PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013-2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
9. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi Dan Arah Kebijakan;
g. BAB VII : Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah;
h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan;
k. BAB XI : Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013.

(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi:

a. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2013-2018.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. pelaksanaan RPJMD; dan
   c. hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD Tahun 2018 - 2023) belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-SKPD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemangku kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud merugikan kepentingan daerah dan nasional apabila dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 65

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel ..... **iii**
Daftar Gambar ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-6
1.4 Sistematika Penulisan I-7
1.5 Maksud dan Tujuan I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karateristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-6
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-11
2.1.4 Kondisi Demografi II-13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-24
2.2.1 Pertumbuhan PDRB II-24
2.2.2 Laju Inflasi II-30
2.2.3 PDRB Perkapita II-31
2.2.4 Indeks Gini II-32
2.2.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia II-33
2.2.6 Indeks Williamson II-34
2.2.7 Penduduk Miskin II-34
2.2.8 Angka Kriminalitas yang Tertangani II-38
2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia II-39
2.2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) II-48
2.2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) II-49
2.2.12 Angka Pendidikan yang Ditamatkan II-51
2.2.13 Angka Kematian Ibu (AKI) II-51
2.2.14 Angka Kematian Bayi (AKB) II-53
2.2.15 Angka Kematian Balita (AKABA) II-55
2.2.16 Prevalensi Balita Gizi Buruk II-56
2.2.17 Indeks Pembangunan Gender (IPG) II-57
2.2.18 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) II-59
2.2.19 Kebudayaan II-60
2.2.20 Pemuda dan Olahraga II-61
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-62
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II-62
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-146
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-166
2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II-166
2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita II-166

2.4.3 Nilai Tukar Petani (NTP) II-167
2.4.4 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-168
2.4.5 Sumber Daya Manusia II-169
2.5 Analisis Gambaran Umum II-171

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN III-1
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013 ..... III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.2 Neraca Daerah III-13
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008-2013 ..... III-21
3.2.1 Proporsi Pengunaan Anggaran III-21
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-23
3.3 Kerangka Pendanaan III-27
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama III-27
3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2014 – 2018 ..... III-28

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah IV-1
4.2 Lingkungan Strategis IV-12
4.3 Isu Strategis IV-16

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran V-5

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan VI-4
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah VI-27
6.2.1 Strategi Pengembangan Wilayah VI-27
6.2.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah VI-28

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1
7.1 Kebijakan Umum VII-1
7.2 Program Pembangunan VII-2
7.3 Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Wilayah VII-44

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII-1
8.1 Urusan Wajib VIII-1
8.2 Urusan Pilihan VIII-14

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X-1

BAB XI PENUTUP XI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketinggian Wilayah di Jawa Tengah II-2
Tabel 2.2 Debit Sungai Rata-Rata Harian Luas Daerah Pengaliran Lebih Dari 1.000 km^2 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-4
Tabel 2.3 Kapasitas Waduk di Provinsi Jawa Tengah..... II-5
Tabel 2.4 Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah II-9
Tabel 2.5 Intensitas Kejadian Bencana Alam di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-13
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ... II-14
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-15
Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-16
Tabel 2.9 Penduduk Jawa Tengah Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-17
Tabel 2.10 Penduduk Jawa Tengah Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2012 ..... II-19
Tabel 2.11 Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ..... II-21
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 .. II-23
Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2008 - 2012 ..... II-26
Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-26
Tabel 2.15 Nilai PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Jawa Tengah..... II-27
Tabel 2.16 Nilai PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah II-28
Tabel 2.17 Perkembangan Kontribusi Sektor pada PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-28
Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-29
Tabel 2.19 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-30
Tabel 2.20 Kontribusi Komponen Sisi Penggunan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-30
Tabel 2.21 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (Rupiah)..... II-31
Tabel 2.22 Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2008 - 2012..... II-33
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-34

Tabel 2.24 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-35
Tabel 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-36
Tabel 2.26 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-37
Tabel 2.27 Angka Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-39
Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Beserta Komposit Pembentuknya Tahun 2012 ..... II-40
Tabel 2.29 Usia Harapan Hidup Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008 – 2012 ..... II-42
Tabel 2.30 Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-43
Tabel 2.31 Angka Melek Huruf di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008 – 2012 ..... II-44
Tabel 2.32 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-45
Tabel 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2008 – 2012 ..... II-46
Tabel 2.34 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .. II-47
Tabel 2.35 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008 – 2012 ..... II-48
Tabel 2.36 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2008 - 2012 ..... II-48
Tabel 2.37 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012 ..... II-49
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-50
Tabel 2.39 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012 ..... II-50
Tabel 2.40 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15 - 64 Tahun) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 ..... II-51
Tabel 2.41 Kasus Kematian Ibu (AKI) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-52
Tabel 2.42 Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-54
Tabel 2.43 Kasus Kematian Balita (AKABA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-55
Tabel 2.44 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-56
Tabel 2.45 Prevalensi Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-57

Tabel 2.46 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008 – 2012 ..... II-59
Tabel 2.47 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008–2012 ..... II-60
Tabel 2.48 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian, Seniman dan Gedung Kesenian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .... II-61
Tabel 2.49 Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-62
Tabel 2.50 Perkembangan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-62
Tabel 2.51 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-63
Tabel 2.52 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2012 ..... II-63
Tabel 2.53 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2012 ..... II-63
Tabel 2.54 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-64
Tabel 2.55 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-64
Tabel 2.56 Rasio Guru dan Murid Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-65
Tabel 2.57 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-65
Tabel 2.58 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2012 ..... II-66
Tabel 2.59 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-67
Tabel 2.60 Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-67
Tabel 2.61 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-67
Tabel 2.62 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Dalam Kondisi Baik Tahun 2008-2012 ... II-68
Tabel 2.63 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-69
Tabel 2.64 Angka Lulus SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-69
Tabel 2.65 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2008 - 2012 ..... II-69
Tabel 2.66 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2008 - 2012 ..... II-70
Tabel 2.67 Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-70
Tabel 2.68 Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-71

Tabel 2.69 Perkembangan Rasio Dokter Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-71
Tabel 2.70 Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 ..... II-71
Tabel 2.71 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-72
Tabel 2.72 Kondisi Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-72
Tabel 2.73 Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ..... II-73
Tabel 2.74 Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-73
Tabel 2.75 Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2008 – 2012 ..... II-75
Tabel 2.76 Kondisi Jaringan Jembatan Kewenangan Provinsi Tahun 2008 – 2012 ..... II-75
Tabel 2.77 Pembagian Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah II-76
Tabel 2.78 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2008-2012 ..... II-76
Tabel 2.79 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2012 ..... II-76
Tabel 2.80 Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-77
Tabel 2.81 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-78
Tabel 2.82 Kebutuhan Rumah per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-78
Tabel 2.83 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-79
Tabel 2.84 Perkembangan Pelayanan Angkutan Darat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-81
Tabel 2.85 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-82
Tabel 2.86 Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-82
Tabel 2.87 Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-83
Tabel 2.88 Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-83
Tabel 2.89 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-84
Tabel 2.90 Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-85
Tabel 2.91 Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ..... II-87
Tabel 2.92 Rasio pasangan berakte nikah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-88

Tabel 2.93 Persentase kepemilikan KTP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-89
Tabel 2.94 Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kewarganegaraan Asing Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 ..... II-91
Tabel 2.95 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 .. II-94
Tabel 2.96 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 . II-96
Tabel 2.97 Jumlah Penduduk usia 10–17 Tahun Yang Bekerja Menurut Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2012 ..... II-99
Tabel 2.98 Persentase Anak yang Bekerja Usia 10 – 17 Tahun Tahun 2008 – 2012 ..... II-100
Tabel 2.99 Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2008 - 2012 ..... II-101
Tabel 2.100 Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Eselonisasi Tahun 2008 - 2012 ..... II-101
Tabel 2.101 Jumlah dan Persentase Anggota Legislatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-102
Tabel 2.102 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2010 - 2012 II-103
Tabel 2.103 Peserta KB Aktif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .... II-104
Tabel 2.104 Peserta DO KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ... II-104
Tabel 2.105 Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 . II-105
Tabel 2.106 Peserta KB Mandiri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-105
Tabel 2.107 Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (orang) II-105
Tabel 2.108 Jumlah Kepala Keluarga, Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 II-107
Tabel 2.109 Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-108
Tabel 2.110 Jumlah Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial Tahun 2008 - 2012 ..... II-108
Tabel 2.111 Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-109
Tabel 2.112 Jumlah PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-109
Tabel 2.113 Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-110
Tabel 2.114 Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Yang Menerapkan Standar Pelayanan (SOP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-110
Tabel 2.115 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-111

Tabel 2.116 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-111
Tabel 2.117 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-111
Tabel 2.118 Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-112
Tabel 2.119 Pencari kerja yang ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012 ..... II-113
Tabel 2.120 PDRB ADHK Tahun 2000 per Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-113
Tabel 2.121 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja)(%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012 ..... II-114
Tabel 2.122 Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding KHL di Proovinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-114
Tabel 2.123 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-115
Tabel 2.124 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (orang) II-115
Tabel 2.125 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-116
Tabel 2.126 Jumlah Koperasi Sehat KSP/USP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-116
Tabel 2.127 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-117
Tabel 2.128 Realisasi KUR Menurut Bank Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-118
Tabel 2.129 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 Berdasarkan Izin Usaha..... II-119
Tabel 2.130 Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-119
Tabel 2.131 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-120
Tabel 2.132 Nilai Realiasasi PMDN dan Pertumbuhan Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-120
Tabel 2.133 Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 . II-121
Tabel 2.134 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-122
Tabel 2.135 Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-123
Tabel 2.136 Perkembangan Olahraga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-124
Tabel 2.137 Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012..... II-124

Tabel 2.138 Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-124
Tabel 2.139 Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana Menonjol di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-125
Tabel 2.140 Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-125
Tabel 2.141 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2011 ..... II-126
Tabel 2.142 Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-126
Tabel 2.143 Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-127
Tabel 2.144 Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-127
Tabel 2.145 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 ..... II-128
Tabel 2.146 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 ..... II-128
Tabel 2.147 Sertifikasi ISO 9001:2008 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-133
Tabel 2.148 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-133
Tabel 2.149 Diklat Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012..... II-133
Tabel 2.150 Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dan 2012 ..... II-134
Tabel 2.151 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 II-135
Tabel 2.152 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-139
Tabel 2.153 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-139
Tabel 2.154 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-139
Tabel 2.155 *Data Base* Indikator Penguatan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, 2012 dan 2015 ..... II-140
Tabel 2.156 Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan di BPCP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ..... II-140
Tabel 2.157 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-142
Tabel 2.158 Posyandu Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012... II-142
Tabel 2.159 PKK Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-143
Tabel 2.160 UED-SP, BUMDES dan Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-143
Tabel 2.161 Pengelolaam Arsip Secara Baku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-144
Tabel 2.162 Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah Memiliki *Website* Tahun 2008 - 2012 ..... II-145
Tabel 2.163 Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan *Update* Data Pada *Website* Tahun 2008 - 2012 ..... II-145

Tabel 2.164 Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-146
Tabel 2.165 Produksi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-147
Tabel 2.166 Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ..... II-147
Tabel 2.167 Produksi Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-147
Tabel 2.168 Produksi Tanaman Perkebunan Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-148
Tabel 2.169 Populasi Ternak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-148
Tabel 2.170 Perkembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-148
Tabel 2.171 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-149
Tabel 2.172 Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 ..... II-149
Tabel 2.173 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-150
Tabel 2.174 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-150
Tabel 2.175 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-151
Tabel 2.176 Penertiban Area Penambangan Liar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-151
Tabel 2.177 Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-152
Tabel 2.178 Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-153
Tabel 2.179 Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-153
Tabel 2.180 Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-154
Tabel 2.181 Kinerja Promosi dan Pemasaran Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-155
Tabel 2.182 Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-155
Tabel 2.183 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Juta Rupiah) II-156
Tabel 2.184 Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-158
Tabel 2.185 Luas Terumbu Karang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-158
Tabel 2.186 Luas Hutan Mangrove Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-159
Tabel 2.187 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah) II-160

Tabel 2.188 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-160
Tabel 2.189 Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-161
Tabel 2.190 Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Ijin Usaha Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-161
Tabel 2.191 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-162
Tabel 2.192 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Juta Rupiah) II-163
Tabel 2.193 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-163
Tabel 2.194 Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-163
Tabel 2.195 Jumlah Bina Kelompok Pengrajin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-164
Tabel 2.196 Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-165
Tabel 2.197 Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-165
Tabel 2.198 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-166
Tabel 2.199 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-167
Tabel 2.200 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-168
Tabel 2.201 Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-169
Tabel 2.202 Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-169
Tabel 2.203 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (Juta orang) II-170
Tabel 2.204 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-170
Tabel 2.205 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-172
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 - 2012 Provinsi Jawa Tengah III-3
Tabel 3.2 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... III-5
Tabel 3.3 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... III-6

Tabel 3.4 Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... III-9
Tabel 3.5 Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... III-10
Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... III-11
Tabel 3.7 Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... III-14

Tabel 3.8 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... III-20
Tabel 3.9 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ..... III-22
Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Tengah III-22
Tabel 3.11 Defisit Riil Anggaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012..... III-24
Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Tengah 2010 – 2012 ..... III-26
Tabel 3.13 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2012..... III-27
Tabel 3.14 Proyeksi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 ..... III-29
Tabel 3.15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 ..... III-32
Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 ..... III-33
Tabel 3.17 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 ..... III-34
Tabel 3.18 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 .. III-35
Tabel 3.19 Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 ..... III-36
Tabel 3.20 Proyeksi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 ..... III-37
Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 ..... V-9
Tabel 6.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018..... VI-15
Tabel 7.1 Kebijakan Umum, dan Program Pembangunan Provinsi Jawa Tengah VII-10

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Tengah VIII-18
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-7
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah II-1
Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah II-2
Gambar 2.3 Peta Kontur Provinsi Jawa Tengah II-3
Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah II-4
Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah. II-12
Gambar 2.6 Peta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-14
Gambar 2.7 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-23
Gambar 2.8 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ..... II-25
Gambar 2.9 Nilai Inflasi Rata-Rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2012 ..... II-31
Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 (%) II-32
Gambar 2.11 Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ..... II-32
Gambar 2.12 Indeks Gini Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-33
Gambar 2.13 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012.... II-34
Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-39
Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2012 ..... II-40
Gambar 2.16 Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (Tahun) II-42
Gambar 2.17 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-43
Gambar 2.18 Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-45
Gambar 2.19 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ..... II-52
Gambar 2.20 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-53
Gambar 2.21 Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-55
Gambar 2.22 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-58
Gambar 2.23 Capaian Unsur Pembentuk IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-58
Gambar 2.24 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-59
Gambar 2.25 Capaian Unsur Pembentuk IDG Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ..... II-60
Gambar 2.26 Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-66

Gambar 2.27 Angka Partisikasi Kasar PAUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-68
Gambar 2.28 Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-87
Gambar 2.29 Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Usia 0 – 18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-88
Gambar 2.30 Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..... II-113
Gambar 2.31 Ketersediaan Padi, Jagung, Ubi Kayu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-136
Gambar 2.32 Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... II-136
Gambar 2.33 Ketersediaan Daging, Susu, Telur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-137
Gambar 2.34 Ketersediaan Energi Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (k.kal/kap/hr) II-137
Gambar 2.35 Ketersediaan Protein Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (gram/kap/hari) II-138
Gambar 2.36 Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-144
Gambar 2.37 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ... II-154
Gambar 2.38 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-156
Gambar 2.39 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Ton/Tahun) II-157
Gambar 2.40 Ekspor Produk Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Kg/Tahun) II-157
Gambar 2.41 Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Kg/Kapita/Tahun) II-158
Gambar 2.42 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ..... II-167
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... III-5
Gambar 3.2 Rata-Rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..... III-6
Gambar 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 ..... III-30
Gambar 3.4 Proyeksi Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 ..... III-30
Gambar 6.1 Keterkaitan Isu Strategis, Visi dan Misi, Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 – 2014 ..... VI-2
Gambar 7.1 Peta Potensi 8 Wilayah Pengembangan VII-44
Gambar 7.2 Peta Potensi Industri Unggulan VII-51
Gambar 7.3 Peta Potensi Klaster VII-51

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 berikut aturan pelaksanaannya, maka setelah pelantikan H. Ganjar Pranowo, SH sebagai Gubernur dan Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari** - ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.*** Dalam rangka Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tersebut maka prinsip *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* merupakan sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh pelaku pembangunan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan RPJMD dilaksanakan melalui pentahapan penyusunan RPJMD dengan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sesuai pendekatan dimaksud, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah melibatkan dan mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

RPJMD merupakan implementasi tahapan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berada pada dua tahapan, yaitu tahap II (2010-2014) diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam, dan tahap III (2015-2019) yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

32. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
33. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1.3. Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maka RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dijadikan sebagai pedoman penyusunan RPJMD dalam menetapkan lokasi program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik dari sisi pola dan struktur ruangnya.

Selain berpedoman pada RPJPD dan RTRWP, serta memperhatikan RPJM Nasional, penyusunan RPJMD juga memperhatikan : (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2011-2015 termasuk mengantisipasi pelaksanaan agenda pembangunan pasca 2015 (pembangunan berkelanjutan); (4) RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya; (5) RAD Pangan dan Gizi (PG) Tahun 2011-2015; (6) RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2010-2020; (7) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK); (8) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan (9) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Selain itu dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

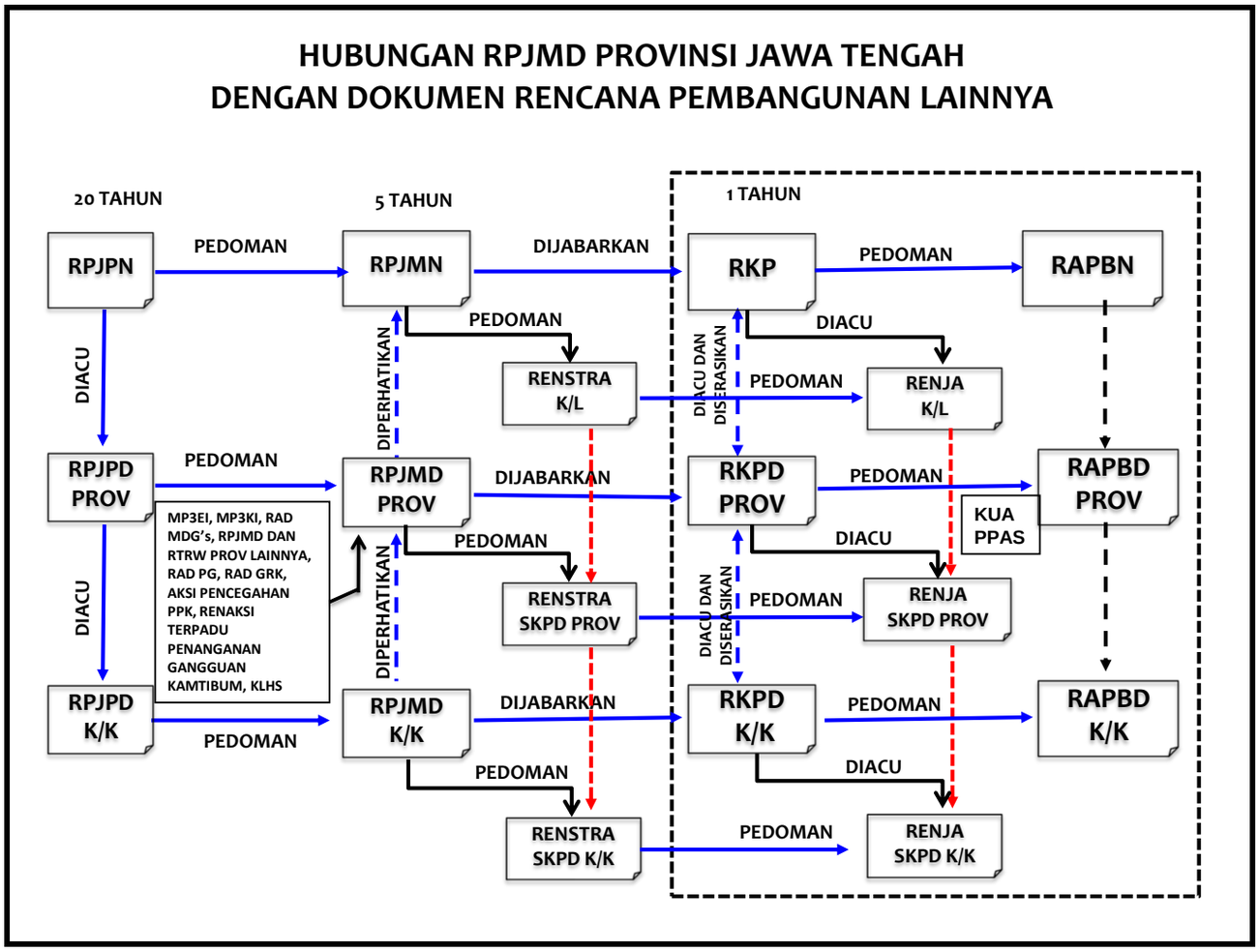

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 11 (sebelas) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Jawa Tengah yang selaras dan mendukung analisis dan penggambaran isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi dan kebijakan, meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yaitu kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Provinsi Jawa Tengah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013–2018 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, disertai kebutuhan pendanaannya.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian

indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan gubernur periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

Bab XI Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

1.5. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RPJMD disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan

RPJMD disusun dengan tujuan :

a. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilandasi Tri Sakti Bung Karno dan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan;
b. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
c. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD;
d. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment* dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
e. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1

Sumber : Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI), BAKOSURTANAL Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2000.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada $5^0$40' - $8^0$30' Lintang Selatan dan $108^0$30' - $111^0$30' Bujur Timur.

2.1.1.3. Topografi

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian

pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan, Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar 2.2.

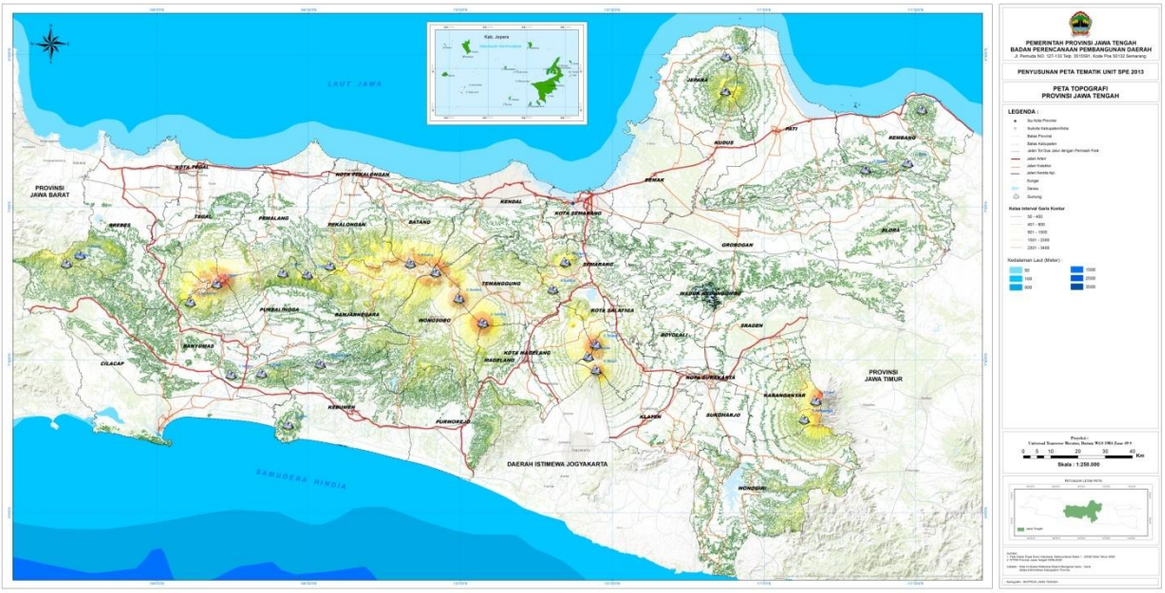

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 2.2. Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 mdpl, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1., dan Peta Kontur pada Gambar 2.3.

Tabel 2.1.
Ketinggian Wilayah di Jawa Tengah

No	Ketinggian (m dpl)	% Luas
1	0-99	53,3
2	100-499	27,4
3	500-999	14,7
4	>1000	4,6

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

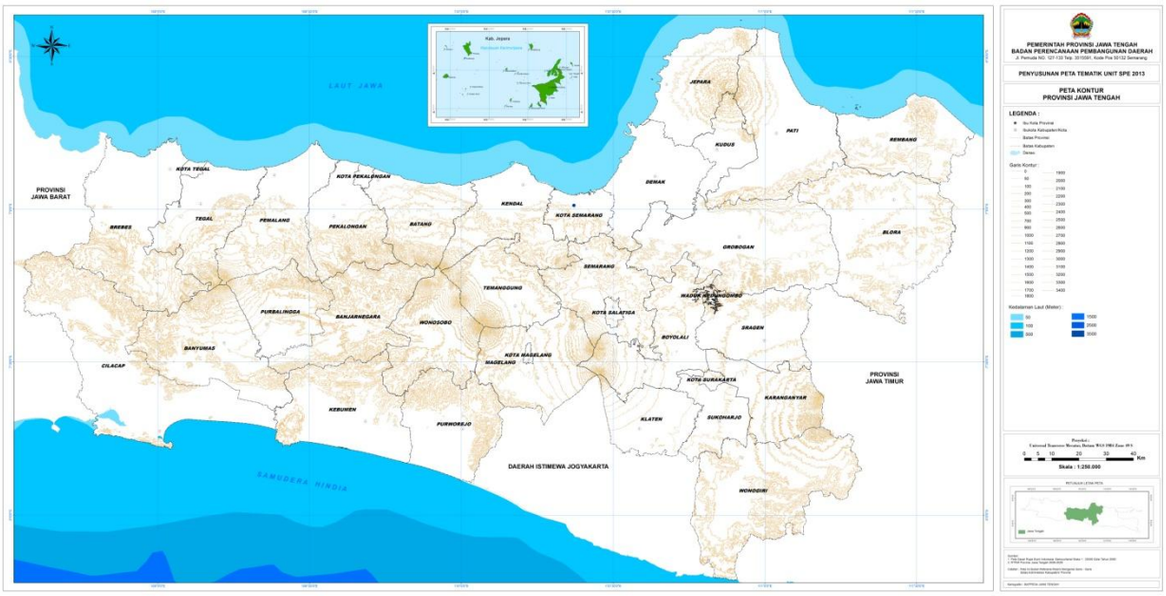

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 2.3. Peta Kontur Provinsi Jawa Tengah

2.1.1.4. Geologi

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis, yaitu Perbukitan Rembang, Zone Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dan gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara) dan Gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

2.1.1.5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak. Beberapa DAS yang menjadi DAS Prioritas di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 19 DAS Prioritas, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), DAS Bribin (Jateng, DIY), dan DAS Serang (Jateng, DIY).

Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi 6 (enam) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten Banyumas, dan bermuara di Kabupaten Cilacap, dengan panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 12-25 m, peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 2.4.

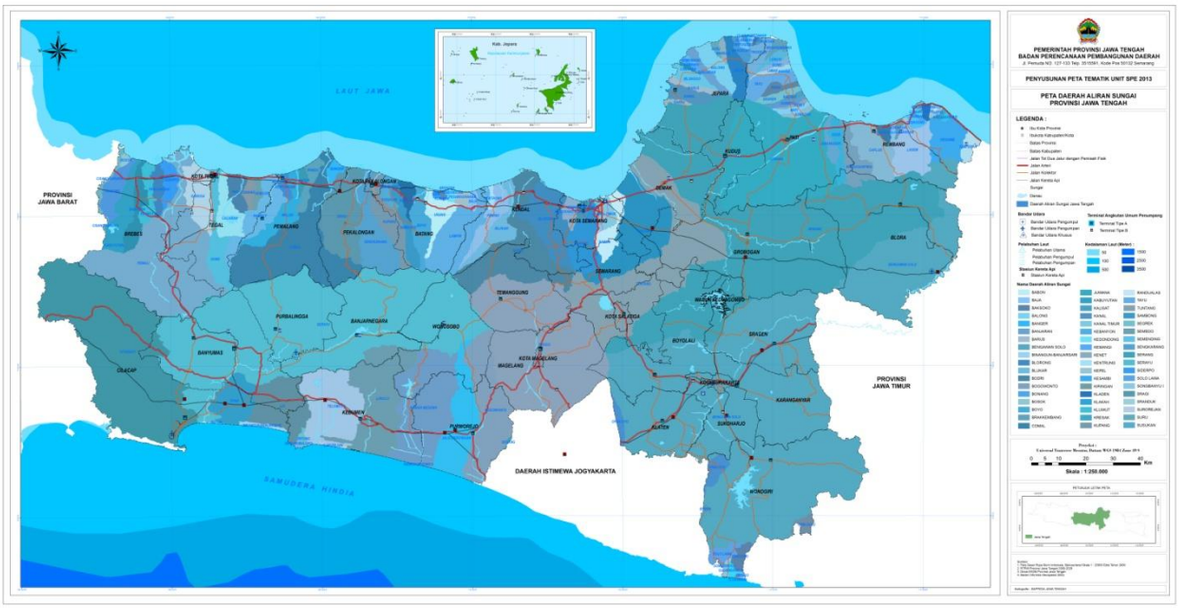

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2013

Gambar 2.4. Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km^2 perlu diwaspadai karena daerah pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpahan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Debit Sungai Rata-Rata Harian Luas Daerah Pengaliran Lebih Dari 1.000 km^2 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Induk Sungai	Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten	Luas Daerah Pengaliran (km^2)	Debit Air (m^3/det)	
			Terbesar	Terkecil
S. Pemali	Pos Rengaspendow, Wanacala, Jatibarang, Brebes	1.111	1.599,09	0,98
Bengawan Solo	Pos Jurug, Desa Jebres, Kota Surakarta	3.206,70	4.056,5	7,9
S. Serayu	Pos Bd. Gerak Serayu Desa Gambarsari, Kab.Banyumas	3.060	1.157,5	16,6

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jateng, 2013

Di wilayah Jawa Tengah terdapat waduk-waduk besar antara lain sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Kapasitas Waduk di Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Waduk	Lokasi Wilayah	Kapasitas (Juta m³)
1	Gajah Mungkur	Kab. Wonogiri	440
2	Kedung Ombo	Kab. Grobogan	723,16
3	Wadaslintang	Kab. Kebumen	412,66
4	Mrica	Kab. Banjarnegara	31,8
5	Cacaban	Kab. Tegal	49,02
6	Sempor	Kab. Kebumen	38,036
7	Rowopening	Kab. Semarang	49,9
8	Malahayu	Kab. Brebes	37,047

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2012

2.1.1.6. Klimatologi

Iklim di Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Pada Tahun 2012, suhu udara di Jawa Tengah wilayah Utara rata-rata berkisar 21,7^{0}C–35,8^{0}C dengan kelembaban udara berada pada kisaran 63%-99%. Sedangkan di Jawa Tengah wilayah Selatan suhu udara berada pada kisaran rata-rata 19,4^{0}C-31,3^{0}C, dengan kelembaban udara pada kisaran rata-rata 74,6%-99,1%. Untuk Tahun 2012 curah hujan tertinggi Jawa Tengah wilayah utara tercatat di Stasiun Curah Hujan Sirampog Kabupaten Brebes yaitu 263 mm, sedangkan jumlah intensitas hujan 7.324 mm/tahun tercatat di Stasiun Hujan Bongas Kabupaten Pemalang. Sedangkan curah hujan tertinggi Jawa Tengah wilayah Selatan tercatat di Stasiun Curah Hujan Penjaringan Kabupaten Boyolali yaitu 610 mm, dengan jumlah intensitas hujan 13.087 mm/tahun.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010 meliputi lahan sawah seluas 991.524 Ha (30,47%) dan bukan lahan sawah seluas 2.262.888 Ha (69,53%). Dibandingkan Tahun 2009, kondisi ini menunjukkan penurunan luas lahan sawah yang beralih menjadi bukan lahan sawah sebesar 128 Ha (0,013%).

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Peruntukan Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 Ha dan lahan peruntukan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 Ha.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Jawa Tengah terdiri atas kawasan peruntukan Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata, Permukiman, serta Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 546.290 Ha terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ± 362.360 Ha dan hutan produksi tetap seluas ± 183.930 Ha. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang, sedangkan kawasan hutan produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

b. Kawasan Hutan Rakyat

Pengembangan kawasan hutan rakyat seluas 345.822,96 Ha (10,63% luas Jawa Tengah) berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ± 990.652 Ha dan kawasan pertanian lahan kering seluas ± 955.587 Ha yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 Ha.

d. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ± 885.344 Ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 Ha (96%), PTPN IX seluas 28.212 Ha (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 Ha (1%).

e. Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

f. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebesar ±24.802 Ha, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi :

1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung.
2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

g. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi :

1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, kawasan Serayu-Pantai Utara, kawasan Gunung Slamet, kawasan Sindoro-Sumbing–Dieng, kawasan Merapi-Merbabu-Ungaran, kawasan Gunung Muria, kawasan Pegunungan Kendeng Utara, kawasan Kendeng Selatan, dan kawasan Gunung Lawu;
2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi : Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condrodimuka;
3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

h. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan pada produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur–Prambanan–Surakarta; koridor Borobudur-Dieng; koridor Semarang-Demak–Kudus–Jepara–Pati–Rembang–Blora; koridor Semarang–Ambarawa–Salatiga; koridor Batang–Pekalongan–Pemalang–Tegal–Brebes; koridor Cilacap–Banyumas–Purbalingga–Banjarnegara dan koridor Cilacap–Kebumen–Purworejo.

Pengembangan kegiatan pariwisata di Jawa Tengah juga akan didukung antara lain dengan penyelenggaraan Kereta Api Wisata, meliputi: Lokomotif Wisata di Kabupaten Blora, Museum Kereta Api dan Lokomotif Wisata di Wilayah Kabupaten Semarang (Ambarawa–Bedono), Kereta api wisata Borobudur dan sekitarnya.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi :

1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan.
2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan

perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

k. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang, Pekalongan, serta Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 pulau terletak di kepulauan Karimunjawa, 2 pulau (Pulau Panjang dan Pulau Mandalika di Kabupaten Jepara); 3 Pulau (Pulau Marongan, Gede dan Sualan di Kabupaten Rembang) serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

2. Kawasan Lindung

Sesuai RTRW Provinsi Jawa Tengah, rencana kawasan lindung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 seluas 561.404 Ha (17,4% dari luas wilayah Provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes.

Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas ± 114.822 Ha. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga dan Semarang.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas ± 59.918 Ha, meliputi :

1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas ± 23.583 Ha.
2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas ± 8.786 Ha yang terdiri dari kawasan pesisir Pantura dan Pansela sejauh 100 meter dari garis

pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi.

3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas ± 24.618,2 Ha, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes.
4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

d. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi :

1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang dan Tegal.
2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/ kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan.
3) Daerah pengungsian satwa berada di Srondol Kota Semarang.

e. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi :

1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar ± 2.923,3 Ha. Sebaran kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam & Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
A.	**KONSERVASI WIL. I PATI**		
1	Cagar Alam Keling I a, b, c	Kabupaten Jepara	6,8
2	Cagar Alam Keling II, III	Kabupaten Jepara	61
3	Cagar Alam Kembang	Kabupaten Jepara	1,8
4	Cagar Alam Gunung Celering	Kabupaten Jepara	1328,4
5	Cagar Alam Bekutuk	Kabupaten Blora	25,4
6	Cagar Alam Cabak I/II	Kabupaten Blora	30
7	Cagar Alam Gunung Butak	Kabupaten Rembang	45,1
B.	**KONSERVASI WIL. II SURAKARTA**		
1	Cagar Alam Gebugan	Kabupaten Semarang	1,8
2	Cagar Alam Sepakung	Kabupaten Semarang	10
3	Cagar Alam Donoloyo	Kabupaten Wonogiri	8,3
4	Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan	Kabupaten Sragen	103,9
C.	**KONSERVASI WIL. III CILACAP**		
1	Cagar Alam Pantodomas	Kabupaten Wonosobo	4,1
2	Cagar Alam Telogo Dringo	Kabupaten Banjarnegara	26,1
3	Cagar Alam Telogo Sumurup	Kabupaten Banjarnegara	20,1

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam & Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
4	Cagar Alam Pringamba I / II	Kabupaten Banjarnegara	58
5	Cagar Alam Nusakambangan Barat	Kabupaten Cilacap	675
6	Cagar Alam Nusakambangan Timur	Kabupaten Cilacap	277
7	Cagar Alam Wijaya Kusuma	Kabupaten Cilacap	1
8	Cagar Alam Karangbolong	Kabupaten Cilacap	0,5
D.	**KONSERVASI WIL. IV PEMALANG**		
1	Cagar Alam Pagerwunung Darupono	Kabupaten Kendal	33,2
2	Cagar Alam Peson Subah I	Kabupaten Batang	10,4
3	Cagar Alam Peson Subah II	Kabupaten Batang	10
4	Cagar Alam Ulolanang Kecubung	Kabupaten Batang	69,7
5	Cagar Alam Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	24,5
6	Cagar Alam Curug Bengkawah	Kabupaten Pemalang	1,5
7	Cagar Alam Moga	Kabupaten Pemalang	3,5
8	Cagar Alam Vak 53 Comal	Kabupaten Pemalang	29,1
9	Cagar Alam Guci	Kabupaten Tegal	2
10	Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara	Kabupaten Tegal	6,6
11	Cagar Alam Telaga Renjeng	Kabupaten Brebes	48,5
	Jumlah		**2.923.3**

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2012

2) Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas ± 12.135 Ha, meliputi : a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas ± 6.410 Ha, berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman - DIY; b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas ± 5.725 Ha berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas ± 111.625 Ha berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara.
3) Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan rakyat dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya Jawa Tengah berada di Berjo-Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas ± 231,3 Ha, dan Kebun Raya Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas seluas ± 150 Ha.
4) Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi: Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro-Roban di Kabupaten Batang.
5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya.
6) Daerah pantai berhutan bakau seluas ± 10.718,51 Ha tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara, berada di Kabupaten Demak (9,19%).

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir berdasarkan data rekapitulasi bencana banjir periode bulan Oktober 2012 sampai dengan Mei 2013, wilayah yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai ataupun rusaknya bendung/tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan dan permukiman, yaitu Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal, Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga.
2. Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah bergerak akibat patahan atau pergeseran, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang.
4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu wilayah di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupa lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang dan longsoran material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya mengancam kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang dan Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Tegal.
5. Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi wilayah Selatan Jawa Tengah dimana relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten dan Wonogiri. Peristiwa gempa bumi signifikan terakhir terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 6,3 Skala Richter, yang mengguncang bagian selatan Pulau Jawa dan berdampak hingga radius 95 km dari pusat gempa meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Kebumen, Temanggung dan Karanganyar.

6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal.
7. Kawasan Rawan Tsunami, meliputi kawasan Pesisir Pantai Selatan berhadapan dengan Samudera Hindia yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri. Tsunami terakhir terjadi pada 17 Juli 2006 akibat gempa bawah laut di Samudera Hindia dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana perikanan dan kerusakan lingkungan pantai di Cilacap, Kebumen dan Purworejo.
8. Kawasan Rawan Abrasi yang mengikis tanah daratan kawasan pesisir pantai utara berakibat pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal.
9. Kawasan Rawan Angin Topan dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kota Semarang dan Pekalongan.
10. Kawasan Rawan Gas Beracun, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila, Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng, mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Kawasan rawan bencana di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.5.

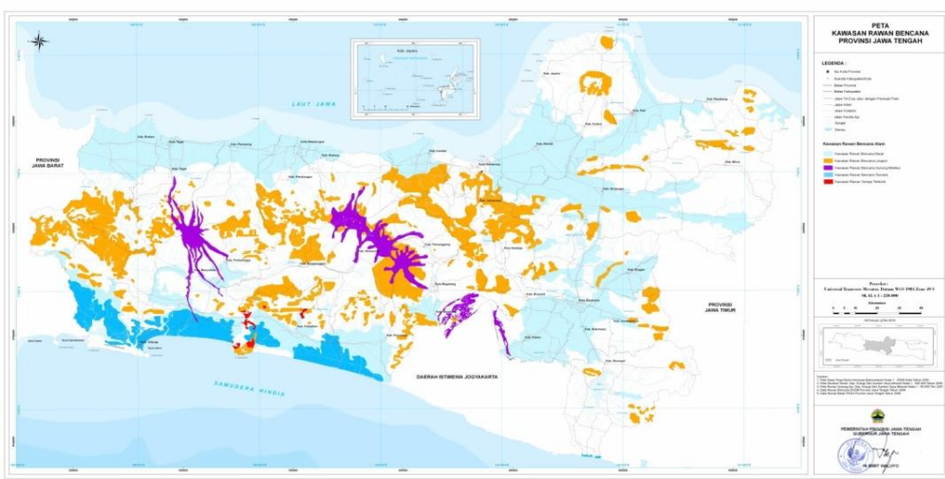

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah

Kejadian bencana yang paling menonjol diantaranya adalah kejadian bencana erupsi Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 dan diikuti dengan aliran lahar hujan yang merusakkan areal persawahan dan permukiman di kawasan puncak dan sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali.

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB Tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memiliki Skor Indeks Rawan Bencana tertinggi di Indonesia dengan 34 kabupaten/kota memiliki Skor Indeks Rawan pada kategori tinggi. Kerawanan

bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah pada kurun waktu 2008-2012 yang semakin meningkat, sebagaimana pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Intensitas Kejadian Bencana Alam di Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Banjir	7	54	115	85	160
2	Tanah Longsor	21	126	141	202	201
3	Gempa Bumi	1	1	1	3	-
4	Letusan Gunung Berapi	-	-	3	1	-
5	Gas Beracun	-	-	-	1	-
6	Gelombang Pasang & Abrasi	72	2	-	-	8
7	Tsunami	1	-	-	-	-
8	Angin Topan	2	100	122	104	312
9	Kekeringan	10	-	-	15	17
10	Kebakaran	30	128	73	268	305
11	Lainnya	-	-	3	-	-
	Jumlah	**144**	**411**	**458**	**679**	**1.003**

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dalam rangka penanggulangan bencana di Jawa Tengah dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sampai dengan saat ini telah terbentuk Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah dan 32 BPBD kabupaten/kota, sedangkan 3 kota belum membentuk BPBD yaitu Kota Surakarta, Magelang dan Salatiga.

2.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2012 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 33.270.207 jiwa atau sekitar 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 16.495.705 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.774.502 jiwa (50,42%), dengan *sex ratio* sebesar 98,34%. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 8.913.425 (Tahun 2011) dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,7 jiwa. Jumlah Penduduk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 2.6.

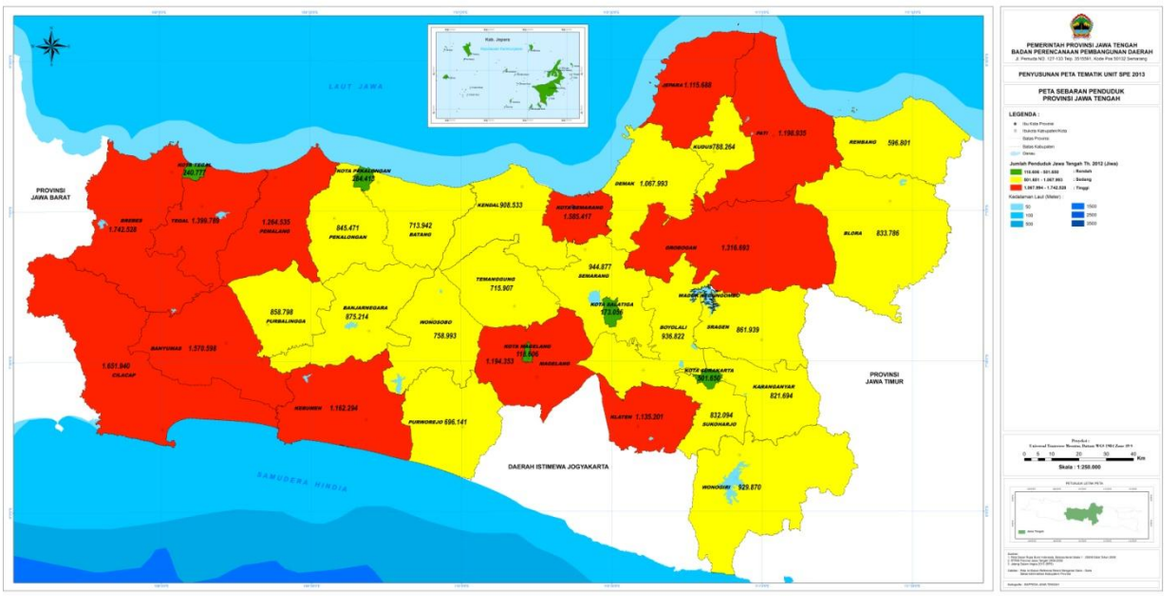

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.6. Peta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Dilihat dari distribusi penduduk per kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa kabupaten dengan penduduk paling banyak yaitu Kabupaten Brebes sejumlah 1.770.480 jiwa, selanjutnya Cilacap 1.679.864 jiwa, dan Kota Semarang 1.629.924 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2008 [1)]	2009 [1)]	2010	2011[2)]	2012[2)]
1.	Cilacap	1.626.795	1.629.908	1.642.107	1.651.940	1.679.864
2.	Banyumas	1.503.262	1.510.102	1.554.527	1.570.598	1.603.037
3.	Purbalingga	828.125	834.164	848.952	858.798	877.489
4.	Banjarnegara	869.777	875.167	868.913	875.214	890.962
5.	Kebumen	1.215.801	1.222.542	1.159.926	1.162.294	1.181.678
6.	Purworejo	722.293	724.973	695.427	696.141	708.483
7.	Wonosobo	757.746	760.819	754.883	758.993	771.447
8.	Magelang	1.170.894	1.180.217	1.181.723	1.194.353	1.219.371
9.	Boyolali	938.469	943.978	930.531	936.822	953.317
10.	Klaten	1.133.012	1.136.829	1.130.047	1.135.201	1.153.047
11.	Sukoharjo	826.699	833.575	824.238	832.094	848.718
12.	Wonogiri	982.730	985.024	928.904	929.870	946.373
13.	Karanganyar	812.423	819.186	813.196	821.694	838.762
14.	Sragen	860.509	862.910	858.266	861.939	875.283
15.	Grobogan	1.336.322	1.345.879	1.308.696	1.316.693	1.339.127
16.	Blora	835.160	838.159	829.728	833.786	847.125
17.	Rembang	575.640	578.232	591.359	596.801	608.548

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2008 [1)]	2009 [1)]	2010	2011[2)]	2012[2)]
18.	Pati	1.171.605	1.175.232	1.190.993	1.198.935	1.219.993
19.	Kudus	786.269	797.617	777.437	788.264	807.005
20.	Jepara	1.090.839	1.107.973	1.097.280	1.115.688	1.144.916
21.	Demak	1.034.286	1.042.932	1.055.579	1.067.993	1.091.379
22.	Semarang	911.223	921.865	930.727	944.877	968.383
23.	Temanggung	707.707	714.411	708.546	715.907	730.720
24.	Kendal	952.011	965.808	900.313	908.533	926.325
25.	Batang	682.561	686.016	706.764	713.942	728.578
26.	Pekalongan	851.700	858.967	838.621	845.471	861.366
27.	Pemalang	1.375.240	1.391.284	1.261.353	1.264.535	1.285.024
28.	Tegal	1.415.625	1.420.532	1.394.839	1.399.789	1.421.001
29.	Brebes	1.788.687	1.800.958	1.733.869	1.742.528	1.770.480
30.	Kota Magelang	134.615	137.055	118.227	118.606	120.447
31.	Kota Surakarta	522.935	528.202	499.337	501.650	509.576
32.	Kota Salatiga	178.451	182.226	170.332	173.056	177.480
33.	Kota Semarang	1.511.236	1.533.686	1.555.984	1.585.417	1.629.924
34.	Kota Pekalongan	275.241	277.065	281.434	284.413	290.347
35.	Kota Tegal	240.502	241.070	239.599	240.777	244.632
	Jumlah	**32.626.390**	**32.864.563**	**32.382.657**	**32.643.612**	**33.270.207**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Keterangan : [1)] Proyeksi Supas 2005
[2)] Angka Sementara Proyeksi SP 2010

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota Tahun 2012 tertinggi adalah Kota Semarang diikuti Kota Salatiga dan Kabupaten Purbalingga serta yang terendah Kabupaten Tegal, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Secara lengkap laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	0,22	0,19	0,75	0,60	1,69
2	Banyumas	0,49	0,46	2,94	1,03	2,07
3	Purbalingga	0,76	0,73	1,77	1,16	2,18
4	Banjarnegara	0,65	0,62	(0,71)	0,73	1,80
5	Kebumen	0,59	0,55	(5,12)	0,20	1,67
6	Purworejo	0,40	0,37	(4,08)	0,10	1,77
7	Wonosobo	0,44	0,41	(0,78)	0,54	1,64
8	Magelang	0,83	0,80	0,13	1,07	2,09
9	Boyolali	0,62	0,59	(1,42)	0,68	1,76
10	Klaten	0,37	0,34	(0,60)	0,46	1,57
11	Sukoharjo	0,86	0,83	(1,12)	0,95	2,00
12	Wonogiri	0,27	0,23	(5,70)	0,10	1,77
13	Karanganyar	0,86	0,83	(0,73)	1,05	2,08

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Pada Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
14	Sragen	0,31	0,28	(0,54)	0,43	1,55
15	Grobogan	0,75	0,72	(2,76)	0,61	1,70
16	Blora	0,39	0,36	(1,01)	0,49	1,60
17	Rembang	0,48	0,45	2,27	0,92	1,97
18	Pati	0,34	0,31	1,34	0,67	1,76
19	Kudus	1,48	1,44	(2,53)	1,39	2,38
20	Jepara	1,60	1,57	(0,97)	1,68	2,62
21	Demak	0,87	0,84	1,21	1,18	2,19
22	Semarang	1,20	1,17	0,96	1,52	2,49
23	Temanggung	0,98	0,95	(0,82)	1,04	2,07
24	Kendal	1,48	1,45	(6,78)	0,91	1,96
25	Batang	0,54	0,51	3,02	1,02	2,05
26	Pekalongan	0,89	0,85	(2,37)	0,82	1,88
27	Pemalang	1,20	1,17	(9,34)	0,25	1,62
28	Tegal	0,38	0,35	(1,81)	0,35	1,52
29	Brebes	0,72	0,69	(3,73)	0,50	1,60
30	Kota Magelang	1,84	1,81	(13,74)	0,32	1,55
31	Kota Surakarta	1,04	1,01	(5,46)	0,46	1,58
32	Kota Salatiga	2,15	2,12	(6,53)	1,60	2,56
33	Kota Semarang	1,52	1,49	1,45	1,89	2,81
34	Kota Pekalongan	0,69	0,66	1,58	1,06	2,09
35	Kota Tegal	0,27	0,24	(0,61)	0,49	1,60
	Jawa Tengah	**0,76**	**0,73**	**(1,47)**	**0,81**	**1,92**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Kepadatan penduduk kabupaten/kota Tahun 2012 yang tertinggi di Kota Surakarta, Tegal dan Magelang, data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	760,71	762,17	767,87	772,47	785,53
2	Banyumas	1.132,32	1.137,48	1.170,94	1.183,04	1.207,48
3	Purbalingga	1.064,91	1.072,67	1.091,69	1.104,35	1.128,39
4	Banjarnegara	813,07	818,11	812,27	818,16	832,88
5	Kebumen	947,82	953,07	904,26	906,10	921,21
6	Purworejo	697,99	700,58	672,03	672,72	684,64
7	Wonosobo	769,54	772,66	766,63	770,80	783,45
8	Magelang	1.078,44	1.087,03	1.088,41	1.100,05	1.123,09
9	Boyolali	924,54	929,96	916,72	922,91	939,16
10	Klaten	1.728,31	1.734,13	1.723,79	1.731,65	1.758,87
11	Sukoharjo	1.771,52	1.786,26	1.766,25	1.783,08	1.818,71
12	Wonogiri	539,26	540,52	509,72	510,25	519,31
13	Karanganyar	1.052,09	1.060,85	1.053,09	1.064,09	1.086,20
14	Sragen	909,16	911,69	906,79	910,67	924,77
15	Grobogan	676,33	681,16	662,35	666,39	677,75
16	Blora	465,43	467,10	462,40	464,66	472,09

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)				
		2008	2009	2010	2011	2012
17	Rembang	567,64	570,19	583,14	588,50	600,09
18	Pati	785,68	788,11	798,68	804,01	818,13
19	Kudus	1.849,30	1.876,00	1.828,53	1.854,00	1.898,08
20	Jepara	1.086,32	1.103,38	1.092,73	1.111,07	1.140,17
21	Demak	1.152,50	1.162,13	1.176,22	1.190,06	1.216,12
22	Semarang	962,36	973,60	982,96	997,91	1.022,73
23	Temanggung	813,24	820,95	814,21	822,66	839,69
24	Kendal	949,85	963,62	898,27	906,48	924,23
25	Batang	865,15	869,53	895,83	904,93	923,48
26	Pekalongan	1.018,62	1.027,31	1.002,98	1.011,17	1.030,18
27	Pemalang	1.359,07	1.374,92	1.246,52	1.249,66	1.269,91
28	Tegal	1.609,21	1.614,79	1.585,58	1.591,21	1.615,32
29	Brebes	1.079,00	1.086,40	1.045,93	1.051,15	1.068,01
30	Kota Magelang	7.429,08	7.563,74	6.524,67	6.545,58	6.647,19
31	Kota Surakarta	11.876,79	11.996,41	11.340,84	11.393,37	11.573,38
32	Kota Salatiga	3.369,54	3.440,82	3.216,24	3.267,67	3.351,21
33	Kota Semarang	4.044,31	4.104,39	4.164,06	4.242,83	4.361,93
34	Kota Pekalongan	6.121,91	6.162,48	6.259,65	6.325,91	6.457,90
35	Kota Tegal	6.973,09	6.989,56	6.946,91	6.981,07	7.092,84
	Jawa Tengah	**1.002,53**	**1.009,85**	**995,04**	**1.003,06**	**1.022,31**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Jumlah penduduk berumur 15 tahun yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Jawa Tengah pada Tahun 2012, rata-rata berpendidikan SD ke bawah sebanyak 9.013.849 orang (55,87%), diikuti SLTA sebanyak 4.057.303 orang (25,15%) dan SLTP sebanyak 3.061.738 orang (18,98%). Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan pendidikan tinggi yang ditamatkan masih didominasi SD ke bawah, data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Penduduk Jawa Tengah Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja						
		Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
		SD kebawah		SLTP		SLTA +		Jumlah
		orang	%	orang	%	orang	%	
1	Cilacap	474.655	66,25	115.877	16,17	125.933	17,58	716.465
2	Banyumas	419.787	59,01	131.016	18,42	160.618	22,58	711.421
3	Purbalingga	273.004	61,11	100.631	22,53	73.112	16,37	446.747
4	Banjarnegara	334.099	68,62	77.009	15,82	75.789	15,57	486.897
5	Kebumen	430.988	70,80	92.598	15,21	85.185	13,99	608.771
6	Purworejo	141.902	41,16	78.028	22,63	124.820	36,21	344.750
7	Wonosobo	289.955	73,58	58.754	14,91	45.333	11,50	394.042
8	Magelang	353.090	56,44	119.840	19,15	152.705	24,41	625.635
9	Boyolali	224.693	45,12	103.545	20,79	169.746	34,09	497.984
10	Klaten	243.671	40,60	109.293	18,21	247.248	41,19	600.212

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja						
		Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
		SD kebawah		SLTP		SLTA +		Jumlah
11	Sukoharjo	151.156	37,56	80.126	19,91	171.205	42,54	402.487
12	Wonogiri	342.609	67,34	86.319	16,97	79.862	15,70	508.790
13	Karanganyar	170.875	40,98	90.329	21,66	155.737	37,35	416.941
14	Sragen	250.233	53,85	95.370	20,52	119.082	25,63	464.685
15	Grobogan	442.466	63,56	134.713	19,35	118.906	17,08	696.085
16	Blora	264.806	59,96	76.717	17,37	100.129	22,67	441.652
17	Rembang	175.841	55,45	68.484	21,60	72.777	22,95	317.102
18	Pati	300.606	53,44	106.611	18,95	155.270	27,60	562.487
19	Kudus	167.277	40,75	108.119	26,34	135.123	32,92	410.519
20	Jepara	266.520	48,48	144.346	26,26	138.903	25,27	549.769
21	Demak	246.435	49,91	111.226	22,53	136.086	27,56	493.747
22	Semarang	258.390	50,31	122.358	23,82	132.858	25,87	513.606
23	Temanggung	256.268	64,52	80.068	20,16	60.833	15,32	397.169
24	Kendal	278.120	61,08	91.278	20,05	85.925	18,87	455.323
25	Batang	235.365	66,01	64.100	17,98	57.070	16,01	356.535
26	Pekalongan	255.962	63,08	78.023	19,23	71.788	17,69	405.773
27	Pemalang	411.000	70,54	89.401	15,34	82.271	14,12	582.672
28	Tegal	392.967	65,50	95.412	15,90	111.608	18,60	599.987
29	Brebes	550.877	74,77	97.759	13,27	88.159	11,97	736.795
30	Kota Magelang	16.159	28,02	10.604	18,39	30.906	53,59	57.669
31	Kota Surakarta	66.901	26,17	46.598	18,23	142.122	55,60	255.621
32	Kota Salatiga	24.481	29,24	17.108	20,43	42.147	50,33	83.736
33	Kota Semarang	194.178	25,65	132.213	17,47	430.515	56,88	756.906
34	Kota Pekalongan	58.748	44,56	28.316	21,48	44.762	33,96	131.826
35	Kota Tegal	49.765	48,75	19.549	19,15	32.770	32,10	102.084
	Jawa Tengah 2012	**9.013.849**	**55,87**	**3.061.738**	**18,98**	**4.057.303**	**25,15**	**16.132.890**
	2011	**9.135.874**	**57,40**	**3.048.208**	**19,15**	**3.732.053**	**23,45**	**15.916.135**
	2010	**9.173.558**	**58,03**	**2.993.593**	**18,94**	**3.642.296**	**23,04**	**15.809.447**
	2009	**9.457.640**	**59,72**	**2.893.843**	**18,27**	**3.483.899**	**22,00**	**15.835.382**
	2008	**9.367.374**	**60,58**	**2.798.160**	**18,10**	**3.298.124**	**21,33**	**15.463.658**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Pada Tahun 2012, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar terserap pada lapangan pekerjaan utama yaitu pertanian (31,39%), perdagangan (21,36%), dan industri (20,44%). Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Penduduk Jawa Tengah Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa)								
		Pertanian	Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas dan Air Bersih	Industri	Kons-truksi	Perdagangan	Transportasi	Keuangan	Jasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cilacap	239.960	9.028	156.590	55.858	134.228	24.431	11.955	84.415	716.465
2	Banyumas	164.900	3.326	164.731	51.119	191.054	25.959	17.742	92.590	711.421
3	Purbalingga	111.111	7.525	151.354	32.438	78.922	9.213	5.115	51.069	446.747
4	Banjarnegara	237.622	3.627	62.478	26.242	90.029	11.477	4.639	50.783	486.897
5	Kebumen	216.669	1.890	197.391	40.180	73.490	16.387	6.454	56.310	608.771
6	Purworejo	133.926	3.367	32.888	17.966	86.123	11.133	4.717	54.630	344.750
7	Wonosobo	213.748	1.788	34.062	23.170	64.231	10.948	4.292	41.803	394.042
8	Magelang	250.581	6.616	91.625	50.135	110.925	20.742	7.137	87.874	625.635
9	Boyolali	134.404	720	103.321	61.029	108.415	16.980	7.593	65.522	497.984
10	Klaten	121.581	2.990	159.631	47.240	138.863	15.858	13.262	100.787	600.212
11	Sukoharjo	63.583	1.346	123.804	29.618	98.031	9.636	12.485	63.984	402.487
12	Wonogiri	264.921	3.011	57.201	37.120	80.961	8.683	4.752	52.141	508.790
13	Karanganyar	116.268	1.868	88.761	33.917	78.368	10.247	10.149	77.363	416.941
14	Sragen	166.812	4.364	66.640	30.300	110.653	15.414	10.165	60.337	464.685
15	Grobogan	362.500	9.840	60.506	54.413	103.217	17.113	15.329	73.167	696.085
16	Blora	204.770	6.375	17.490	29.761	114.147	8.066	3.885	57.158	441.652
17	Rembang	137.206	1.470	36.024	22.920	57.741	11.543	3.154	47.044	317.102
18	Pati	183.798	12.903	86.086	39.038	122.901	15.545	10.118	92.098	562.487
19	Kudus	50.776	396	150.833	42.453	90.600	15.149	7.337	52.975	410.519
20	Jepara	59.554	7.409	263.264	36.717	96.640	12.501	8.336	65.348	549.769

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa)								
		Pertanian	Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas dan Air Bersih	Industri	Kons-truksi	Perdagangan	Transportasi	Keuangan	Jasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Demak	175.454	1.145	59.985	54.017	108.745	17.031	10.027	67.343	493.747
22	Semarang	190.958	4.202	124.643	44.468	74.565	12.571	5.768	56.431	513.606
23	Temanggung	144.553	414	129.184	17.456	56.756	9.901	1.704	37.201	397.169
24	Kendal	195.465	1.939	75.761	22.417	92.228	14.548	4.522	48.443	455.323
25	Batang	105.761	3.900	90.950	29.750	58.142	12.789	2.549	52.694	356.535
26	Pekalongan	74.443	2.545	156.277	33.613	76.220	12.095	4.618	45.962	405.773
27	Pemalang	230.847	3.065	82.275	39.688	132.781	23.513	7.964	62.539	582.672
28	Tegal	140.420	2.543	112.244	63.153	160.441	39.641	7.013	74.532	599.987
29	Brebes	322.969	2.951	38.936	46.715	180.999	45.017	4.855	94.353	736.795
30	Kota Magelang	106	-	9.003	1.841	22.259	3.788	2.788	17.884	57.669
31	Kota Surakarta	2.015	348	59.626	14.107	95.302	10.772	12.226	61.225	255.621
32	Kota Salatiga	5.705	328	17.167	10.695	27.324	3.063	3.509	15.945	83.736
33	Kota Semarang	27.415	4.134	172.594	54.001	248.502	46.155	40.033	164.072	756.906
34	Kota Pekalongan	6.233	190	51.252	3.722	36.735	3.572	3.333	26.789	131.826
35	Kota Tegal	7.343	209	13.130	9.790	46.609	6.463	3.285	15.255	102.084
	Jawa Tengah 2012	5.064.377	117.772	3.297.707	1.207.067	3.447.147	547.944	282.810	2.168.066	16.132.890
	(%)	31,39	0,73	20,44	7,48	21,37	3,40	1,75	13,44	100,00
	2011	5.376.452	108.592	3.046.724	1.097.380	3.402.091	563.144	264.681	2.057.071	15.916.135
	2010	5.616.529	136.625	2.815.292	1.046.741	3.388.450	664.080	179.804	1.961.926	15.809.447
	2009	5.864.827	147.997	2.656.673	1.028.429	3.462.071	683.675	154.739	1.836.971	15.835.382
	2008	5.697.121	155.082	2.703.427	1.006.994	3.254.982	715.404	167.840	1.762.808	15.463.658

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Jumlah penduduk menurut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu, serta lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Menurut Agama (Jiwa)									
		Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010									
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong HuCu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cilacap	1.612.218	15.496	7.016	145	2.131	68	1.094	-	3.939	1.642.107
2	Banyumas	1.525.427	16.302	9.604	356	1.714	177	68	1	878	1.554.527
3	Purbalingga	841.826	4.876	1.885	16	70	42	59	-	178	848.952
4	Banjarnegara	863.181	3.575	1.028	36	584	16	170	-	323	868.913
5	Kebumen	1.145.767	7.313	3.658	38	2.030	33	272	-	815	1.159.926
6	Purworejo	678.168	7.621	6.624	61	723	47	56	-	2.127	695.427
7	Wonosobo	744.199	5.006	3.036	218	701	28	27	-	1.668	754.883
8	Magelang	1.136.998	10.249	21.577	199	277	24	565	-	11.834	1.181.723
9	Boyolali	908.402	12.500	3.687	1.986	2.374	5	26	-	1.551	930.531
10	Klaten	1.062.043	28.333	33.457	5.194	273	7	47	-	693	1.130.047
11	Sukoharjo	776.983	29.692	12.095	407	597	32	58	-	4.374	824.238
12	Wonogiri	905.318	11.779	9.735	50	1.773	4	22	-	223	928.904
13	Karanganyar	774.020	22.386	11.765	2.906	382	9	30	-	1.698	813.196
14	Sragen	838.958	10.356	5.406	1.001	229	10	26	-	2.280	858.266
15	Grobogan	1.291.406	11.048	3.049	155	1.071	84	6	-	1.877	1.308.696
16	Blora	816.688	8.158	2.910	48	226	63	110	-	1.525	829.728
17	Rembang	579.874	2.986	2.303	52	585	44	33	-	5.482	591.359
18	Pati	1.154.431	26.478	3.141	98	3.191	23	1.351	-	2.280	1.190.993
19	Kudus	757.833	11.194	3.731	28	1.039	20	161	-	3.431	777.437
20	Jepara	1.066.591	21.854	971	489	4.070	26	56	-	3.223	1.097.280

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Menurut Agama (Jiwa)									
		Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010									
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong HuCu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Demak	1.041.086	8.151	2.849	82	217	15	-	1	3.178	1.055.579
22	Semarang	868.084	32.060	22.064	311	4.884	63	512	-	2.749	930.727
23	Temanggung	679.193	14.570	5.663	52	7.691	23	258	-	1.096	708.546
24	Kendal	885.191	4.898	3.355	334	267	23	40	-	6.205	900.313
25	Batang	702.605	1.876	1.455	32	120	26	2	-	648	706.764
26	Pekalongan	834.637	2.440	817	442	99	20	54	-	112	838.621
27	Pemalang	1.254.669	4.620	1.331	72	194	13	149	1	304	1.261.353
28	Tegal	1.386.690	4.459	2.264	343	471	206	43	2	361	1.394.839
29	Brebes	1.724.709	3.534	1.307	34	232	84	71	1	3.897	1.733.869
30	Kota Magelang	97.585	10.971	5.902	132	427	54	23	-	3.133	118.227
31	Kota Surakarta	393.375	68.844	33.014	364	1.208	151	37	-	2.344	499.337
32	Kota Salatiga	129.894	30.443	8.069	106	792	28	16	-	984	170.332
33	Kota Semarang	1.350.310	107.519	77.319	1.548	10.013	1.061	205	-	8.009	1.555.984
34	Kota Pekalongan	270.632	5.801	2.992	56	1.237	151	8	1	556	281.434
35	Kota Tegal	229.350	5.129	2.840	57	1.117	315	2	-	789	239.599
	Jawa Tengah	31.328.341	572.517	317.919	17.448	53.009	2.995	5.657	7	84.764	32.382.657

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Dilihat dari struktur penduduk Jawa Tengah, penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 8.440.155 jiwa (25,37%), kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 22.369.646 jiwa (67,23%) dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebanyak 2.460.406 jiwa (7,4%), seperti terlihat pada Gambar 2.7.

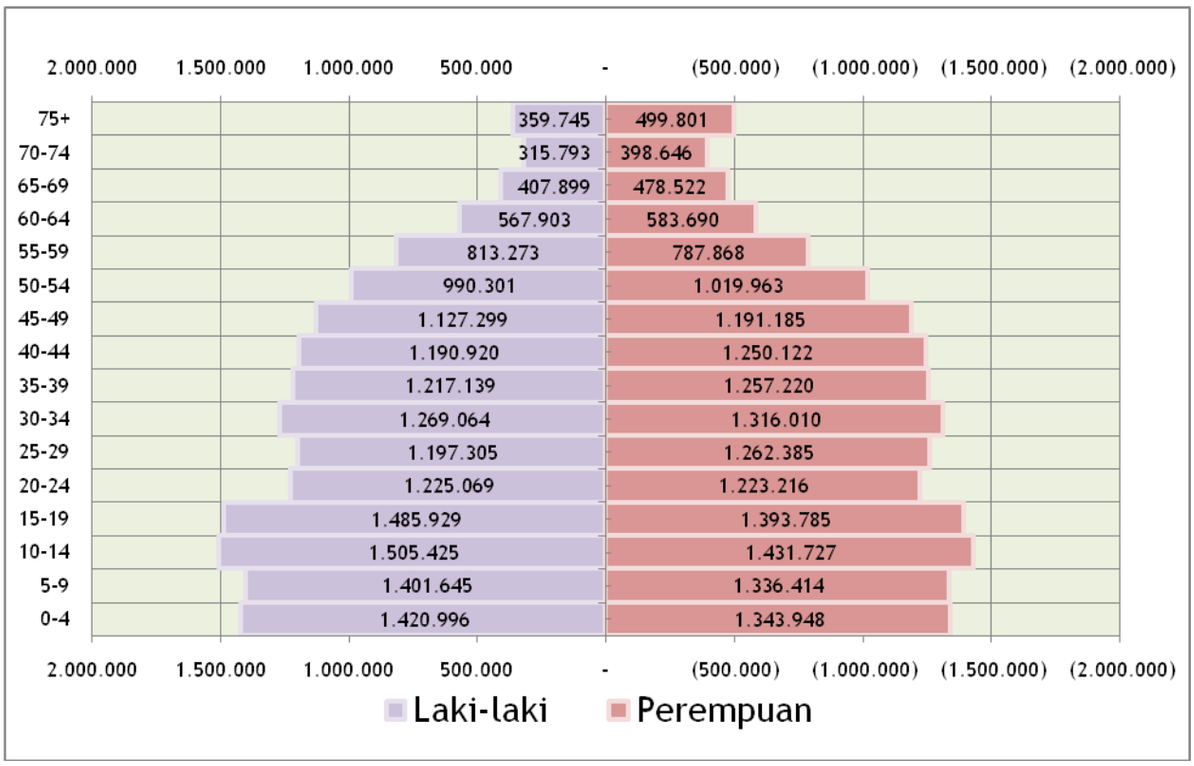

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Keterangan : [1] Proyeksi Supas 2005

Gambar 2.7.
Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten/Kota	Kelompok Umur Tahun 2012 [2] (Jiwa)			
		0-14	15-64	65+	Jumlah
1.	Cilacap	458.664	1.098.179	123.021	1.679.864
2.	Banyumas	411.524	1.063.223	128.290	1.603.037
3.	Purbalingga	236.895	572.188	68.406	877.489
4.	Banjarnegara	233.676	591.560	65.726	890.962
5.	Kebumen	320.363	752.300	109.015	1.181.678
6.	Purworejo	173.164	457.856	77.463	708.483
7.	Wonosobo	208.907	505.944	56.596	771.447
8.	Magelang	305.581	815.424	98.366	1.219.371
9.	Boyolali	235.367	627.751	90.199	953.317
10.	Klaten	264.488	773.365	115.194	1.153.047
11.	Sukoharjo	198.731	585.255	64.732	848.718
12.	Wonogiri	203.342	623.392	119.639	946.373
13.	Karanganyar	203.909	567.973	66.880	838.762

No.	Kabupaten/Kota	Kelompok Umur Tahun 2012 [2] (Jiwa)			
		0-14	15-64	65+	Jumlah
14.	Sragen	208.466	585.483	81.334	875.283
15.	Grobogan	342.523	897.049	99.555	1.339.127
16.	Blora	200.592	574.284	72.249	847.125
17.	Rembang	142.801	424.539	41.208	608.548
18.	Pati	287.673	833.399	98.957	1.219.993
19.	Kudus	196.762	568.165	42.078	807.005
20.	Jepara	303.235	772.953	68.728	1.144.916
21.	Demak	293.973	741.583	56.823	1.091.379
22.	Semarang	233.098	662.289	72.996	968.383
23.	Temanggung	179.152	495.625	55.943	730.720
24.	Kendal	233.367	632.400	60.558	926.325
25.	Batang	186.154	498.084	44.340	728.578
26.	Pekalongan	241.485	570.618	49.263	861.366
27.	Pemalang	362.248	840.877	81.899	1.285.024
28.	Tegal	401.619	933.282	86.100	1.421.001
29.	Brebes	485.641	1.175.467	109.372	1.770.480
30.	Kota Magelang	26.707	84.700	9.040	120.447
31.	Kota Surakarta	110.130	367.723	31.723	509.576
32.	Kota Salatiga	40.081	125.695	11.704	177.480
33.	Kota Semarang	372.072	1.180.497	77.355	1.629.924
34.	Kota Pekalongan	75.474	201.871	13.002	290.347
35.	Kota Tegal	62.327	169.653	12.652	244.632
	Jumlah 2012 [2]	**8.440.155**	**22.369.646**	**2.460.406**	**33.270.207**
	2011 [2]	**8.373.852**	**21.986.712**	**2.283.048**	**32.643.612**
	2010	**8.515.686**	**21.543.429**	**2.323.542**	**32.382.657**
	2009 [1]	**7.784.425**	**21.598.118**	**2.482.020**	**32.864.563**
	2008 [1]	**8.669.153**	**21.423.535**	**2.533.702**	**32.626.390**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Keterangan : [1] Proyeksi Supas 2005
[2] Angka Sementara Proyeksi SP 2010

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pembangunan inklusif, yang menitikberatkan pada pertumbuhan tanpa disparitas inter-regional dan ketidaksetaraan sosial. Konsep pertumbuhan dalam pembangunan inklusif mengacu pada suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan juga strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan menyediakan kesempatan bagi orang/kelompok yang terpinggirkan dan rentan untuk berkontribusi pada proses pembangunan. Dengan demikian peluang ekonomi yang dihasilkan harus dapat dinikmati atau terdistribusi ke semua lapisan masyarakat termasuk kaum miskin termarjinalkan.

Selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat meskipun laju pertumbuhannya bergerak secara perlahan, yaitu sebesar 5,61% di Tahun 2008 menjadi 6,34% di Tahun

2012. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tersebut, ditopang oleh sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sumber pertumbuhan PDRB Jawa Tengah terbesar setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Gambar 2.8.

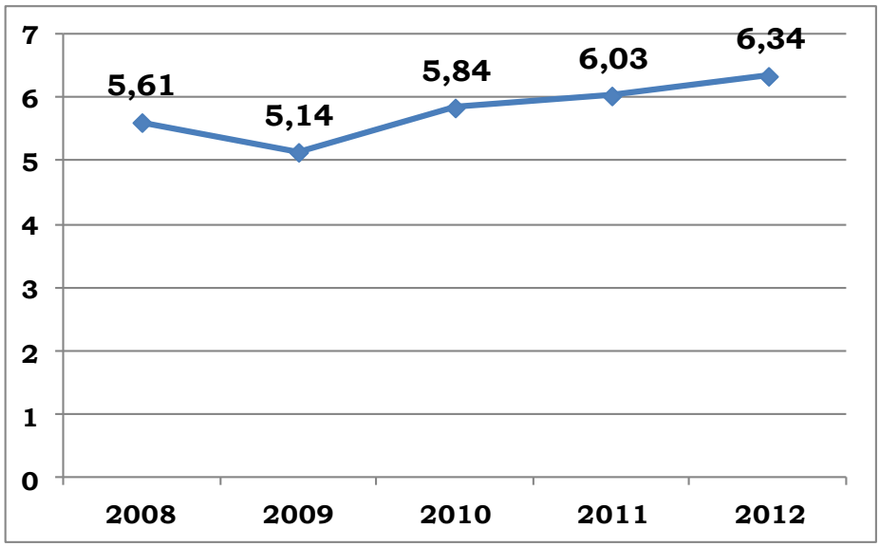

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.8.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat dipengaruhi oleh faktor internal yang diakibatkan belum optimalnya kinerja sektor industri pengolahan dan faktor eksternal karena masih tingginya ketergantungan pada sektor pertanian.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aglomerasi, artinya terjadi pemusatan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam suatu wilayah tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada wilayah tersebut. Selain berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, aglomerasi juga mempunyai manfaat lain yaitu efisiensi kolektif pada proses produksi pada skala menengah dan besar. Sebaran aglomerasi di Jawa Tengah antara lain di Kota Semarang dan Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kudus, Pekalongan dan Kendal.

Perkembangan gejolak ekonomi global dan terbukanya pasar bebas Asia Pasifik mengakibatkan tingginya persaingan antar produk. Hal ini berdampak pada menurunnya permintaan pasar global, nilai ekspor dan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif baik dan stabil. Pada Tahun 2012 dari keenam provinsi di Pulau Jawa, terdapat tiga provinsi yang mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,23%, yaitu Provinsi Jawa Timur 7,27%, DKI Jakarta 6,53% dan Jawa Tengah 6,34%.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa selama kurun waktu Tahun 2008–2012 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa
Tahun 2008 - 2012

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)
1	Banten	5,77	4,71	6,11	6,39	6,15
2	Jawa Barat	6,21	4,19	6,09	6,48	6,21
3	DKI Jakarta	6,23	5,02	6,50	6,73	6,53
4	Jawa Tengah	5,61	5,14	5,84	6,03	6,34
5	DIY	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32
6	Jawa Timur	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27
	Nasional	5,74	4,77	6,22	6,49	6,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2012)
Keterangan : r) Angka revisi
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Dilihat dari sebaran per kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Sragen sebesar 6,6%, selanjutnya Kota Magelang sebesar 6,48%, dan Kota Semarang sebesar 6,42%. Sementara itu, kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Kudus sebesar 4,33%, Demak 4,64%, dan Rembang 4,88%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	5,00	5,09	5,30	5,27	5,47
2	Banyumas	5,38	5,49	5,77	5,86	5,88
3	Purbalingga	5,30	5,89	5,67	6,07	6,26
4	Banjarnegara	4,98	5,11	4,89	4,92	5,25
5	Kebumen	5,80	3,94	4,15	4,88	5,47
6	Purworejo	5,62	4,96	5,01	5,02	5,04
7	Wonosobo	3,69	4,02	4,29	4,52	5,14
8	Magelang	4,99	4,72	4,51	4,27	5,84
9	Boyolali	4,04	5,16	3,60	5,28	5,66
10	Klaten	3,93	4,24	1,73	1,96	5,54
11	Sukoharjo	4,84	4,76	4,65	4,59	5,03
12	Wonogiri	4,27	4,73	5,87	2,03	5,89
13	Karanganyar	5,30	5,54	5,42	5,50	5,82
14	Sragen	5,69	6,01	6,09	6,53	6,60
15	Grobogan	5,33	5,03	5,05	3,59	6,16
16	Blora	5,80	4,97	5,04	2,70	5,03
17	Rembang	4,67	4,46	4,45	4,40	4,88
18	Pati	4,94	4,69	5,11	5,43	5,92
19	Kudus	3,92	3,95	4,17	4,21	4,33
20	Jepara	4,49	5,02	4,52	5,49	5,79
21	Demak	4,11	4,08	4,12	4,48	4,64
22	Semarang	4,26	4,37	4,90	5,69	6,02
23	Temanggung	3,54	4,09	4,31	4,65	5,04
24	Kendal	4,26	5,55	5,97	5,99	5,54

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
25	Batang	3,67	3,72	4,97	5,26	5,02
26	Pekalongan	4,78	4,30	4,27	4,77	5,32
27	Pemalang	4,99	4,78	4,94	4,83	5,28
28	Tegal	5,32	5,29	4,83	4,81	5,25
29	Brebes	4,81	4,99	4,94	4,97	5,21
30	Kota Magelang	5,05	5,11	6,12	5,48	6,48
31	Kota Surakarta	5,69	5,90	5,94	6,04	6,12
32	Kota Salatiga	4,98	4,48	5,01	5,52	5,73
33	Kota Semarang	5,59	5,34	5,87	6,41	6,42
34	Kota Pekalongan	3,73	4,78	5,51	5,45	5,60
35	Kota Tegal	5,15	5,02	4,61	4,58	5,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2012)

Nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 periode Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari Rp.168,034 trilyun menjadi Rp.210,848 trilyun atau meningkat sebesar Rp.42,814 trilyun, sebagaimana Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Nilai PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Provinsi Jawa Tengah

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)				
	2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)
Pertanian	32.880.707,85	34.101.148,13	34.956.425,39	35.399.800,56	36.712.340,43
Pertambangan & Penggalian	1.851.189,43	1.952.866,70	2.091.257,42	2.193.964,23	2.355.848,88
Industri Pengolahan	55.348.962,88	57.444.185,45	61.387.556,40	65.439.443,00	69.012.495,82
Listrik, Gas, &Air Bersih	1.408.666,12	1.489.552,65	1.614.857,68	1.711.200,96	1.820.436,99
Konstruksi	9.647.593,00	10.300.647,63	11.014.598,60	11.753.387,92	12.573.964,87
Perdagangan, Hotel, & Restoran	35.226.196,01	37.766.356,61	40.054.938,34	43.159.132,59	46.719.025,28
Pengangkutan & Komunikasi	8.581.544,49	9.192.949,90	9.805.500,11	10.645.260,49	11.486.122,63
Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan	6.218.053,97	6.701.533,13	7.038.128,91	7.503.725,18	8.206.252,08
Jasa-Jasa	16.871.569,54	17.724.216,37	19.029.722,65	20.464.202,99	21.961.937,06
PDRB	**168.034.483,29**	**176.673.456,57**	**186.992.985,50**	**198.270.117,94**	**210.848.424,04**

Sumber : BPS BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2012)
Keterangan : r) Angka revisi
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), periode Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari Rp.367,135 trilyun menjadi Rp.556,479 trilyun, atau meningkat sebesar Rp.189,344 trilyun, sebagaimana Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Nilai PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Jawa Tengah

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)
Pertanian	72.862.985,73	79.342.553,91	86.665.684,94	95.078.348,99	104.311.416,00
Pertambangan & Penggalian	3.514.457,82	3.852.796,77	4.302.563,07	4.726.493,18	5.239.594,00
Industri Pengolahan	125.006.771,42	130.352.154,42	146.132.156,78	165.850.520,22	182.715.200,32
Listrik, Gas, &Air Bersih	3.749.439,12	4.114.517,64	4.645.499,82	5.110.058,36	5.648.692,00
Konstruksi	21.196.201,77	24.448.721,40	27.124.582,63	29.851.905,75	33.352.512,04
Perdagangan, Hotel, & Restoran	71.617.054,69	78.262.543,48	86.996.495,32	98.462.085,40	112.908.719,28
Pengangkutan & Komunikasi	21.091.610,95	23.836.789,16	26.298.747,14	29.172.039,07	32.951.087,21
Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan	12.617.097,04	14.447.437,07	15.899.731,16	17.684.047,74	19.993.405,95
Jasa-Jasa	35.480.336,36	39.246.429,89	46.599.865,32	52.828.325,46	59.359.199,44
PDRB	**367.135.954,90**	**397.903.943,75**	**444.666.007,00**	**498.763.824,16**	**556.479.872,13**

Sumber : BPS (BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2012)
Keterangan : r) Angka revisi
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Sementara itu, dari sisi perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada PDRB Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu 2008–2012, dapat diketahui bahwa sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan. Selama lima tahun, sektor ini mengalami peningkatan positif. Begitu pula sektor lainnya, hampir selalu mengalami peningkatan kontribusi positif terhadap PDRB Jawa Tengah, kecuali sektor pertanian menunjukkan penurunan kontribusi dari Tahun 2008 ke 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Perkembangan Kontribusi Sektor pada PDRB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012

Lapangan Usaha	ADHB (%)					ADHK Tahun 2000 (%)				
	2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)	2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)
Pertanian	19,85	19,94	19,49	19,07	18,74	19,57	19,30	18,69	17,87	17,41
Pertambang-an & Penggalian	0,96	0,97	0,97	0,95	0,94	1,10	1,11	1,12	1,11	1,12
Industri Pengolahan	33,10	32,76	32,87	33,31	32,83	32,94	32,51	32,83	33,06	32,73
Listrik, Gas, &Air Bersih	1,02	1,03	1,04	1,00	1,02	0,84	0,84	0,86	0,85	0,86
Konstruksi	5,77	6,14	6,10	5,97	5,99	5,74	5,83	5,89	5,91	5,96
Perdagangan, Hotel, & Restoran	19,70	19,67	19,56	19,71	20,29	20,96	21,38	21,42	21,73	22,16
Pengangkut-an & Komunikasi	5,74	5,99	5,91	5,85	5,92	5,11	5,20	5,24	5,37	5,45

Lapangan Usaha	ADHB (%)					ADHK Tahun 2000 (%)				
	2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)	2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)
Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan	3,44	3,63	3,58	3,55	3,59	3,70	3,79	3,76	3,79	3,89
Jasa-Jasa	9,66	9,86	10,48	10,60	10,67	10,04	10,03	10,18	10,32	10,42
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2012)
Keterangan : r) Angka revisi
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Tahun 2008-2012, pertumbuhan sektor PDRB Jawa Tengah ADHB tertinggi terjadi di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan; serta Pengangkutan dan Komunikasi, sedangkan pertumbuhan ADHK yang tertinggi adalah sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; serta Pengangkutan dan Komunikasi, dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2000
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Sektor	Pertumbuhan PDRB ADHB (%)					Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012 **)	2008	2009	2010r)	2011*)	2012 **)
Pertanian	14,55	8,89	9,23	9,72	9,71	3,19	3,71	2,51	1,27	3,71
Pertambangan & Penggalian	13,02	9,63	11,67	9,85	10,86	3,83	5,49	7,09	4,91	7,38
Industri Pengolahan	21,11	4,28	12,12	13,65	10,17	5,06	3,79	6,86	6,60	5,46
Listrik, Gas, &Air Bersih	9,75	9,74	12,91	7,29	10,54	5,06	5,74	8,41	5,97	6,38
Konstruksi	17,02	15,34	10,94	9,67	11,73	6,54	6,77	6,93	6,71	6,98
Perdagangan, Hotel, & Restoran	17,64	9,28	11,16	12,95	14,67	7,23	7,21	6,06	7,75	8,25
Pengangkutan &Komunikasi	14,87	13,02	10,33	10,93	12,95	6,57	7,12	6,66	8,56	7,9
Keuangan, Sewa & Js.Perusahaan	16,59	14,51	10,05	11,22	13,06	7,81	7,78	5,02	6,62	9,36
Jasa-Jasa	15,65	10,61	18,74	13,37	12,36	7,35	5,05	7,37	7,54	7,32

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013
Keterangan :
r) : Angka Revisi
*) : *Angka Sementara*
**) : *Angka Sangat Sementara*

PDRB Jawa Tengah apabila dilihat dari sisi penggunaan menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga memberi kontribusi nilai PDRB terbesar disusul ekspor, impor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besaran nilai dari komponen PDRB Sisi Penggunaan terus meningkat dari tahun ke tahun selama 2008-2012 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Jenis Penggunaan	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
		2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)
1	Konsumsi Rumah Tangga	231.938.662,99	256.411.756,84	285.498.002,51	320.409.012,55	355.895.519,36
2	Konsumsi Lembaga Swasta	5.321.506,89	6.046.906,93	6.351.006,47	6.926.557,48	7.965.290,35
3	Konsumsi Pemerintah	42.004.768,69	48.170.288,56	50.485.477,70	56.133.920,40	61.523.114,00
4	PMTB	68.286.651,89	77.408.666,28	85.331.518,10	92.102.444,28	109.221.189,03
5	Perubahan Stok	20.644.021,20	135.064,82	-2.219.518,10	15.058.789,69	6.761.082,46
6	Ekspor	182.147.491,35	177.695.969,86	200.788.641,47	222.913.601,11	260.406.058,31
7	Impor	183.207.148,09	167.964.709,52	181.569.115,00	214.780.501,36	245.292.381,38
	Total PDRB	367.135.954,92	397.903.943,76	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2012)
Keterangan : r) Angka revisi
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Dari besaran presentase PDRB Sisi Penggunaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.20 dapat diketahui pula bahwa kontribusi terbesar dalam penciptaan PDRB Jawa Tengah selama 2008 - 2012 adalah konsumsi rumah tangga sebesar 64 persen, disusul ekspor dan impor. Sementara itu, konsumsi pemerintah dan sektor dunia usaha (PMTB) masing-masing menyumbang sekitar 11 persen dan sekitar 18-20 persen per tahun.

Tabel 2.20.
Kontribusi Komponen Sisi Penggunaan Terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

No	Jenis Penggunaan	PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku				
		2008	2009	2010r)	2011*)	2012**)
1	Konsumsi Rumah Tangga	63,18	64,44	64,21	64,24	63,95
2	Konsumsi Lembaga Swasta	1,45	1,52	1,43	1,39	1,43
3	Konsumsi Pemerintah	11,44	12,11	11,35	11,25	11,06
4	PMTB	18,60	19,45	19,19	18,47	19,63
5	Perubahan Stok	5,62	0,03	(0,50)	3,02	1,21
6	Ekspor	49,61	44,66	45,15	44,69	46,80
7	Impor	49,90	42,21	40,83	43,06	44,08
	PDRB Penggunaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2010, 2011, 2012)
Keterangan : r) Angka revisi
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

2.2.2. Laju Inflasi

Angka Inflasi *(y-o-y)* di Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebesar 4,24%, lebih tinggi dibanding angka inflasi Tahun 2011 sebesar 2,68%. Beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan angka inflasi Tahun 2012 adalah harga berbagai komoditas pada Desember 2012 bertepatan dengan Hari Natal dan Tahun Baru 2013, secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga

beras, daging ayam ras, telur ayam, daging sapi dan bawang merah menjadi pemicu utama terjadinya inflasi di Jawa Tengah, dapat dilihat pada Gambar 2.9.

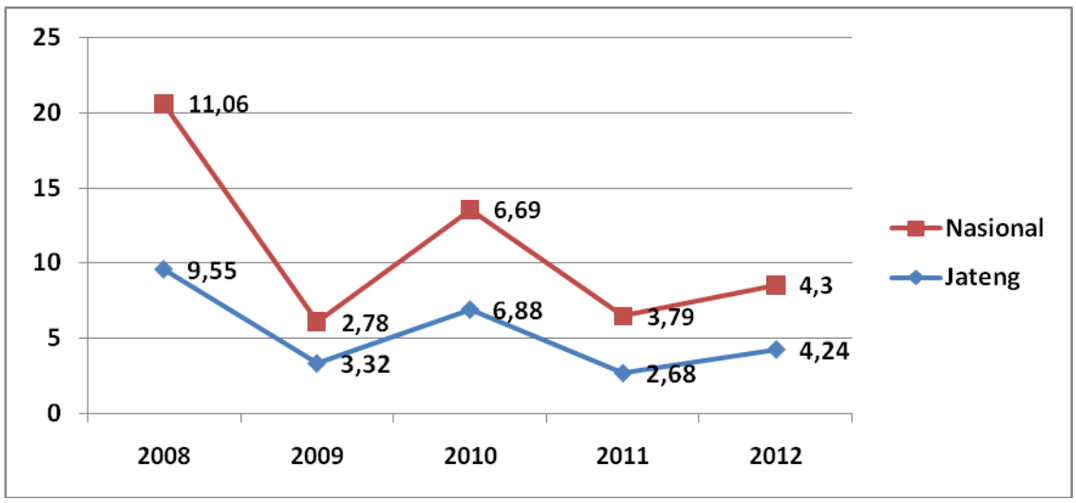

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.9.
Nilai Inflasi Rata-Rata Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Jawa Tengah ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012, PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah sebesar Rp.17,14 juta atau naik sebesar 11,44% dari Tahun 2011. Kondisi yang sama pada PDRB per kapita ADHK juga mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku, dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2000
2008	11.406.655	5.220.713
2009	12.322.889	5.471.490
2010	13.730.016	5.773.809
2011*)	15.380.771	6.114.211
2012**)	17.140.206	6.494.368

Sumber : BPS (PDRB Jateng 2012)
*Keterangan : *) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Secara keseluruhan total PDRB ADHB tanpa migas kabupaten/kota se-Jawa Tengah dibagi jumlah penduduk Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar Rp.13,05 juta perkapita. Sebanyak 11 kabupaten/kota memiliki PDRB perkapita lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, yaitu Kota Pekalongan (Rp. 16,42 juta), Magelang (Rp.22,07 juta), Surakarta (Rp.24,35 juta), dan Semarang (Rp.34,79 juta), serta Kabupaten Karanganyar (Rp.14,06 juta), Semarang (Rp.14,81 juta), Sukoharjo (Rp.14,84 juta), Kendal (Rp.14,88 juta), Cilacap (Rp.30,33 juta), dan

Kudus (Rp.47,35 juta). Kabupaten Kudus bukan daerah dengan PDRB terbesar namun memiliki PDRB perkapita tertinggi, yaitu sebesar Rp.47,35 juta. Sebaliknya, Kabupaten Blora walaupun bukan daerah dengan PDRB terkecil, namun menempati posisi dengan PDRB perkapita terendah, yaitu sebesar Rp.6,12 juta. Selengkapnya data PDRB dapat dilihat pada Gambar 2.10.

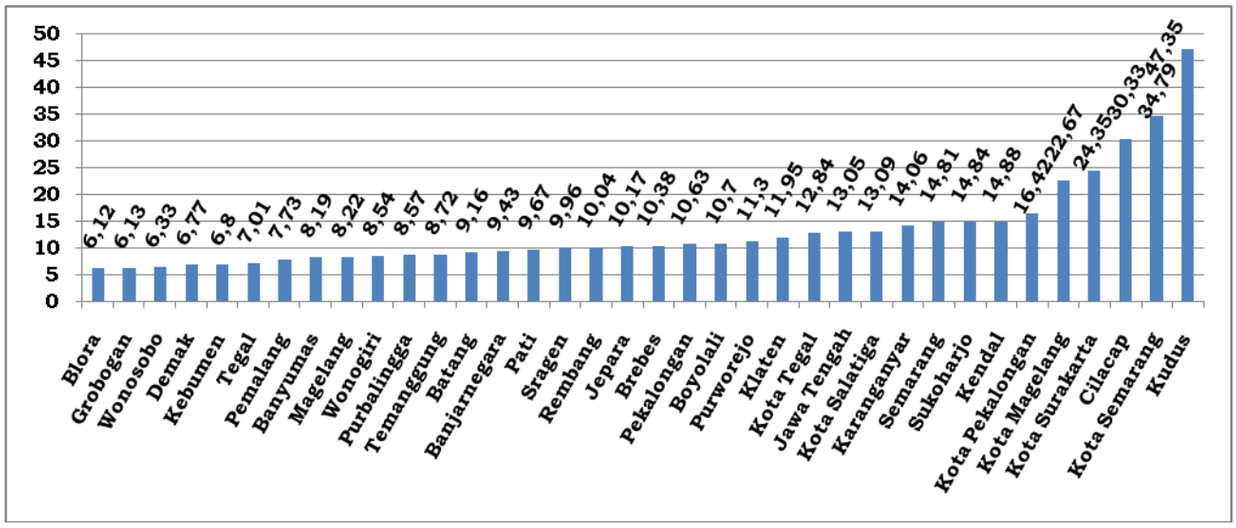

Sumber: BPS (PDRB Jateng 2012)

Gambar 2.10.
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 (%)

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Indeks Gini Tahun 2008 sebesar 0,303, meningkat menjadi 0,355 pada Tahun 2012. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar masyarakat meningkat selama 2010-2012 sebagai konsekuensi logis dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Perkembangan Indeks Gini Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.11.

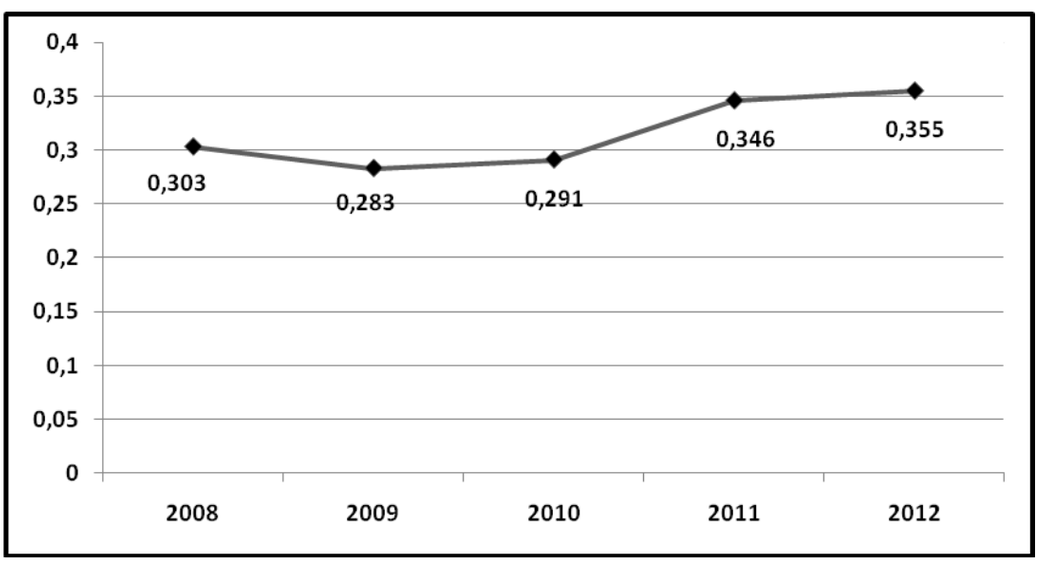

Sumber : Susenas 2012 BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Gambar 2.11.
Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

Berdasarkan distribusi Indeks Gini per kabupaten/kota, diketahui Indeks Gini kabupaten dan kota di Jawa Tengah berada pada kisaran antara 0,245 sampai 0,397. Kabupaten/kota yang memiliki Indeks Gini tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Karanganyar (0,397), Kabupaten Boyolali (0,384), dan Kabupaten Blora (0,380). Sementara Kabupaten Pemalang, Pekalongan dan Pati memiliki Indeks Gini terendah. Rincian Indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.12.

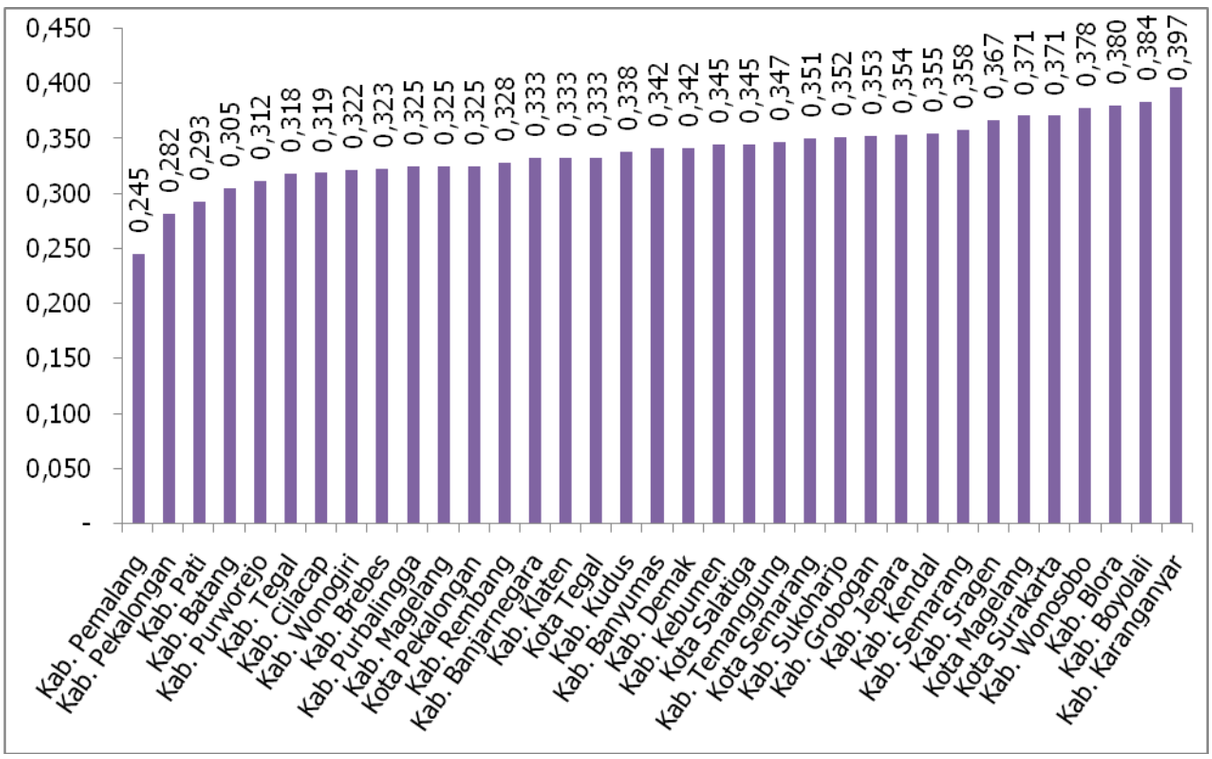

Sumber: Susenas 2012, diolah.

Gambar 2.12.
Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Berdasarkan kriteria Bank Dunia Tahun 2012, distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah tergolong merata pada ketimpangan rendah. Hal tersebut ditunjukkan sebesar 18,79% pendapatan dinikmati oleh 40% masyarakat berpenghasilan rendah, sebesar 32,21% oleh 40% masyarakat berpenghasilan menengah dan sebesar 49% oleh 20% masyarakat berpenghasilan tinggi. Data dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Pemerataan Pendapatan Penduduk
Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Kriteria Bank Dunia		
		40% I	40% II	20% III
1	2008	22,53	38,42	39,05
2	2009	24,11	37,75	38,14
3	2010	22,75	36,95	40,30
4	2011	20,15	36,30	43,55
5	2012	18,79	32,21	49,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012

2.2.6. Indeks Williamson

Kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Williamson menunjukkan bahwa pada kurun waktu Tahun 2008-2012 kesenjangan antar wilayah menyempit selama 2008-2010, namun kian melebar pada Tahun 2011 - 2012. Pada Tahun 2011 - 2012, Indeks Williamson meningkat menjadi 0,6972 dan 0,7042, yang menunjukkan kesenjangan antar wilayah di Jawa Tengah kian melebar. Indeks Williamson yang berada di atas angka 0,5, menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah di kabupaten/kota Jawa Tengah termasuk kategori tinggi. Perkembangan Indeks Williamson Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.13.

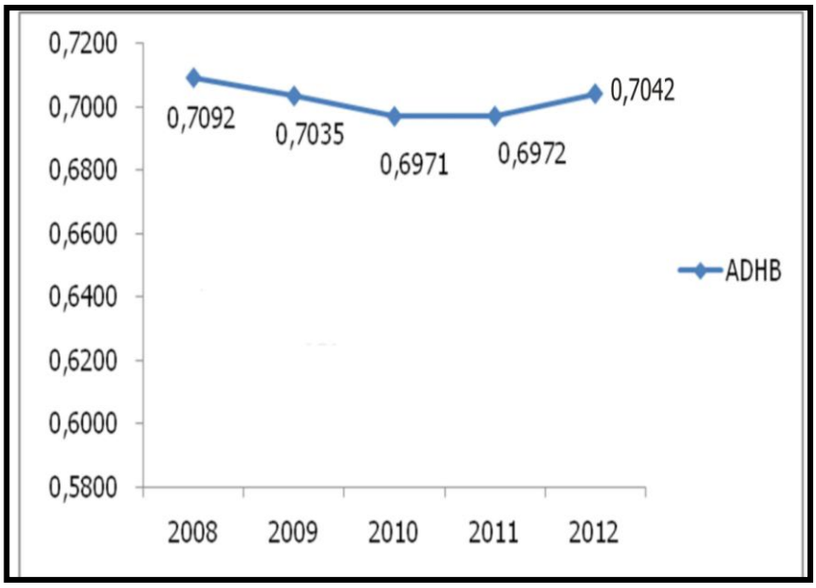

Sumber : Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota 2012, BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.13.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

2.2.7. Penduduk Miskin

a. Penduduk Miskin Berdasarkan Perhitungan Garis Kemiskinan

Penduduk miskin di Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebesar 14,98% (4,863 juta orang), dengan rincian berada di perdesaan sebesar 16,55% (2,916 juta orang) selebihnya di perkotaan 13,11% (1,946 juta orang). Data penduduk miskin kurun waktu Tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Tahun / Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)			Persentase		
		Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
1	2008 / Maret	2.556,50	3.633,10	6.189,60	16,34	21,96	19,23
2	2009 / Maret	2.420,90	3.304,80	5.725,70	15,41	19,89	17,72
3	2010 / Maret	2.258,94	3.110,22	5.369,16	14,33	18,66	16,56
4	2011 / Maret	2.092,51	3.014,85	5.107,36	14,12	17,14	15,76
5	2011 / Sept	2.175,82	3.080,17	5.255,99	14,67	17,50	16,21
6	2012 / Maret	2.001,12	2,976,25	4.977,36	13,49	16,89	15,34
7	2012 / Sept	1.946,51	2.916,90	4.863,41	13,11	16,55	14,98

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2012

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah kondisi bulan Maret 2013 sebanyak 4,732 juta jiwa (14,56%), mengalami penurunan dibandingkan jumlah penduduk miskin Tahun 2012 sebanyak 4,863 juta jiwa (14,98%).

Sebaran penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat 15 kabupaten dengan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional, sehingga masih perlu upaya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin terbesar pada Tahun 2012 terdapat di Kabupaten Wonosobo sebesar 22,50%, Kebumen sebesar 22,40%, dan Rembang sebesar 21,88%. Dilihat dari jumlah penduduk miskin, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Brebes sejumlah 364.900 orang, Banyumas sejumlah 304.000 orang, dan Cilacap sejumlah 260.900 orang. Jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten/ Kota	Penduduk Miskin									
		2008 (Juli)		2009 (Juli)		2010 (Juli)		2011 (September)		2012 (September)	
		(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)
1	Cilacap	343,9	21,40	318,8	19,88	297,2	18,11	281,950	17,15	260,900	15,92
2	Banyumas	340,7	22,93	319,8	21,52	314,1	20,20	328,510	21,11	304,000	19,44
3	Purbalingga	221,9	27,12	205,0	24,97	208,9	24,58	196,000	23,06	181,400	21,19
4	Banjarnegara	200,6	23,34	184,0	21,36	166,7	19,17	177,313	20,38	164,100	18,87
5	Kebumen	334,9	27,87	309,6	25,73	263,0	22,71	279,415	24,06	258,500	22,40
6	Purworejo	130,0	18,22	121,4	17,02	115,3	16,61	121,941	17,51	112,800	16,32
7	Wonosobo	207,5	27,72	194,0	25,91	174,7	23,16	182,951	24,21	169,300	22,50
8	Magelang	190,8	16,49	176,5	15,19	167,2	14,14	179,581	15,18	166,200	13,97
9	Boyolali	158,4	17,08	148,2	15,96	127,8	13,72	139,516	14,97	129,100	13,88
10	Klaten	243,1	21,72	220,2	19,68	197,4	17,47	203,052	17,95	187,900	16,71
11	Sukoharjo	99,1	12,13	94,4	11,51	90,2	10,94	91,966	11,13	85,100	10,16
12	Wonogiri	201,1	20,71	184,9	19,08	145,5	15,68	146,372	15,74	135,500	14,67
13	Karanganyar	125,9	15,68	118,8	14,73	113,8	13,98	124,493	15,29	115,200	14,07
14	Sragen	177,1	20,83	167,3	19,70	149,7	17,49	154,260	17,95	142,800	16,72
15	Grobogan	262,0	19,84	247,5	18,68	233,7	17,86	227,778	17,38	210,800	16,13
16	Blora	155,1	18,79	146,0	17,70	134,9	16,27	134,931	16,24	124,800	15,10
17	Rembang	154,7	27,21	147,2	25,86	138,5	23,41	140,377	23,71	129,900	21,88
18	P a t i	207,2	17,90	184,1	15,92	172,4	14,48	175,124	14,69	162,000	13,61
19	Kudus	97,8	12,58	84,9	10,80	70,2	9,02	73,591	9,45	68,100	8,63
20	Jepara	119,2	11,05	104,7	9,60	111,8	10,18	113,349	10,32	104,800	9,38
21	Demak	217,2	21,24	202,2	19,70	198,8	18,76	192,465	18,21	178,100	16,73
22	Semarang	102,5	11,37	96,7	10,66	97,9	10,50	95,994	10,30	88,800	9,40
23	Temanggung	114,7	16,39	105,8	15,05	95,3	13,46	94,923	13,38	87,800	12,32
24	Kendal	168,2	17,87	152,4	16,02	130,4	14,47	128,584	14,26	119,000	13,17
25	Batang	122,0	18,08	112,2	16,61	103,6	14,67	95,306	13,47	88,200	12,40
26	Pekalongan	164,3	19,52	151,6	17,93	136,6	16,29	125,941	15,00	116,500	13,86
27	Pemalang	325,2	23,92	303,7	22,17	251,8	19,96	261,197	20,68	241,700	19,27
28	Tegal	220,7	15,78	195,5	13,98	182,5	13,11	161,116	11,54	149,100	10,75
29	Brebes	459,3	25,98	432,4	24,39	398,7	23,01	394,417	22,72	364,900	21,12

No.	Kabupaten/ Kota	Penduduk Miskin									
		2008 (Juli)		2009 (Juli)		2010 (Juli)		2011 (September)		2012 (September)	
		(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)
30	Kota Magelang	14,9	11,16	13,7	10,11	12,4	10,51	13,093	11,06	12,100	10,31
31	Kota Surakarta	83,4	16,13	78,0	14,99	69,8	13,96	64,498	12,90	59,700	12,01
32	Kota Salatiga	14,9	8,47	14,1	7,82	14,2	8,28	13,307	7,80	12,300	7,11
33	Kota Semarang	89,6	6,00	73,1	4,84	79,7	5,12	88,453	5,68	81,900	5,13
34	Kota Pekalongan	28,0	10,29	23,3	8,56	26,4	9,37	28,278	10,04	26,200	9,47
35	Kota Tegal	26,8	11,28	23,4	9,88	25,7	10,62	25,922	10,81	24,000	10,04
JAWA TENGAH		**6.122,6**	**18,99**	**5.655,4**	**17,48**	**5.217,2**	**16,11**	**5.255,962**	**16,21**	**4.863,4**	**14,98**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing–masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data Tahun 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,39 atau berada di atas rata-rata angka nasional sebesar 1,90. Dalam kurun waktu 2008 - 2012 perkembangan Indeks Kedalam Kemiskinan cenderung menurun dari sebesar 4,25 menjadi 2,39. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir cukup efektif. Selanjutnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota pada Tahun 2012, tertinggi adalah Kabupaten Wonosobo (3,91) dan terendah Kota Salatiga (0,77). Secara rinci perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
		2008 (Juli)	2009 (Juli)	2010 (Juli)	2011 (Sept)	2012 (Sept)
1	Cilacap	4,67	2,76	3,05	2,59	2,22
2	Banyumas	3,95	3,21	3,56	3,69	3,42
3	Purbalingga	5,40	4,60	4,00	3,11	3,72
4	Banjarnegara	5,75	3,42	3,34	3,15	3,39
5	Kebumen	7,05	4,87	3,68	3,94	3,35
6	Purworejo	4,17	2,57	2,67	2,82	2,78
7	Wonosobo	8,07	5,14	3,97	4,52	3,91
8	Magelang	5,01	1,99	2,05	2,05	2,09
9	Boyolali	3,64	2,36	2,34	2,15	2,14
10	Klaten	7,09	3,12	2,95	3,43	2,14
11	Sukoharjo	2,63	1,45	1,54	1,68	1,78
12	Wonogiri	6,03	2,87	3,02	3,09	1,76
13	Karanganyar	3,02	1,84	1,98	1,98	2,24
14	Sragen	3,50	3,16	2,85	2,89	2,38
15	Grobogan	4,49	2,50	2,48	2,62	2,55
16	Blora	5,12	2,38	2,38	2,35	2,19
17	Rembang	5,48	3,66	3,50	2,86	2,76
18	P a t i	6,01	2,22	2,43	2,07	1,72
19	Kudus	2,76	1,56	0,92	1,16	0,92

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
		2008 (Juli)	2009 (Juli)	2010 (Juli)	2011 (Sept)	2012 (Sept)
20	Jepara	1,99	1,14	1,12	1,30	0,94
21	Demak	3,86	3,68	3,75	3,12	2,75
22	Semarang	2,33	1,43	1,45	1,60	1,57
23	Temanggung	4,66	2,58	1,73	1,93	1,85
24	Kendal	4,02	2,88	3,48	2,21	1,59
25	Batang	5,41	2,66	2,29	2,07	1,89
26	Pekalongan	4,23	2,40	2,40	2,08	1,49
27	Pemalang	3,59	3,98	3,19	3,09	2,51
28	Tegal	2,70	2,44	1,78	1,89	1,14
29	Brebes	5,06	4,36	4,27	4,25	3,07
30	Kota Magelang	1,68	1,88	1,61	1,61	1,48
31	Kota Surakarta	2,71	2,67	2,19	1,89	1,33
32	Kota Salatiga	1,28	0,83	0,94	1,30	0,77
33	Kota Semarang	0,99	1,02	0,89	0,71	0,80
34	Kota Pekalongan	1,03	1,17	1,12	1,37	1,09
35	Kota Tegal	1,42	1,64	1,72	1,89	0,95
Jawa Tengah		**4,25**	**2,89**	**2,49**	**2,56**	**2,39**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ukuran ini memberikan informasi saling melengkapi pada kasus kemiskinan. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebesar 0,57 atau lebih tinggi dari rata-rata angka nasional sebesar 0,49, tertinggi adalah Kabupaten Wonosobo (1,04) dan terendah Kota Salatiga (0,13), selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
		2008 (Juli)	2009 (Juli)	2010 (Juli)	2011 (Sept)	2012 (Sept)
1	Cilacap	1,35	0,60	0,81	0,60	0,50
2	Banyumas	0,93	0,75	0,99	0,99	0,91
3	Purbalingga	1,49	1,27	1,08	0,67	0,96
4	Banjarnegara	1,72	0,85	0,92	0,74	0,94
5	Kebumen	2,05	1,34	0,92	0,96	0,75
6	Purworejo	1,21	0,59	0,65	0,74	0,65
7	Wonosobo	2,86	1,54	1,09	1,25	1,04
8	Magelang	1,69	0,41	0,46	0,44	0,48
9	Boyolali	1,01	0,59	0,71	0,49	0,51
10	Klaten	2,50	0,73	0,75	0,99	0,47
11	Sukoharjo	0,74	0,30	0,35	0,35	0,49
12	Wonogiri	2,06	0,65	0,92	0,89	0,33
13	Karanganyar	0,78	0,36	0,50	0,41	0,50
14	Sragen	0,85	0,76	0,66	0,73	0,55
15	Grobogan	1,23	0,55	0,52	0,63	0,61
16	Blora	1,61	0,51	0,61	0,51	0,47
17	Rembang	1,43	0,78	0,83	0,58	0,60
18	P a t i	2,08	0,54	0,68	0,47	0,35

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
		2008 (Juli)	2009 (Juli)	2010 (Juli)	2011 (Sept)	2012 (Sept)
19	Kudus	0,71	0,34	0,16	0,20	0,19
20	Jepara	0,46	0,25	0,22	0,25	0,18
21	Demak	0,88	1,05	1,14	0,75	0,68
22	Semarang	0,65	0,34	0,32	0,44	0,38
23	Temanggung	1,50	0,76	0,34	0,45	0,41
24	Kendal	1,23	0,77	1,30	0,59	0,30
25	Batang	1,93	0,67	0,55	0,50	0,43
26	Pekalongan	1,02	0,52	0,53	0,42	0,24
27	Pemalang	0,85	1,08	0,80	0,71	0,50
28	Tegal	0,68	0,67	0,35	0,46	0,23
29	Brebes	1,36	1,18	1,17	1,23	0,77
30	Kota Magelang	0,44	0,51	0,39	0,36	0,33
31	Kota Surakarta	0,75	0,78	0,53	0,46	0,28
32	Kota Salatiga	0,34	0,17	0,16	0,33	0,13
33	Kota Semarang	0,29	0,39	0,25	0,18	0,19
34	Kota Pekalongan	0,18	0,26	0,19	0,32	0,19
35	Kota Tegal	0,21	0,42	0,44	0,51	0,15
Jawa Tengah		**1,24**	**0,87**	**0,60**	**0,66**	**0,57**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012

b. Penduduk Miskin Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011

Berdasarkan data PPLS Tahun 2011, dari total rumah tangga (ruta) sebanyak 8.752.059 ruta, masuk dalam klasifikasi miskin sebanyak 4.244.206 ruta, dengan rincian sangat miskin 521.186 ruta, miskin 674.182 ruta, hampir miskin 1.155.102 ruta dan rentan miskin lainnya 1.893.736 ruta. Melalui pemetaan interval persentase rumah tangga miskin (sangat miskin dan miskin) dibandingkan total rumah tangga yang dilakukan Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 50 kecamatan (15 kabupaten) masuk kategori kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi, 234 kecamatan (27 kabupaten) kategori sedang dan 289 kecamatan (30 kabupaten/kota) kategori rendah.

2.2.8. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Penanganan tindak kriminal di Jawa Tengah masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang tertangani masih fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih belum idealnya rasio polisi terhadap jumlah penduduk, saat ini rasio polisi terhadap jumlah penduduk 1:1.131 sedangkan idealnya adalah 1 : 600. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi kamtramtibum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kejahatan			Angka Kriminalitas Yang Tertangani
			Lapor	Selesai	Rasio (%)	
1	2008	32.626.390	18.484	13.111	70.93	4,02
2	2009	32.864.563	17.391	12.850	73.89	3,91
3	2010	32.382.657	19.645	12.709	64.69	3,92
4	2011	32.643.612	21.675	13.913	64.19	4,26
5	2012	33.270.207	19.094	12.039	63.05	3,61

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengahdan POLDA Jawa Tengah, 2012.

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2008 sebesar 71,6, meningkat menjadi 73,36 pada Tahun 2012, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.14.

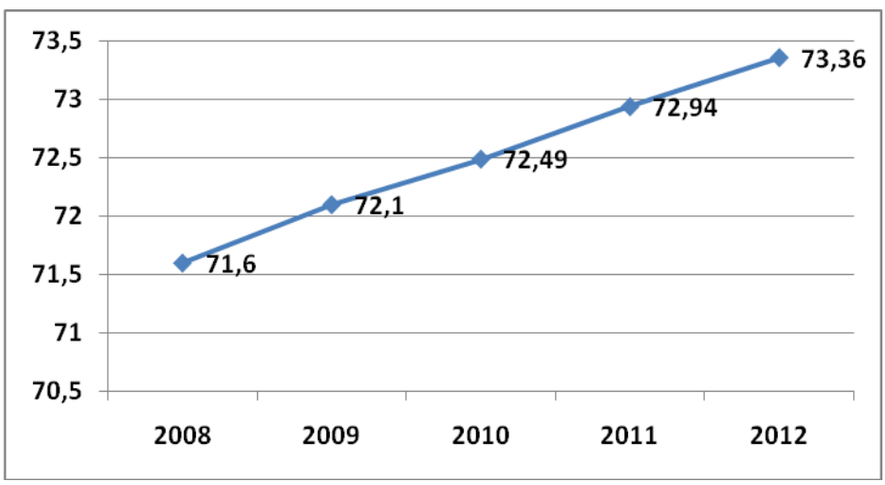

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.14.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar 73,36 di atas rata-rata IPM Nasional sebesar 73,29 dan apabila di bandingkan dengan Provinsi se Jawa berada pada posisi ke-3 (tiga) di bawah Provinsi DKI dan DIY, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.15.

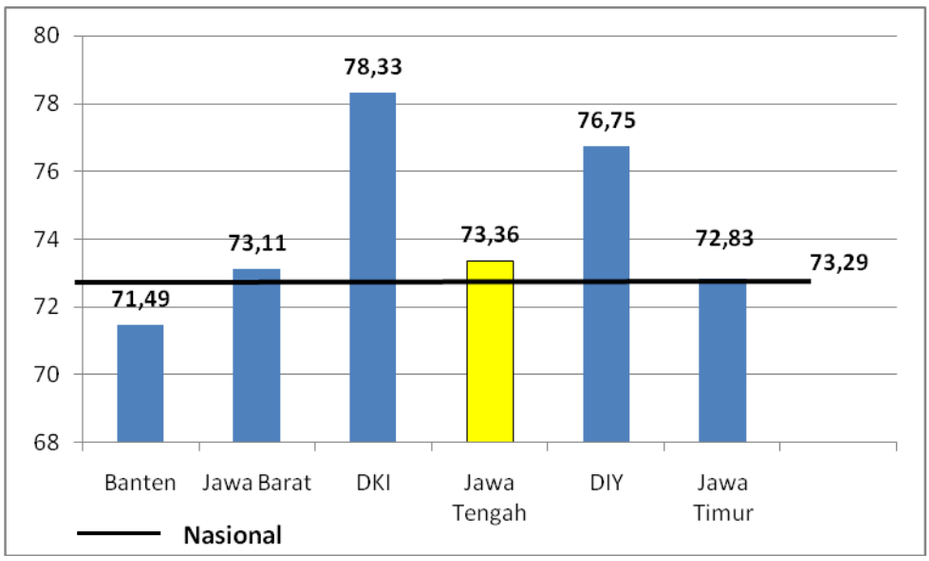

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2012

Apabila dilihat dari IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah, dapat dilihat bahwa beberapa kabupaten/kota memiliki IPM di atas IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Kabupaten/kota yang memiliki IPM tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta (78,60), sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Brebes (69,37). IPM kabupaten/kota masih sangat perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kualitas hidup penduduk di tiap kabupaten/kota khususnya dan mendukung pencapaian kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Beserta Komposit Pembentuknya Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (Persen)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp PPP)	IPM
1.	Cilacap	71,43	91,49	6,87	639,78	72,77
2.	Banyumas	69,83	94,24	7,79	641,78	73,33
3.	Purbalingga	70,68	93,52	7,23	638,41	72,97
4.	Banjarnegara	69,36	88,49	6,35	641,53	70,70
5.	Kebumen	69,43	91,54	6,93	641,78	71,86
6.	Purworejo	71,04	92,79	7,93	638,51	73,53
7.	Wonosobo	70,48	91,43	6,56	632,71	71,45
8.	Magelang	70,23	93,31	7,55	641,45	73,14
9.	Boyolali	70,49	87,97	7,43	634,86	71,50
10.	Klaten	71,84	89,93	8,31	649,49	74,46
11.	Sukoharjo	70,36	90,73	8,53	652,39	74,21
12.	Wonogiri	72,42	84,32	6,65	653,07	72,59
13.	Karanganyar	72,36	88,95	8,27	651,05	74,62
14.	Sragen	72,95	84,41	7,22	633,90	71,85
15.	Grobogan	70,05	90,94	6,83	638,68	71,77
16.	Blora	71,48	85,06	6,46	645,28	71,49
17.	Rembang	70,34	91,37	7,05	646,90	72,81
18.	Pati	72,95	87,61	7,01	652,22	73,81

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (Persen)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp PPP)	IPM
19.	Kudus	69,73	93,74	8,49	642,02	73,69
20.	Jepara	71,13	93,29	7,58	639,89	73,54
21.	Demak	71,95	92,54	7,62	635,62	73,52
22.	Semarang	72,60	94,20	8,07	640,67	74,98
23.	Temanggung	72,77	95,97	7,10	640,56	74,74
24.	Kendal	69,10	89,77	7,11	642,55	71,48
25.	Batang	70,57	89,93	6,73	634,28	71,41
26.	Pekalongan	69,56	92,11	6,80	646,96	72,37
27.	Pemalang	68,12	90,80	6,54	641,52	70,66
28.	Tegal	69,38	90,64	6,62	646,19	71,74
29.	Brebes	68,26	86,69	6,07	640,06	69,37
30.	Kota Magelang	70,34	97,52	10,36	655,08	77,26
31.	Kota Surakarta	72,35	96,73	10,49	658,92	78,60
32.	Kota Salatiga	71,25	96,55	9,98	653,16	77,13
33.	Kota Semarang	72,24	96,98	10,30	652,80	77,98
34.	Kota Pekalongan	70,63	95,94	8,72	647,14	75,25
35.	Kota Tegal	69,12	94,91	8,30	656,99	74,63
	Jawa Tengah	**71,71**	**90,45**	**7,39**	**643,53**	**73,36**

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2013.

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya.

Dalam kurun waktu Tahun 2008-2012, Usia Harapan Hidup di Jawa Tengah sebesar 71,10 tahun meningkat menjadi 71,71 tahun. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian angka provinsi lain di Pulau Jawa, UHH di Jawa Tengah menempati urutan ke-3 setelah DKI dan DIY. Meningkatnya Usia Harapan Hidup penduduk di Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 antara lain disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kesehatannya melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

Perkembangan UHH masyarakat Jawa Tengah dan provinsi lain se-Jawa serta Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.16 dan Tabel 2.29.

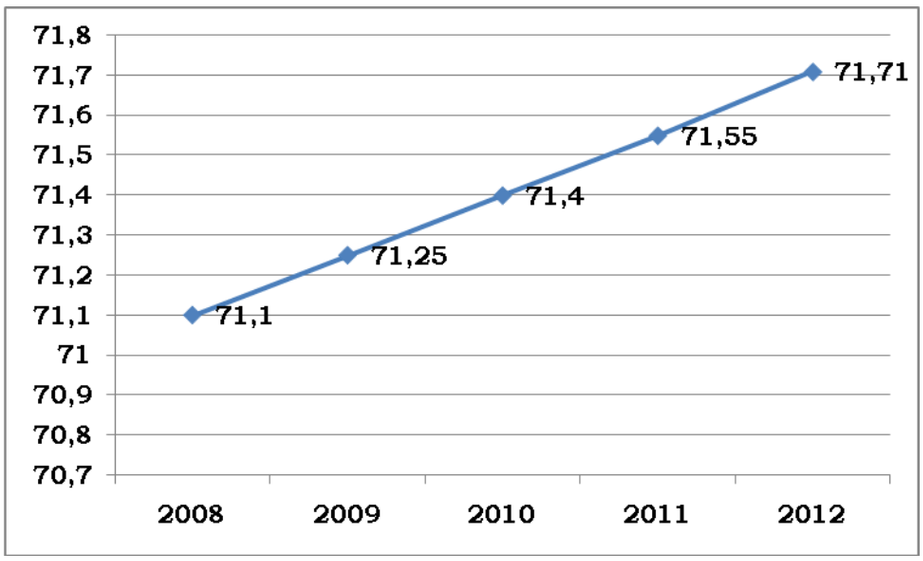

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.16.
Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012 (Tahun)

Tabel 2.29.
Usia Harapan Hidup
Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008-2012

No	Provinsi	Tahun (Tahun)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Banten	64,60	64,75	64,90	65,05	65,23
2	Jawa Barat	67,80	68,00	68,20	68,40	68,60
3	DKI Jakarta	72,90	73,05	73,20	73,35	73,49
4	Jawa Tengah	71,10	71,25	71,40	71,55	71,71
5	DIY	73,11	73,16	73,22	73,27	73,33
6	Jawa Timur	69,10	69,35	69,60	69,86	70,09
	Nasional	**69,00**	**69,21**	**69,43**	**69,65**	**69,87**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

2. Angka Melek Huruf

Perkembangan Angka Melek Huruf di Jawa Tengah penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat dari sebesar 89,24% (Tahun 2008) menjadi 90,45% (Tahun 2012). Kondisi ini menggambarkan semakin banyak penduduk usia tersebut yang mampu membaca dan menulis. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke-5 dan masih berada di bawah angka nasional sebesar 93,25.

Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah selama 2008 - 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.17.

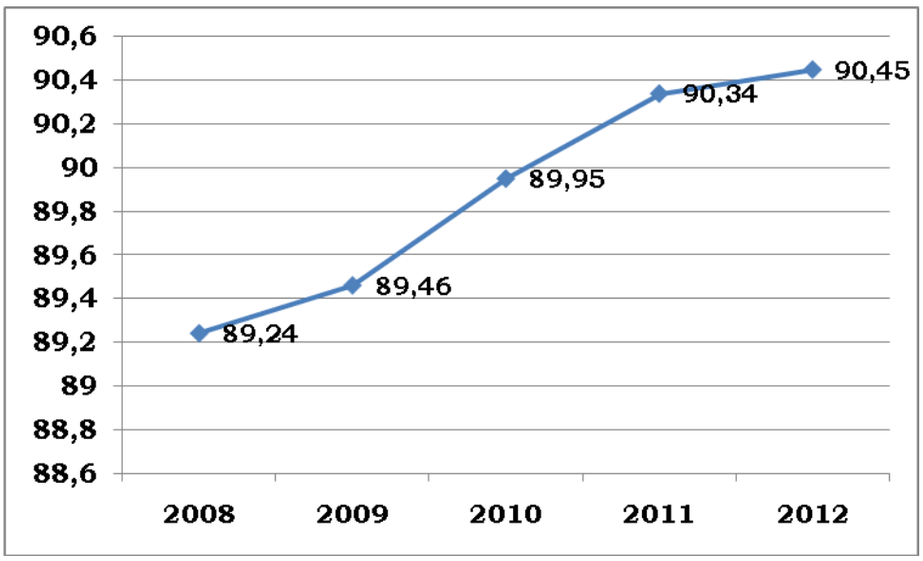

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Melek Huruf
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Sedangkan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada Tahun 2012, capaian tertinggi adalah Kota Magelang (97,52), dan terendah Kabupaten Wonogiri (84,32). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	90,10	90,28	90,28	91,48	91,49
2	Banyumas	93,92	93,98	93,98	94,06	94,24
3	Purbalingga	93,01	93,02	93,48	93,50	93,52
4	Banjarnegara	88,24	88,43	88,43	88,48	88,49
5	Kebumen	90,39	90,40	90,74	91,53	91,54
6	Purworejo	89,20	89,78	91,51	91,74	92,79
7	Wonosobo	88,91	89,27	90,47	91,16	91,43
8	Magelang	91,34	91,35	91,35	93,29	93,31
9	Boyolali	85,96	85,97	85,97	87,96	87,97
10	Klaten	89,28	89,70	89,9	89,92	89,93
11	Sukoharjo	90,36	90,38	90,69	90,72	90,73
12	Wonogiri	82,03	82,14	82,18	83,50	84,32
13	Karanganyar	84,76	84,96	86,91	88,90	88,95
14	Sragen	81,15	82,26	84,36	84,41	84,41
15	Grobogan	90,18	90,36	90,36	90,41	90,94
16	Blora	82,97	83,19	83,19	85,06	85,06
17	Rembang	88,79	89,43	91,17	91,36	91,37
18	Pati	86,28	86,38	86,42	87,59	87,61
19	Kudus	91,98	92,48	93,71	93,73	93,74
20	Jepara	92,92	93,09	93,09	93,15	93,29
21	Demak	90,82	90,95	91,36	92,53	92,54
22	Semarang	93,51	93,62	93,62	93,67	94,20

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
23	Temanggung	95,93	95,94	95,94	95,96	95,97
24	Kendal	88,93	88,96	89,15	89,31	89,77
25	Batang	87,62	87,74	88,09	89,90	89,93
26	Pekalongan	89,94	90,60	92,05	92,08	92,11
27	Pemalang	87,34	87,75	90,76	90,79	90,80
28	Tegal	89,09	89,21	89,26	89,47	90,64
29	Brebes	84,85	85,21	86,14	86,15	86,69
30	Kota Magelang	97,17	97,25	97,25	97,29	97,52
31	Kota Surakarta	96,66	96,67	96,68	96,71	96,73
32	Kota Salatiga	96,49	96,50	96,5	96,52	96,55
33	Kota Semarang	95,94	96,44	96,44	96,47	96,98
34	Kota Pekalongan	95,37	95,48	95,68	95,93	95,94
35	Kota Tegal	94,87	94,88	94,88	94,90	94,91
JAWA TENGAH		**89,24**	**89,46**	**89,95**	**90,34**	**90,45**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Dibandingkan dengan Provinsi se-Jawa, capaian Angka Melek Huruf penduduk berusia di atas 15 tahun ke atas Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan 5 setelah DKI, Banten, Jawa Barat dan DIY, dan berada di bawah angka nasional sebesar 93,25. Angka Melek Huruf di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Angka Melek Huruf
Di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008 - 2012

No	Provinsi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Banten	95,60	95,95	96,20	96,25	96,51
2	Jawa Barat	95,53	95,98	96,18	96,29	96,39
3	DKI Jakarta	98,76	98,94	99,13	99,15	99,21
4	Jawa Tengah	89,24	89,46	89,95	90,34	90,45
5	DIY	89,46	90,18	90,84	91,49	92,02
6	Jawa Timur	87,43	87,80	88,34	88,52	89,28
	Nasional	**92,19**	**92,58**	**92,91**	**92,99**	**93,25**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah meningkat dalam kurun waktu 2008 - 2012 yaitu dari 6,86 tahun menjadi 7,39 tahun. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin meningkat, baik pada jenjang pendidikan yang diikuti maupun pada besaran peserta pendidikannya.

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.18.

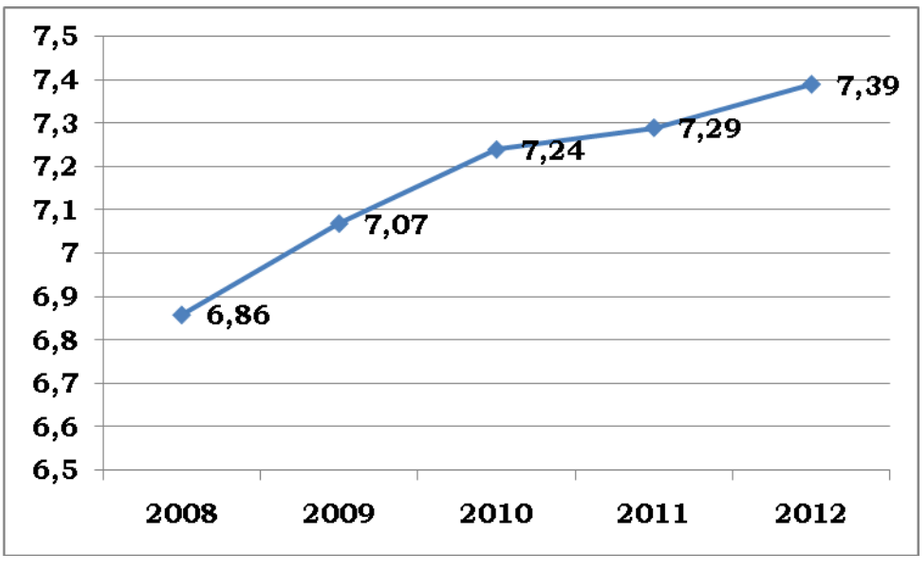

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.18.
Perkembangan Rata–Rata Lama Sekolah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada Tahun 2012, capaian tertinggi adalah Kota Surakarta (10,49 tahun), sedangkan terendah Kabupaten Brebes (6,07 tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	6,60	6,72	6,85	6,86	6,87
2	Banyumas	7,49	7,72	7,73	7,76	7,79
3	Purbalingga	6,46	6,81	7,18	7,21	7,23
4	Banjarnegara	5,98	6,20	6,33	6,34	6,35
5	Kebumen	6,65	6,84	6,87	6,92	6,93
6	Purworejo	7,30	7,70	7,75	7,84	7,93
7	Wonosobo	6,11	6,27	6,27	6,55	6,56
8	Magelang	7,10	7,26	7,26	7,33	7,55
9	Boyolali	7,10	7,29	7,37	7,42	7,43
10	Klaten	7,75	7,93	8,27	8,28	8,31
11	Sukoharjo	8,15	8,36	8,36	8,52	8,53
12	Wonogiri	6,10	6,29	6,32	6,35	6,65
13	Karanganyar	7,05	7,17	7,39	7,41	8,27
14	Sragen	6,50	6,88	6,99	7,02	7,22
15	Grobogan	6,60	6,76	6,76	6,81	6,83
16	Blora	6,02	6,25	6,25	6,45	6,46
17	Rembang	6,65	6,85	6,85	6,89	7,05
18	Pati	6,80	6,95	6,95	6,98	7,01
19	Kudus	7,80	8,11	8,11	8,12	8,49
20	Jepara	7,22	7,40	7,4	7,52	7,58
21	Demak	7,00	7,26	7,59	7,60	7,62
22	Semarang	7,15	7,40	7,75	7,87	8,07
23	Temanggung	6,70	6,86	7,01	7,09	7,10

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
24	Kendal	6,69	6,90	6,91	6,93	7,11
25	Batang	6,02	6,34	6,71	6,72	6,73
26	Pekalongan	6,50	6,66	6,66	6,70	6,80
27	Pemalang	6,10	6,49	6,49	6,51	6,54
28	Tegal	6,24	6,42	6,56	6,60	6,62
29	Brebes	5,50	5,62	5,7	5,72	6,07
30	Kota Magelang	10,00	10,10	10,21	10,22	10,36
31	Kota Surakarta	10,15	10,32	10,32	10,34	10,49
32	Kota Salatiga	9,50	9,75	9,94	9,97	9,98
33	Kota Semarang	9,80	9,98	9,98	10,11	10,30
34	Kota Pekalongan	8,52	8,66	8,66	8,69	8,72
35	Kota Tegal	8,06	8,25	8,25	8,27	8,30
JAWA TENGAH		**6,86**	**7,07**	**7,24**	**7,29**	**7,39**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk berusia di atas 15 tahun ke atas Provinsi Jawa Tengah perlu dipacu sehingga dapat menyamai atau bahkan lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi di pulau Jawa. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2008 - 2012

No	Provinsi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Banten	8,10	8,15	8,32	8,41	8,61
2	Jawa Barat	7,50	7,72	8,02	8,06	8,08
3	DKI Jakarta	10,80	10,90	10,93	10,95	10,98
4	Jawa Tengah	6,86	7,07	7,24	7,29	7,39
5	DIY	8,71	8,78	9,07	9,20	9,21
6	Jawa Timur	6,95	7,20	7,24	7,34	7,45
	Nasional	**7,52**	**7,72**	**7,92**	**7,94**	**8,08**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

4. Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)

Pengeluaran perkapita (disesuaikan) di Provinsi Jawa Tengah meningkat dalam kurun waktu 2008 - 2012 yaitu dari Rp.633,59 ribu (Tahun 2008) menjadi Rp.641,04 ribu (Tahun 2012). Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah.

Perkembangan pengeluaran per kapita (disesuaikan) Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	631,17	633,50	634,50	636,62	639,78
2	Banyumas	626,94	630,75	634,52	638,27	641,78
3	Purbalingga	627,57	630,44	631,04	634,44	638,41
4	Banjarnegara	628,33	632,76	634,04	638,79	641,53
5	Kebumen	627,57	632,43	635,81	639,16	641,78
6	Purworejo	633,27	633,61	634,97	636,29	638,51
7	Wonosobo	626,77	629,26	629,76	630,41	632,71
8	Magelang	630,88	633,26	636,96	638,16	641,45
9	Boyolali	626,14	629,49	632,00	632,19	634,86
10	Klaten	641,86	643,92	644,21	646,39	649,49
11	Sukoharjo	643,38	644,60	646,94	649,96	652,39
12	Wonogiri	639,55	644,24	647,21	649,51	653,07
13	Karanganyar	645,79	647,87	647,94	649,70	651,05
14	Sragen	626,26	627,15	628,04	630,01	633,90
15	Grobogan	627,60	629,42	631,25	635,15	638,68
16	Blora	633,90	637,29	642,36	642,83	645,25
17	Rembang	639,29	640,28	641,28	644,43	646,90
18	Pati	639,68	643,48	646,15	648,77	652,22
19	Kudus	633,57	635,90	636,90	639,98	642,02
20	Jepara	627,68	631,04	632,48	636,45	639,89
21	Demak	630,13	631,72	632,22	632,87	635,62
22	Semarang	632,18	633,14	634,97	637,71	640,67
23	Temanggung	630,82	633,87	635,01	638,07	640,56
24	Kendal	631,64	635,70	637,09	639,78	642,55
25	Batang	626,02	628,82	630,11	631,55	634,28
26	Pekalongan	637,47	638,79	639,95	643,53	646,96
27	Pemalang	632,39	634,26	635,26	637,71	641,52
28	Tegal	634,24	637,09	639,95	643,48	646,19
29	Brebes	629,64	633,23	634,36	637,29	640,09
30	Kota Magelang	645,91	648,06	649,02	651,91	655,08
31	Kota Surakarta	646,45	648,23	652,43	655,77	658,92
32	Kota Salatiga	643,96	644,65	647,54	650,39	653,16
33	Kota Semarang	643,55	644,63	646,94	649,21	652,80
34	Kota Pekalongan	632,38	636,28	640,55	644,01	647,14
35	Kota Tegal	646,30	648,66	650,72	653,11	656,99
JAWA TENGAH		**633,59**	**636,39**	**637,27**	**640,41**	**643,53**

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2013.*

Perkembangan pengeluaran per kapita (disesuaikan) Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008 - 2012

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Provinsi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Banten	625,52	627,63	629,70	633,64	636,73
2	Jawa Barat	626,81	628,71	632,22	635,80	638,90
3	DKI Jakarta	625,70	627,46	628,67	632,17	635,29
4	Jawa Tengah	633,59	636,39	637,27	640,41	643,53
5	DIY	643,25	644,67	646,56	650,16	653,78
6	Jawa Timur	636,61	640,12	643,60	647,46	651,04
	Nasional	**628,33**	**631,46**	**633,64**	**638,05**	**641,04**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

2.2.10. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada Tahun 2008 - 2012, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan SMA/SMK/MA meningkat. Untuk APK SMP/MTs meningkat dari 92,62% (Tahun 2008) menjadi 100,50% (Tahun 2012). APK SMA/SMK/MA masih relatif rendah yaitu sebesar 67% (Tahun 2012), meskipun mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2008 sebesar 53,51%. Relatif rendahnya APK SMA/SMK/MA disebabkan beberapa hal antara lain biaya pendidikan relatif tinggi, letak geografis SMA/SMK/MA relatif jauh dari pemukiman penduduk terdekat dan kurangnya sarana dan prasarana terutama untuk SMK. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2008 – 2012

No	Tahun	SD / MI (%)		SMP / MTs (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	2008	106,79	115,51	92,62	92,32	53,51	60,51
2	2009	107,31	116,56	96,93	96,18	54,87	64,28
3	2010	108,00	116,77	99,40	98,11	64,62	69,60
4	2011	114,93	115,33	99,72	98,20	64,93	70,53
5	2012	109,06	115,43	100,50	99,47	67,00	76,40

Sumber : Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada Tahun 2012 terlihat capaian tertinggi adalah Kota Surakarta (116,50), dan terendah Kabupaten Grobogan (94,31). Sedangkan APK SMA/MA Tahun 2012, capaian tertinggi adalah Kota Magelang (154,62), dan terendah adalah Kabupaten Brebes (46,85). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011			2012		
		SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA
1	Cilacap	117,12	97,28	52,23	112.42	96.16	56.23	111,79	100.70	75.99
2	Banyumas	116,60	99,20	77,40	112.94	99.77	70.57	112,91	102.01	61.31
3	Purbalingga	115,10	94,78	46,58	110.06	97.88	47.42	113,50	100.63	71.73
4	Banjarnegara	116,11	89,00	42,61	113.74	90.72	46.27	106,03	94.54	75.90
5	Kebumen	119,63	102,45	69,17	109.26	101.84	62.04	108,78	104.36	65.97
6	Purworejo	119,97	107,21	93,50	115.25	109.76	97.90	104,93	103.73	89.21
7	Wonosobo	120,02	83,96	39,07	113.71	99.82	41.92	104,04	104.47	65.93
8	Magelang	122,48	90,90	48,07	116.17	92.04	39.87	102,74	94.56	65.10
9	Boyolali	122,06	102,15	66,09	118.26	101.29	62.15	102,16	100.74	73.18
10	Klaten	121,86	102,3	95,95	120.12	101.06	85.58	117,51	100.85	80.25
11	Sukoharjo	117,32	112,15	77,47	116.38	114.18	87.95	124,97	102.44	75.48
12	Wonogiri	116,35	101,56	69,95	112.75	100.51	65.37	102,71	101.20	77.86
13	Karanganyar	119,93	102,90	67,99	120.07	102.10	64.01	111,71	101.90	76.39
14	Sragen	120,58	109,36	74,96	115.40	107.82	74.08	108,38	100.26	82.48
15	Grobogan	118,18	89,21	43,23	113.18	92.99	50.08	105,10	94.31	43.45
16	Blora	120,18	99,83	58,98	115.54	98.87	52.30	104,30	99.83	70.99
17	Rembang	121,39	101,96	67,50	119.99	101.39	71.45	106,71	100.85	57.74
18	Pati	120,36	103,20	73,63	116.04	102.99	73.27	117,27	104.34	50.98
19	Kudus	107,40	103,81	77,73	102.35	103.48	80.67	106,98	98.00	85.62
20	Jepara	119,40	99,30	57,85	114.12	99.18	65.00	109,95	101.07	73.15
21	Demak	116	100,73	50,24	111.52	99.50	59.56	101,34	99.34	57.69
22	Semarang	119,83	105,59	56,23	118.19	107.95	56.86	115,31	99.38	59.85
23	Temanggung	121,45	101,11	68,07	118.29	99.88	67.34	106,09	102.73	50.52
24	Kendal	119,96	101,33	63,78	115.77	103.92	71.10	101,48	101.59	56.50
25	Batang	120,25	99,07	47,08	114.66	99.72	51.14	108,32	99.16	48.49
26	Pekalongan	119,65	97,09	44,16	114.25	100.43	47.55	109,03	100.33	62.34
27	Pemalang	120,69	94,74	53,20	115.60	95.52	58.16	117,35	101.27	54.82
28	Tegal	120,71	96,08	51,62	117.84	97.86	53.43	100,65	98.68	60.90
29	Brebes	120,75	94,67	50,09	115.02	94.08	54.74	106,45	94.81	46,85
30	Kota Magelang	119,61	106,17	80,76	118.35	110.61	75.06	130,28	111.53	154.62
31	Kota Surakarta	119,88	119,31	101,53	121.93	117.45	102.07	148,54	116.50	136.60
32	Kota Salatiga	118,81	113,50	87,34	122.83	98.26	74.44	114,07	108.48	145.41
33	Kota Semarang	119,23	101,73	102,61	120.24	91.66	104.86	106,11	100.52	101.27
34	Kota Pekalongan	119,54	101,75	78,16	117.76	100.68	74.01	116,04	106.09	93.14
35	Kota Tegal	117,81	115,49	77,33	112.13	117.46	63.34	110,93	103.41	106.23
Jawa Tengah		**108**	**99,40**	**64.62**	**114.93**	**99.72**	**64.93**	**109,06**	**100.50**	**67.00**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.2.11. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. APM pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA capaiannya masih berada di bawah 100%. Periode 2008 - 2012, capaian APM mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali APM SD/MI mengalami penurunan dari 97,08% (Tahun 2010) menjadi 96,04% (Tahun 2011), namun meningkat kembali pada Tahun 2012 menjadi 98,30%. Capaian APM SD/MI tersebut perlu ditingkatkan untuk mencapai target MDGs Tahun 2015 sebesar 100%. Untuk capaian APM SMP/MTs meningkat dari 71,50% pada Tahun 2008 menjadi 78,92 pada Tahun 2012. Capaian APM SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari sebesar 45,78% (Tahun 2008) menjadi 53% (Tahun 2012). APM SMA/SMK/MA tersebut masih rendah sehingga menjadi perhatian untuk peningkatannya guna kesinambungan pelaksanaan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun menuju Wajib Belajar 12 Tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
		Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	2008	90,99	94,90	71,50	71,60	45,78	49,94
2	2009	95,82	95,14	75,29	73,62	49,19	45,86
3	2010	97,08	95,23	76,87	74,52	50,12	55,73
4	2011	96,04	95,41	78,33	75,64	51,46	56,52
5	2012	98,30	95,55	78,92	77,71	53,00	57,74

Sumber : Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada Tahun 2012, terlihat capaian tertinggi adalah Kota Magelang (104,55), dan terendah Kabupaten Batang (95,13). Sedangkan APM SMP/MTs di Jawa Tengah pada Tahun 2012, terlihat capaian tertinggi adalah Kota Magelang (93,87), dan terendah Kabupaten Grobogan (65,17). Dan APM SMA/MA di Jawa Tengah pada Tahun 2012, capaian tertinggi adalah Kota Magelang (124,47), dan terendah adalah Kabupaten Brebes (32,89). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012

No	Kabupaten/ Kota	2010			2011			2012		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1	Cilacap	95,53	73,68	39,25	93.51	75.96	42.74	98.60	80.30	59.77
2	Banyumas	95,12	75,09	58,26	93.88	78.82	54.60	98.61	84.95	49.81
3	Purbalingga	93,89	71,01	35,97	91.97	76.34	38.17	98.21	82.96	56.75
4	Banjarnegara	94,72	67,25	33,18	94.52	70.76	37.05	97.73	79.19	67.65
5	Kebumen	97,59	79,22	50,46	98.81	80.04	48.40	98.65	84.20	48.80
6	Purworejo	97,86	81,32	70,22	95.92	85.62	79.77	98.70	81.30	70.61
7	Wonosobo	97,90	64,49	30,76	94.52	77.85	33.95	98.84	82.06	51.57
8	Magelang	99,91	69,37	36,35	99.87	71.79	32.33	96.23	69.45	50.58
9	Boyolali	99,56	78,19	51,44	98.14	80.02	53.10	98.13	81.25	55.07
10	Klaten	99,40	77,79	70,64	99.88	79.18	71.40	99.57	86.92	62.52
11	Sukoharjo	95,70	85,39	60,24	96.65	89.06	72.54	98.90	86.63	58.29
12	Wonogiri	94,91	76,88	53,20	95.06	78.40	53.30	98.13	86.07	51.43
13	Karanganyar	97,83	77,18	52,03	99.80	79.64	54.00	97.11	87.39	60.26
14	Sragen	98,36	83,79	56,28	96.60	84.10	60.52	98.52	83.57	63.26
15	Grobogan	96,40	68,12	33,11	94.24	72.53	39.69	96.70	65.17	35.16
16	Blora	98,04	75,99	45,05	96.15	77.12	41.51	98.09	74.79	56.06
17	Rembang	99,02	77,89	52,93	98.41	79.08	57.49	96.19	79.07	45.59
18	Pati	98,18	79,87	58,56	96.37	80.33	55.41	98.78	80.41	36.96
19	Kudus	87,60	80,19	59,98	87.21	81.75	59.98	95.83	79.01	78.42
20	Jepara	97,40	77,29	39,65	95.16	77.36	47.63	98.38	71.49	56.05
21	Demak	94,63	79,16	43,89	93.13	79.60	45.10	97.83	73.92	46.07
22	Semarang	97,75	79,28	42,56	98.99	83.39	45.68	97.41	76.37	46.85
23	Temanggung	99,06	76,56	52,60	98.26	77.80	52.42	98.52	78.14	41.45
24	Kendal	97,86	77,17	48,95	96.24	82.10	58.06	97.82	79.32	44.58

No	Kabupaten/ Kota	2010			2011			2012		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
25	Batang	98,09	74,77	36,24	95.30	78.78	41.43	95.13	80.77	41.46
26	Pekalongan	97,60	74,19	33,85	94.87	78.14	36.95	97.76	75.77	52.40
27	Pemalang	98,45	71,80	41,29	96.24	75.46	47.83	98.88	79.48	46.00
28	Tegal	98,46	73,33	37,20	97.97	77.31	42.98	96.90	68.99	53.66
29	Brebes	98,50	73,02	39,24	95.59	74.32	41.22	98.21	72.48	32,89
30	Kota Magelang	97,57	81,04	61,39	98.65	87.37	59.35	104.55	93.87	124.47
31	KotaSurakarta	97,79	90,60	78,51	99.97	92.79	80.67	103.82	91.49	104.91
32	Kota Salatiga	96,91	85,10	66,80	99.51	77.63	61.89	102.43	87.92	115.73
33	KotaSemarang	97,26	77,65	79,77	97.74	73.33	84.08	101.55	80.79	74.52
34	Kota Pekalongan	97,51	77,64	59,33	98.74	78.53	49.90	101.06	87.97	78.37
35	Kota Tegal	96,10	87,60	57,80	96.90	92.79	51.38	100.46	84.79	78.57
Jawa Tengah		**97,08**	**76,87**	**50,12**	**96.04**	**78.33**	**51.46**	**98,30**	**78.92**	**53.00**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.2.12. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2008 - 2011 jumlah penduduk yang berpendidikan/lulusan SD/MI relatif tinggi, walaupun kecenderungannya menurun. Pada Tahun 2008-2011, APT jenjang SD/MI dari 56,12% menjadi 54,00%. Jenjang SMP/MTs, meningkat dari 16,76% menjadi 18,02%,serta jenjang SMA/SMK/MA dari 19,76% meningkat menjadi 22,06%. Tantangan ke depan adalah upaya meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15 -64 Tahun)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011

Tahun	Jumlah Penduduk AK	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Jumlah
		SD	APT	SLTP	APT	SLTA +	APT	
2008	16.690.966	9.367.374	56,12	2.798.160	16,76	3.298.124	19,76	15.463.731
2009	17.087.649	9.457.640	55,35	2.893.843	16,94	3.483.899	20,39	15.835.454
2010	16.856.330	9.173.558	54,42	2.993.593	17,76	3.642.296	21,61	15.809.519
2011	16.918.797	9.135.874	54,00	3.048.208	18,02	3.732.053	22,06	15.916.207

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)

Tingginya persentase penduduk tamat SD/MI disebabkan oleh banyakya penduduk yang masih berpendidikan SD tidak mengikuti ujian persamaan, belum optimalnya pelaksanaan ujian persamaan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh ujian persamaan SMP dan SMA.

2.2.13. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam

masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Kecenderungan angka kematian ibu dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari 114,42 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2008 menjadi 116,34 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2012. Apabila dibandingkan angka nasional (SDKI Tahun 2012) berada di bawah angka nasional sebesar 359/100.000 penduduk.

Penyebab tertinggi kematian ibu antara lain hipertensi, pendarahan, masih rendahnya deteksi dini kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat dan masih kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam rujukan persalinan pada kehamilan risiko tinggi. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat khususnya status kesehatan ibu masih perlu ditingkatkan terutama di wilayah-wilayah dengan kasus kematian ibu tinggi, antara lain di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Cilacap, Grobogan, Banyumas, Pekalongan dan Batang.

Kondisi AKI Provinsi Jawa Tengah kurun waktu Tahun 2008 - 2012 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.19.

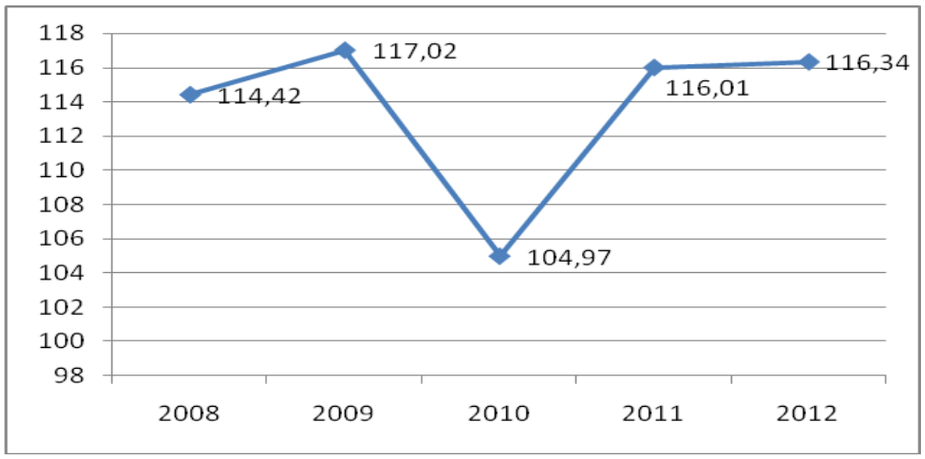

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.19.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Kasus kematian ibu dikabupaten/kota kurun waktu Tahun 2008 - 2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Cilacap	37	35	34	35	34
2	Banyumas	27	41	35	35	32
3	Purbalingga	21	20	15	15	21
4	Banjarnegara	22	20	10	12	23
5	Kebumen	17	15	14	9	11
6	Purworejo	17	12	13	10	20
7	Wonosobo	18	16	12	15	18
8	Magelang	12	25	22	22	13
9	Boyolali	20	24	18	18	15
10	Klaten	24	19	11	10	19

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
11	Sukoharjo	11	11	21	13	9
12	Wonogiri	16	14	12	10	13
13	Karanganyar	14	8	16	13	17
14	Sragen	11	9	8	18	19
15	Grobogan	20	46	18	25	34
16	Blora	26	22	12	22	15
17	Rembang	11	14	9	11	13
18	Pati	18	12	21	24	22
19	Kudus	12	14	15	16	15
20	Jepara	21	26	23	24	21
21	Demak	21	32	21	26	17
22	Semarang	15	19	15	21	11
23	Temanggung	15	6	14	13	11
24	Kendal	23	21	24	27	22
25	Batang	24	16	20	23	25
26	Pekalongan	28	19	26	17	31
27	Pemalang	25	48	48	45	35
28	Tegal	24	14	22	51	39
29	Brebes	57	47	36	34	51
30	Kota Magelang	3	1	3	1	3
31	Kota Surakarta	5	16	9	4	6
32	Kota Salatiga	2	2	3	6	2
33	Kota Semarang	27	22	19	32	22
34	Kota Pekalongan	6	10	5	9	5
35	Kota Tegal	3	2	7	9	11

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.2.14. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 Kelahiran Hidup (KH), sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.20.

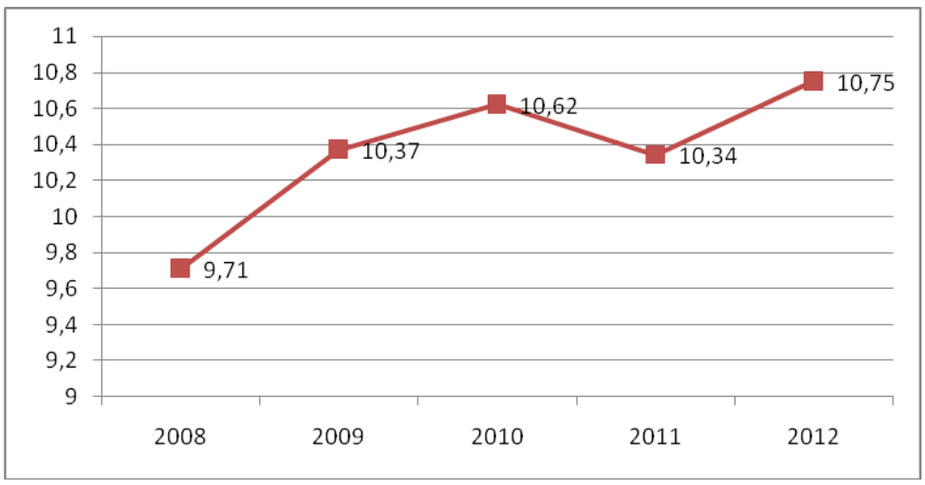

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.20
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Capaian AKB dalam kurun waktu lima tahun meningkat dari 9,71 per 1.000 KH pada Tahun 2008 menjadi 10,75 per 1.000 KH pada Tahun 2012.

Namun demikian AKB Provinsi lebih baik dibandingkan angka nasional sebesar 32 per 1.000 KH (Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012).

Penyebab kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyebab kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah serta penyakit *konginetal* dan penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun, antara lain karena masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi dan balita.

Kasus kematian bayi kabupaten/kota kurun waktu Tahun 2008-2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Cilacap	383	314	285	275	351
2	Banyumas	230	225	195	279	266
3	Purbalingga	128	168	171	168	182
4	Banjarnegara	291	319	252	255	297
5	Kebumen	142	191	231	187	223
6	Purworejo	88	115	86	152	148
7	Wonosobo	224	219	186	176	181
8	Magelang	141	131	150	142	134
9	Boyolali	203	142	164	190	171
10	Klaten	185	266	283	172	190
11	Sukoharjo	48	141	138	128	135
12	Wonogiri	173	138	169	134	84
13	Karanganyar	110	106	125	121	117
14	Sragen	139	138	123	137	146
15	Grobogan	228	258	267	194	240
16	Blora	156	147	156	169	192
17	Rembang	161	154	214	198	150
18	Pati	151	111	186	178	202
19	Kudus	77	91	97	102	109
20	Jepara	176	177	178	211	216
21	Demak	122	102	115	142	119
22	Semarang	176	203	171	191	186
23	Temanggung	119	141	193	209	149
24	Kendal	85	106	123	191	160
25	Batang	210	198	213	217	174
26	Pekalongan	107	141	184	138	185
27	Pemalang	207	248	233	334	264
28	Tegal	267	178	154	196	221
29	Brebes	232	437	312	293	508
30	Kota Magelang	10	10	13	16	31
31	Kota Surakarta	37	59	66	37	55
32	Kota Salatiga	18	26	29	21	20
33	Kota Semarang	204	478	337	314	293
34	Kota Pekalongan	52	34	58	57	68
35	Kota Tegal	11	26	15	30	68

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.2.15. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2008 - 2012 kurang baik, dikarenakan meningkat dari 10,25 per 1.000 KH (Tahun 2008) menjadi 11,85 per 1.000 KH (Tahun 2012), namun demikian masih lebih baik bila dibandingkan dengan angka nasional sebesar 40 per 1000 KH (Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012).

Faktor penyebab kematian balita antara lain infeksi, namun tingginya AKABA lebih banyak disebabkan oleh tingginya AKB. Perkembangan Angka Kematian Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.21.

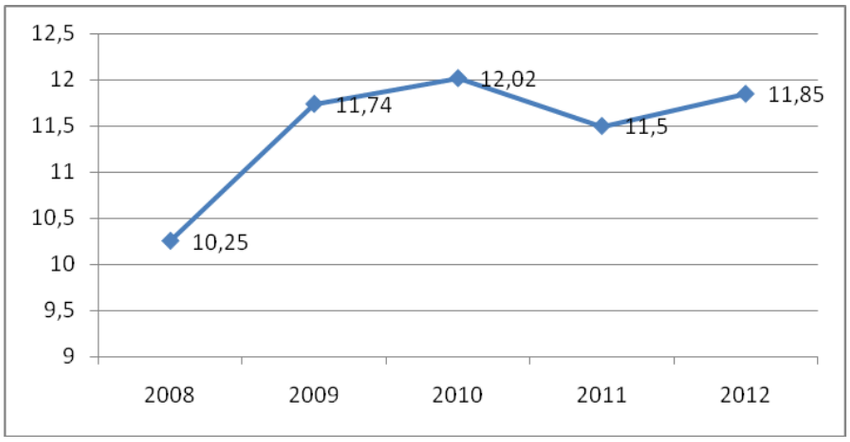

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.21.
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Kasus kematian balita kabupaten/kota kurun waktu Tahun 2008 - 2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Kasus Kematian Balita (AKABA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Cilacap	426	369	369	299	397
2	Banyumas	239	241	225	310	298
3	Purbalingga	167	183	192	187	193
4	Banjarnegara	326	350	284	282	319
5	Kebumen	158	205	243	205	235
6	Purworejo	100	145	100	165	172
7	Wonosobo	238	235	197	182	194
8	Magelang	146	141	175	159	151
9	Boyolali	214	160	185	215	181
10	Klaten	195	286	302	194	205
11	Sukoharjo	52	169	157	146	150
12	Wonogiri	197	156	189	157	93
13	Karanganyar	114	121	141	144	123

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
14	Sragen	147	162	146	161	163
15	Grobogan	237	281	278	208	263
16	Blora	163	154	173	185	216
17	Rembang	181	183	238	214	180
18	Pati	168	121	204	190	222
19	Kudus	84	97	119	113	117
20	Jepara	198	211	237	235	229
21	Demak	135	115	131	174	140
22	Semarang	182	223	192	207	204
23	Temanggung	152	154	210	225	158
24	Kendal	92	112	147	212	168
25	Batang	229	230	229	238	195
26	Pekalongan	112	147	238	156	204
27	Pemalang	223	261	239	368	278
28	Tegal	275	231	177	217	243
29	Brebes	246	490	329	311	563
30	Kota Magelang	11	11	17	18	33
31	Kota Surakarta	44	67	70	42	62
32	Kota Salatiga	18	27	31	22	23
33	Kota Semarang	229	604	427	384	337
34	Kota Pekalongan	62	52	75	64	84
35	Kota Tegal	17	28	19	32	80

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.2.16. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 mengalami penurunan. Prevalensi balita gizi buruk terendah pada Tahun 2012 sebesar 0,04% (1.131 Balita) dan tertinggi Tahun 2010 sebesar 0,13% (3.429 balita). Prevalensi Balita Gizi Buruk di Jawa Tengah selama Tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012

No	Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase (%)
1	2008	3.407	2.615.489	0,13
2	2009	3.160	2.615.489	0,12
3	2010	3.429	2.624.266	0,13
4	2011	3.187	2.501.219	0,13
5	2012	1.131	2.596.217	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk sejalan dengan menurunnya jumlah kasus gizi buruk yaitu dari 3.407 balita pada Tahun 2008 menjadi 1.131 Balita pada Tahun 2012. Penurunan tersebut terjadi karena berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk.

Namun demikian status gizi balita bersifat labil, karena dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta misalnya diare, cacingan, demam berdarah, *thypus* dan lain-lain. Oleh sebab itu masih diperlukan upaya

peningkatan status gizi bayi dan balita. Kabupaten dengan kasus balita gizi buruk tinggi yaitu Blora, Cilacap, Tegal, Brebes dan Purbalingga.

Prevalensi balita gizi buruk kabupaten/kota kurun waktu Tahun 2008-2012 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Prevalensi Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	0,01	0,00	0,22	0,34	0,07
2	Banyumas	0,02	0,01	0,22	0,13	0,03
3	Purbalingga	0,20	0,20	0,19	0,07	0,11
4	Banjarnegara	0,14	0,12	0,23	0,20	0,03
5	Kebumen	0,63	0,29	0,29	0,17	0,02
6	Purworejo	0,59	0,51	0,37	0,38	0,07
7	Wonosobo	0,42	0,42	0,06	0,12	0,03
8	Magelang	0,21	0,23	0,04	0,03	0,01
9	Boyolali	0,10	0,10	0,01	0,03	0,04
10	Klaten	0,08	0,08	0,03	0,06	0,03
11	Sukoharjo	0,04	0,02	0,04	0,05	0,02
12	Wonogiri	0,45	0,45	0,06	0,09	0,10
13	Karanganyar	0,40	0,40	0,00	0,01	0,02
14	Sragen	0,01	0,01	0,00	0,11	0,01
15	Grobogan	0,03	0,03	0,06	0,02	0,02
16	Blora	0,35	0,37	0,50	0,22	0,17
17	Rembang	0,24	0,35	0,27	0,14	0,07
18	Pati	0,06	0,06	0,25	0,27	0,06
19	Kudus	0,01	0,02	0,03	0,15	0,01
20	Jepara	0,08	0,09	0,18	0,17	0,05
21	Demak	0,11	0,11	0,05	0,07	0,02
22	Semarang	0,02	0,04	0,17	0,19	0,03
23	Temanggung	0,03	0,04	0,03	0,07	0,05
24	Kendal	0,05	0,06	0,23	0,19	0,03
25	Batang	0,00	0,00	0,11	0,07	0,02
26	Pekalongan	0,07	0,07	0,22	0,30	0,09
27	Pemalang	0,08	0,08	0,00	0,01	0,02
28	Tegal	0,05	0,03	0,08	0,05	0,07
29	Brebes	0,05	0,09	0,19	0,14	0,05
30	Kota Magelang	0,22	0,19	0,03	0,02	0,07
31	Kota Surakarta	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
32	Kota Salatiga	0,12	0,13	0,04	0,11	0,02
33	Kota Semarang	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03
34	Kota Pekalongan	0,02	0,04	0,12	0,09	0,03
35	Kota Tegal	0,07	0,05	0,26	0,45	0,06
	JAWA TENGAH	0,13	0,12	0,13	0,13	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.2.17. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Implikasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) berpengaruh terhadap capaian IPG dan IDG. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, terutama pada indikator pembentuk UHH, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja. IPG Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2008 sebesar 64,66 meningkat menjadi 66,80 pada Tahun 2012. Peningkatan IPG Tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.22.

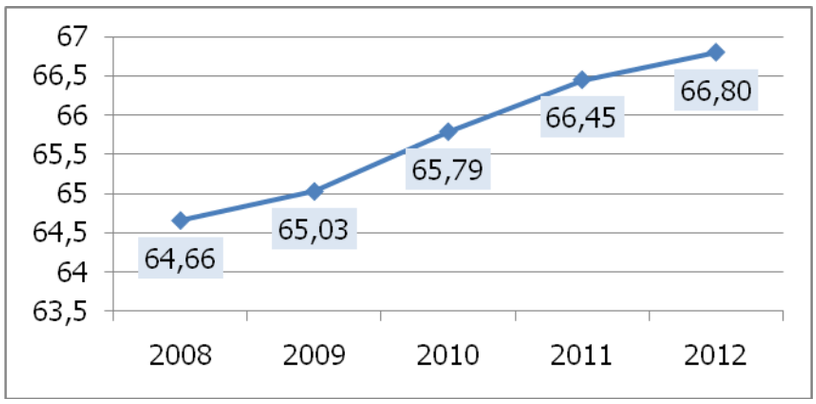

Sumber : Badan Pusat Statistikdan Kementerian PP dan PA RI, 2013

Gambar 2.22.
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Dari empat indikator pembentuk IPG, perempuan hanya unggul pada UHH, sedangkan 3 indikator lainnya lebih rendah dari laki-laki. Pencapaian masing-masing unsur pembentuk IPG Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.23.

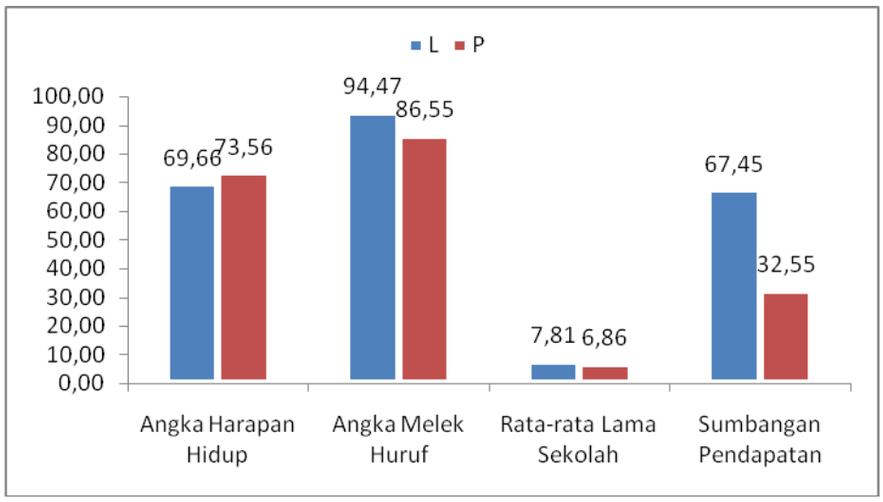

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA, 2013

Gambar 2.23.
Capaian Unsur Pembentuk IPG Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 masih lebih baik dibandingkan Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten, namun masih di bawah Provinsi DKI, DIY, dan Nasional. Posisi IPG Jawa Tengah menempati peringkat ke-11 dari 33 provinsi di Indonesia. Perbandingan capaian IPG Jawa Tengah dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional
Tahun 2008 - 2012

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Banten	61,49	61,89	62,88	63,35	63,93
2	Jawa Barat	61,81	61,84	62,38	63,25	63,68
3	DKI Jakarta	72,70	73,00	73,35	74,01	74,66
4	**Jawa Tengah**	**64,66**	**65,03**	**65,79**	**66,45**	**66,80**
5	DIY	71,50	72,24	72,51	73,07	74,11
6	Jawa Timur	62,97	63,48	65,11	65,61	66,56
	Nasional	**66,38**	**66,77**	**67,20**	**67,80**	**68,52**

Sumber: Kementerian PP dan PA, BPS, 2013

2.2.18. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup keterwakilan perempuan di legislatif (parlemen); posisi perempuan dalam kedudukan manajerial, profesional, administrasi dan teknisi; dan sumbangan dalam pendapatan. Angka IDG Provinsi Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Sumber : BPS dan Kementerian PP dan PA, 2013

Gambar 2.24
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Pencapaian masing-masing unsur pembentuk IDG Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.25.

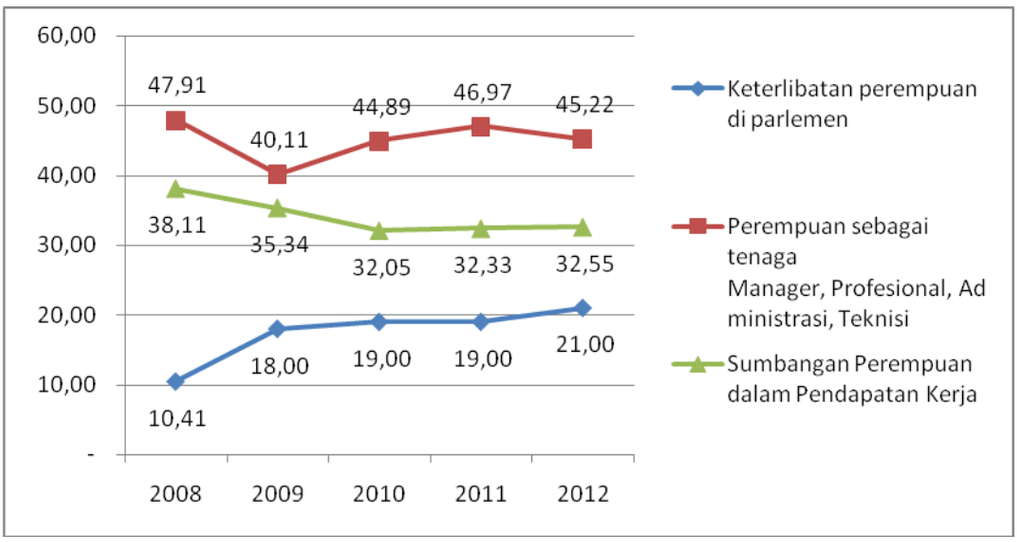

Sumber : BPS dan Kementerian PP dan PA, 2013

Gambar 2.25
Capaian Unsur Pembentuk IDG Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, IDG Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012 masih lebih baik dibandingkan Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten, tetapi masih di bawah DKI dan DIY. IPG Jawa Tengah juga masih lebih tinggi dari IDG Nasional dan menempai peringkat ke-4 dari 33 Provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan perbandingan capaian IPG antar provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2008 - 2012

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Banten	49,02	54,87	65,66	66,58	65,53
2	Jawa Barat	55,51	55,77	67,01	68,08	68,62
3	DKI Jakarta	63,37	63,94	73,23	74,70	76,14
4	**Jawa Tengah**	**59,76**	**59,96**	**67,96**	**68,99**	**70,66**
5	DIY	62,87	63,32	77,70	77,84	75,57
6	Jawa Timur	59,81	60,26	67,91	68,62	62,29
	Nasional	**62,27**	**63,52**	**68,15**	**69,14**	**70,07**

Sumber: Kementerian PP dan PA, BPS, 2013

2.2.19. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujud dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Jawa Tengah, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2008-2012 jumlah kelompok kesenian meningkat dari 6.624 menjadi 9.857 kelompok kesenian. Demikian halnya mengenai jumlah seniman,

meningkat dari 10.927 menjadi 11.269 seniman, sedangkan untuk gedung kesenian tetap sebanyak 8 buah.

Meskipun aktivitas seni budaya di Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun demikian ke depan upaya untuk lebih memberdayakan nilai adiluhung budaya Jawa; mengembangkan ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*; mendayagunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan serta melestarikan kesenian Jawa perlu terus ditingkatkan. Perkembangan kesenian di Jawa Tengah sebagaimana tertera pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian, Seniman dan Gedung Kesenian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah kelompok kesenian	6.624	7.917	7.917	7.917	9.857
2	Jumlah seniman	10.927	11.695	11.686	11.178	11.269
3	Jumlah gedung kesenian	8	8	8	8	8

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2012

2.2.20. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran serta dan arti penting bagi pelaksanaan pembangunan. Jumlah pemuda di Jawa Tengah sebanyak 9,771 juta orang atau sebesar 29,94% dari jumlah seluruh penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2010. Jumlah pemuda tersebut terdiri dari 4,860 juta orang laki-laki dan 4,911 juta orang perempuan.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia yang seutuhnya. Upaya pembangunan kepemudaan dilakukan melalui pembinaan kepemudaan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan, kepelajaran, kemahasiswaan yang secara keseluruhan di Jawa Tengah sejumlah 2.963 pada Tahun 2012, sedangkan jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program sebanyak 72 Organisasi Kepemudaan.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dilaksanakan Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan melalui pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dari Tahun 2008 - 2012 sebanyak 72 orang dan jumlah Pemuda Pelopor sebanyak 60 orang.

Peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui kader kewirausahaan yang dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan akses permodalan. Capaian jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan mengalami peningkatan dari Tahun 2008 hingga Tahun 2012, dan pada akhir Tahun 2012 telah mencapai 485 kader. Perkembangan Kepemudaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Perkembangan Kepemudaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	55	55	72	72	72
2	Jumlah SP3 yang dibina	0	0	8	33	34
3	Jumlah Pemuda Pelopor	0	15	15	15	15
4	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	60	60	70	100	295

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2013

Jumlah klub olahraga di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 3.516 (Tahun 2009) menjadi 4.230 klub (Tahun 2012). Peningkatan jumlah klub olahraga juga diikuti dengan peningkatan fasilitas olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga) dari 15.550 pada Tahun 2009 menjadi 19.291 pada Tahun 2012, selengkapnya terlihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Perkembangan Olahraga
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Klub Olahraga	-	3.516	3.925	4.230	4.230
2	Jumlah Gedung Olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga)	-	15.550	17.250	19.291	19.291

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2013

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

a. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Sekolah

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur pendidikan dasar dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. APS penduduk usia 7-12 tahun pada Tahun 2008 sebesar 98,83%, meningkat menjadi 98,87% pada Tahun 2012. APS penduduk usia 13-15 tahun mengalami peningkatan dari 84,27% pada Tahun 2008, menjadi 89,59% pada Tahun 2012, sebagaimana Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI (7-12 Tahun)	98,83	98,80	98,95	98,62	98,87
2	SMP/MTs (13-15 Tahun)	84,27	84,59	85,33	88,39	89,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2012

APS Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke 3 apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan lebih baik dibandingkan dengan APS nasional sebagaimana Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI
Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2012

No	Provinsi	APS
1	Banten	98,29
2	Jawa Barat	98,34
3	DKI Jakarta	98,97
4	**Jawa Tengah**	**98,87**
5	DIY	99,77
6	Jawa Timur	98,66
	Nasional	**97,95**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

Untuk APS SMP/MTs, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke-5 apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa namun lebih rendah dibandingkan dengan APS nasional, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs
Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2012

NO	Provinsi	APS
1	Banten	90,97
2	Jawa Barat	88,51
3	DKI Jakarta	93,79
4	**Jawa Tengah**	**89,59**
5	DIY	98,32
6	Jawa Timur	91,70
	Nasional	**89,66**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Selama kurun waktu 2008 - 2012, ketersediaan sekolah untuk SMP/MTs mengalami peningkatan sedangkan untuk SD/MI fluktuatif. Demikian pula dengan jumlah penduduk usia sekolah, jumlahnya mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah SD/MI	23.775	23.480	22.874	23.520	23.358
2	Jumlah SMP/MTs	4.195	4.324	4.448	4.541	4.679
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	3.753.089	3.710.248	3.637.446	3.693.871	3.645.929
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	1.912.941	1.873.746	1.741.098	1.761.901	1.756.919

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2013

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semua penduduk usia sekolah.

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari 63,35 menjadi 64,07. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan SD/MI di Jawa Tengah cukup memadai. Pada kurun waktu yang sama rasio ketersediaan SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari 21,93 menjadi 26,63. Namun demikian kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapai rasio 52,08. Data selengkapnya terlihat dalam Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Rasio Ketersediaan Sekolah
Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7 – 12 tahun	63,35	63,28	62,88	63,67	64,07
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13 – 15 tahun	21,93	23,08	25,55	25,77	26,63

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2013

3) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran.

Selama kurun waktu Tahun 2008-2012, rasio ketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Jawa Tengah cenderung membaik karena mengalami penurunan dari 17,22 menjadi 15,18. Selanjutnya pada jenjang SMP/MTs rasio guru terhadap murid pada kurun waktu yang sama juga

membaik, dikarenakan menurun dari 15,65 menjadi 14,36 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Rasio Guru dan Murid
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
I	**SD/MI**					
	Jumlah guru	230.721	236.126	233.451	225.311	241.749
	Jumlah murid	3.972.889	3.853.288	3.743.925	3.709.232	3.669.968
	Rasio	17,22	16,32	16,04	16,46	15,18
II	**SMP/MTs**					
	Jumlah guru	99.367	105.653	108.642	112.703	113.174
	Jumlah murid	1.555.653	1.574.741	1.631.457	1.606.619	1.624.843
	Rasio	15,65	14,90	15,04	14,25	14,36

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013.

4) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu, rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang SD/MI capaiannya kurang baik ditunjukkan dengan menurunnya rasio dari 1,36 pada Tahun 2008 menjadi 1,07 pada Tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama untuk jenjang SMP/MTs capaiannya baik dikarenakan meningkat dari 2,03 menjadi 2,31 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
SD/MI					
Jumlah kelas	146.875	147.900	147.911	148.277	148.388
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1,36	1,20	1,16	1,15	1,07
SMP/MTs					
Jumlah kelas	42.289	42.944	44.068	45.835	47.718
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	2,03	2,33	2,29	2,21	2,31

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

b. Pendidikan Menengah

1) Angka Partisipasi Sekolah

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah relatif rendah. APS penduduk usia 16-18 tahun pada Tahun 2008 sebesar 53,36%, meningkat menjadi 58,56% pada Tahun 2012. Walaupun mengalami peningkatan namun capaian tersebut termasuk kategori rendah. Rendahnya APS pada jenjang pendidikan menengah disebabkan oleh

tingginya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, selain itu keberadaan pendidikan menengah secara geografis jauh dari pemukiman penduduk serta jumlah sekolah menengah relatif sedikit. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah dapat dilihat pada Gambar 2.26.

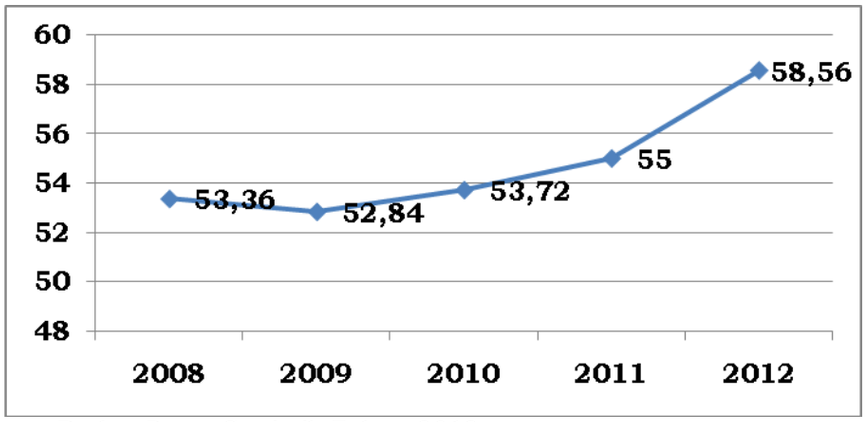

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2012

Gambar 2.26
Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, APS SMA/SMK/MA, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke-5 dan masih lebih rendah dibandingkan dengan APS nasional, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2012

No	Provinsi	APS
1	Banten	58,58
2	Jawa Barat	55,69
3	DKI Jakarta	60,81
4	**Jawa Tengah**	**58,56**
5	DIY	80,22
6	Jawa Timur	61,68
	Nasional	**61,06**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Selama kurun waktu 2008 - 2012 ketersediaan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan, sedangkan untuk jumlah penduduk usia sekolah yang perkembangan mengalami penurunan, sebagaimana pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah SMA/ SMK/ MA	2.172	2.309	2.458	2.513	3.407
Jumlah penduduk usia 16-18 th	1.647.632	1.623.463	1.547.110	1.505.602	1.545.555
Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk Usia 16 – 18 tahun	13,18	14,22	15,89	16,69	22,04

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012

Berdasarkan data di atas rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan yaitu dari 13,18 pada Tahun 2008 menjadi 22,04 per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun pada Tahun 2012. Rasio ideal mendekati angka 30 sehingga kondisi tersebut belum ideal.

3) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran.

Selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 rasio ketersediaan guru per 10.000 murid SMA/SMK/MA di Jawa Tengah cenderung membaik, yaitu dari 13,26 menjadi 10,27, sebagaimana Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah guru	67.429	71.173	90.090	101.656	103.187
Jumlah murid	894.073	934.743	985.942	1.105.319	1.060.257
Rasio	13,26	13,13	10,94	9,99	10,27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013

4) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Rasio Guru dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah kelas	25.375	26.144	26.307	27.966	31.092
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	6,65	5,56	5,18	4,57	4,17

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Angka Partisipasi Kasar PAUD di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan dari 59,22% pada Tahun 2008 menjadi 70,50% pada Tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak meningkat. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, APK PAUD Jawa Tengah berada diatas capaian nasional sebesar 63%, selengkapnya sebagaimana Gambar 2.27.

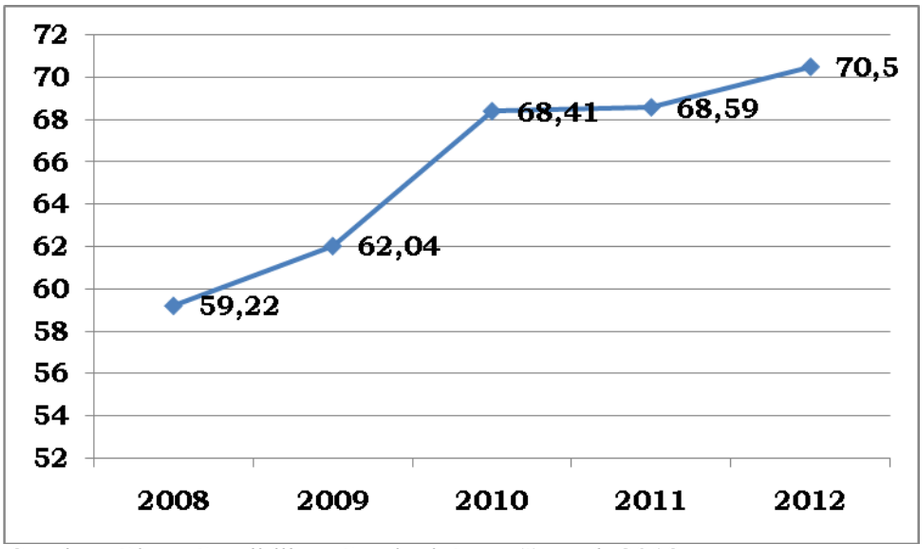

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,2013

Gambar 2.27.
Angka Partisipasi Kasar PAUD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

d. Fasilitas Pendidikan

Bangunan sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar, karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.

Selama kurun waktu 2008 - 2012, persentase bangunan sekolah SD/MI dalam kondisi baik mengalami peningkatandari 54% menjadi 94,75% kemudian untuk sekolah SMP/MTs mengalami peningkatan dari 60% menjadi 96,76% dan sekolah SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan dari 20% menjadi 80%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Dalam Kondisi Baik
Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI/SDLB	54	62	70	85,38	94,75
2	SMP/MTs/SMPLB	60	68	73	82,86	96,76
3	SMA/SMK/MA	20	25	30	76,53	80

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012

e. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA selama kurun waktu 2008-2012 mengalami penurunan. APS SD/MI turun dari 0,3% menjadi 0,12%. APS SMP/MTs dari 0,98% menjadi 0,38%, sedangkan untuk APS SMA/SMK/MA dari 0,11% menjadi 0,08%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI/SDLB	0,3	0,22	0,22	0,16	0,12
2	SMP/MTs/SMPLB	0,98	0,72	0,68	0,5	0,38
3	SMA/SMK/MA	0,11	0,17	0,1	0,09	0,08

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012

f. Angka Kelulusan

Angka Lulus menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Lulus pada Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Angka Lulus SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI/SDLB	95,17	95,98	96,29	98,40	99,95
2	SMP/MTs/SMPLB	92,83	93,96	94,00	99,05	99,15
3	SMA/SMK/MA	93,13	92,03	94,19	95,00	95,59

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012

Selanjutnya terkait dengan nilai ujian akhir nasional, terlihat bahwa hasil nilai ujian akhir nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di Jawa Tengah mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Nilai Ujian Akhir Nasional
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI/SDLB	6,76	6,64	7,4	7,31	7,06
2	SMP/MTs/SMPLB	6,43	6,89	7,16	6,75	6,8
3	SMA/SMK/MA	7,08	7,27	7,19	7,72	7,73

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012

g. Angka Melanjutkan

Persentase siswa lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Angka melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 90,04% menjadi 94,57%, sedangkan angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA dari 71,95% menjadi 81,07%, dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	90,04	92,01	92,64	93,78	94,57
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	71,95	74,13	75,62	76,99	81,07

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012

h. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu Tahun 2008-2012, persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Namun demikian persentase pendidik PAUD dan SD/MI/SDLB masih relatif rendah, sebagaimana tertera pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	11,30	12,00	18,83	20,99	31,01
2	Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4	22,90	25,90	34,11	45,40	51,56
3	Pendidik SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi S1/D4	73,80	74,70	76,03	78,01	84,57
4	Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4	82,50	83,20	85,81	88,48	91,85

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012

2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 cenderung fluktuatif, berdasarkan data pada Tabel 2.68 menggambarkan rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya masih di bawah standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk.

Tabel 2.68.
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Tahun	JumlahPuskesmas (unit)	JumlahPenduduk (orang)	Rasio
2008	861	32.626.390	1 : 37.894
2009	853	32.864.563	1 : 38.528
2010	864	32.382.657	1 : 37.480
2011	867	32.643.612	1 : 37.651
2012	873	33.270.307	1 : 38.110

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012

b. Rasio dokter per satuan penduduk

Kurun waktu 2008-2012 rasio dokter umum di Jawa Tengah lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan dokter spesialis. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Perkembangan Rasio Dokter
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2008	3.397	0,104	1.713	0,049	888	0,027
2009	3.578	0,109	2.149	0,065	943	0,029
2010	3.605	0,111	2.148	0,066	943	0,029
2011	4.224	0,129	2.343	0,072	1.058	0,032
2012	4.264	0,128	2.157	0,065	1.091	0,033

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012

c. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi) di Jawa Tengah dari Tahun 2009 - 2012 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

Tahun	Perawat		Bidan		Tenaga Farmasi		Tenaga Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2009	24.763	0,753	12.456	0,379	3.633	0,111	1.472	0,045
2010	24.790	0,766	12.456	0,385	3.637	0,112	1.475	0,046
2011	24.472	0,750	13.100	0,401	4.376	0,134	1.549	0,047
2012	27.404	0,824	14.443	0,434	5.347	0,161	1.575	0,047

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013

d. Persentase balita usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Cakupan pelayanan kesehatan anak Balita Tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Kondisi ini dikarenakan kurangnya kampanye ASI dibandingkan dengan promosi susu formula, belum semua Rumah Sakit dan Rumah Bersalin serta Puskesmas perawatan persalinan mempunyai media promosi ASI Eksklusif dan tenaga terlatih untuk Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta belum semua masyarakat memahami arti pentingnya ASI Eksklusif, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Persentase Balita Usia 0-6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (%)
2008	562.427	162.900	28,96
2009	340.373	136.862	40,21
2010	488.495	181.600	37,18
2011	247.647	112.338	45,36
2012	577.407	148.059	25,60

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012

e. Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 cenderung mengalami penurunan, sedangkan penemuan kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk meningkatkan langkah preventif melalui advokasi, dan pemberian pemahaman bagi masyarakat serta pendampingan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Kondisi Penyakit Menular
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV / AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2008	59,2	1,19	47,97	83,9	259	170
2009	57,9	1,42	48,15	85,01	143	430
2010	56,8	1,29	55,38	85,15	373	501
2011	15,3	0,93	59,52	82,90	755	521
2012	19,29	1,52	58,45	83,64	607	797

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012

f. Persentase Rumah Sakit yang Dibina untuk Akreditasi

Jumlah Rumah Sakit (RS) yang dibina untuk akreditasi pelayanan dari Tahun 2008 - 2012 mengalami peningkatan, sehingga pelayanan di

tingkat rujukan menjadi lebih optimal. Jumlah RS yang dibina untuk akreditasi tercantum pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73.
Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah yang dibina untuk akreditasi	Persentase
2008	217	29	13,36
2009	227	37	16,30
2010	243	54	22,22
2011	247	44	21,86
2012	263	135	51,33

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012

g. Jumlah Penduduk Miskin Yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Kemampuan membeli masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin mengakibatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan rendah, untuk itu perlu dilaksanakan Program Jamkesmas dan Jamkesda. Persentase penduduk miskin yang terlayani Jamkesda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu 1,75% pada Tahun 2010 menjadi 15,69% pada Tahun 2012, seperti terlihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat
Jamkesmas dan Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (PPLS)	Jumlah yang menerima Jamkesmas	%	Jumlah yang menerima Jamkesda	%	Keterangan
2008	9.828.568	11.715.881	119,20	-	-	Blm ada Jamkesda, adanya Askeskin
2009	12.938.386	11.715.881	90,55	-	-	Blm ada jamkesda
2010	12.801.233	11.715.881	91,52	225.000	1,75	
2011	13.003.805	11.715.881	90,10	2.248.596	17,29	
2012	12.447.383	12.274.134	98,61	1.954.005	15,69	

Sumber: TNP2K dan Kementerian Kesehatan, 2012

Pemberi pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jamkesda yaitu 873 Puskesmas dengan jumlah tempat tidur kelas III sebanyak 4.123 TT dan 263 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur kelas III sebanyak 12.868 TT.

3. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum yang harus ditangani sesuai kewenangan Provinsi meliputi jalan, jembatan, sumberdaya air, air bersih, sanitasi, persampahan, dan jasa konstruksi.

a. Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 26.368,792 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.390,571 km, jalan provinsi sepanjang 2.565,621 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 22.412,600 km. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebagai berikut:

1) Aksesibilitas

Indikator aksesibilitas yaitu tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Kondisi sampai dengan Tahun 2012 seluruh titik Pusat Kegiatan (PK) sudah terhubung baik oleh jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota.

Total panjang jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 26.368,792 km. Untuk meningkatkan aksesibilitas khususnya di wilayah Selatan direncanakan pembangunan ruas jalan Wawar-Tambak-mulyo/Ruas Jalan Diponegoro Kabupaten Kebumen (Jaringan Jalan Lintas Selatan/JJLS) sepanjang 38,460 km. Panjang eksisting jalan ditambah rencana pembangunan jalan menjadi 26.407,252 km, sehingga tingkat aksesibilitas (rasio panjang jalan eksisting dibandingkan total panjang jalan eksisting ditambah rencana pembangunan jalan) sebesar 99,85%. Diharapkan pada akhir Tahun 2014, ruas JJLS selesai terbangun dengan *Regional Road Developement Programme* (RRDP) sehingga indeks aksesibilitas dapat terpenuhi 100%.

2) Mobilitas

Indikator mobilitas yaitu tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk dalam satuan Km/10.000 jiwa.

Indeks mobilitas Jawa Tengah pada Tahun 2011 mencapai 8,078 Km/10.000 jiwa, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 269,26%, telah memenuhi SPM pada Tahun 2014 sebesar 100%.

3) Keselamatan

Indikator keselamatan adalah tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendaraan dengan selamat. Sampai dengan Tahun 2012, ruas jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.956,192 km, sedangkan ruas jalan yang rawan kecelakaan dan rawan longsor/banjir sepanjang 525,556 Km, sehingga panjang ruas jalan yang sudah memenuhi kriteria keselamatan sepanjang 3.430,636 km, maka indeks keselamatan jalan kewenangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah 86,72% sudah memenuhi standar pelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2014 mencapai 60%.

4) Kondisi jalan

Indikator kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Sampai dengan Tahun 2012, jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 6.041,863 km yang terdiri dari 93,099 km jalan nasional, 7,184 Km jalan provinsi dan 5.941,580 km jalan kabupaten/kota, sehingga total jalan yang telah

memenuhi kriteria kondisi baik dan sedang sepanjang 20.326,929 km. Maka persentase pelayanan kondisi ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,08%, telah melampaui standar pelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2014 sebesar 60%.

Pada Tahun 2012 kondisi jalan baik kewenangan provinsi, sepanjang 2.211,052 km (86,18%) dan jembatan baik kewenangan provinsi sepanjang 19.842,372 m (78,32%). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.75 dan Tabel 2.76.

Tabel 2.75.
Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi
Tahun 2008 - 2012

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Baik	2.139,097	2.158,745	2.190.014	2.199,250	2.211,052
2	Sedang	387,558	371,050	366,627	358,417	347,385
3	Rusak	12,445	9,905	8,980	7,953	7,184
Jumlah		2.539,700	2.539,700	2.565,621	2.565,621	2.565,621

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, 2012
Catatan: - Panjang jalan kewenangan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 620/12/2008 : 2.539,700 km
- Panjang jalan kewenangan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 620/12/2010 : 2.565,621 km

Tabel 2.76.
Kondisi Jaringan Jembatan Kewenangan Provinsi
Tahun 2008 - 2012

No	Kondisi Jembatan	Panjang Jembatan (m) / Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Baik	18.915,11	19.117,79	19.344,00	19.642,00	19.842,372
2	Sedang	6.118,40	5.946,12	5.722,00	5.436,00	5.251,946
3	Rusak	301,49	271,09	269,00	257,00	240,683
Jumlah		25.335,00	25.335,00	25.335,00	25.335,00	25.335,00

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, 2012

5) Kecepatan

Indikator kecepatan yaitu tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Panjang jalan kewenangan provinsi yang sudah memenuhi kriteria kecepatan sepanjang 1.716,491 km dan belum memenuhi kriteria kecepatan sepanjang 849,13 km, karena kapasitas jalan belum memadai untuk melayani arus kendaraan. Dengan kondisi tersebut maka persentase pelayanan jalan provinsi yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana sebesar 66,90% di atas Standar Pelayanan Minimum yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2014 sebesar 60%.

b. Sumber Daya Air

Area layanan irigasi di Provinsi Jawa Tengah seluas 992.455 ha yang tercakup dalam 9.127 Daerah Irigasi (DI). Kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik sampai dengan Tahun 2012 sebesar 56.926 ha (66%). Kondisi jaringan irigasi baik tersebut adalah

untuk mendukung peningkatan produksi beras. Pembagian kewenangan pengelolaan DI dan kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Pembagian Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No	Kewenangan	Luas Area (ha)	%	Jumlah DI
1	Pusat	346.998	34,96	39
2	Provinsi	86.252	8,69	106
3	Kabupaten/Kota	559.205	56,35	8.982
Jumlah		992.455	100	9.127

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2012

Kondisi jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78.
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2008 - 2012

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi					
	Baik		Sedang		Rusak	
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
2008	34.364	41	45.714	53	5.175	6
2009	40.539	47	40.538	47	5.175	6
2010	42.263	49	43.989	51	0	0
2011	52.613	61	32.776	38	863	1
2012	56.926	66	29.326	34	0	0

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)

Kondisi penanganan banjir di Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2008-2011 telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya genangan banjir di Jawa Tengah. Kondisi genangan banjir pada Tahun 2008 seluas 199.427 ha, berturut-turut berkurang menjadi 192.942 ha (Tahun 2009), 186.456 ha (Tahun 2010), dan 179.971 ha (Tahun 2011), dengan rata-rata penurunan seluas 6.485 ha per tahun.

Kondisi pemenuhan kebutuhan air baku di Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2008-2012, cenderung meningkat. Selengkapnya perkembangan pemenuhan kebutuhan air baku dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kebutuhan Air Baku (juta m^3/tahun)	709,128	714,518	719,734	709,180	714,895
2	Ketersediaan Air Baku (juta m^3/tahun)	284,040	300,105	317,003	326,210	343,212
Persentase (%)		40,05	42,00	44,04	46,00	48,01

Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)

c. Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan

Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi sampai dengan Tahun 2012 adalah sebesar 40,60% untuk air bersih perkotaan, 20,30% untuk air bersih perdesaan, dan 60,03% untuk sanitasi dasar. Cakupan pelayanan tersebut perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai target *Millenium Development Goals* Tahun 2015 yaitu sebesar 75% air bersih perkotaan dan 52,80% air bersih perdesaan serta 72% sanitasi.

Penanganan sampah terangkut di Jawa Tengah belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan persentase sampah terangkut mengalami penurunan dari 77,41% pada Tahun 2008 menjadi 41,34% pada Tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80.
Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Air Bersih					
	- Perkotaan (%)	33,00	37,00	38,70	38,90	40,60
	- Perdesaan (%)	8,00	9,00	10,40	18,00	20,30
2	Sanitasi (%)	52,90	54,73	57,70	58,40	60,03
3	Persampahan (%)	77,41	77,09	53,33	48,73	41,34

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng, 2012 dan Jawa Tengah Dalam Angka 2013

d. Jasa Konstruksi

Pelayanan uji laboratorium jasa konstruksi telah mendapatkan Survailen I, ISO 9001:2008 oleh lembaga sertifikasi IAPMO dan Re-Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh KAN pada Tahun 2012. Pelayanan Sertifikasi Hasil Uji (SHU) Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan. Tahun 2008 sebanyak 178 sertifikat, Tahun 2009 sebanyak 382 sertifikat, Tahun 2010 sebanyak 357 sertifikat, Tahun 2011 sebanyak 507 sertifikat dan Tahun 2012 meningkat menjadi 573 sertifikat.

4. Perumahan

Salah satu indikator pelayanan pada urusan Perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada Tahun 2008 jumlah rumah layak huni di Jawa Tengah sebanyak 5.412.645 unit (72,14%) meningkat menjadi 6.709.038 unit (76,56%) pada Tahun 2012, sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2008 sebanyak 2.090.007 unit (27,68%), turun menjadi 2.053.772 unit (23,44%) pada Tahun 2012.

Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan serta mendukung pengurangan angka kemiskinan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta, telah memberikan stimulan bagi perbaikan RTLH sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sejumlah 40.646 unit. Perkembangan jumlah rumah layak huni dan RTLH serta rasio rumah layak huni di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Jumlah Rumah (unit)	Rumah Layak Huni		Rumah Tidak Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (%)	Jumlah (unit)	Rasio (%)
2008	7.502.652	5.412.645	72,14	2.090.007	27,86
2009	7.757.025	5.425.704	69,94	2.331.321	30,06
2010	8.743.590	6.510.358	74,45	2.233.232	25,55
2011	8.529.355	6.539.551	76,67	1.989.804	23,33
2012	8.762.810	6.709.038	76,56	2.053.772	23,44

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2013

Kebutuhan rumah di Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebanyak 1.498.724 (17,84%). Rincian masing-masing kebutuhan rumah untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82.
Kebutuhan Rumah Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2012			
		Jumlah KK	Jumlah Rumah	Kebutuhan Rumah (*Backlog*)	Persentase Kebutuhan Rumah
1	Cilacap	501.044	454.800	46.244	10,17
2	Banyumas	471.968	409.995	61.973	15,12
3	Purbalingga	274.821	216.877	57.944	26,72
4	Banjarnegara	275.512	234.631	40.881	17,42
5	Kebumen	312.651	293.020	19.631	6,70
6	Purworejo	204.924	155.208	49.716	32,03
7	Wonosobo	238.400	218.738	19.662	8,99
8	Magelang	322.764	253.820	68.944	27,16
9	Boyolali	262.449	241.633	20.816	8,61
10	Klaten	382.966	301.342	81.624	27,09
11	Sukoharjo	214.539	191.688	22.851	11,92
12	Wonogiri	375.701	260.027	115.674	44,49
13	Karanganyar	234.480	210.953	23.527	11,15
14	Sragen	279.144	250.866	22.278	8,88
15	Grobogan	504.330	432.936	71.394	16,49
16	Blora	402.984	345.936	57.048	16,49
17	Rembang	166.914	165.454	1.460	0,88
18	Pati	347.961	298.703	49.258	16,49
19	Kudus	253.065	227.758	25.307	11,11
20	Jepara	295.721	271.454	24.267	8,94
21	Demak	336.436	288.809	47.627	16,49
22	Semarang	283.303	238.953	44.350	18,56
23	Temanggung	194.596	192.814	1.782	0,92
24	Kendal	227.133	192.961	34.172	17,71
25	Batang	220.999	178.951	42.048	23,50
26	Pekalongan	245.757	185.330	60.427	32,61
27	Pemalang	383.077	306.054	77.023	25,17

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2012			
		Jumlah KK	Jumlah Rumah	Kebutuhan Rumah (*Backlog*)	Persentase Kebutuhan Rumah
28	Tegal	422.996	340.423	82.573	24,26
29	Brebes	526.620	412.228	114.400	27,75
30	Kota Magelang	33.897	29.985	3.912	13,05
31	Kota Surakarta	122.462	103.978	18.484	17,78
32	Kota Salatiga	47.547	38.632	8.915	23,08
33	Kota Semarang	396.354	342.882	53.472	15,59
34	Kota Pekalongan	74.806	61.150	13.656	22,33
35	Kota Tegal	67.218	51.834	15.384	29,68
Jawa Tengah		**9.905.547**	**8.400.823**	**1.498.724**	**17,84**

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Permukiman kumuh masih menjadi permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah, penanganan permukinan kumuh selama lima tahun mencapai seluas 58,75 Ha atau sebesar 6,26% dari luas kawasan kumuh (938,23 Ha), dengan perincian per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83.
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Jumlah Capaian per Tahun (Ha)	Kumulatif Capaian (Ha)	Presentase Capaian per Tahun	Presentase Capaian Kumulatif
2008	9,85	9,85	1,05	1,05
2009	10,78	20,63	1,15	2,20
2010	9,36	30,00	1,00	3,20
2011	12,18	42,17	1,30	4,50
2012	16,58	58,75	1,77	6,26

Sumber : Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 2013

5. Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci berupa rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, yang akan dijadikan pedoman oleh pemerintah provinsi dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pemerintah provinsi juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di wilayahnya.

Sampai dengan Tahun 2012, pasca ditetapkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, telah disusun 5 (lima) dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dari 61 (enampuluh satu) kawasan strategis provinsi yang belum ditetapkan dalam bentuk Perda. Namun, sampai dengan Tahun 2012, belum ada kabupaten/kota yang menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/Kota.

Dari aspek pengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun 2012, diketahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

sebesar 62%. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya implementasi rencana tata ruang disebabkan antara lain masih adanya perizinan yang belum efektif dan efisien serta kurang optimalnya kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

6. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama antar daerah di 35 kabupaten/kota dan pada 59 SKPD Provinsi, kesepakatan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah¬Jawa Barat Tahun 2008-2013 serta kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meliputi kawasan Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, Kedungsepur, Kedu Plus, Sapta Mitra Pantura dan Pakudjembara.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Gubernur. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029. Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan global dan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan target *Millenium Development Goals* (RAD-MDGs) Tahun 2011 - 2015, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2014, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2010 - 2020, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program-program pembangunan tersebut maka telah dibentuk kelompok kerja (Pokja) yang bersifat lintas SKPD serta melakukan koordinasi dengan 35 kabupaten/kota. Selanjutnya guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Perhubungan

Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (angkutan darat, kereta api dan ASDP), perhubungan laut, dan perhubungan udara. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut maupun udara.

a. Perhubungan Darat

Pelayanan angkutan darat di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu Tahun 2010 - 2012. Hal ini terlihat dari jumlah izin trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP Provinsi Jawa Tengah sebanyak 840 izin trayek (Tahun 2010) menjadi 902 izin trayek (Tahun 2012). Untuk jumlah izin trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) selama kurun waktu yang sama tidak mengalami peningkatan.

Jumlah angkutan wisata (kendaraan) juga mengalami peningkatan dari 952 kendaraan (Tahun 2008) menjadi 2.249 kendaraan (Tahun 2012). Sementara itu jumlah bus untuk pelayanan umum Tahun 2012 sebanyak 10.490 unit, meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2011 sebanyak 10.174 unit. Jumlah mobil penumpang umum selama 4 (empat) tahun terakhir tidak mengalami perkembangan, yaitu sebanyak 397.667 unit. Perkembangan pelayanan angkutan darat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Darat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	840	840	840	902	902
2	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	367	367	367	367	367
3	Angkutan wisata (kendaraan)	952	1.502	1.791	2.095	2.249
4	Jumlah bus (unit)	11.536	10.174	10.174	10.174	10.490
5	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667
6	Jumlah terminal bis Tipe A	15	16	16	16	17

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, 2012

Untuk jaringan jalan kewenangan provinsi kondisinya telah 100% terlayani dengan angkutan umum AKDP sepanjang 2.353,921 km terbagi dalam 260 trayek dan angkutan perdesaan sepanjang 211,70 km.

Guna mendukung keselamatan lalu lintas, maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Jawa Tengah, yang terdiri antara lain rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ),

Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), *guardrail*, dan marka jalan. Perkembangan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan selama kurun waktu Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85.
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rambu Jalan	243	564	878	2.502	1.902
2	RPPJ	40	-	12	65	101
3	APILL	1	-	-	-	-
4	*Guardrail*	360	-	464	824	904
5	Marka Jalan	-	-	23.200	61.785	52.815

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, 2012

Jawa Tengah memiliki 140 stasiun Kereta Api. Jumlah penumpang yang menggunakan Kereta Api sebagai sarana transportasi mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Tahun 2008 jumlah penumpang sebanyak 7.889.666 orang meningkat sebesar 22,38% menjadi 9.655.794 orang pada Tahun 2012. Untuk jumlah barang terangkut Kereta Api cenderung fluktuatif yaitu pada Tahun 2008 sebanyak 1.882.028 ton turun menjadi 1.562.214 ton pada Tahun 2012. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86.
Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penumpang (orang)	7.889.666	8.957.670	9.376.298	7.586.582	9.655.794
2	Jumlah barang terangkut (ton)	1.882.028	1.748.849	1.796.157	448.788	1.562.214
3	Jumlah stasiun KA	140	140	140	140	140
4	Jumlah Perlintasan KA di Jalan Provinsi	-	1.427	1.506	1.570	1.614

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, 2013

Jawa Tengah memiliki 2 buah kapal yang digunakan sebagai sarana angkutan sungai dan penyeberangan yaitu KM Muria dengan rute Jepara-Karimunjawa dan KMC Kartini I dengan rute Semarang-Karimunjawa. Jumlah penumpang KM Muria mengalami peningkatan yang signifikan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2010 - 2012) mencapai 151%. Tahun 2010 jumlah penumpang KM Muria sebanyak 16.350 orang, dan Tahun 2012 mencapai 65.886 orang. Sementara KMC Kartini I Tahun 2010 sebanyak 15.977 orang, dan Tahun 2012 menjadi 13.227 orang. Perkembangan jumlah penumpang angkutan sungai danau dan penyeberangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87.
Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penumpang KM. Muria (orang)	20.851	8.720	16.350	65.925	65.886
2	Jumlah penumpang KMC. Kartini I (orang)	10.521	13.259	15.977	13.102	13.227

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, 2012

b. Perhubungan Laut

Perhubungan laut Jawa Tengah, didukung dengan 9 Pelabuhan Laut termasuk Pelabuhan Utama Tanjung Emas Semarang yang saat ini dalam pengembangan dan modernisasi pelayanan serta telah dilengkapi dengan fasilitas gudang/lapangan penumpukan peti kemas seluas 352.384 m^2, *Crane* sampai dengan 40 ton untuk pelayanan bongkar muat barang dan peti kemas, dan 10 dermaga/tambatan dengan kedalaman sampai dengan minus 10 m; KMC Kartini I untuk melayani lintas Semarang–Jepara–Karimunjawa, serta KMP Muria dan KMP Express Bahari untuk melayani lintas Jepara–Karimunjawa. Perkembangan pelayanan angkutan laut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah pelabuhan	9	9	9	9	9
2	Pelabuhan Tanjung Emas					
	a. Kunjungan kapal (*call*)	3.994	3.914	2.221	1.919	1.703
	b. GRT (GT)	17.253.846	17.453.846	12.556.730	14.739.666	12.538.366
	c. Kargo (ton)	5.868.383	7.487.270	7.863.850	11.593.685	5.841.235
	d. Kontainer (*Teus*)	373.644	356.451	384.522	313.480	269.044
	e. Penumpang (orang)	403.569	392.606	449.645	318.527	238.525
3	Pelabuhan Tanjung Intan					
	a. Kunjungan kapal (*call*)	1.723	2.140	1.249	309	448
	b. GRT (GT)	18.083.880	21.153.538	21.882.020	2.519.752	3.669.263
	c. Kargo (ton)	6.601.033	37.511.612	23.895.627	1.949.073	5.568.781

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, 2012

c. Perhubungan Udara

Perhubungan udara, didukung dengan 4 (empat) bandar udara (Bandara), termasuk 2 Bandara yang dalam tahap pengembangan yaitu Bandara pengumpul skala sekunder internasional, Bandara Ahmad Yani Semarang dengan rencana kapasitas penumpang 4.000.000 penumpang, landasan pacu sepanjang 2.680 m, kapasitas appron untuk 2 (dua)

pesawat sejenis B 767 dan 8 (delapan) pesawat sejenis B 737, serta pengembangan Bandara Karimunjawa Jepara yang merupakan bandara pengumpul dengan *run way* sepanjang 1.200 m.

Perkembangan pelayanan perhubungan udara dapat diketahui dengan jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut setiap tahunnya. Dari dua bandara besar di Jawa Tengah yaitu Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo, diketahui bahwa perkembangan jumlah penumpang dan barang yang terangkut cenderung fluktuatif, baik penumpang domestik maupun internasional. Perkembangan jumlah penumpang dan barang yang terangkut di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah bandara	-	4	4	4	4
2	Bandara Ahmad Yani					
	a. Penumpang domestik (orang)	1.370.012	1.627.706	1.954.901	2.400.686	2.888.087
	b. Penumpang internasional (orang)	37.994	23.278	38.603	32.256	114.673
	c. Barang domestik (kg)	18.226.293	7.944.179	23.862.533	25.062.038	11.037.345
	d. Barang internasional (kg)	555.968	1.645.400	1.641.079	1.680.832	598.392
3	Bandara Adi Soemarmo					
	a. Penumpang domestik (orang)	516.403	574.453	780.852	970.615	1.200.787
	b. Penumpang internasional (orang)	137.764	111.957	119.694	115.522	48.961
	c. Barang domestik (kg)	6.044.690	1.995.359	2.542.982	3.349.969	4.128.433
	d. Barang internasional (kg)	2.020.733	24.786	75.311	150.723	358.495

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, 2012

8. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu informasi status mutu air, jumlah pengaduan dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti, pemantauan dan pencemaran terhadap kualitas air, udara ambien, dan pengaduan kasus lingkungan hidup.

Kondisi kualitas air sungai di Jawa Tengah saat ini sudah mengalami penurunan kualitas air yang berakibat pada percemaran air. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa parameter kunci yang melebihi baku mutu antara lain *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS) dan *Fosphat*.

Kondisi kualitas udara ambien di Jawa Tengah, berdasarkan pengukuran di 35 kabupaten/kota, dengan titik sampel pada 3 (tiga) lokasi pengukuran yakni Kawasan Perumahan, Kawasan Industri dan Kawasan Padat Lalu Lintas, menunjukan bahwa nilai Total Partikel Debu (TSP) melebihi batas ambang baku

mutu, sementara nilai SO_2, NO_2 dan CO masih di bawah baku mutu udara ambien.

Pada Tahun 2012, jumlah kasus lingkungan yang terjadi sebanyak 43 kasus dan semuanya dapat ditangani 100%, terdiri dari 29 kasus diberi sanksi administratif dan 14 kasus diselesaikan melalui mediasi. Secara rinci perkembangan kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berdasarkan SPM dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90.
Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Indikator	Target SPM (2013)	2008	2009	2010	2011	2012
1	Informasi status mutu air (SPM) sungai	100	-	2	3	4	6
2	Informasi status mutu udara ambien (SPM) kab/kota	100	-	25	35	35	35
3	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100	-	100	100	100	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, 2012

Dalam rangka pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, pemerintah provinsi juga melakukan penilaian dokumen AMDAL usaha/ kegiatan. Dalam kurun waktu 2008 - 2012 telah dilaksanakan penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi sebanyak 41dokumen AMDAL usaha/kegiatan, dengan rincian pada Tahun 2008 sebanyak 8 dokumen, Tahun 2009 tidak ada, Tahun 2010 sebanyak 3 dokumen, Tahun 2011 sebanyak 15 dokumen, dan Tahun 2012 sebanyak 15 dokumen AMDAL usaha/kegiatan.

Terkait dengan fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK), menunjukkan bahwa emisi GRK yang dihasilkan di wilayah Jawa Tengah sebesar 29,42 juta ton CO_2e pada Tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 39,89 juta ton CO_2e. Peningkatan ini selain disebabkan konsumsi energi yang meningkat, juga disebabkan cakupan sumber emisi yang diperhitungkan. Sumber emisi GRK berasal dari sektor energi mencapai 16,80 juta ton CO_2e, transportasi 10,45 juta ton CO_2e, proses industri 1,40 juta ton CO_2e, kehutanan 0,18 juta ton CO_2e, pertanian 6,40 juta ton CO_2e dan pengelolaan limbah 4,67 juta ton CO_2e.

Masalah utama dalam pengendalian emisi GRK di Jawa Tengah, adalah:

a. Proses industri yaitu industri-industri yang menghasilkan emisi adalah semen, kaca, peleburan logam, dan karbonasi;
b. Kehutanan dan pengembangan wilayah yang terkait dengan tingginya konversi hutan ke lahan lainnya, yang mengakibatkan menurunkan potensi serapan karbon;
c. Pertanian dengan sumber utama emisi berasal dari pemakaian pupuk urea, sistem penanaman padi dengan air menggenang, pembakaran seresah pasca panen, dan pengelolaan limbah peternakan;

d. Pengelolaan limbah yang belum mengadopsi teknologi yang tepat seperti *sanitary land fill* untuk TPA dan pengomposan, serta sistem sanitasi yang menggunakan sistem cubluk;
e. Energi, terkait dengan penggunaan energi yang masih bertumpu pada energi fosil yang potensinya semakin lama semakin berkurang dan rentan terhadap kenaikan harga, serta penggunaan energi yang kurang efisien pada bangunan/gedung dan industri;
f. Transportasi, berkaitan dengan pola pemanfaatan ruang di Jawa Tengah yang menyebar sehingga membutuhkan transportasi yang intensif.

9. Pertanahan

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Jawa Tengah dapat ditunjukkan dari data jumlah bidang tanah di Jawa Tengah sejumlah 21.212.403 bidang seluas 3.254.248 ha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.929.926 bidang seluas 1.394.192,79 ha telah terdaftar/bersertifikat, sedangkan sebanyak 11.282.477 bidang seluas 1.860.055,57 ha belum terdaftar/bersertifikat. Saat ini kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam pensertifikatan tanah. Berkaitan dengan penanganan konflik-konflik pertanahan, tercatat sebanyak 372 kasus pengaduan pertanahan yang masuk, dan telah diselesaikan permasalahannya sebanyak 355 kasus (BPN, data sampai dengan Oktober 2013).

Dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan memberikan stimulan berupa sertifikasi tanah bagi masyarakat, sekaligus dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan mempertahankan fungsi lahan/kawasan lindung, lokasi ditentukan di kawasan lahan sawah dan kawasan lindung.

Selanjutnya, dalam upaya mempertahankan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, selama Tahun 2008-2012 telah dilakukan penggantian tanah kas desa yang telah beralih fungsi untuk kepentingan pembangunan. Penggantian tanah kas desa untuk pertanian harus tetap memperhatikan kesuburan tanah sebagai lahan pertanian yang sekaligus mendukung upaya mempertahankan sektor pertanian.

Sementara untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam mendukung penetapan kawasan lindung dan lahan pertanian berkelanjutan, telah dilakukan stimulasi pembuatan sertifikat bagi masyarakat di kawasan tersebut. Status kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut selain dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan fungsi kawasan juga digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahannya.

Perkembangan pelayanan urusan pertanahan di Jawa Tengah selama Tahun 2008–2012, dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun					Ket
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Penggantian tanah kas desa						
	Luas semula (ha)	124.824	212.079	505.277	345.091	173.550	Untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol, tower PLN, dll)
	Luas menjadi (ha)	181.439	361.101	665.860	386.436	237.196	Tanah pertanian baru
2	Stimulasi pembuatan sertifikat lahan						
	Kawasan lindung (ha)	2.534	1.750	280	98	200	Sebagai stimulan
	Lahan pertanian pangan berkelanjutan (ha)	0	0	22	46	124	

Sumber : Biro Administrasi Tata Pemerintahan, Setda Provinsi Jawa Tengah, 2012

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio/Persentase Penduduk ber KTP

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2008-2012 kondisinya berfluktuatif. Dari Tahun 2009 sampai Tahun 2011 kondisinya menurun, namun pada Tahun 2012 meningkat cukup signifikan dari 68,98% menjadi 83,4%. Kenaikan persentase tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan penerapan *e*-KTP oleh pemerintah. Kepemilikan KTP sampai Tahun 2012 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.28.

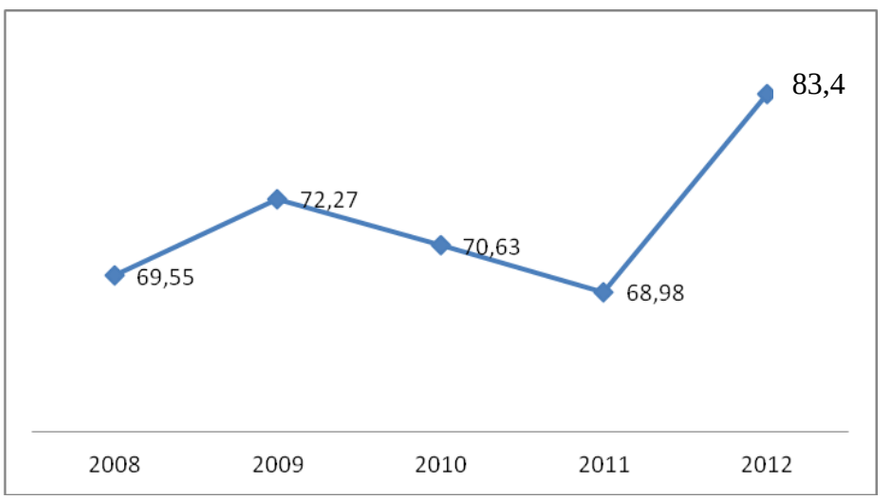

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.28
Persentase Kepemilikan KTP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

b. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran

Perkembangan penduduk usia 0–18 tahun yang memiliki Akte Lahir di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dari Tahun 2008 - 2012

terus mengalami peningkatan, walaupun pernah terjadi penurunan pada Tahun 2011, seperti terlihat pada Gambar 2.29.

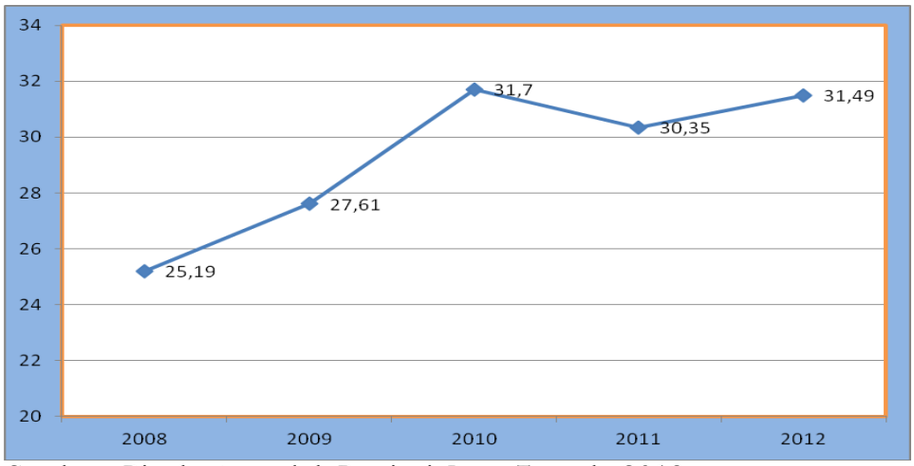

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.29
Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Usia 0 - 18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah di Jawa Tengah pada Tahun 2012 dapat di lihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Rasio Pasangan Berakte Nikah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Status Nikah	Pemilik Akte Nikah	%
1	Cilacap	794.798	385.440	48.50
2	Banyumas	913.097	477.503	52.29
3	Purbalingga	498.306	36.636	7.35
4	Banjarnegara	455.058	41.569	9.13
5	Kebumen	653.023	151.191	23.15
6	Purworejo	386.298	187.554	48.55
7	Wonosobo	456.288	65,321	14,32
8	Magelang	679.197	200,955	29,59
9	Boyolali	587.965	68,281	11,61
10	Klaten	650.695	269,820	41,47
11	Sukoharjo	459.774	38,872	8,45
12	Wonogiri	540.143	171,851	31,82
13	Karanganyar	444.940	173,572	39,01
14	Sragen	514.566	38,557	7,49
15	Grobogan	796.353	58,717	7,37
16	Blora	491.476	61,282	12,47
17	Rembang	348.702	226,310	64,90
18	Pati	670.246	71,945	10,73
19	Kudus	398.101	191,702	48,15
20	Jepara	605.456	93,777	15,49
21	Demak	551.298	26,922	4,88
22	Semarang	529.387	127,598	24,10
23	Temanggung	427.379	271,422	63,51
24	Kendal	448.131	320,468	71,51

No	Kabupaten/Kota	Status Nikah	Pemilik Akte Nikah	%
25	Batang	401.666	82,525	20,55
26	Pekalongan	430.282	169,019	39,28
27	Pemalang	679.484	232,184	34,17
28	Tegal	653.543	297,449	45,51
29	Brebes	952.453	166,749	17,51
30	Kota Magelang	60.543	31,766	52,47
31	Kota Surakarta	261.924	183,996	70,25
32	Kota Salatiga	94.312	70,487	74,74
33	Kota Semarang	761.833	625,881	82,15
34	Kota Pekalongan	132.685	72,128	54,36
35	Kota Tegal	121.784	72,752	59,74
Jumlah Total		**17.851.186**	**5.762.201**	**32,28**

Sumber: Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase pasangan berakte nikah sebesar 32,28% dari jumlah pasangan menikah sebanyak 17.851.186 pasangan.

d. Kepemilikan KTP

Persentase kepemilikan KTP di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2012 tersaji dalam Tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk usia >17 thn dan atau sudah menikah	Jumlah penduduk usia >17 thn dan atau sudah menikah yang memiliki KTP	Persentase
1	2	3	4	5
1	Cilacap	1.639.185	1.112.589	67,9
2	Banyumas	1.444.659	1.162.589	80,5
3	Purbalingga	770.253	654.615	85,0
4	Banjarnegara	773.079	768.638	99,4
5	Kebumen	1.240.844	1.173.884	94,6
6	Purworejo	610.815	610.815	100,0
7	Wonosobo	705.551	702.551	99,6
8	Magelang	1.141.297	423.421	37,1
9	Boyolali	962.371	874.391	90,9
10	Klaten	1.139.957	1.108.694	97,3
11	Sukoharjo	958.968	686.602	71,6
12	Wonogiri	979.983	715.492	73,0
13	Karanganyar	771.924	733.017	95,0
14	Sragen	821.891	704.185	85,7
15	Grobogan	1.203.320	1.020.612	84,8
16	Blora	734.897	289.580	39,4
17	Rembang	504.635	411.914	81,6
18	Pati	1.044.024	798.925	76,5
19	Kudus	631.222	627.379	99,4
20	Jepara	902.123	829.954	92,0
21	Demak	923.233	651.762	70,6
22	Semarang	715.342	621.233	86,8

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk usia >17 thn dan atau sudah menikah	Jumlah penduduk usia >17 thn dan atau sudah menikah yang memiliki KTP	Persentase
1	2	3	4	5
23	Temanggung	612.385	251.319	41,0
24	Kendal	873.728	873.728	100,0
25	Batang	604.765	517.564	85,6
26	Pekalongan	761.064	560.785	73,7
27	Pemalang	1.068.552	869.063	81,3
28	Tegal	1.267.995	1.028.917	81,1
29	Brebes	1.584.484	1.157.351	73,0
30	Kota Magelang	98.760	98.760	100,0
31	Kota Pekalongan	235.849	138.981	58,9
32	Kota Salatiga	136.447	112.893	82,7
33	Kota Semarang	1.269.692	1.219.390	96,0
34	Kota Surakarta	436.840	393.156	90,0
35	Kota Tegal	223.918	209.064	93,4
	Jumlah	**28.920.324**	**24.113.813**	**83,4**

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013

Pada Tabel 2.93 tersebut di atas menunjukkan bahwa penduduk usia >17 tahun dan atau sudah menikah yang memiliki KTP di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup tinggi yaitu sebesar 83,4%. Terdapat 3 Kabupaten/Kota dengan penduduk usia >17 tahun dan atau sudah menikah yang memiliki KTP mencapai 100%, yaitu Kabupaten Kendal, Purworejo dan Kota Magelang.

e. Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kewarganegaraan Asing

Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kewarganegaraan Asing sejumlah 2.636 orang, dengan jumlah terbanyak dari warga negara Cina sejumlah 803 orang, disusul warga negara Asia sejumlah 364 orang dan warga negara Bangladesh/India/Pakistan sejumlah 329 orang. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.94 sebagai berikut:

Tabel 2.94.
Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kewarganegaraan Asing Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010

Kabupaten/Kota		Kewarganegaraan Asing																					
		Asia	Cina	Bangladesh /India /Pakistan	Jepang	Korsel	Arab Saudi	Afganista/ Armenia	Australia	AS	Argentin/Bolivia	Kanada	Angola/ Chad	Belanda	Austria/ Belgia	Albania/ Andora	Fiji/ Kep. Marshall	Aljazair / Libya	Afsel	Anguilla	Burundi / Djibouti	Tidak Ada dalam daftar Kode	Jml
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cilacap	9	170	2	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	196
2	Banyumas	9	0	0	0	6	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21
3	Purbalingga	13	20	0	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
4	Banjarnegara	1	6	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
5	Kebumen	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	Purworejo	0	16	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21
7	Wonosobo	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
8	Magelang	17	6	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	37
9	Boyolali	0	10	24	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	41
10	Klaten	0	26	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
11	Sukoharjo	28	116	10	0	45	1	0	5	7	0	0	0	3	9	3	0	1	0	0	0	0	228
12	Wonogiri	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
13	Karanganyar	5	24	1	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	42
14	Sragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
15	Grobogan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
16	Blora	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	Rembang	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	Pati	5	45	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	53
19	Kudus	1	5	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
20	Jepara	43	17	14	8	27	2	2	4	4	0	0	0	12	31	1	0	0	0	0	3	2	170

Kabupaten/Kota		Kewarganegaraan Asing																					
		Asia	**Cina**	**Bangladesh /India /Pakistan**	**Jepang**	**Korsel**	**Arab Saudi**	**Afganista/ Armenia**	**Australia**	**AS**	**Argentin/Bolivia**	**Kanada**	**Angola/ Chad**	**Belanda**	**Austria/ Belgia**	**Albania/ Andora**	**Fiji/ Kep. Marshall**	**Aljazair / Libya**	**Afsel**	**Anguilla**	**Burundi / Djibouti**	**Tidak Ada dalam daftar Kode**	**Jml**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21	Demak	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Semarang	27	44	20	1	29	0	1	1	7	4	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	142
23	Temanggung	2	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
24	Kendal	6	2	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	20
25	Batang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
26	Pekalongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Pemalang	0	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
28	Tegal	0	24	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	61
29	Brebes	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
30	Kota Magelang	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9
31	Kota Surakarta	31	81	7	1	0	14	0	1	1	10	0	0	1	10	2	0	0	1	0	3	3	166
32	Kota Salatiga	48	0	0	2	95	0	8	14	179	9	0	0	28	3	7	3	0	0	0	0	0	396
33	Kota Semarang	110	130	244	23	54	10	21	3	14	1	2	0	27	86	23	2	15	1	8	0	7	781
34	Kota Pekalongan	0	30	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
35	Kota Tegal	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Provinsi Jawa Tengah		**364**	**803**	**329**	**54**	**310**	**88**	**39**	**40**	**219**	**25**	**3**	**2**	**90**	**170**	**41**	**6**	**17**	**2**	**8**	**6**	**20**	**2.636**

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 – BPS Republik Indonesia

f. Kabupaten/Kota mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara lebih baik kepada masyarakat, telah dikembangkan SIAK secara *on-line* dari 35 kabupaten/kota ke provinsi dan pusat, disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan ketersediaan peralatan infrastruktur pendukung.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja Di Swasta

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan melalui berbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatkan partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2008 - 2012, persentase rata-rata perempuan yang bekerja di sektor swasta mengalami penurunan sebesar 2,12% dari 67,21% (Tahun 2008) menjadi 65,09% (Tahun 2012). Penurunan tersebut disebabkan antara lain adanya PHK, alih profesi menjadi wirausaha mandiri dan TKI. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel. 2.95.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Wilayah	Jumlah Pekerja Perempuan					JumlahPekerja Perempuan di Lembaga Swasta					Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	238.552	240.845	247.253	330.961	361.764	106.736	126.457	146.178	165.899	185.620	44,74	52,51	59,12	50,13	51,31
2	Banyumas	255.280	274.407	281.783	317.016	337.595	176.049	178.157	180.265	182.373	184.481	68,96	64,92	63,97	57,53	54,65
3	Purbalingga	150.364	163.903	177.075	172.143	179.403	146.764	137.894	129.024	120.154	111.284	97,61	84,13	72,86	69,80	62,03
4	Banjarnegara	177.735	173.625	184.261	176.126	175.590	78.590	83.141	87.692	92.243	96.794	44,22	47,89	47,59	52,37	55,13
5	Kebumen	210.660	218.773	214.216	233.600	241.247	125.506	128.028	130.550	133.072	135.594	59,58	58,52	60,94	56,97	56,21
6	Purworejo	137.199	140.681	142.755	145.490	148.254	83.596	89.260	94.924	100.588	106.252	60,93	63,45	66,49	69,14	71,67
7	Wonosobo	139.895	142.343	151.883	149.616	152.856	95.221	89.211	83.201	77.191	71.181	68,07	62,67	54,78	51,59	46,57
8	Magelang	254.849	260.669	266.838	242.510	238.397	189.260	174.397	159.534	144.671	129.808	74,26	66,90	59,79	59,66	54,45
9	Boyolali	219.770	222.260	228.463	194.492	186.066	137.254	136.464	135.674	134.884	134.094	62,45	61,40	59,39	69,35	72,07
10	Klaten	264.494	268.432	238.664	240.358	232.313	175.607	178.561	181.515	184.469	187.423	66,39	66,52	76,05	76,75	80,68
11	Sukoharjo	177.412	174.797	176.024	173.425	172.096	140.385	140.488	140.591	140.694	140.797	79,13	80,37	79,87	81,13	81,81
12	Wonogiri	219.335	241.270	217.561	206.543	202.279	71.127	79.652	88.177	96.702	105.227	32,43	33,01	40,53	46,82	52,02
13	Karanganyar	191.200	175.060	182.216	170.975	164.233	139.045	130.765	122.485	114.205	105.925	72,72	74,70	67,22	66,80	64,50
14	Sragen	201.316	209.895	219.512	183.390	177.415	140.269	188.773	152.947	117.121	81.295	69,67	89,94	69,68	63,86	45,82
15	Grobogan	276.178	323.178	305.426	270.331	268.382	204.299	173.202	142.105	111.008	79.911	73,97	53,59	46,53	41,06	29,78
16	Blora	175.156	196.034	186.828	178.201	179.216	68.056	76.623	85.190	93.757	102.324	38,85	39,09	45,60	52,61	57,10
17	Rembang	105.794	124.673	121.555	123.218	129.026	50.517	58.974	67.431	75.888	84.345	47,75	47,30	55,47	61,59	65,37
18	Pati	237.834	254.347	243.032	259.634	266.901	114.085	135.605	157.125	178.645	200.165	47,97	53,31	64,65	68,81	75,00
19	Kudus	195.237	185.002	177.053	164.252	153.924	189.627	173.844	158.061	142.278	126.495	97,13	93,97	89,27	86,62	82,18
20	Jepara	201.691	211.668	214.785	219.965	226.056	143.796	154.459	165.122	175.785	186.448	71,30	72,97	76,88	79,91	82,48
21	Demak	211.632	207.422	201.475	212.386	212.637	181.493	163.724	145.955	128.186	110.417	85,76	78,93	72,44	60,36	51,93
22	Semarang	222.837	213.074	223.875	196.560	187.801	197.297	176.056	154.815	133.574	112.333	88,54	82,63	69,15	67,96	59,81
23	Temanggung	154.014	151.073	168.531	147.789	145.714	148.484	117.718	86.952	56.186	25.420	96,41	77,92	51,59	38,02	17,45
24	Kendal	198.835	198.889	180.120	181.089	175.174	114.623	119.538	124.453	129.368	134.283	57,65	60,10	69,09	71,44	76,66

No	Wilayah	Jumlah Pekerja Perempuan					JumlahPekerja Perempuan di Lembaga Swasta					Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
25	Batang	134.922	134.445	142.098	144.012	147.042	124.054	118.770	113.486	108.202	102.918	91,94	88,34	79,86	75,13	69,99
26	Pekalongan	161.188	174.575	165.390	165.253	166.608	116.812	123.963	131.114	138.265	145.416	72,47	71,01	79,28	83,67	87,28
27	Pemalang	196.504	212.462	184.704	250.622	268.661	125.959	137.108	148.257	159.406	170.555	64,10	64,53	80,27	63,60	63,48
28	Tegal	239.098	217.765	214.134	275.263	287.318	29.692	92.475	155.258	218.041	280.824	12,42	42,47	72,51	79,21	97,74
29	Brebes	294.924	295.026	317.516	339.530	354.399	223.053	215.487	207.921	200.355	192.789	75,63	73,04	65,48	59,01	54,40
30	Kota Magelang	23.269	25.213	24.440	25.331	26.018	15.976	17.309	18.642	19.975	21.308	68,66	68,65	76,28	78,86	81,90
31	Kota Surakarta	110.479	107.537	101.959	108.679	108.079	63.947	73.426	82.905	92.384	101.863	57,88	68,28	81,31	85,01	94,25
32	Kota Salatiga	33.449	35.257	32.721	36.355	37.324	22.114	24.975	27.836	30.697	33.558	66,11	70,84	85,07	84,44	89,91
33	Kota Semarang	286.940	312.708	310.916	334.878	350.857	231.021	254.081	277.141	300.201	323.261	80,51	81,25	89,14	89,64	92,13
34	Kota Pekalongan	55.009	58.528	55.363	55.548	55.728	47.079	48.164	49.249	50.334	51.419	85,58	82,29	88,96	90,61	92,27
35	Kota Tegal	41.767	39.212	43.185	49.218	51.702	29.409	32.991	36.573	40.155	43.737	70,41	84,13	84,69	81,59	84,59
	JUMLAH	**6.394.818**	**6.585.048**	**6.543.610**	**6.674.759**	**6.768.073**	**4.246.802**	**4.349.740**	**4.368.348**	**4.386.956**	**4.405.564**	**67,21**	**66,05**	**66,76**	**65,72**	**65,09**

Sumber : Sakernas BPS, 2008 – 2013 (diolah).

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Jawa Tengah berdasarkan data Sakernas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan pada Tahun 2012 mengalami penurunan bila dibandingkan periode Tahun 2010 - 2011 namun mengalami peningkatan dibanding Tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Kab/Kota	Jumlah Total Penduduk Usia Kerja Perempuan				Jumlah Angkatan Kerja Perempuan				% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	602.718	593.336	598.643	594.680	276.140	276.237	358.738	283.071	45,82	46,56	59,93	47,60
2	Banyumas	588.267	574.666	572.470	577.243	293.745	316.132	334.448	271.622	49,93	55,01	58,42	47,06
3	Purbalingga	305.187	312.851	315.485	314.665	170.933	181.433	184.842	199.920	56,01	57,99	58,59	63,53
4	Banjarnegara	319.159	317.993	321.303	319.594	183.174	191.988	190.240	215.253	57,39	60,37	59,21	67,35
5	Kebumen	444.288	422.707	423.668	425.252	237.726	242.305	247.916	276.116	53,51	57,32	58,52	64,93
6	Purworejo	281.865	265.833	265.083	266.828	146.627	147.298	155.016	148.490	52,02	55,41	58,48	55,65
7	Wonosobo	265.082	268.561	268.910	269.890	147.491	157.360	159.073	163.686	55,64	58,59	59,15	60,65
8	Magelang	435.516	439.797	442.124	439.946	270.805	274.840	260.661	272.700	62,18	62,49	58,96	61,98
9	Boyolali	366.476	356.657	356.582	356.861	234.592	241.013	207.138	234.968	64,01	67,58	58,09	65,84
10	Klaten	479.498	444.279	444.865	444.571	282.406	246.032	254.428	268.854	58,90	55,38	57,19	60,47
11	Sukoharjo	329.205	318.745	316.176	317.421	190.369	189.112	183.030	176.295	57,83	59,33	57,89	55,54
12	Wonogiri	414.099	376.448	376.594	376.518	252.073	229.017	215.988	223.727	60,87	60,84	57,35	59,42
13	Karanganyar	326.103	311.094	310.044	311.080	188.966	202.355	181.848	187.202	57,95	65,05	58,65	60,18
14	Sragen	345.302	334.408	336.074	335.078	219.223	226.087	197.253	226.077	63,49	67,61	58,69	67,47
15	Grobogan	510.109	490.976	490.362	493.891	335.691	317.808	290.746	305.478	65,81	64,73	59,29	61,85
16	Blora	327.396	321.876	325.109	323.187	210.164	202.520	195.138	194.460	64,19	62,92	60,02	60,17
17	Rembang	224.670	228.259	225.410	227.798	131.933	125.334	132.443	141.138	58,72	54,91	58,76	61,96
18	Pati	478.897	472.455	467.978	472.923	273.246	261.270	285.460	263.570	57,06	55,30	61,00	55,73
19	Kudus	313.527	299.689	299.392	298.084	197.885	187.882	174.509	195.235	63,12	62,69	58,29	65,50
20	Jepara	403.624	405.946	400.315	403.520	220.169	223.882	235.275	230.618	54,55	55,15	58,77	57,15
21	Demak	384.407	391.097	387.540	390.715	217.537	212.376	226.090	218.662	56,59	54,30	58,34	55,96

No	Kab/Kota	Jumlah Total Penduduk Usia Kerja Perempuan				Jumlah Angkatan Kerja Perempuan				% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
22	Semarang	358.749	360.206	369.807	360.958	229.832	244.691	212.920	234.553	64,06	67,93	59,18	64,98
23	Temanggung	264.434	265.238	265.182	266.282	158.086	177.230	159.934	172.732	59,78	66,82	60,31	64,87
24	Kendal	356.949	328.932	329.383	329.350	211.622	189.839	194.315	188.395	59,29	57,71	58,99	57,20
25	Batang	260.564	261.979	259.785	263.013	141.626	155.332	154.511	149.603	54,35	59,29	59,48	56,88
26	Pekalongan	317.295	303.254	302.444	303.489	183.088	172.734	178.627	172.267	57,70	56,96	59,06	56,76
27	Pemalang	508.394	457.339	459.110	458.141	246.036	226.488	270.979	226.746	48,39	49,52	59,02	49,49
28	Tegal	525.381	500.492	504.877	503.405	239.731	234.521	296.244	238.228	45,63	46,86	58,68	47,32
29	Brebes	641.329	622.236	628.073	624.150	324.284	360.697	368.160	275.855	50,56	57,97	58,62	44,20
30	Kota Magelang	55.466	47.533	46.284	46.642	29.578	39.360	28.049	28.630	53,33	61,77	60,60	61,38
31	Kota Surakarta	219.088	200.738	200.255	200.645	118.765	115.294	115.239	123.876	54,21	57,44	57,55	61,74
32	Kota Salatiga	71.973	62.579	67.183	67.260	38.956	37.077	38.640	40.642	54,13	59,25	57,51	60,43
33	Kota Semarang	609.536	612.894	614.043	609.989	346.986	350.521	358.211	340.073	56,93	57,19	58,34	55,75
34	Kota Pekalongan	111.628	101.459	101.032	103.354	63.483	61.856	59.428	56.536	56,87	60,97	58,82	54,70
35	Kota Tegal	97.633	91.330	89.438	89.638	47.691	53.669	52.834	43.143	48,85	58,76	59,07	48,13
	Total	**12.543.814**	**12.163.882**	**12.171.023**	**12.186.061**	**7.060.659**	**7.061.590**	**7.158.371**	**6.988.421**	**56,29**	**58,05**	**58,81**	**57,35**

Sumber : Sakernas BPS, 2008 – 2013 (diolah).

c. Produk Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan responsif gender di Provinsi Jawa Tengah, secara sistematis telah dilakukan langkah-langkah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, telah mengintegrasikan isu gender ke dalam penjelasan misi dan kebijakan. Selain itu, beberapa isu gender telah terintegrasi di dalam Renstra SKPD, antara lain pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan; Dinas Pendidikan; serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terkait dengan penyusunan dokumen RKPD, isu gender telah terintegrasi sejak Tahun 2008. Selain dokumen perencanaan, produk kebijakan yang dihasilkan adalah KUA-PPAS yang responsif gender; Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RBA RSUD-RSJD; Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, serta Peraturan Gubernur tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

d. Rasio KDRT

Berdasarkan data rasio KDRT dari kabupaten/kota, dapat disimpulkan bahwa ratio KDRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2008 sebesar 0,01%, meningkat menjadi 0,028% pada Tahun 2012. Peningkatan tersebut terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT kepada lembaga layanan. Namun angka tersebut tetap belum dapat menggambarkan kasus KDRT yang sesungguhnya karena tidak semua korban melaporkan kepada pelayanan terpadu.

e. Jumlah Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan

Berbagai kebijakan telah disusun dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perlindungan hak perempuan antara lain perlindungan bagi korban kekerasan yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 411/91 Tahun 2009 dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 411/I03.A tanggal 1 Agustus 2011 serta terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Selain itu juga telah disusun kebijakan perlindungan hak perempuan dalam bentuk Perda tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif.

f. Produk Kebijakan terkait Penanganan Tenaga Kerja di Bawah Umur

Mendasarkan konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu konvensi yang melindungi Hak Asasi Anak. Konvensi tersebut mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC, 1984) melalui Keppres RI No. 36 Tahun 1990 yang kemudian diperkuat dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Keterlibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk utamanya disebabkan oleh faktor kemiskinan dan upaya yang dilakukan adalah penarikan anak-anak dari pekerjaan terburuk. Perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk di Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Jumlah penduduk usia 10-14 tahun pada Tahun 2012 yang bekerja di Jawa Tengah sebesar 79.834 anak, lebih besar bila dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan anak yang bekerja usia 15-17 Tahun 2012 sebesar 370.798 anak, lebih besar bila dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97.
Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2012

No	Provinsi / Nasional	Jumlah Penduduk Usia (orang)	
		10 – 14 tahun	15 – 17 tahun
1	Banten	18.405	134.678
2	Jawa Barat	51.485	356.964
3	DKI Jakarta	7.146	100.168
4	**Jawa Tengah**	**79.834**	**370.798**
5	DIY	7.509	28.530
6	Jawa Timur	70.629	298.321
	Nasional	**894.404**	**2.680.426**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Selama kurun waktu Tahun 2008-2012, persentase anak yang bekerja pada usia 10-17 tahun di Jawa Tengah menunjukkan penurunan pada Tahun 2010 dibanding 2009 yaitu dari 9,95% menjadi 7,87%, namun mengalami peningkatan menjadi 7,90% pada Tahun

2011, dan menjadi 9,06% pada tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98.
Persentase anak yang bekerja usia 10 – 17 Tahun
Tahun 2008 - 2012

Tahun	Total Anak	Jumlah Anak Yang Bekerja	%
2008	NA	NA	NA
2009	4.825.937	408.412	9,95
2010	4.866.137	382.842	7,87
2011	4.886.741	385.887	7,90
2012	4.972.822	450.632	9,06

Sumber : BPS, Pusdatinaker diolah KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013

g. Produk Hukum dan Kebijakan Daerah Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta Responsif Anak Skala Provinsi

Dalam rangka menguatkan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak telah disusun Peraturan Gubernur tentang Pokja Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Nomor 463/105/2006 tanggal 8 Desember 2006, Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Nomor 42 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011, dan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengamanatkan perlindungan anak melalui upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko kerentanan terhadap anak-anak, yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

h. Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kebijakan PUG sejak Tahun 2010 melalui Perencanaan dan Peng-anggaran Responsif Gender (PPRG). Tahun 2010 dan 2011, rasio SKPD yang menerapkan kebijakan PUG melalui PPRG sebesar 30,61%, dan pada Tahun 2012 telah mencapai 100%.

i. Rasio Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender

Rasio Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD sampai dengan Tahun 2012 baru mencapai 14,28%. Selanjutnya yang menerapkan PPRG pada Renstra SKPD dan Renja SKPD pada Tahun 2011 sebesar 8,57% meningkat menjadi 62,85 % pada Tahun 2012.

j. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2008 - 2012 mengalami peningkatan dari sebanyak 5.913 orang (Tahun 2008), menjadi 6.215 orang (Tahun 2012).

Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase tertinggi PNS perempuan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada pada pendidikan lulus Strata 1, dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,13%. Meskipun pada pendidikan Strata 2 meningkat rata-rata 1,015%, namun persentasenya masih rendah, sedangkan untuk Strata 3 tidak mengalami peningkatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2008 - 2012

Tingkat Pendidikan	Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
Lulus S-3	2	0,05	1	0,01	2	0,03	2	0,03	1	0,01
Lulus S-2	402	6,78	473	7,77	580	9,19	639	10,07	674	10,84
Lulus S-1	1.904	32,08	2.091	34,86	2.279	36,83	2.429	39,27	2.436	40,59
Lulus D-3	463	7,94	807	29,60	1.017	21,56	1.113	21,74	1.123	21,67
Lulus SMA sederajat	2.012	34,02	1.865	30,64	1.827	28,97	1.647	25,95	1.509	24,27
Lulus SMP sederajat	124	2,09	113	1,85	100	1,58	83	1,30	72	1,15
Lulus SD sederajat	62	1,09	71	1,16	72	1,14	63	0,99	55	0,88
Jumlah Pegawai Perempuan (Org)	**5.913**		**6.086**		**6.306**		**6.345**		**6.215**	

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2009–2013

Pada Tahun 2008 persentase perempuan dalam jabatan eselon II sebesar 18,75%, mengalami penurunan pada periode Tahun 2009-2010, namun meningkat kembali menjadi 14,92% pada Tahun 2012. Hal tersebut berbeda dengan jabatan eselon III, dimana persentase perempuan mengalami peningkatan dari 22,25% pada Tahun 2008 menjadi 26,98% pada Tahun 2012. Demikian pula dengan jabatan eselon IV meningkat dari 29,26% pada Tahun 2008 menjadi 34,89% pada Tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100.
Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Eselonisasi Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah perempuan pada jabatan eselon II	12 (18,75%)	9 (13,23%)	7 (10,29%)	9 (13,43%)	10 (14,92%)
2	Jumlah perempuan pada jabatan eselon III	95 (22,25%)	104 (23,05%)	106 (23,71%)	111 (24,12%)	119 (26,98%)
3	Jumlah perempuan pada jabatan eselon IV	364 (29,26%)	402 (32,05%)	413 (32,77%)	430 (32,77%)	431 (34,89%)

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
4	Pekerja perempuan di pemerintah	5.912 (32,32%)	6.352 (34,20%)	6.273 (34,70%)	6.345 (35,78%)	6.190 (37,20%)
5	Jumlah pekerja perempuan	6.314.818	6.585.048	6.543.610	6.674.759	6.566.616
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	0,09	0,10	0,10	0,095	0,09

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2008–2013

k. Persentase Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Parlemen

Keterwakilan politik perempuan merupakan salah satu indikator dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Persentase keterwakilan perempuan dalam politik di Lembaga Parlemen Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2008 - 2012 mengalami peningkatan dari 15% menjadi 21%. Peningkatan ini cukup signifikan karena adanya faktor pendukung yaitu kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Jumlah dan persentase anggota legislatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101.
Jumlah dan Persentase Anggota Legislatif
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2008	85	85	15	15
2009	81	81	19	19
2010	81	81	19	19
2011	81	81	19	19
2012	79	79	21	21

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2009–2013.

l. Rasio Ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta *Trafficking*

Dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2014. Pergub tersebut sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Capaian SPM tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102.
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2010 - 2012

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pengaduan	96,75	99,17	100
2	Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat	7,92	9,91	20.23
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPR/PKT rumah sakit	80,97	35,25	35.3
4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	49,33	50,00	28.0
5	Cakupan petugas rehabsos terlatih	56	56	9.2
6	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi peremuan dan anak korban kekerasan	100	100	100
7	Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus KTP/A	96	96	NA
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	63	91	93.1
10	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yg memiliki kemampuan pendampingan KTP/A	-	12,24	26.5
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	86,47	84,37	84
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial	85,09	81,59	81.9
13	Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	56	56	56

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2010–2013

m. Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Jumlah pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2009 - 2012 mengalami fluktuasi, yaitu sebanyak 2.478 (Tahun 2009), 3.215 (Tahun 2010), 2.737 (Tahun 2011), dan 2.883 (Tahun 2012). Keseluruhan pengaduan tersebut dalam setiap tahunnya dapat diselesaikan sepenuhnya (100%).

n. Rasio Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota yang telah mendeklarasikan menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) pada Tahun 2009 sebanyak 3 kabupaten/kota (8,6%), Tahun 2010 menjadi sebanyak 7 kabupaten/kota (20%), Tahun 2011 sebanyak 10 kabupaten/kota (28,5%) dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi 17 kabupaten/kota (48,6%).

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan KLA anak telah dilakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Gugus Tugas serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Peserta KB Aktif

Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun cenderung meningkat, walaupun kenaikannya tidak begitu besar, yaitu dari 4,9 juta pada Tahun 2008 menjadi 5,4 juta pada Tahun 2012. Data selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103.
Peserta KB Aktif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
1	2008	6.357.836	4.964.579	78,09
2	2009	6.487.025	5.080.590	78.32
3	2010	6.561.254	5.155.761	78.58
4	2011	6.683.596	5.285.530	79.08
5	2012	6.738.688	5.403.576	80.19

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

b. *Drop Out (DO) KB*

Persentase DO peserta KB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dari 11,46% pada Tahun 2008 meningkat menjadi 15,09% pada Tahun 2012. Peningkatan tersebut dikarenakan antara lain masih rendahnya komitmen kabupaten/kota terhadap program KB, belum mantapnya kelembagaan, rasio PLKB terhadap desa/kelurahan yang ditangani belum proporsional, dan masih banyak akseptor menggunakan alat kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104.
Peserta DO KB di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	DO KB	
		Jumlah (orang)	Persentase
1	2008	642.671	11,46
2	2009	655.569	11,69
3	2010	829.455	13,11
4	2011	911,924	14,71
5	2012	960.277	15,09

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

c. *Unmet Need*

Unmet Need adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan alat/cara KB atau kebutuhan KB yang tidak

terpenuhi. Persentase *Unmet Need* KB masih cukup tinggi walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 12,44% pada Tahun 2008 menjadi 10,26% pada Tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105.
***Unmet Need* KB di Provinsi Jawa Tengah**
Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (orang)	*Unmet Need* KB (%)
1	2008	6.357.836	790.980	12,44
2	2009	6.487.025	758.084	11,69
3	2010	6.561.254	760.704	11,59
4	2011	6.683.596	729.796	10,95
5	2012	6.738.688	691.640	10,26

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

d. Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Layanan KB Mandiri

Peran serta masyarakat dalam layanan KB mandiri sangat diperlukan bagi suksesnya pengendalian penduduk di Jawa Tengah. Kepesertaan KB Mandiri selama kurun waktu Tahun 2008-2012 berfluktuatif seperti terlihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106.
Peserta KB Mandiri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Peserta KB Mandiri (orang)
1	2008	3.030.907
2	2009	2.827.153
3	2010	2.938.270
4	2011	2.903.225
5	2012	2.964.527

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

e. Prevalensi Akseptor KB (KB Aktif)

Prevalensi akseptor KB (KB aktif) persentasenya senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan bertambahnya akseptor KB, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107.
Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (orang)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	244.466	246.422	254.622	250.105	262.107
2	Banyumas	224.728	229.983	230.476	240.350	244.047
3	Purbalingga	143.277	144.099	147.915	151.768	155.483
4	Banjarnegara	149.658	155.539	157.614	148.020	152.094
5	Kebumen	157.955	180.425	161.361	164.531	166.728

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
6	Purworejo	96.285	97.214	97.894	98.492	101.376
7	Wonosobo	127.371	130.025	132.938	134.515	135.999
8	Magelang	162.873	165.431	169.097	172.371	179.084
9	Boyolali	142.723	145.303	148.073	152.626	151.933
10	Klaten	157.224	162.485	162.158	164.364	166.180
11	Sukoharjo	121.812	122.438	119.661	123.642	124.834
12	Wonogiri	177.929	179.605	180.397	183.059	18.662
13	Karanganyar	130.790	132.365	130.963	133.914	133.565
14	Sragen	134.860	142.896	146.694	151.108	152.316
15	Grobogan	218.296	218.769	219.773	221.418	229.555
16	Blora	141.617	145.263	150.087	156.767	160.541
17	Rembang	104.533	107.157	109.329	110.366	113.356
18	Pati	209.661	213.199	215.882	226.092	224.596
19	Kudus	106.658	107.803	108.628	108.506	118.707
20	Jepara	163.342	171.724	176.523	184.454	193.463
21	Demak	173.039	179.096	187.885	194.756	201.613
22	Semarang	151.492	157.551	158.465	159.482	166.831
23	Temanggung	118.947	119.362	120.264	122.041	125.551
24	Kendal	137.478	138.623	141.180	144.911	145.094
25	Batang	117.837	119.878	122.505	125.964	133.942
26	Pekalogan	125.841	130.487	135.028	146.765	143.236
27	Pemalang	193.850	205.063	213.132	217.396	223.650
28	Tegal	203.817	211.814	218.846	227.067	232.837
29	Brebes	271.966	283.067	281.555	310.026	308.507
30	Kota Megelang	14.132	14.018	14.033	13.110	14.212
31	Kota Surakarta	55.289	56.465	56.424	57.164	57.653
32	Kota Salatiga	21.853	21.221	20.312	22.644	23.071
33	Kota Semarang	196.876	198.086	195.554	197.197	204.026
34	Kota Pekalongan	33.087	33.485	35.191	33.883	33.364
35	Kota Tegal	33.071	34.218	35.302	96.658	37.363
Jawa Tengah		**4.964.579**	**5.080.590**	**5.155.761**	**5.285.530**	**5.403.576**

Sumber : BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Dari tabel 2.07 di atas terlihat bahwa jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya tidak begitu besar, yaitu dari 4,9 juta pada Tahun 2008 menjadi 5,4 juta pada Tahun 2012. Pada Tahun 2008 pengaruh transisi era otonomi daerah dan komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam program KB, terlihat bahwa jumlah peserta KB aktif mengalami penurunan walaupun relative kecil. Secara keseluruhan peningkatan peningkatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, karena persentase PUS yang ikut KB di Jawa Tengah cukup tinggi, yaitu setiap 100 PUS rata-rata 70 s/d 80 ikut KB. Kondisi seperti ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Jawa Tengah, karena harus menjaga/memelihara peserta KB aktif dalam jumlah yang besar agar tidak terjadi *Drop Out*.

f. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera danKeluarga Sejahtera 1

Jumlah keluarga Pra Sejahtera di Jawa Tengah Tahun 2012 sebanyak 2.793.948 KK. Kabupaten dengan jumlah keluarga Pra Sejahtera tertinggi adalah Kabupaten Rembang, yaitu sebanyak 269.707 KK, sedangkan terendah Kota Semarang sebanyak 4.862 KK. Selanjutnya untuk Keluarga Sejahtera I sebanyak 1.905.066 KK, dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 122.789 KK dan terendah Kota Magelang sebanyak 481 KK. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108.
Jumlah Kepala Keluarga, Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera 1 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Kepala Keluarga					Jumlah Keluarga Pra Sejahtera					Jumlah Keluarga Sejahtera I				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	Cilacap	462.473	471.953	479.607	489.605	489.605	140.491	137.369	138.690	139.571	111.658	109.927	112.811	112.289	117.413	117.413
2	Banyumas	449.234	459.431	464.892	470.153	471.968	116.537	118.413	116.778	111.821	74.645	84.371	88.572	87.691	91.775	91.904
3	Purbalingga	259.770	264.747	269.879	274.821	274.821	82.785	80.074	76.915	74.645	139.571	50.413	50.820	51.453	52.235	52.235
4	Banjarnegara	259.332	266.596	271.664	275.512	275.512	94.271	86.862	83.680	81.735	81.735	58.299	61.400	62.284	61.417	61.417
5	Kebumen	328.463	338.167	344.181	348.953	348.953	93.849	94.263	91.839	89.241	96.610	76.419	76.616	76.447	72.929	72.929
6	Purworejo	208.925	212.650	215.194	217.695	217.695	58.995	59.144	58.660	56.751	50.752	39.867	39.290	39.376	39.052	39.052
7	Wonosobo	223.265	227.970	232.126	235.274	238.400	69.922	68.438	65.680	63.308	58.761	45.381	44.774	44.774	45.361	44.328
8	Magelang	328.051	334.646	341.470	347.095	347.095	108.532	99.592	100.490	96.610	56.751	54.631	57.082	57.265	58.129	58.129
9	Boyolali	284.418	288.367	290.080	292.517	292.517	120.099	111.317	107.325	106.410	89.241	51.971	54.157	56.446	56.035	56.035
10	Klaten	338.306	343.396	345.229	349.631	353.849	83.723	78.179	73.040	69.243	56.085	71.948	72.994	75.429	74.905	73.848
11	Sukoharjo	219.534	222.450	228.976	231.152	236.047	52.078	52.620	51.180	50.441	126.650	46.566	46.232	45.598	46.858	47.678
12	Wonogiri	320.390	324.584	327.181	329.676	329.676	73.307	70.717	66.396	62.538	88.895	64.573	65.168	64.592	66.240	66.240
13	Karanganyar	237.068	241.804	245.396	249.636	249.636	37.957	35.104	33.882	31.973	151.124	24.282	23.381	22.892	22.731	22.731
14	Sragen	264.036	267.952	271.006	273.590	270.851	107.221	108.723	106.431	105.173	61.340	49.683	49.528	48.469	49.307	51.329
15	Grobogan	403.396	413.814	421.082	428.413	428.413	262.540	270.704	272.201	269.707	99.719	44.478	46.425	49.044	51.147	51.147
16	Blora	250.529	252.811	261.774	268.815	275.934	126.630	125.539	125.094	120.532	130.174	57.769	60.437	61.726	68.194	71.063
17	Rembang	177.461	182.373	185.863	188.574	189.799	99.102	98.363	97.352	96.998	269.707	12.973	13.270	12.965	10.929	10.822
18	Pati	384.645	391.812	396.183	398.990	413.956	172.542	163.757	154.910	144.515	138.144	61.642	66.988	72.903	73.347	84.826
19	Kudus	193.160	200.193	203.334	208.505	208.505	28.237	26.192	25.934	25.887	82.131	36.701	38.774	39.644	38.990	38.990
20	Jepara	289.191	301.823	313.177	320.258	320.258	84.930	84.758	83.766	82.131	95.017	53.481	59.022	64.686	65.375	65.375
21	Demak	302.726	310.427	319.269	327.856	341.363	147.716	144.131	133.028	128.950	123.196	61.481	66.916	71.610	74.172	77.563
22	Semarang	262.621	269.560	273.638	278.819	226.590	89.551	86.814	76.190	70.299	25.887	35.006	37.096	44.961	51.682	48.412
23	Temanggung	207.553	211.205	214.285	217.717	217.717	64.896	60.898	53.744	50.752	68.039	25.286	20.786	20.919	19.147	19.147
24	Kendal	261.284	265.602	272.106	276.878	281.074	115.629	111.910	106.796	101.488	106.410	38.457	40.553	39.732	41.239	42.121
25	Batang	204.398	208.614	211.860	217.335	220.999	84.104	82.275	81.241	80.303	99.378	46.054	46.463	45.003	47.720	48.627
26	Pekalogan	226.611	232.178	235.806	241.540	245.757	62.707	61.066	58.256	57.351	49.549	48.337	53.107	54.254	55.838	57.350
27	Pemalang	355.108	364.672	369.507	377.718	377.718	135.242	129.766	127.859	126.650	31.973	75.029	78.507	81.010	79.830	79.830
28	Tegal	390.218	399.376	408.629	418.268	422.996	95.103	94.269	91.413	89.993	62.538	84.104	85.246	87.232	88.261	88.330
29	Brebes	499.298	508.698	515.061	524.152	525.946	190.627	162.136	158.100	151.124	79.221	96.011	119.826	121.676	122.789	122.789
30	Kota Megelang	32.091	33.375	33.215	33.351	33.411	4.017	4.178	4.445	4.869	42.777	5.616	5.841	6.375	6.779	6.781
31	Kota Surakarta	118.873	119.488	120.307	121.862	121.862	13.567	11.952	11.744	11.500	11.364	26.913	24.893	25.354	25.025	24.901
32	Kota Salatiga	44.271	45.008	45.577	46.421	58.876	7.906	8.331	6.996	6.989	15.206	7.338	7.422	7.822	8.411	8.411
33	Kota Semarang	367.701	376.030	383.795	392.037	392.037	45.522	44.094	43.512	42.777	4.862	70.121	67.386	69.739	70.260	70.260
34	Kota Pekalongan	68.743	70.464	71.421	73.985	73.985	15.939	15.807	15.560	15.206	7.849	14.317	15.132	15.686	14.817	14.817
35	Kota Tegal	65.290	66.788	67.785	69.733	67.302	9.216	9.655	9.263	8.557	6.989	15.863	16.980	18.303	18.343	18.236
Jumlah		9.288.433	9.489.024	9.650.555	9.816.537	9.841.123	3.095.490	2.997.410	2.908.390	2.826.038	2.793.948	1.745.308	1.813.895	1.855.649	1.886.682	1.905.066

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2013

13. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti teknologi dan sumber daya ekonomi. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mencakup 2 (dua) komponen penting yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

a. Sarana Sosial

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Dalam kaitan ini panti sosial milik pemerintah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS melalui sistem kelembagaan serta mendorong munculnya produk-produk operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

Selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 telah dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana milik pemerintah dengan harapan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan sosial. Lihat Tabel 2.109.

Tabel 2.109.
Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial
Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah Panti Sosial	Jumlah Panti Sosial Yang di Rehab	Persentase
1	2008	52	9	17,31
2	2009	52	8	15,38
3	2010	52	5	9,62
4	2011	52	5	9,62
5	2012	52	11	21,15

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013

Penanganan PMKS dilakukan melalui 2 pendekatan yakni pendekatan kelembagaan Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial, serta melalui peran masyarakat dan PSKS. Pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial telah dilaksanakan di 27 Balai Resos dan 25 Unit Resos, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110.
Jumlah Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang Melakukan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
dan Perlindungan Sosial Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah Panti	Realisasi	Persentase
1	2008	52	52	100
2	2009	52	52	100
3	2010	52	52	100
4	2011	52	52	100
5	2012	52	52	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,2013

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 menunjukkan peningkatan dari 0,04% menjadi 2,37%. Kondisi tersebut dikarenakan penanganan PMKS telah diupayakan oleh berbagai elemen yakni pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, melalui sistem kelembagaan (Balai Rehabilitasi Sosial) dan sistem berbasis masyarakat. Namun demikian capaian kinerja penanganan PMKS tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PMKS yang ada di Jawa Tengah. Oleh karenanya kedepan penanganan tersebut perlu ditingkatkan dengan harapan nantinya PMKS mampu melaksanakan fungsi sosial dan meningkat kesejahteraannya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111.
Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Populasi PMKS	Jumlah Penanganan	Persentase
1	2008	6.701.000	2.835	0,04
2	2009	6.584.535	6.260	0,10
3	2010	6.243.091	42.706	0,70
4	2011	6.111.535	118.935	1,95
5	2012	6.090.369	144.217	2,37

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013

c. Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Secara garis besar penanganan PMKS dimaksud terbagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS Potensial dan Non Potensial, dengan demikian jumlah penanganan PMKS tidak berbanding lurus dengan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

Pada Tahun 2008 persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 0,03% meningkat menjadi 0,12% pada Tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112.
Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Populasi PMKS (orang)	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial (orang)	Persentase
1	2008	6.701.000	1.678	0,03
2	2009	6.584.535	3.491	0,05
3	2010	6.243.091	3.003	0,05
4	2011	6.111.535	4.426	0,07
5	2012	6.090.369	7.257	0,12

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013

d. Jumlah PSKS yang memperoleh bimbingan/pelatihan

Upaya untuk penguatan kapasitas PSKS dilakukan melalui bimbingan/pelatihan guna membantu pemerintah dalam penanganan PMKS di sekitarnya, selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2008 sebanyak 300 PSKS (0,15%) meningkat menjadi 2.612 PSKS (1,32%) pada Tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113.
Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Populasi PSKS	Penguatan Kapasitas	Persentase
1	2008	197.316	300	0,15
2	2009	197.316	710	0,36
3	2010	197.316	1.067	0,54
4	2011	197.316	1.008	0,51
5	2012	197.316	2.612	1,32

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013

e. Jumlah Panti yang sudah menerapkan Standar Pelayanan

Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27 unit seluruhnya telah menyusun standar pelayanan rehabilitasi sosial sebagai landasan operasional pelayanan rehabilitasi sosial penerima manfaat sistem kelembagaan namun dalam implementasinya belum ditindaklanjuti dengan survei kepuasan masyarakat. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.114.

Tabel 2.114.
Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Yang Menerapkan
Standar Pelayanan (SOP) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Balai Resos	Standar Pelayanan
1	2008	27	1
2	2009	27	1
3	2010	27	1
4	2011	27	1
5	2012	27	1

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013

14. Ketenagakerjaan

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Perkembangan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode Tahun 2008 - 2012 terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan semakin banyaknya penduduk yang dapat terserap dalam lapangan pekerjaan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2008	15.463.658	24.411.601	63,35
2	2009	15.835.382	24.669.525	64,19
3	2010	15.809.447	23.874.585	66,22
4	2011	15.916.135	23.905.331	66,58
5	2012	16.132.890	23.933.408	67,41

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

b. Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Kasus Hubungan Industrial (HI) selama periode Tahun 2008-2012 menunjukkan jumlah yang berfluktuatif, tertinggi pada Tahun 2012 sebesar 4.017 kasus dan terendah pada Tahun 2008 sebanyak 94 kasus, namun semua kasus tersebut dapat terselesaikan 100%, data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.116.

Tabel 2.116
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2008	94	100% terselesaikan
2	2009	1.063	100% terselesaikan
3	2010	2.349	100% terselesaikan
4	2011	511	100% terselesaikan
5	2012	4.017	100% terselesaikan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, 2013

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada Tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan, diikuti dengan peningkatan TPAK. Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Tahun	Angkatan Kerja *)	
		Jumlah (orang)	TPAK (%)
1	2008	16.690.966	68,37
2	2009	17.087.649	69,27
3	2010	16.856.330	70,60

No	Tahun	Angkatan Kerja *)	
		Jumlah (orang)	TPAK (%)
4	2011	16.918.797	70,77
5	2012	17.095.031	71,43

Sumber : BPS Provinsi Jateng dan Pusdatinaker, 2013
*Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan*

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah selama periode Tahun 2008 – 2012 terus mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.118.

Tabel 2.118.
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

No	Tahun*)	Jumlah Penganggur (orang) *)	TPT (%) *)
1	2008	1.227.308	7,35
2	2009	1.252.267	7,33
3	2010	1.046.883	6,21
4	2011	1.002.662	5,93
5	2012	962.010	5,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013
*Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan*

Sebaran TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah pada Tahun 2012 dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak merata, terdapat 9 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, 9 kabupaten/kota yang berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan di bawah Nasional dan 17 kabupaten berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sebaran TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.30.

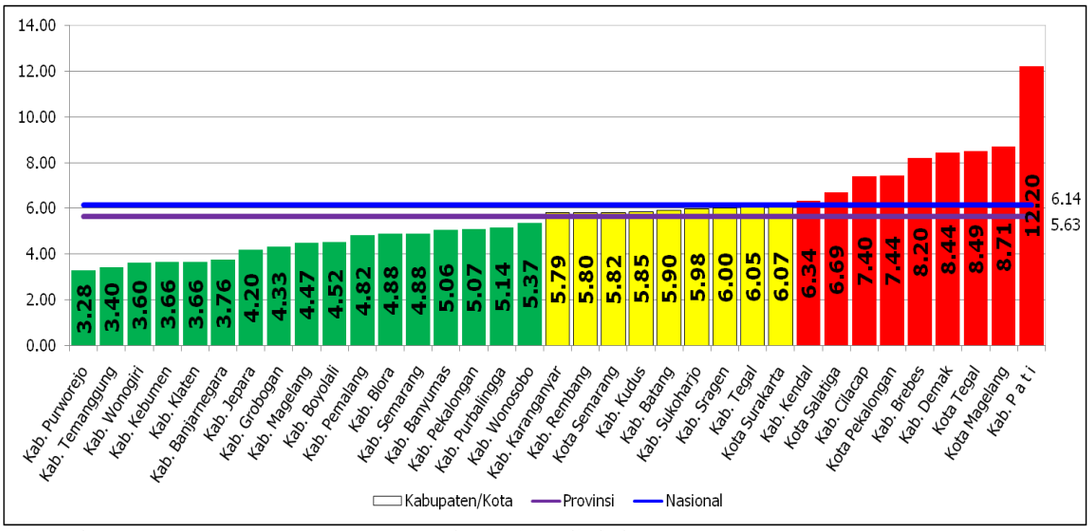

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

Gambar 2.30
Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

e. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Berdasarkan Tabel 2.119 menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja meningkat sebesar 219.374 orang (32,66%) pada Tahun 2012 bila dibandingkan pada Tahun 2010 sebesar 88.671 orang (14,73%).

Tabel 2.119.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 - 2012

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2010	602.024	88.671	14,73
2011	580.564	242.193	41,72
2012	671.603	219.374	32,66

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013

f. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah selama periode Tahun 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan cukup signifikan, mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah semakin mempunyai daya saing. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120.
PDRB ADHK Tahun 2000 per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHK 2000/Tenaga Kerja (Juta Rupiah)
1	2008	168.034.933,29	15.463.658	10,87
2	2009	176.673.456,57	15.835.382	11,16
3	2010	186.995.480,63	15.809.447	11,83

No	Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHK 2000/Tenaga Kerja (Juta Rupiah)
4	2011	198.226.349,46	15.916.135	12,45
5	2012	210.848.300,00	16.132.890	13,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

g. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode Tahun 2008 – 2012 mengalami penurunan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja formal di berbagai sektor. Perkembangan capaian proporsi tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja) (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja dan Pekerja Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)
1	2008	60,60
2	2009	61,51
3	2010	59,93
4	2011	58,17
5	2012	55,40

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Pusdatinaker, 2013 (diolah)

h. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah selama periode Tahun 2008 - 2012 terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122.
Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding KHL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	UMK (Rp/bln/orang)	KHL (Rp/bln/orang)	Rasio (%)
1	2008	601.419	667.715	90,10
2	2009	679.083	752.389	90,30
3	2010	734.874	801.210	91,81
4	2011	780.801	830.216	94,09
5	2012	834.255	864.859	96,42

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013

i. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode Tahun 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	2008	8.683	649.529
2	2009	9.737	643.574
3	2010	18.978	1.330.917
4	2011	19.664	1.966.390
5	2012	21.899	2.186.821

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013.

j. Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta program Jamsostek

Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) selama Tahun 2008 - 2012 berfluktuatif, namun cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pekerja/buruh sektor non formal terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.124.

Tabel 2.124.
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (orang)

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja
1	2008	27.755
2	2009	36.954
3	2010	33.107
4	2011	29.969
5	2012	32.784

Sumber : Dinakertransduk Prov. Jateng, 2013.

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian Jawa Tengah. Kinerja koperasi dapat diukur dari tingkat keaktifan koperasi, dan tingkat kesehatan koperasi khususnya pada unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Tingkat keaktifan koperasi dalam kurun waktu 2008 - 2012 cenderung meningkat, dari sebesar 70,53% pada Tahun 2008 menjadi sebesar 79,34% pada Tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai

dengan Tahun 2012 masih terdapat sebanyak 20,66% koperasi yang tidak aktif.

Kabupaten/kota dengan persentase koperasi aktif paling rendah adalah Kabupaten Pati, Tegal dan Kendal. Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pasca penerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi. Perkembangan tingkat keaktifan koperasi dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125.
Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Koperasi	17.618	25.076	25.427	26.346	26.857
2	Jumlah Koperasi aktif (unit)	12.426	19.850	19.617	20.571	21.308
3	Persentase koperasi aktif (%)	70,53	79,16	77,15	78,08	79,34

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2013

Pengelolaan KSP yang baik dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah pada Tahun 2012 sebesar 8,54%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam sangat rendah, sehingga memerlukan pembinaan khususnya dalam pengelolaan keuangan koperasi. Perkembangan tingkat kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126.
Jumlah Koperasi Sehat KSP/USP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah koperasi simpan pinjam (KSP/USP)	15.285	16.157	19.129	19.881	20.296
2	Jumlah koperasi sehat (unit)	-	40	189	116	1.733
3	Persentase koperasi sehat (%)	-	0,25	0,99	0,58	8,54

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2013

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2012 mencapai sebanyak 3.792.071 unit. Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan UMKM. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 64.294 unit pada Tahun 2008 menjadi 80.583 unit pada Tahun 2012. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 264.762 orang pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 345.622 orang pada Tahun 2012. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar 3.976 Milyar pada tahun 2008 menjadi 6.816 Milyar pada Tahun 2012.

Omset mengalami peningkatan dari sebesar 9.527 Milyar pada Tahun 2008 menjadi 18.972 Milyar pada Tahun 2012. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127.
Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
1	**Jumlah UMKM**	**unit**	**64.294**	**65.878**	**67.616**	**70.222**	**80.583**
	Produksi/Non Pertanian	unit	20.343	20.682	21.205	23.374	26.171
	Pertanian	unit	8.305	9.385	9.775	10.097	13.242
	Perdagangan	unit	28.007	28.172	28.247	28.362	32.055
	Jasa	unit	7.639	7.639	8.389	8.389	9.115
2	**Penyerapan Tenaga Kerja**	**orang**	**264.762**	**278.000**	**285.335**	**293.877**	**345.622**
3	**Asset**	**Rp. Milyar**	**3.976**	**4.334**	**4.448**	**5.266**	**6.816**
4	**Omzet**	**Rp. Milyar**	**9.527**	**10.194**	**10.463**	**14.476**	**18.972**

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dalam rangka pengembangan UMKM diperlukan dukungan kredit perbankan. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2008 - 2012 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan,dari sebesar Rp 1.955 Milyar pada Tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 11.960 Milyar pada Tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama jumlah UMKM yang mengakses KUR juga mengalami peningkatan dari sebanyak 367.553 UMKM menjadi 1.784.123 UMKM. Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah yang disalurkan melalui 7 bank pelaksana dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128.
Realisasi KUR Menurut Bank Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

NO	BANK PELAKSANA	TAHUN									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		UMKM	REALISASI (Milyar)	UMKM	REALISASI (Milyar)	UMKM	REALISASI (Milyar)	UMKM	REALISASI (Milyar)	UMKM	REALISASI (Milyar)
1	BANK MANDIRI	112	30.035.089.130	134	32.955.578.260	466	94.753.078.260	844	256.804.121.630	2.019	507.154.121.630
2	BRI	365.270	1.636.399.129.400	471.710	2.084.642.024.893	902.047	3.873.897.521.800	1.177.574	5.348.223.321.900	1.510.391	8.379.574.423.118
3	BNI	1.698	177.418.970.835	1.730	182.652.060.835	4.578	273.538.163.800	13.897	628.314.122.962	54.348	1.300.668.773.279
4	BANK BUKOPIN	257	70.201.964.793	260	70.500.000.100	562	88.238.997.499	842	112.685.540.635	842	112.685.540.635
5	BANK SYARIAH MANDIRI	74	23.928.100.000	112	35.270.100.000	269	79.528.047.459	496	88.310.447.459	3.841	164.731.818.831
6	BTN	142	17.347.150.000	242	21.990.072.382	1.419	74.876.809.547	2.443	121.840.274.734	3.394	248.747.091.311
7	BANK JATENG	-	-	-	-	5.468	310.970.501.000	12.732	748.500.293.061	20.502	1.246.754.668.061
	JUMLAH	367.553	1.955.330.404.158	474.188	2.428.009.836.470	914.809	4.795.803.119.365	1.208.828	7.304.678.122.381	1.595.337	11.960.316.436.865

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2013

16. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal digambarkan melalui indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor yang menanamkan modalnya pada Tahun 2008-2012 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Jumlah investor PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2011, sebanyak 43 investor. Perkembangan jumlah investor di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2.129.
Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 Berdasarkan Izin Usaha

Tahun	Jumlah Investor/ Perusahaan		
	PMA	PMDN	Jumlah
2008	10	28	38
2009	3	27	30
2010	9	16	25
2011	16	27	43
2012	13	17	30

Sumber: BPMD ProvinsiJawa Tengah, 2013

Persetujuan proyek, nilai dan realisasi berfluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah dari Tahun 2008-2010 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.2,716 Trilyun, menjadi sebesar Rp.8,320 Trilyun pada Tahun 2010. Namun demikian, terjadi penurunan nilai investasi pada Tahun 2011 menjadi sebesar Rp.6,414 Trilyun dan Tahun 2012 menjadi Rp.2,993 Triliun.

Realisasi jumlah proyek di Jawa Tengah berfluktuasi disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu dari investor antara lain yang terkait dengan ketersediaan lahan, infrastruktur penunjang, kesiapan masyarakat menerima investasi, implementasi regulasi di tingkat pusat/provinsi/ kabupaten/kota. Perkembangan nilai investasi di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130.
Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Persetujuan		Realisasi Izin Usaha Tetap	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)
2008	86	22,312	50	2,716
2009	81	48,037	36	3,510
2010	125	7,242	46	8,320
2011	166	26,698	64	6,414
2012	131	55,808	48	2,993

Sumber: BPMD ProvinsiJawa Tengah, 2013

Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN dari tahun ke tahun berfluktuasi dan cenderung meningkat. Demikian pula rasio daya

serapnya dari sebesar 396 orang per perusahaan pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 1.511 pada Tahun 2012, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN	15.052	6.885	12.794	19.785	45.322
Jumlah seluruh PMA/PMDN	38	30	25	43	30
Rasio daya serap tenaga kerja	396	230	512	460	1.511

Sumber: BPMD ProvinsiJawa Tengah, 2013.

Nilai realisasi PMDN Tahun 2009 nilai PMDN sebesar Rp.2.570,34 milyar, meningkat sebesar 92,34 % dari Tahun 2008. Pada Tahun 2010 realisasi meningkat dari Rp.2.825,40 milyar dari Tahun 2009, namun persentase peningkatan menurun menjadi 9,92 %. Realisasi Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.430 milyar (127,58%) dari Tahun 2010. Sedangkan realisasi Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp.1.633,95 milyar dengan penurunan persentase sebesar 74,59 %. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.132.

Tabel 2.132.
Nilai Realiasasi PMDN dan Pertumbuhan Realisasi PMDN
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai Realisasi PMDN (Rp.Milyar)	1.336,34	2.570,34	2.825,40	6.430,00	1.633,95
Pertumbuhan realisasi PMDN (%)	383,36	92,34	9,92	127,58	74,59

Peningkatan dan penurunan realisasi investasi secara umum dipengaruhi oleh: (1) faktor internal : regulasi, infrastruktur (ketersediaan kawasan industri, sarana dan prasarana), bahan baku, upah buruh, kemudahan perizinan/pelayanan investasi dan promosi investasi, kualifikasi/kompetensi SDM/tenaga kerja; 2) faktor eksternal : suku bunga kredit investasi, tingkat *money policy*, nilai tukar, inflasi, stabilitas polhukkam, peluang pasar/usaha, kebijakan nasional dan perekonomian global.

Dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanaman modal, Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari 7 indikator SPM yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2014, sejumlah 6 indikator telah tercapai bahkan melampaui target hingga 2012. Perkembangan capaian target SPM penanaman modal dapat dilihat pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133.
Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Indikator	Target SPM 2014	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor /Bidang Usaha Unggulan (sektor/ bidang usaha/tahun)	1	-	-	-	-	1
2	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/ tahun)	1	3	3	3	4	6
3	Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal provinsi (kali/tahun)	1	3	3	5	4	6
4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi(%).	100	-	-	-	60	60
5	Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (kali/kali)	1	2	2	2	2	2
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%)	100	-	-	-	75	75
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (kali)	1	2	2	2	3	3

Sumber: BPMD ProvinsiJawa Tengah, 2013

Dalam rangka mendorong kinerja urusan penanaman modal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Tahun 2012 - 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan publik telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012.

Keberadaan UPT PTSP dimaksud, diharapkan dapat memberikan kemudahaan bagi para investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan. Pada Tahun 2012, jumlah perizinan yang telah dilayani sesuai

dengan SPM yaitu Izin Prinsip dan Izin Usaha (Baru, Perluasan, Perubahan, Penggabungan). Sedangkan pelayanan non perizinan meliputi : Angka Pengenal Importir Produsen (APIP), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) masih dilakukan oleh instansi teknis. Diharapkan mulai Tahun 2014 pelayanan non perizinan tersebut dapat dilayani oleh UPT PTSP. Kegiatan penanaman modal di Jawa Tengah juga didukung oleh adanya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 35 kabupaten/kota.

17. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2008-2012 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 7 hingga 8 kali penyelenggaraan, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.

Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan pelestarian cagar budaya (candi, situs), dari total sebanyak 199 buah (Tahun 2012) telah dilestarikan sebanyak 12 lokasi (6,03%) melalui kegiatan berupa optimalisasi 56 candi, 143 situs dan 48 museum serta 5.162 benda cagar budaya bergerak dan 1.783 benda cagar budaya tidak bergerak. Selanjutnya untuk meningkatkan kecintaan terhadap cagar budaya dan museum telah dilaksanakan Tahun Kunjungan Museum dengan jumlah pengunjung museum sebanyak 379.357 orang (Tahun 2010), 996.320 orang (Tahun 2011) dan 1.201.642 orang (Tahun 2012).

Sepanjang Tahun 2008-2013 telah pula diselenggarakan kegiatan seni budaya antara lain *Borobudur International Festival*, Pencanangan *Visit* Jateng *Years* 2013, Festival Seni dan Budaya. Kemudian dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai budaya daerah telah dilakukan kegiatan jelajah budaya, kemah budaya, serta pembinaan dan peningkatan budi pekerti. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134.
Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kali	7 kali	7 kali	8 kali	8 kali
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
3	Jml cagar budaya (candi, situs)	198	198	198	198	199
4	Jml cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs)	-	13 lokasi	12 lokasi	10 lokasi	12 lokasi
5	Jumlah Museum	43	43	43	48	48
6	Jumlah Pengunjung Museum	-	-	379.357	996.320	1.201.642

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013

18. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, pada Tahun 2008-2012 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 54 kegiatan. Selain itu guna meningkatkan wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda dilakukan beberapa upaya, salah satunya melalui pelatihan dan pengembangan Generasi Muda, dengan capaian kegiatan dari Tahun 2008 hingga 2012 cenderung fluktuatif.

Guna mendorong peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda, telah dilakukan kegiatan kewirausahaan kepemudaan, melalui pembentukan kelompok kewirausahaan pemuda yang dilakukan mulai Tahun 2010. Sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 60 kelompok kewirausahaan pemuda.

Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, pada Tahun 2012 telah terbentuk 55 organisasi kepemudaaan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.135.

Tabel 2.135.
Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	55	55	72	72	72
2	Pelatihan dan pengembangan generasi muda	4.185	5.370	10.000	3.493	3.500
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	12 keg	12 keg	9 keg	11 keg	10 keg
4	JumlahKelompokKewirausahaan Pemuda	0	0	10	25	25

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2013

Pada bidang keolahragaan kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 54 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Kurun waktu Tahun 2008 – 2012 klub olahraga dan gedung olahraga serta kegiatan olahraga semakin meningkat, sedangkan untuk organisasi olahraga jumlahnya tidak mengalami perubahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136.
Perkembangan Olahraga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Organisasi Olahraga	-	54	54	54	54
2	Jumlah Kegiatan Olahraga	20 keg	23 keg	23 keg	23 keg	27 keg

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2013.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Jawa Tengah selama kurun waktu 2008 - 2012 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain aksi teroris, kerusuhan 72 kasus, konflik sosial 1.430 kasus, unjuk rasa 2.000 kejadian, serta masih adanya paham radikal dan aliran sesat, sebagaimana Tabel 2.137 dan Tabel 2.138.

Tabel 2.137.
Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

NO	KELOMPOK MASSA	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	PELAJAR	4	45	9	0	0
2	MAHASISWA	135	101	123	80	167
3	BURUH	52	70	51	72	73
4	MASYARAKAT	245	151	197	174	251
JUMLAH		**436**	**367**	**380**	**326**	**491**

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2013

Tabel 2.138.
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	TUNTUTAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	IDEOLOGI	0	2	3	2	0
2	POLITIK	59	44	72	31	4
3	EKONOMI	75	122	93	103	73
4	SOSBUD	266	93	118	137	378
5	HUKAM	36	106	94	53	36
JUMLAH		**436**	**367**	**380**	**326**	**491**

Sumber : Polda Jawa Tengah,2013

Di samping itu, tingkat kriminalitas ditunjukkan melalui Jumlah Tindak Pidana (*crime total*) sebanyak 92.902 kasus dan Tindak Pidana Menonjol (*crime index*) yang terdiri dari curat, curas, curanmor, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan, uang palsu,

narkoba, kenakalan remaja dan pemerkosaan sebanyak 43.128 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.139.

Tabel 2.139.
Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana Menonjol di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Tindak Pidana Menonjol	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	2008	17.008	12.945	7.738	5.357
2	2009	17.391	12.850	7.857	5.246
3	2010	19.645	12.700	8.948	6.117
4	2011	19.764	10.708	8.971	5.186
5	2012	19.094	12.039	9.614	4.926
J U M L A H		**92.902**	**61.242**	**43.128**	**26.832**

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2013

b. Politik

Kondisi politik Jawa Tengah dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 sebesar 58,46% turun menjadi 55,73% pada Tahun 2013. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada dikabupaten/kota selama kurun waktu Tahun 2008-2012, tertinggi adalah Kota Salatiga 82,06% dan terendah Kabupaten Pemalang 56,74%. Pada Tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih Pileg DPR/DPRD sebesar 71,26% dan Pilpres sebesar 71,01%.Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana Tabel 2.140.

Tabel 2.140.
Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	KEGIATAN	TAHUN(kegiatan)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	1	35	6	9	6
2.	Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol	-	10	3	4	4
3.	Penguatan budaya dan etika politik masyarakat	1	6	4	4	4
JUMLAH		**2**	**51**	**13**	**17**	**14**

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah,2013

c. Demokrasi

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan kelembagaan

demokrasi (*democratic institution*) terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Skor IDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 sebesar 66,45 mengalami penurunan pada Tahun 2010 menjadi 63,42, namun demikian pada Tahun 2011 meningkat menjadi 65,59. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.141.

Tabel 2.141.
Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2011

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)		
		2009	2010	2011
I.	**Kebebasan Sipil**	86,48	84,83	84,05
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	78,75	55,00	51,88
	2. Kebebasan Berpendapat	50,02	0,00	74,97
	3. Kebebasan Berkeyakinan	93,22	93,22	86,44
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	86,93	100,00	93,05
II.	**Hak-Hak Politik**	51,85	46,29	46,29
	1. Hak Memilih dan Dipilih	42,59	42,59	42,59
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	61,11	50,00	50,00
III.	**Lembaga Demokrasi**	64,43	63,70	73,04
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	94,94	94,94
	2. Peran DPRD	69,88	42,60	69,48
	3. Peran Partai Politik	5,01	57,35	98,06
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	80,30	80,30
	5. Peran Peradilan yang Independen	75,00	50,00	32,50
Skor IDI		66,45	63,42	65,59

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013.

d. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2008 - 2012 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana Tabel 2.142.

Tabel 2.142.
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya	6	6	4	4	4
2.	Sarasehan pendayagunaan Ormas	-	4	2	2	2
3.	Sarasehan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah	-	-	2	2	2

No.	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)				
		2008	2009	2010	2011	2012
4.	Peningkatan peran politik Ormas/LSM/Toga/Toma	5	3	3	4	4
JUMLAH		**11**	**13**	**11**	**12**	**12**

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah,2013

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2008-2012 rasio Polisi Pamong Praja di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 0,73 menjadi 0,78, adapun pelanggaran Peraturan Daerah untuk setiap tahunnya dapat diselesaikan secara tuntas, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.143 dan Tabel 2.144.

Tabel 2.143.
Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Rasio
1.	2008	2.408	32.626.390	0,73
2.	2009	2.487	32.864.563	0,75
3.	2010	2.508	32.382.657	0,77
4.	2011	2.537	32.643.612	0,77
5.	2012	2.616	33.270.207	0,78

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Tabel 2.144.
Penyelesaian Pelanggar Perda
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Jumlah Pelanggar Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1.	2008	252	252	100
2.	2009	359	359	100
3.	2010	126	126	100
4.	2011	2740	2740	100
5.	2012	1926	1926	100
	Jumlah	**5.403**	**5.403**	**100**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya

pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.145 dan Tabel 2.146.

Tabel 2.145.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No.	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1.	2009	186.304	32.864.563	56,69
2.	2010	264.915	32.382.657	81,81
3.	2011	272.280	32.643.612	83,41
4.	2012	254.791	33.270.207	76,58

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Tabel 2.146.
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No.	Tahun	Jumlah Pos Siskamling	Jumlah Desa/Kel	Rasio
1.	2009	4.230	8.574	0,49
2.	2010	46.769	8.577	5,45
3.	2011	75.413	8.578	8,79
4.	2012	103.065	8.578	12,02

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

c. Hukum dan HAM

Pembangunan bidang Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah.Upaya yang dilakukan meliputi penetapan Perda Provinsi, evaluasi Raperda dan Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota, Penindakan terhadap pelanggar Perda Provinsi serta bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berperkara di peradilan.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah dilaksanakan penyuluhan hukum di 35 kabupaten/kota dan pembentukkan 122 Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Disamping itu, guna penguatan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2011-2014, telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 180/43/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/45/2011 tentang Pembentukan Panitia RAN-HAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2014.

Dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014, telah

dilaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Aksi yang dilaksanakan meliputi Strategi Pencegahan Korupsi dengan fokus pada:

1) Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP;
2) Transparansi perencanaan dan penganggaran melalui publikasi dokumen yang dapat diakses melalui *website* jatengprov.go.id;
3) Transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui *website* LPSE.

d. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu upaya penataan sistem manajemen dan proses kerja melalui pengembangan *website* www.jatengprov.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat. Di samping itu, untuk mendukung penciptaan transparansi dan akuntabilits kinerja, telah tersedia berbagai sistem informasi manajemen, antara lain: Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan berbagai sistem informasi lainnya.

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disertai pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Gubernur kepada lembaga PTSP. Bidang perizinan dan non perizinan yang dilayani meliputi bidang penanaman modal, tenaga kerja, koperasi dan UMKM, kesbangpolinmas dan politik, sosial, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, kelautan dan perikanan, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta keamanan.

Terkait penataan desa/kelurahan pada Tahun 2010 dan 2011 terjadi pembentukan 4 (empat) desa baru dan perubahan status 2 (dua) desa menjadi kelurahan. Ke depan dimungkinkan terjadi pembentukkan/penggabungan/penghapusan/perubahan status desa/kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa/kelurahan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat serta telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

e. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan

potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri; Fasilitasi peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/kota dan kerjasama bilateral dengan provinsi lain; serta kerjasama *sister province* dengan 4 (empat) provinsi di luar negeri, yaitu Negara Bagian *Queensland* Australia, Provinsi Fujian China, Chung Cheong Buk Do Korea dan Siem Reap Kamboja.

f. Administrasi Keuangan Daerah

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 35/A/LHP/BPK/XVIII.NG/5/2012.

g. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Selain itu dilaksanakan pula kerjasama dengan pihak ketiga pada 3 (tiga) obyek aset, pinjam pakai 11 obyek aset, dan disewakan 27 obyek aset.

h. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan (obrik)

meliputi seluruh SKPD di jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 468 LHP; Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati/Walikota di Jawa Tengah 35 LHP; penanganan dan pemeriksaan khusus 412 kasus; pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan di 35 kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Sampai dengan triwulan I Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 499 LHP terdapat 6.015 temuan dengan 6.930 rekomendasi dimana 6.128 rekomendasi (88,43%) telah ditindaklanjuti dan 802 rekomendasi (11,57%) dalam proses; Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati/Walikota di Jawa Tengah sebanyak 35 LHP terdapat 491 Temuan dengan 542 Rekomendasi dimana 494 rekomendasi (91,14%) telah ditindaklanjuti dan 48 rekomendasi (8,86%) dalam proses; penanganan dan pemeriksaan khusus 421 kasus; pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan laporan hasil pemeriksaan sebanyak 344 LHP terdapat 2.727 temuan dengan 3.544 rekomendasi dimana 2.791 rekomendasi (78,75%) telah ditindaklanjuti dan 753 rekomendasi (21,25%) dalam proses.

i. Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; Diklat Formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), Diklat Kader (Bintek dan Kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), Kenaikan Pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

j. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

(1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan pada 59 SKPD Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO 9001:2008 sebagaimana

Tabel 2.144, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana Tabel 2.145.

(3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui diklat aparatur sebagaimana Tabel 2.146. Selain itu, selama kurun waktu 2008-2012 juga telah dilaksanakan Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.372 orang dan fasilitasi pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 34.674 orang; Tes kompetensi bagi 1.136 pejabat struktural pemerintah provinsi serta fasilitasi 579 pejabat struktural pemerintah kabupaten/kota; Evaluasi kinerja 4.450 pejabat struktural di Instansi induk dan UPT, 15.108 pejabat fungsional dan 24.640 pejabat fungsional umum dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2013 mencapai 31.740 pejabat fungsional umum; Pemberian penghargaan kepada PNS melalui penganugerahan tanda jasa kepada 4.209 PNS provinsi dan 36.707 PNS kabupaten/kota; Peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas belajar sebanyak 42 orang, 361 orang mendapat bantuan biaya untuk izin belajar; Penyelenggaraan Diklat Aparatur bagi 27.506 orang dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2013 mencapai 27.961 orang.

(4) Penguatan Pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan internal pada 60 obyek pemeriksaan lingkup provinsi dan 35 obyek pemeriksaan lingkup kabupaten/kota, serta implementasi Sistem Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah pada 2 SKPD provinsi.

(5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, pendekatan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT *online*, *drive thru*, SAMSAT keliling, gerai SAMSAT.

(7) Penataan perundang-undangan, dilaksanakan melalui penyusunan 38 Raperda Provinsi serta evaluasi 954 Raperda dan Klarifikasi 887 Perda kabupaten/kota.

(8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap SKPD, serta pembentukan *problem solving health* pada RSUD Provinsi.

Tabel 2.147.
Sertifikasi ISO 9001:2008
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Jumlah UPP
1.	2008	3
2.	2009	3
3.	2010	3
4.	2011	2
5.	2012	2
	Jumlah	**13**

Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian,Setda Prov Jateng, 2013.

Tabel 2.148.
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Jumlah UPP	Nilai	
			Sangat Baik	Baik
1.	2008	-	-	-
2.	2009	-	-	-
3.	2010	2	2	-
4.	2011	-	-	-
5.	2012	48	1	47
	Jumlah	**50**	**3**	**47**

Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian, Setda Prov Jateng, 2013.

Tabel 2.149.
Diklat Aparatur Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Diklat	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Teknis	835	973	552	490	995
2.	Fungsional	547	568	409	260	480
3.	Kepemimpinan	267	532	468	420	676
4.	Pemerintah Daerah	210	290	64	35	40
5.	Prajabatan	1.100	4.410	4.581	5.917	2.387

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jateng, 2013.

21. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan beberapa regulasi daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pangan Lahan Pertanian Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pergub Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan;
3. Pergub Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
4. Pergub Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah;
5. Pergub Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
6. Pergub Nomor 47 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan Dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.

Ketahanan pangan di Jawa Tengah secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Jawa Tengah;
c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan luas lahan sawah sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.150.

Tabel 2.150.
Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dan 2012

No.	Kabupaten/Kota	Luas lahan Sawah		Luas (Ha) penurunan/ kenaikan lahan sawah	Persentase penurunan/ kenaikan lahan sawah
		2008 (Ha)	2012 (Ha)*		
1	Cilacap	63.092	63.318	226	0,36
2	Banyumas	32.858	32.367	-491	-1,49
3	Purbalingga	20.961	20.737	-224	-1,07
4	Banjarnegara	14.600	14.663	63	0,43
5	Kebumen	39.258	39.768	510	1,30
6	Purworejo	29.891	30.060	169	0,57
7	Wonosobo	17.288	17.174	-114	-0,66
8	Magelang	36.848	37.220	372	1,01
9	Boyolali	23.070	22.920	-150	-0,65
10	Klaten	33.172	33.398	226	0,68
11	Sukoharjo	21.102	21.256	154	0,73
12	Wonogiri	32.105	32.231	126	0,39
13	Karangannyar	22.341	22.133	-208	-0,93
14	Sragen	40.339	39.763	-576	-1,43

No.	Kabupaten/Kota	Luas lahan Sawah		Luas (Ha) penurunan/ kenaikan lahan sawah	Persentase penurunan/ kenaikan lahan sawah
		2008 (Ha)	2012 (Ha)*		
15	Grobogan	63.669	64.790	1121	1,76
16	Blora	46.359	46.570	211	0,46
17	Rembang	30.105	29.172	-933	-3,10
18	Pati	58.348	59.329	981	1,68
19	Kudus	20.579	20.691	112	0,54
20	Jepara	26.493	26.576	83	0,31
21	Demak	49.461	50.893	1432	2,90
22	Semarang	25.316	24.410	-906	-3,58
23	Temanggung	20.630	20.619	-11	-0,05
24	Kendal	26.207	26.218	11	0,04
25	Batang	22.568	22.480	-88	-0,39
26	Pekalongan	25.124	24.950	-174	-0,69
27	Pemalang	38.617	37.632	-985	-2,55
28	Tegal	42.313	40.287	-2026	-4,79
29	Brebes	60.634	62.700	2066	3,41
30	Kota Magelang	212	211	-1	-0,47
31	Kota Surakarta	106	103	-3	-2,83
32	Kota Salatiga	774	765	-9	-1,16
33	Kota Semarang	4.034	3.965	-69	-1,71
34	Kota Pekalongan	1.283	1.260	-23	-1,79
35	Kota Tegal	895	895	0	0
TOTAL		**990.652**	**991.524**	**872**	**0,09**

Sumber: JDA Tahun 2009. JDA Tahun 2013 (diolah)
*Ket : *Data luas sawah periode Tahun 2010-2012 sama tiap tahunnya, tidak ada perubahan*

Jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dalam kurun waktu 2008 - 2012 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2008 tercatat sebanyak 5.697.121 orang dan pada Tahun 2012 sebanyak 5.064.377 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.151.

Tabel 2.151.
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008 (orang)	2009 (orang)	2010 (orang)	2011 (orang)	2012 (orang)
1	Cilacap	267.516	279.728	258.682	290.564	239.960
2	Banyumas	160.114	167.471	172.666	196.928	164.900
3	Purbalingga	146.113	149.894	138.936	127.818	111.111
4	Banjarnegara	228.712	225.722	235.310	236.017	237.622
5	Kebumen	238.226	238.002	203.214	207.941	216.669
6	Purworejo	159.593	149.742	142.908	124.566	133.926
7	Wonosobo	196.421	184.795	206.983	215.049	213.748
8	Magelang	263.034	256.451	271.549	242.096	250.581
9	Boyolali	202.127	215.055	200.180	140.666	134.404
10	Klaten	125.514	137.435	104.627	112.937	121.581
11	Sukoharjo	85.560	104.955	75.912	50.927	63.583
12	Wonogiri	334.331	341.399	310.895	271.942	264.921
13	Karanganyar	129.597	121.970	118.959	117.514	116.268
14	Sragen	176.613	205.324	185.015	172.160	166.812
15	Grobogan	364.429	417.427	391.712	364.192	362.500
16	Blora	261.096	278.500	256.970	206.732	204.770
17	Rembang	155.535	169.091	171.748	140.266	137.206
18	Pati	240.997	243.826	252.812	219.159	183.798
19	Kudus	60.445	65.140	49.643	54.552	50.776
20	Jepara	92.094	108.837	100.258	81.010	59.554
21	Demak	185.565	210.649	181.971	227.820	175.454
22	Semarang	159.770	171.444	171.931	177.394	190.958
23	Temanggung	178.067	166.428	182.385	166.116	144.553
24	Kendal	247.149	241.389	209.909	192.641	195.465
25	Batang	116.829	116.300	129.258	105.992	105.761

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008 (orang)	2009 (orang)	2010 (orang)	2011 (orang)	2012 (orang)
26	Pekalongan	87.901	95.399	91.145	80.153	74.443
27	Pemalang	192.373	192.044	164.936	237.688	230.847
28	Tegal	189.233	192.773	185.337	167.397	140.420
29	Brebes	380.163	364.513	416.322	400.359	322.969
30	Kota Magelang	861	1.430	493	565	106
31	Kota Surakarta	1.743	2.608	1.366	2.034	2.015
32	Kota Salatiga	7.117	7.014	2.688	5.903	5.705
33	Kota Semarang	25.316	21.363	12.697	24.369	27.415
34	Kota Pekalongan	4.269	8.091	4.998	5.854	6.233
35	Kota Tegal	12.698	12.618	12.114	9.131	7.343
TOTAL		**5.697.121**	**5.864.827**	**5.616.529**	**5.376.452**	**5.064.377**

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009 - 2013

Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2008 - 2012 mengalami peningkatan seperti pada Gambar 2.31 s.d. 2.33. Ketersediaan pangan tersebut merupakan produksi pangan Jawa Tengah setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.

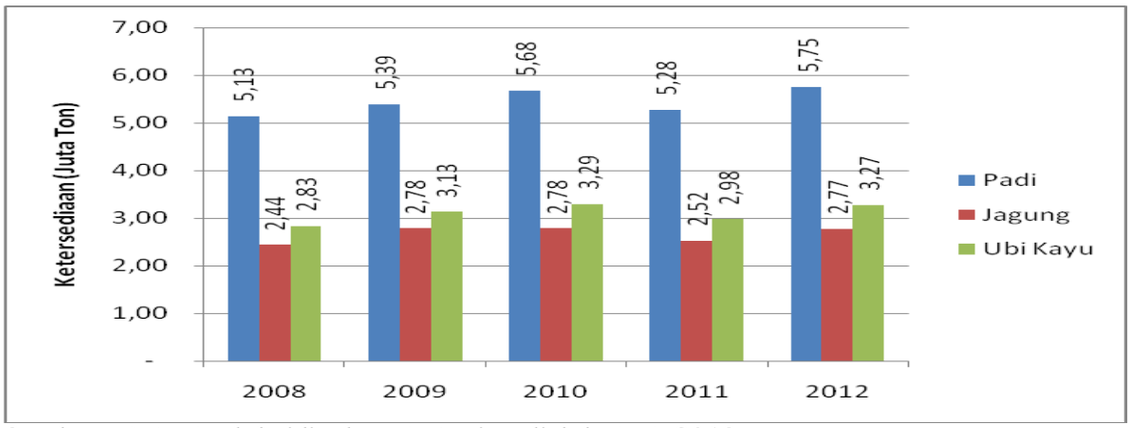

Sumber : Data Produksi lingkup Pertanian diolah BKP, 2013

Gambar 2.31
Ketersediaan Padi, Jagung, Ubi Kayu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Keterangan : Ketersediaan beras dihitung: *) GKG tersedia = GKG dikurangi penggunaan gabah 7,3%, untuk benih 0,9%; pakan 0,44%; industri non makanan 0,56%; tercecer/susut 5,4%. Konversi GKG tersedia ke beras (62,7%), dikurangi penggunaan beras 3,33 %, untuk pakan ternak/unggas 0,17%; industri non makanan 0,66%; tercecer/susut 2,5%;

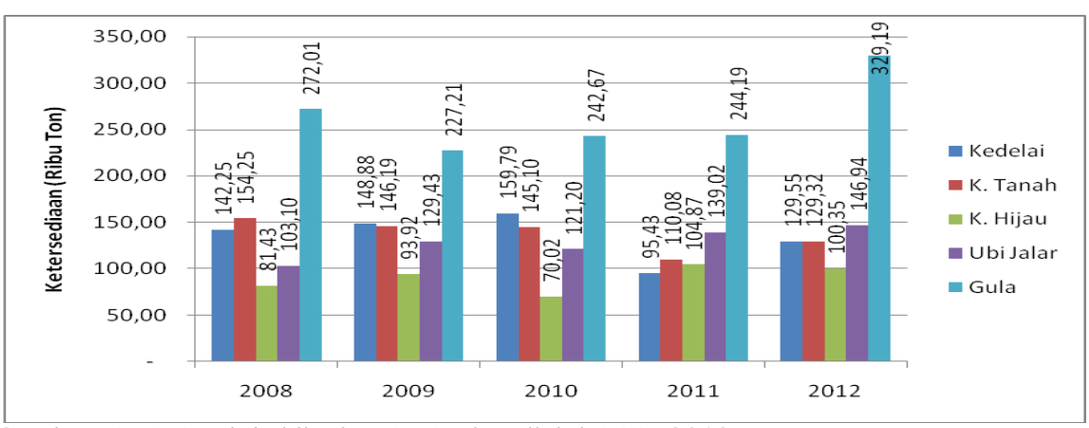

Sumber : Data Produksi lingkup Pertanian diolah BKP, 2013

Gambar 2.32
Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

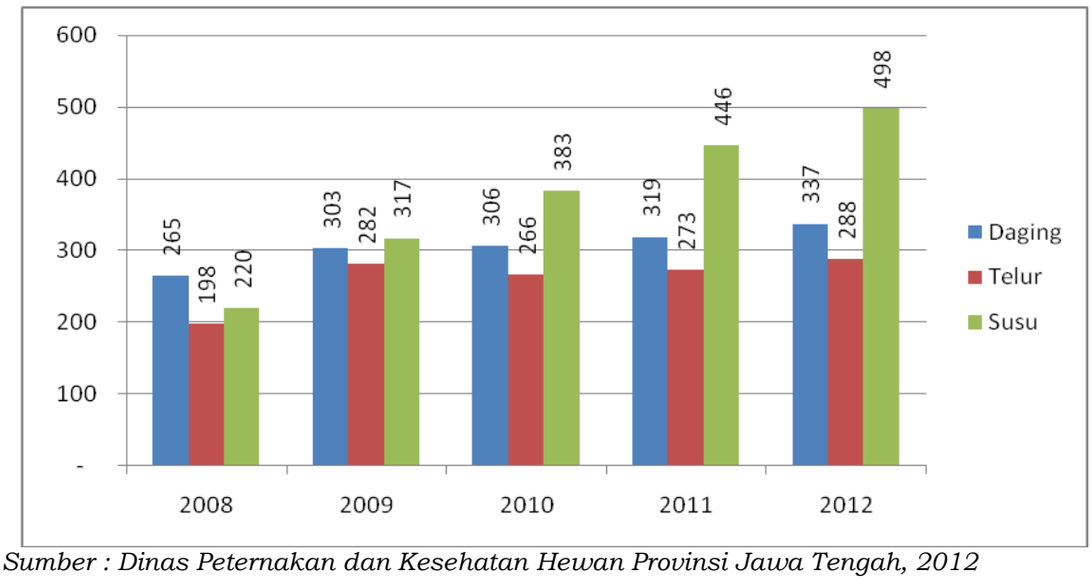

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2012

Gambar 2.33
Ketersediaan Daging, Susu, Telur di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Jawa Tengah ditunjukkan oleh Neraca Bahan Makanan (NBM). Berdasarkan hasil analisis NBM Jawa Tengah dari Tahun 2008 - 2012 diketahui bahwa ketersediaan energi rata-rata 3.245 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein rata-rata 88,50 gram/kap/hari. Capaian ini telah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII Tahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2.200 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kap/hari. Pada periode tersebut, ketersediaan energi naik rata-rata 10,59% per tahun dan protein naik rata-rata 7,00% per tahun. Perkembangan ketersediaan energi dan protein perkapita dapat dilihat pada Gambar 2.34 dan 2.35.

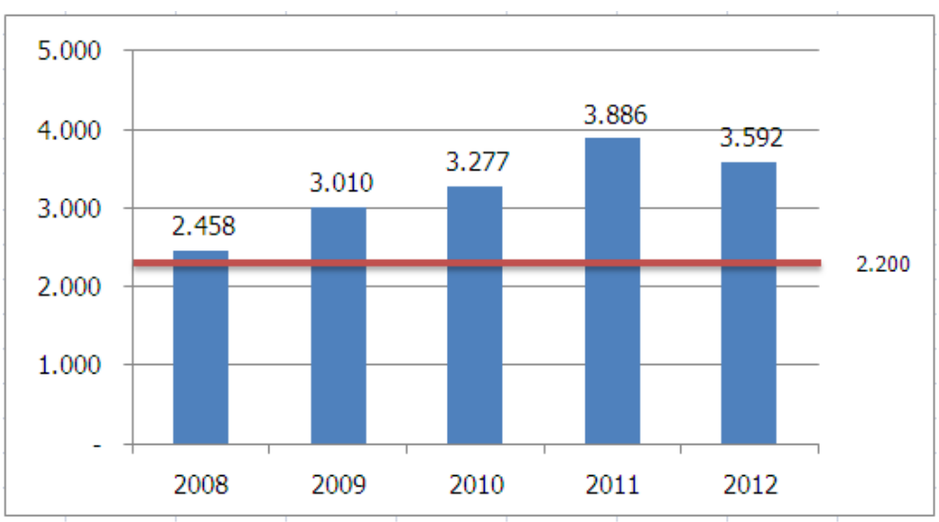

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2012

Gambar 2.34
Ketersediaan Energi Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012 (k.kal/kap/hr)

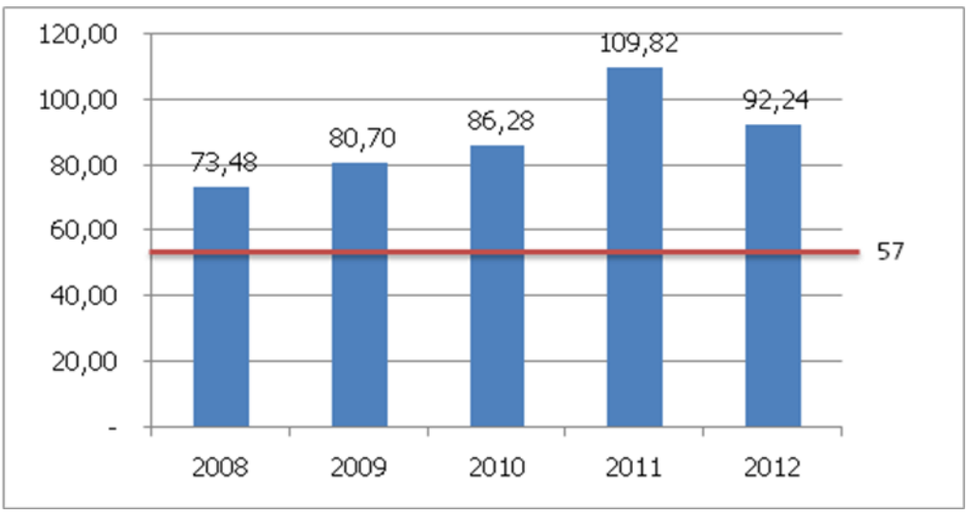

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2012

Gambar 2.35
Ketersediaan Protein Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012 (gram/kap/hari)

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diketahui melalui pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Tingginya ketersediaan bahan makanan di Jawa Tengah tetap harus dijaga untuk memenuhi kedaulatan pangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya. Hal ini bila diperhatikan dan diusahakan oleh masyarakat Jawa Tengah akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat di desa dilaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dari Tahun 2006 - 2012 sebanyak 281 desa. Pada Tahun 2013 kegiatan pembinaan Desa Mandiri Pangan (DMP) dilaksanakan di 131 desa dan untuk tahap persiapan dan penumbuhan terdapat 4 desa baru di Kabupaten Purworejo dan Wonogiri.

Distribusi bahan pangan tersedia bagi semua konsumen, meskipun wilayah sentra produksi berbeda dengan wilayah pasar dan sentra konsumen. Untuk mendukung distribusi bahan pangan dilakukan antara lain melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita tani, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 1.453 desa/kelompok.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari Tahun 2008 - 2012 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Jawa Tengah dari aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel 2.152.

Tabel 2.152.
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,5	1,9	2,0	1,93	2,40	2,50
3	Pangan Hewani	24,0	14,3	16,0	12,10	17,88	17,85
4	Minyak & lemak	5,0	4,8	4,6	5,50	4,95	5,00
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,0	1,0	1,42	0,97	1,00
6	Kacang-kacangan	10,0	8,9	8,0	9,21	10,00	10,00
7	Gula	2,5	2,4	2,1	1,79	2,27	2,48
8	Sayur & buah	30,0	24,9	25,0	22,67	25,18	26,00
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	83,2	83,7	86,02	88,66	89,87
Skor PPH Nasional			81,9	75,7	77,5	77,3	75,4

Sumber: Badan KetahananPangan Provinsi Jateng, 2013

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Jawa Tengah sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil.

Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel 2.153 dan Tabel 2.154.

Tabel 2.153.
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Beras (Kg/Kap/Th)	100,57	96,93	108,43	102,48	90,49
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	19,36	12,61	21,99	27,52	32,31
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	33,15	41,98	21,10	38,44	37,21
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	76,80	87,45	69,43	76,57	73,98

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Tabel 2.154.
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Kelompok Pangan	Ideal	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Padi-padian	1000	1230	1.550,3	1.228,84	1.094,80	1.033,02
2	Umbi-umbian	120	78	90,7	98,75	100,51	118,89
3	Pangan Hewani	240	145,3	184,0	121,87	178,80	178,52
4	Minyak & lemak	200	196,2	210,1	200	188,10	200,18
5	Buah/biji berminyak	60	40	45,0	39,99	37,90	40,15
6	Kacang-kacangan	100	90	93,0	99,78	137,60	158,99
7	Gula	100	99	95,0	97,61	97,80	99,24
8	Sayur & buah	120	101	115,0	91,3	100,70	104,12
9	Lain-lain	60	13,1	14,9	14,9	67,30	69,29
JUMLAH		2000	1.992,6	2.398	2.015	2.003,51	2.002,39

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan sesuai kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2015. Jenis pelayanan yang harus dipenuhi yaitu :

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan, dengan Indikator Penguatan Cadangan Pangan

Pemerintah provinsi wajib memiliki lembaga cadangan pangan dan menyediakan cadangan pangan pemerintah sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras yang diharapkan pada Tahun 2015 terpenuhi sebesar 60% (120 Ton Ekuivalen Beras). Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Badan Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP) pada Tahun 2012 sebanyak 251.657 Ton gabah setara 141.894 Ton Beras, lebih besar dari target sebesar 90 Ton ekuivalen beras, meningkat dari Tahun 2011 sebanyak 89.475 Ton Ekuivalen Beras. Persentase capaian cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar 70,95%, sudah melebihi target SPM, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.155 dan 2.156.

Tabel 2.155.
***Data Base* Indikator Penguatan Cadangan Pangan**
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, 2012 dan 2015

Uraian	Satuan	Tahun		
		2011	2012	2015
Target	Persen	40	45	60
	Ton Ekuivalen Beras	80	90	120
Realisasi	Persen	44,74	70,94	-
	Ton Ekuivalen Beras	89,475	141,894	

Sumber:Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Tabel 2.156.
Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan di BPCP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

Tahun Anggaran	Realisasi (Ton)	
	Gabah	Setara Beras
2009	128,38	75,80
2010	110,77	70,196
2011	118,392	71,035
2012	227,361	125,05
2013*)	230	131,10
JUMLAH	**796,523**	**473,179**

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2013
Keterangan : *) Masih dalam proses pengadaan

Untuk meningkatkan cadangan pangan dan menjamin stabilitas harga pangan di masyarakat telah dikembangkan lumbung pangan. Jumlah lumbung pangan sampai dengan Tahun 2012 di 29 kabupaten dan Kota Semarang sebanyak 1.220 lumbung. Rata-rata stok cadangan pangan pada setiap lumbung sebanyak 3 ton setara beras sehingga

dapat mendukung ketersediaan cadangan pangan beras sebanyak 3.360 Ton. Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 232 lumbung pangan masyarakat.

b. Distribusi dan Akses Pangan, dengan Indikator Ketersediaan Informasi pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Target komoditas yang wajib dipantau adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. Persentase capaian ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan Tahun 2012 sebesar 93,65%, belum mencapai target SPM sebesar 100% pada Tahun 2015.

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, dengan Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Tahun 2012 sebesar 80%, sudah sesuai dengan Target SPM. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan baik pangan segar maupun pangan olahan pada Tahun 2012 telah dilakukan terhadap 50 sampel dengan jumlah aman 40 sampel (80%).

d. Penanganan Kerawanan Pangan, dengan Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan telah dilaksanakan dengan program Desa Mandiri Pangan dan Revitalisasi lumbung pangan masyarakat di daerah yang mengalami defisit pangan pada saat masa tanam atau berpotensi rawan pangan/miskin. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta intervensi melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).

Hasil analisis FSVA 2012, menunjukkan 29 kabupaten yang ada di Jawa Tengah pada kondisi sangat tahan pangan. Penanganan daerah rawan pangan difokuskan untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan transien. Kegiatan penanganan rawan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan di 99 desa.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program

pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). Jumlah LPMD/K sebagaimana pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Jumlah LPMD/K
1.	2008	8.574
2.	2009	8.576
3.	2010	8.576
4.	2011	8.576
5.	2012	8.578

Sumber : Bapermasdes Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2008-2013 adalah meningkatkan peran dan fungsi melalui revitalisasi 15.000 unit Posyandu dan pembangunan 44 unit Posyandu. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.158.

Tabel 2.158.
Posyandu Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
1.	2008	36.897
2.	2009	47.579
3.	2010	48.124
4.	2011	48.124
5.	2012	48.187

Sumber : Bapermades Provinsi Jawa Tengah, 2012

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah memberikan peran nyata untuk meningkatkan pendapatan keluarga yaitu dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi kader-kader PKK. Hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2008 - 2012 adalah telah ditumbuhkembangkan 332 unit Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK). Disamping itu PKK memiliki beberapa peran dalam meningkatkan ketrampilan dan

pengetahuan 1.750 kader PKK dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan yaitu melalui kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pelestarian lingkungan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.159.

Tabel 2.159.
PKK Aktif di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Tahun	Jumlah PKK Aktif
1.	2008	8.574
2.	2009	8.574
3.	2010	8.576
4.	2011	8.577
5.	2012	8.578

Sumber : Bapermasdes Provinsi Jawa Tengah, 2012

Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) telah dilaksanakan penguatan kelembagaan Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa melalui pemberian bantuan stimulan dan pelatihan bagi pengurus. Hasil yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 adalah kapasitas 153 unit UED-SP, 87 unit BUMDes dan 176 unit Pasar Desa, dapat dilihat pada Tabel 2.160.

Tabel 2.160.
UED-SP, BUMDES dan Pasar Desa
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

NO	KEGIATAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	UED-SP	30	10	30	49	34
2.	BUMDES	-	-	29	29	29
3.	Pasar Desa	20	60	29	39	28

Sumber : Bapermasdes Provinsi Jawa Tengah, 2012

23. Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.

Capaian kinerja sejak Tahun 2008 sampai dengan triwulan I Tahun 2013 antara lain : Tersusunnya Buku Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008 - 2012; Buku PDRB Tahun 2008 - 2012 dan Buku Tinjauan PDRB kabupaten/kota Tahun 2008 - 2012. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik.

24. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu Tahun 2008 - 2012 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Sementara itu pada tingkat kabupaten/kota belum semua SKPD melakukan pengelolaan arsip secara baku dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain tidak semua SKPD mempunyai tenaga arsiparis/tenaga pengelola kearsipan, belum tersedianya tempat/ruang penyimpanan arsip sesuai dengan standar sebagaimana pada Tabel 2.161.

Tabel 2.161.
Pengelolaan Arsip Secara Baku
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah SKPD	Jumlah SKPD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
1	2008	60	60	1,00
2	2009	60	60	1,00
3	2010	60	60	1,00
4	2011	59	59	1,00
5	2012	59	59	1,00

Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan, penyusutan sampai dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis dan dinamis. Jumlah arsip yang dilestarikan mulai Tahun 2008 - 2012 mencapai 196.500 arsip sebagaimana terlihat pada Gambar 2.36.

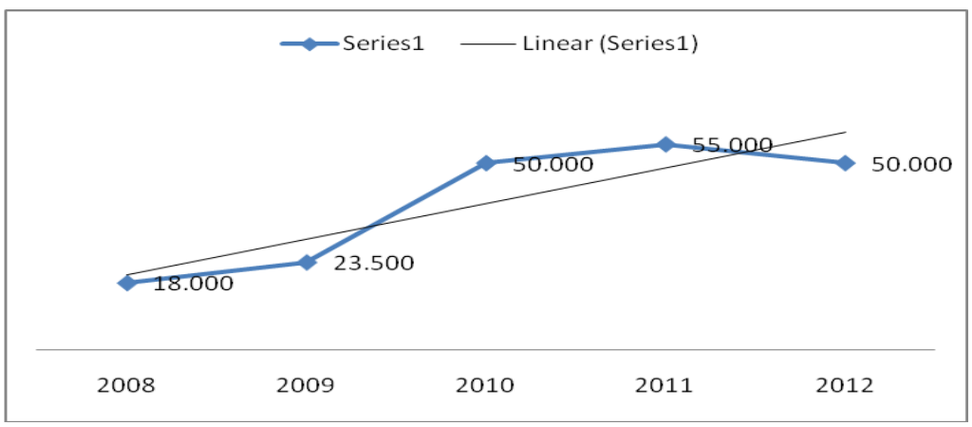

Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.36
Jumlah Arsip yang Dilestarikan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Kondisi SDM bidang kearsipan khususnya arsiparis masih sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang kearsipan. Selama kurun waktu 5 tahun telah diselenggarakan 11 kali kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang kearsipan melalui Bintek bagi 2.900 Sekdes dan 320 SDM Aparatur.

25. Komunikasi dan Informatika

a. Persentase SKPD Provinsi yang memiliki *website* sendiri

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan harus dibuka seluas-luasnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan di *website* milik pemerintah. Cara ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.162.

Tabel 2.162.
Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah Memiliki *Website*
Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah SKPD Provinsi	Jumlah SKPD Provinsi Memiliki *Website*	Persentase
1	2008	60	24	41
2	2009	60	27	46
3	2010	60	30	50
4	2011	59	33	55
5	2012	59	35	58

Sumber : Dishubkominfo Provinsi Jawa Tengah, 2013

b. Persentase SKPD Provinsi yang telah meng-*update* data di *website*nya

Kekinian data yang tersaji dalam *website* milik pemerintah akan memberikan gambaran hasil pembangunan kepada masyarakat dan juga investor yang membutuhkan data terbaru, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.163.

Tabel 2.163.
Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan *Update* Data Pada *Website* Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah SKPD Provinsi Memiliki *Website*	Jumlah SKPD Provinsi yang Telah Meng-*update* Data di*website*	Persentase
1	2008	24	19	80
2	2009	27	22	81
3	2010	30	25	83
4	2011	33	28	85
5	2012	35	30	85

Sumber : DishubkominfoProvinsi Jawa Tengah, 2013

c. Jumlah Surat Kabar

Jumlah surat kabar yang beredar di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 8 surat kabar (Tahun 2008), 9 surat kabar (Tahun 2009) dan 10 surat kabar (Tahun 2010, 2011 dan 2012).

26. Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu Tahun 2008-2012 sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Demikian juga untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 432.455 orang Tahun 2008 menjadi 595.200 orang Tahun 2012. Disisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya minat baca masyarakat, meskipun peningkatan tersebut belum optimal jika dikaitkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Perkembangan perpustakaan di Jawa Tengah terlihat pada Tabel 2.164.

Tabel 2.164.
Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian Data	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Desa	277	356	435	521	711
	b. Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi	1	1	1	1	1
	c. Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota	35	35	35	35	35
	d. Jumlah Perpustakaan Keliling	35	35	35	58	80
2	Jumlah Koleksi Perpustakaan	39.627	67.127	171.068	184.568	229.963
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	432.455	431.377	494.665	517.148	595.200

Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan ProvinsiJawa Tengah, 2013

2.3.2 . Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Pembangunan urusan pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu penyangga pangan nasional terutama beras, dapat dilihat dari produksi padi Tahun 2012 mencapai 10.232.934 Ton Gabah Kering Giling/GKG (setara dengan 5.729.529 Ton beras). Persentase kontribusi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 terhadap produksi beras nasional sebesar 14,83%. Sementara produksi jagung dan kedelai pada Tahun 2012 masing-masing sebesar 3.041.630 Ton dan 152.416 Ton. Secara keseluruhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 2.165 dan Tabel 2.166.

Tabel 2.165.
Produksi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Padi (ton)	9.136.405	9.600.416	10.110.830	9.391.959	10.232.934*
2	Beras (ton)[a]	5.130.875	5.391.456	5.678.098	5.274.390	5.729.529
3	Jagung (ton)	2.679.914	3.057.845	3.058.710	2.772.575	3.041.630*
4	Kedelai (ton)	167.345	175.156	187.992	112.273	152.416*
5.	Tebu (ton)	3.885.829	3.216.557	4.118.607	3.516.328	4.555.355
6.	Gula (ton)[a]	272.007	227.214	242.660	244.192	329.191
7.	Daging (kg)	183.770.371	203.841.029	228.189.441	239.459.443	252.218.874
8.	Susu (lt)	74.031.934	91.762.220	100.149.736	104.141.255	105.516.134
9.	Telur (kg)	191.355.603	249.804.428	250.226.811	257.175.536	271.819.998

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013; Dinpertan TPH dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2013
*Keterangan : * Angka Tetap*
[a] Data Hasil Olahan Dinas Pertanian TPH (Beras) dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Gula)

Tabel 2.166.
Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Produksi per hektar (kw/ha)				
		Padi	Jagung	Kedelai	Ubi	
					Kayu	Jalar
1	2008	55,06	41,92	14,96	164,32	133,10
2	2009	55,65	46,21	15,91	192,65	167,77
3	2010	56,13	48,41	16,48	206,10	172,91
4	2011	54,47	53,30	13,69	202,17	196,34
5	(ASEM 2012)	57,70	54,97	15,69	217,61	208,72

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2013
Keterangan: produktivitas tidak dijumlah, tetap dirata-rata (jumlah produksi/luas areal pada tahun tertentu)

Produksi pertanian selain tanaman pangan juga menjadi andalan Jawa Tengah untuk pemenuhan kebutuhan regional maupun provinsi lain. Pada Tahun 2012 produksi hortikultura cabe merah dan bawang merah mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2008. Sedangkan untuk produksi kentang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.167.

Tabel 2.167.
Produksi Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Komoditas (Ton)	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Cabai Merah	100.083	139.993	134.357	119.130	130.127
2	Bawang Merah	379.903	406.725	506.357	372.256	381.319
3	Kentang	263.147	288.654	265.123	250.402	252.607

Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, 2013

Tahun 2012 produksi hasil perkebunan seperti kelapa, kakao, karet dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2008. Perkembangan produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.168.

Tabel 2.168.
Produksi Tanaman Perkebunan Utama Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Komoditas (ton)	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kopi	14.292,31	15.010,12	16.224,81	9.837	33.474
2	Kakao	1.083,99	1.231,28	1.376,62	1.417	1.890
3	Kelapa	174.962	177.714	179.491	180.162	183.048
4	Karet	732,35	795,23	1.187,36	1.401,64	1.580
5	Cengkeh	5.869,27	6.108,26	6.558,44	4.236,27	7.571
6	Teh	5.579.95	5.512,06	6.131,58	6.105	6.436
7	Nilam	12.464	15.810,8	17.489,19	13.971	12.487

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Jumlah populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kambing terus meningkat. Pada Tahun 2012, populasi sapi potong sebesar 2.051.407 ekor naik 42,25% dibanding Tahun 2008 sebesar 1.442.033 ekor. Populasi sapi perah sebesar 154.398 ekor naik sebesar 30,37% dibanding Tahun 2008 sebesar 118.424 ekor. Sedangkan populasi kambing sebesar 3.889.878 ekor naik 15,48% dibanding Tahun 2008 sebesar 3.356.801 ekor. Perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada Tabel 2.169.

Tabel 2.169.
Populasi Ternak Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sapi Potong (ekor)	1.442.033	1.525.250	1.554.458	1.937.551	2.051.407
2	Sapi Perah (ekor)	118.424	120.667	122.489	149.931	154.398
3	Kambing (ekor)	3.356.801	3.499.848	3.691.096	3.724.452	3.889.878

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Penyuluhan memiliki peran yang penting untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Perkembangan kelembagaan dan SDM penyuluh dapat dilihat pada Tabel 2.170.

Tabel 2.170.
Perkembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluh
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jenis	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Balai Penyuluhan dan Posluhdes yang berkualitas	245	258	497	522	528 dan 3.233*
2	Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian	0,59	1,61	8,5	30,2	34,01

Sumber : Set Bakorluh Provinsi Jawa Tengah, 2013
** Tahun 2012 dibentuk Posluhdes*

Kontribusi sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada kurun waktu Tahun 2008-2012 cenderung fluktuatif. Kontribusi sub sektor tanaman pangan selalu menurun, hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi, namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan pada sektor pertanian, karena yang lebih penting adalah peningkatan nilai produksinya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.171.

Tabel 2.171.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	ADHB (%)			ADHK (%)		
	Tan. Pangan	Tan. Perkebunan	Peternakan	Tan. Pangan	Tan. Perkebunan	Peternakan
2008	13,93	1,63	2,80	13,78	1,82	2,47
2009	13,92	1,69	2,89	13,53	1,84	2,50
2010	13,70	1,51	2,90	13,15	1,68	2,49
2011	13,31	1,54	2,85	12,39	1,66	2,47
2012*	13,18	1,47	2,78	12,07	1,62	2,42

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013
*Keterangan : * Angka Sementara*

Komoditas pertanian unggulan ekspor Tahun 2012 untuk sayuran : kol putih (kobis), lobak putih, kentang XL, buncis super, buncis b*aby*, kentang medium, cabe merah, sawi putih; Buah-buahan : melon, salak, pepaya serta F*loriculture* : melati dan l*eatherleaf*.

2. Kehutanan

Luas lahan yang berfungsi sebagai hutan pada Tahun 2012 seluas 1,394 juta ha (hutan negara 651,08 ribu ha dan hutan rakyat 742,92 ribu ha), meningkat sebesar 26,27% dibanding Tahun 2008 (1,02 juta ha). Peningkatan ini antara lain didukung hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 2.172.

Tabel 2.172.
Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 - 2012

No.	Luas (Ha)	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Luas hutan (dalam dan luar kawasan)	992.955	1.710.230	1.392.251	1.394.006
2	Luas lahan kritis	697.397	696.797	720.763	720.763
3	Lahan yang direhabilitasi	43.764	37.306	198.686	119.911
4	% Lahan yang direhabilitasi	6,27	5,35	27,56	16,63

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan, sampai Tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 316.914 ha yang didukung dengan pembangunan kebun Bibit Rakyat dan Gerakan *One Billion Indonesian Trees.* Pada Tahun 2012 luas hutan rakyat mencapai 734.803 ha, meningkat dibanding Tahun 2008 seluas 412.980 ha. Upaya optimalisasi lahan di kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan lahan di bawah tegakan. Pada Tahun 2012 telah dilakukan penanaman bawah tegakan seluas 215 ha, meningkat dibanding Tahun 2008 seluas 125 ha. Komoditas tanaman bawah tegakan yang dikembangkan antara lain jahe, kunir, temu lawak, jagung dan padi gogo.

Guna mendukung hutan sebagai kawasan lindung, maka telah dilakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kebun Raya Baturraden dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I. Peningkatan kualitas dilakukan dengan pengelolaan dan peningkatan sarana prasarana pada kawasan lindung tersebut.

Kerusakan pada kawasan hutan terjadi akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan. Tahun 2012 luas kerusakan hutan mencapai 5.905,21 ha atau meningkat 28,52% dibanding Tahun 2008. Kerusakan pada kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 2.173.

Tabel 2.173.
Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas pencurian pohon	Ha	20,32	21,50	14,81	36,24	23,21
2.	Luas Kebakaran hutan	Ha	4.574,32	5.335,60	160	3.447	5.882
	Total Luas Kerusakan hutan	**Ha**	**4.594,64**	**5.357,10**	**174,81**	**3.483,24**	**5.905,21**

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Terkait pemanfaatan hasil hutan, jumlah industri pengolahan hasil hutan kayu menunjukkan kecenderungan meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah membentuk industri pengolahan hasil hutan kayu yang mempunyai Sertifikat Verifikasi Legal Kayu (SVLK). Adapun kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Tahun 2012 sebesar 0,50%, menurun dibanding Tahun 2008 sebanyak 0,52%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.174.

Tabel 2.174.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Nilai Sektor Kehutanan (juta rupiah)	1.903.219	2.032.962	2.354.617	2.643.961	2.754.602
2	Nilai total PDRB (juta rupiah)	367.135.954,90	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13
3	Kontribusi (%)	0,52	0,51	0,53	0,53	0,50

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Jawa Tengah tergolong kecil, yaitu sebesar 0,85%. Dalam kurun waktu Tahun 2008 - 2012 kontribusi sektor pertambangan cenderung menurun, seperti terlihat pada Tabel 2.175.

Tabel 2.175.
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Nilai Sektor Pertambangan (juta rupiah)	3.514.457,82	3.852.796,77	4.302.563,07	4.726.493,18	4.726.486,17
2	Nilai total PDRB (juta rupiah)	367.135.954,90	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13
3	Kontribusi (%)	0,96	0,97	0,97	0,95	0,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Penambangan tanpa izin menjadi permasalahan yang masih dihadapi Provinsi Jawa Tengah. Luas area penambangan liar mencapai 43,67 ha, menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Karakter pertambangan tanpa izin adalah sporadis dan bersifat setempat sehingga luas area tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan penertiban penambangan liar, dengan persentase luasan penambangan tanpa izin yang ditertibkan mencapai sebesar 85% pada Tahun 2012. Maraknya penambangan rakyat ilegal dan rendahnya tingkat pengetahuan pengelolaan pertambangan dari pelaku aktivitas penambangan memerlukan adanya pengawasan intensif, pembinaan usaha penambangan dan sosialisasi alih fungsi profesi. Perkembangan penertiban area penambangan liar dapat dilihat pada Tabel 2.176.

Tabel 2.176.
Penertiban Area Penambangan Liar Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas area penambangan liar (ha)	NA	100	92,43	92,43	43,67
2	Luas area penambangan liar yang ditertibkan (ha)	NA	50	82,21	80,43	37,12
3	Persentase	NA	50	88,94	87,02	85

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2013

Pencapaian pembangunan terkait dengan energi, terlihat dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi (RE) yang menunjukkan jumlah KK yang sudah berlistrik. Sampai dengan Bulan April Tahun 2013, RE telah mencapai sebesar 81,91%. Walaupun demikian, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 18,09% rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.177.

Tabel 2.177.
Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio Elektrifikasi (%)	72,7	72,72	73,48	76,63	79,98
2	Pembangunan jaringan tengangan menengah (JTM)	6,35	7	8,77	12,89	22,7
3	Pembangunan jaringan tengangan rendah (JTR) (kms)	4,8	6,49	9,88	13,16	26,32
4	Pembangunan PLTMH (unit)	2	3	5	7	9
5	Pembangunan PLTS SHS (unit)	490	559	655	1929	2637
6	Pembangunan Demplot Gas Rawa (unit)	1	2	3	4	6
7	Pembangunan Demplot Biogas	0	8	16	24	44

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2013

Pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT). Jumlah CAT sebanyak 31 CAT, terdiri dari 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota, 6 CAT lintas provinsi dan 19 CAT lintas kabupaten/kota (kewenangan provinsi). Potensi air tanah bebas CAT lintas provinsi sebesar 411,15 juta m^3/tahun, CAT lintas kabupaten/kota sebesar 7.368,64 juta m^3/tahun dan CAT dalam kabupaten sebesar 3.619 juta m^3/tahun. Persentase CAT pada Tahun 2011 sebesar 10,53% dan Tahun 2012 sebesar 42,11%. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terutama di daerah sulit air (rawan kekeringan) dan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di daerah rawan kekeringan. Jumlah sumur bor yang masih aktif di Jawa Tengah tercatat ±4.259 sumur.

Upaya pencegahan risiko bencana alam geologi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mitigasi, simulasi mitigasi dan pemasangan alat pantau pada lokasi rawan bencana geologi. Sampai dengan Tahun 2012, sosialisasi mitigasi telah dilakukan pada 54 lokasi, dan telah terpasang 7 unit alat pantau pada lokasi rawan bencana geologi. Persentase upaya pencegahan resiko bencana alam geologi dari Tahun 2008 - 2012 berturut-turut sebesar : 3,57%; 5,63 %; 6,10%; 7,9% dan 9,91%.

4. Pariwisata

Perkembangan jumlah obyek wisata pada kurun waktu 2008 - 2012 cenderung meningkat, sebagaimana tertera pada Tabel 2.178.

Tabel 2.178.
Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah obyek wisata (OW)	255	257	266	284	385
2	Obyek wisata yang memiliki rencana pengembangan destinasi wisata(%).	5	10	15	15	20
3	Jumlah obyek wisata berstandar nasional (OW)	27	28	30	34	37
4	Jumlah obyek wisata berstandar internasional (OW)	10	13	15	17	20
5	Jumlah obyek wisata memiliki UMKM dan Industri Kreatif bidang pariwisata (OW)	100	125	150	175	200
6	Jumlah desa wisata (desa)	65	85	115	119	125

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013

Perkembangan tenaga kerja di bidang pariwisata Jawa Tengah pada kurun waktu 2008 - 2012 cenderung meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.179.

Tabel 2.179.
Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2009	2010	2012
1.	Jumlah Tenaga Kerja di bidang pariwisata (orang)	16.369	19.419	19.807	21.340	21.520
2.	Jumlah Pramuwisata Madya (orang)	29	90	117	189	249

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Wisnus) di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari sebanyak 15.762.384 orang pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 25.240.021 orang pada Tahun 2012.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari 302.000 orang pada Tahun 2008 menjadi 372.463 orang pada Tahun 2012. Namun demikian jumlah kunjungan wisman pada Tahun 2012 menurun dari Tahun 2011 sebanyak 392.895 orang. Perkembangan jumlah kunjungan wisnus dan wisman dapat dilihat pada Gambar 2.37.

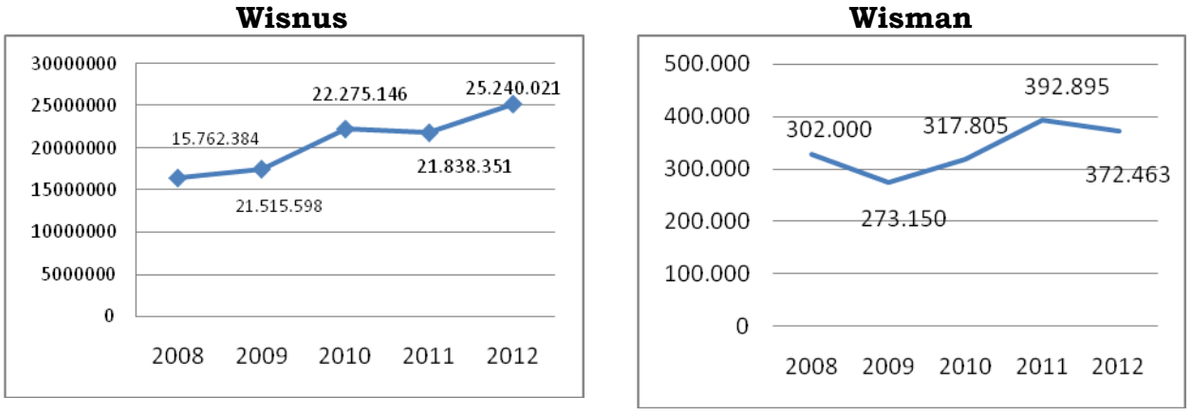

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.37
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Rata-rata lama tinggal wisnus dan wisman dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat. Untuk wisman dari 2,22 per hari pada Tahun 2008 menjadi 2,31 hari pada Tahun 2012, sedangkan untuk wisnus dari 1,91 per hari menjadi 2,01 per hari.

Pengeluaran belanja wisman cenderung meningkat dari sebesar 150 US$ per hari pada Tahun 2008 menjadi sebesar 298 US$ per hari pada Tahun 2012, demikian pula wisnus cenderung meningkat dari sebesar Rp. 225.000 per hari menjadi sebesar Rp. 498.000 per hari. Perkembangan rata-rata lama tinggal menginap wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan dapat dilihat pada Tabel 2.178.

Tabel 2.180.
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,22	2,23	2,25	2,26	2,31
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,91	1,92	1,94	1,96	2,01
3	Rata-rata belanja wisatawan mancanegara (US dollar per hari)	150	160	170	284	298
4	Rata-rata belanja wisatawan nusantara (rupiah per hari)	225.000	245.000	275.000	474.000	498.000

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan, promosi dan pemasaran pariwisata memiliki peran yang sangat penting. Beberapa aktivitas promosi yang dilakukan antara lain promosi melalui media cetak, penyelenggaraan *event* pariwisata dan partisipasi *event* pariwisata luar negeri. Pada Tahun 2012, jumlah obyek wisata yang memiliki kelengkapan bahan promosi

sejumlah 100 obyek wisata. Jumlah obyek wisata yang menyelenggarakan *event* pariwisata sebanyak 225 obyek wisata. Sementara itu jumlah obyek wisata yang dipasarkan dalam *event* pariwisata luar negeri sebanyak 37obyek wisata. Perkembangan kinerja promosi dan pemasaran wisata dapat dilihat pada Tabel 2.181.

Tabel 2.181.
Kinerja Promosi dan Pemasaran Wisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah obyek wisata yang memiliki kelengkapan bahan promosi (OW)	65	70	75	90	100
2	Jumlah obyek wisata yang menyelenggarakan event pariwisata.(OW)	135	150	175	200	225
3	Jumlah obyek wisata yang dipasarkan dalam event pariwisata luar negeri (OW)	28	30	35	35	37

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013

Pengembangan pariwisata perlu didorong melalui kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan asosiasi/lembaga pariwisata. Jumlah kelompok sadar wisata dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebanyak 35 kelompok pada Tahun 2008 menjadi sejumlah 225 kelompok pada Tahun 2012. Jumlah kerjasama dengan Asosiasi/ Lembaga Pariwisata juga menunjukkan peningkatan sampai Tahun 2012 menjadi 3 lembaga. Perkembangan jumlah kelompok sadar wisata dan asosiasi/lembaga pariwisata yang bermitra dengan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.182.

Tabel 2.182.
Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)	35	96	89	190	225
2	Jumlah kerjasama dengan Asosiasi/ Lembaga Pariwisata (lembaga)	0	0	2	2	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 3,26% pada Tahun 2008 menjadi 3,28% pada Tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap kondisi perekonomian Jawa Tengah semakin

meningkat. Perkembangan jumlah dan kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.183.

Tabel 2.183.
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Juta rupiah)

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Hotel	1.193.421,83	1.362.722,98	1.547.333,66	1.711.438,05	1.898.282,67
2	Restoran	10.433.598,17	11.252.640,99	12.495.126,54	14.137.771,81	15.982.272,76
3	Hiburan dan Rekreasi	208.072,67	277.994,35	331.540,12	361.282,19	399.197,41
4	Jumlah Sektor Pariwisata	11.835.092,67	12.893.358,32	14.374.000,32	16.210.492,05	18.279.752,84
5	Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	3,22	3,24	3,23	3,25	3,28

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah).

5. Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 741,49 km, dengan rincian pantai utara 557,39 km dan pantai selatan 184,10 km. Potensi perikanan laut cukup besar, yang tersebar di sebanyak 17 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu lima tahun produksi perikanan tangkap meningkat dari sebanyak 192.117,8 Ton pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 283.957,60 Ton pada Tahun 2012. Perkembangan produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada Gambar 2.38.

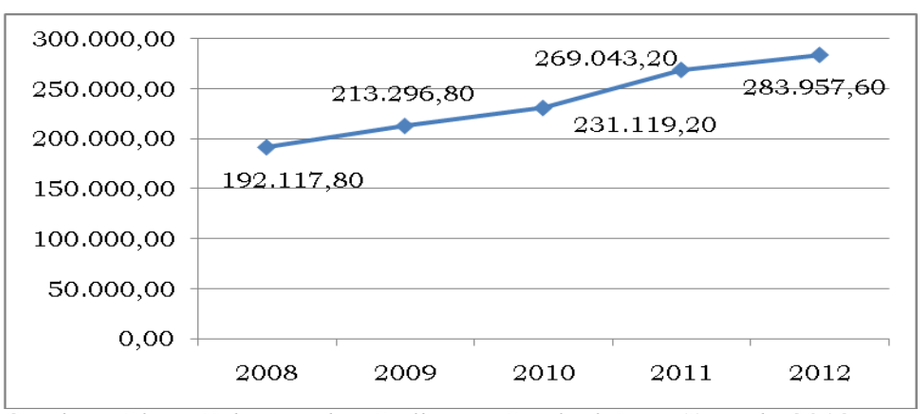

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.38
Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

Produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 128.705,80 ton pada Tahun 2008 menjadi sebesar 251.135,80 ton pada Tahun 2012. Perkembangan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada Gambar 2.39.

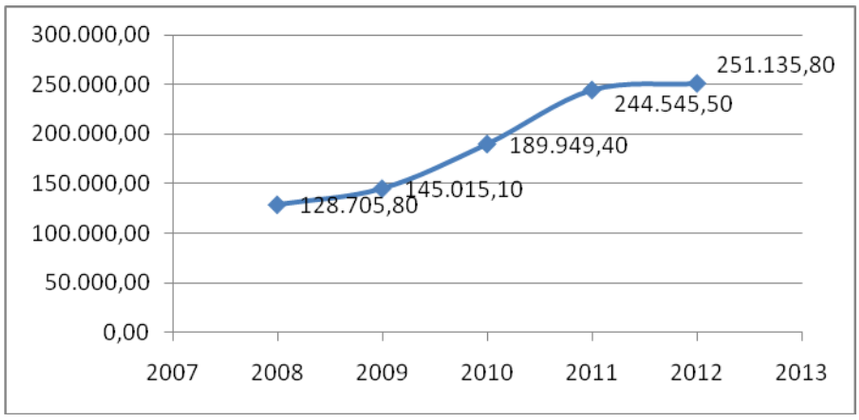

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.39
Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012 (Ton/Tahun)

Ekspor produk perikanan dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 17,794 juta ton pada Tahun 2008 menjadi 23,791 juta ton pada Tahun 2012 atau naik sebesar 8,20%, seperti terlihat pada Gambar 2.40.

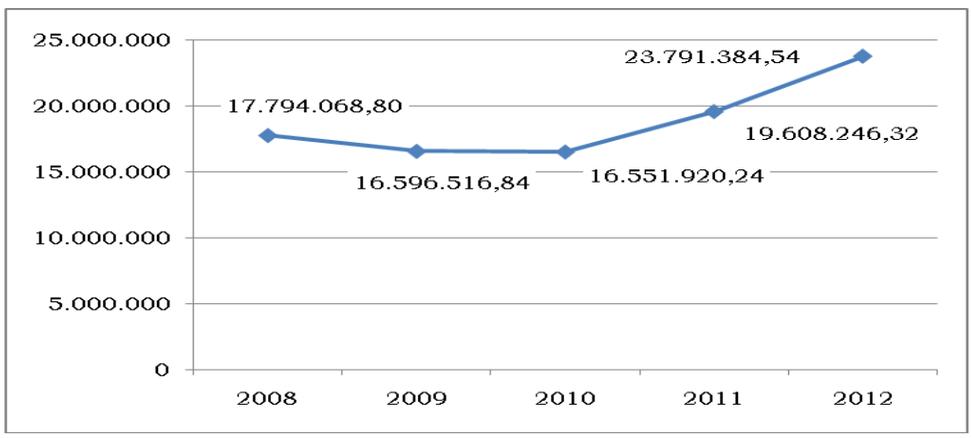

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.40
Ekspor Produk Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012 (Kg/Tahun)

Tingkat konsumsi ikan dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari sebesar 15,05 kg/kapita/tahun menjadi 17,50 kg/kapita/tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan semakin meningkat. Walaupun demikian, tingkat konsumsi ikan sebesar 17,50 kg/kapita/tahun pada Tahun 2012 tergolong masih rendah apabila dibandingkan capaian nasional sebesar 33,89 kg/kapita/tahun. Rendahnya tingkat konsumsi ikan ini dipengaruhi oleh faktor geografis antar kabupaten/kota yang berbeda, sebagian tidak memiliki laut dan kawasan budidaya perikanan; faktor daya beli masyarakat yang masih rendah; dan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi ikan yang kurang. Perkembangan tingkat konsumsi ikan dapat dilihat pada Gambar 2.41.

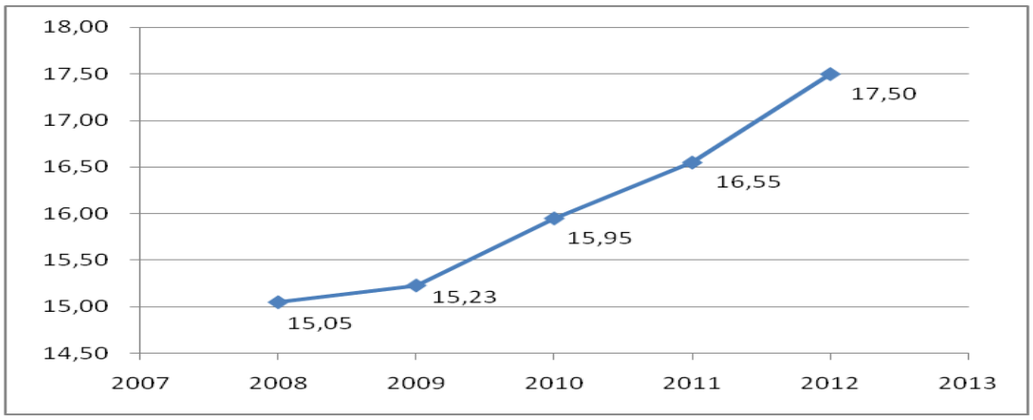

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.41
Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Kg/Kapita/Tahun)

Rata-rata pendapatan nelayan menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp.5.878.807,86 per kapita/tahun pada Tahun 2008 menjadi sebesar Rp.10.000.000 per kapita/tahun pada Tahun 2012. Demikian juga rata-rata pendapatan pembudidaya ikan menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp.2.065.187,16 per kapita/tahun pada Tahun 2008 menjadi sebesar Rp.3.673.000 per kapita/tahun pada Tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.184.

Tabel 2.184.
Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendapatan nelayan (Rp)	5.878.807,86	7.144.737,40	7.788.712,80	9.900.000	10.000.000
2	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp)	2.065.187,16	2.044.500	2.535.260	3.372.526	3.673.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Daya dukung ekosistem perairan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap semakin menurun. Hal ini dilihat dari kerusakan terumbu karang pada Tahun 2012 mencapai 58 % dari total luasan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang tersebut disebabkan oleh penggunaan alat tangkap tidak sesuai standar dan tidak ramah lingkungan. Perkembangan kinerja luas terumbu karang dapat dilihat pada Tabel 2.185.

Tabel 2.185.
Luas Terumbu Karang Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas terumbu karang (ha)	221,20	1.237,43	1.355,61	1.377,18	987,62
2	Luas terumbu karang kondisi baik (ha)	36,70	58,60	451,65	430,97	404,95

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
3	Luas Terumbu Karang Kondisi Sedang (ha)	2,50	405,21	76,28	88,51	5,20
4	Luas terumbu karang kondisi rusak (ha)	182	773,62	827,69	857,71	577,48

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013.

Luas hutan mangrove Tahun 2012 sebesar 25.655,22 ha. Kondisi hutan mangrove Tahun 2012 juga banyak mengalami kerusakan, yaitu mencapai sebanyak 3.483,38 ha atau sebesar 13,57%. Perkembangan luas hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 2.186.

Tabel 2.186.
Luas Hutan Mangrove Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas hutan mangrove (ha)	11.019,62	21.450,99	25.819,30	20.153,26	25.655,22
2	Luas hutan mangrove kondisi baik (ha)	4.319,95	14.673,27	15.325,75	14.822,23	17.432,06
3	Luas hutan mangrove kondisi sedang (ha)	6.019,25	4.939,53	6.079,67	2.277,58	4.739,78
4	Luas hutan mangrove kondisi rusak (ha)	680,42	1.838,19	4.413,89	3.053,45	3.483,38

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Upaya konservasi terhadap wilayah pesisir dan laut yang menjadi kewenangan provinsi memerlukan penataan ruang wilayah pesisir dan laut sesuai UU pengelolaan wilayah Pesisir dan laut. Sampai dengan Tahun 2012 telah tersusun sebanyak 1 dokumen Rencana Strategis Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Jawa Tengah yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah. Selain itu perlu juga dilakukan pelestarian kawasan lindung perairan. Luas kawasan lindung atau konservasi perairan yang masuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebesar 7.029,11 ha (perairan Ujung Negoro Batang seluas 6.893,75 ha, dan Karang Jeruk seluas 116,36 ha).

6. Perdagangan

Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan peningkatan, dari sebesar 19,7% pada Tahun 2008 menjadi 20,3% pada Tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Jawa Tengah. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.187.

Tabel 2.187.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012 (Juta Rupiah)

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Nilai total PDRB	367.135.954,90	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13
2	Nilai Sektor Perdagangan	59.990.034,69	65.647.179,51	72.954.035,12	82.612.875,54	95.028.163,85
3	Kontribusi (%)	16,34	16,50	16,41	16,56	17,08

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Kinerja perdagangan internasional terlihat dari kinerja ekspor Jawa Tengah dan impor yang masuk ke Jawa Tengah. Ekspor non migas Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dari sebesar 3.185 Juta US$ pada Tahun 2008 menjadi sebesar 4.513 Juta US$ pada Tahun 2012. Di sisi lain, kinerja impor non migas Jawa Tengah mengalami peningkatan yang sangat tajam dari sebesar 2.454 Juta US$ pada Tahun 2008 menjadi sebesar 5.292 juta US$ pada Tahun 2012. Ekspor bersih perdagangan pada Tahun 2008 dan 2009 masih positif, namun pada Tahun 2010 - 2012 mengalami minus. Perkembangan ekspor bersih perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.188.

Tabel 2.188.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Indikator	Nilai				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)	3.185	2.885	3.674	4.259	4.513
2	Nilai impor non migas (Jt US$)	2.454	2.469	4.071	4.468	5.292
4	Ekspor Bersih Perdagangan (Jt US$)	731	416	-397	-209	-779

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ekspor barang ke luar negeri antara lain melalui pemberian izin usaha perdagangan luar negeri, dan sertifikasi mutu produk ekspor. Kinerja pemberian izin usaha perdagangan luar negeri menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, dari sebanyak 114 unit pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 462 unit Tahun 2012. Sertifikasi mutu barang juga menunjukkan peningkatan, pada Tahun 2008 jumlah jenis barang bersertifikat mutu sebanyak 351 jenis, pada Tahun 2012 sebanyak 529 jenis. Perkembangan izin usaha perdagangan luar negeri dan jumlah jenis barang bersertifikat mutu dapat dilihat pada Tabel 2.189.

Tabel 2.189.
Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	114	77	477	334	462
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	351	632	396	396	529

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) menunjukkan peningkatan dari Tahun 2008 sebanyak 294.982 unit menjadi 415.829 unit pada Tahun 2012. Jumlah izin usaha perdagangan dalam negeri baik SIUP maupun TDP juga mengalami peningkatan, SIUP dari sebanyak 279.121 unit pada Tahun 2008 menjadi 358.733 unit pada Tahun 2012, dan TDP dari sebanyak 15.861 unit pada Tahun 2008 menjadi 57.096 unit pada Tahun 2012. Perkembangan Jumlah UDKM dan Izin Usaha Perdagangan Dalam Negeri dapat dilihat pada Tabel 2.190.

Tabel 2.190.
Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Izin Usaha Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Jumlah UDKM	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (unit)	294.982	320.482	353.965	384.873	415.829
2	Jumlah izin usaha perdagangan dalam negeri (unit)					
	- SIUP	279.121	304.771	329.213	356.999	358.733
	-TDP	15.861	15.711	24.752	27.874	57.096

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dalam rangka melindungi konsumen, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 14 kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setiap kabupaten/kota harus membentuk BPSK. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memfasilitasi pembentukan BPSK di tingkat kabupaten/kota, sehingga seluruh kabupaten/kota memiliki BPSK dalam rangka melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan oleh produsen. Kinerja BPSK diukur dari persentase penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kabupaten/kota, dengan capaian pada Tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 100%. Selain BPSK, keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga penting. Jumlah kabupaten/kota memiliki LPKSM sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 4 kabupaten/kota yaitu Kota Magelang, Salatiga, Surakarta dan Kabupaten Semarang, sehingga masih terdapat 31 kabupaten/kota yang belum memiliki LPKSM.

Terkait peredaran barang, jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, dari sebanyak 272 jenis pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 946 jenis pada Tahun 2012. Persentase penyidikan terhadap hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan pada Tahun 2012 sebesar 100%. Sementara itu persentase SPBU yang telah dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya telah mencapai 100%. Secara rinci kinerja perlindungan konsumen dapat dilihat pada Tabel 2.191.

Tabel 2.191.
Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	1	2	6	10	14
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	1	1	4	4	4
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)	-	-	-	5 kasus (100%)	7 kasus (100%)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	272	300	200	800	946
5	Persentase penyidikan terhadap hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan (%)	0	0	0	0	1 kasus (100%)
6	Persentase SPBU yang telah dilakukan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (%).	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

7. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; pertumbuhan industri; jumlah klaster industri; cakupan bina kelompok pengrajin; dan pengembangan kelembagaan usaha industri.

a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2012 nilai sektor industri pengolahan dalam menyumbang pertumbuhan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan perkembangan yang positif yaitu dari Rp.32.259,7 Milyar pada Tahun 2008 meningkat menjadi Rp.182.715,2 Milyar pada Tahun 2012. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami fluktuatif terhadap total PDRB ditunjukkan pada Tabel 2.192.

Tabel 2.192.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012 (Juta Rupiah)

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Nilai total PDRB	367.135.954,90	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13
2	Nilai Sektor Industri	125.006.771,42	130.352.154,42	146.132.837,59	165.850.520,22	182.715.245,06
3	Kontribusi (%)	34,05	32,76	32,86	33,25	32,83

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,2013

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan Industri besar sejak Tahun 2008 sebesar 498 unit tumbuh menjadi sebesar 554 unit pada Tahun 2012. Industri Kecil dan Menengah pada Tahun 2008 sebesar 320.411 unit meningkat menjadi sebesar 335.673 unit pada Tahun 2012 yang ditunjukkan pada Tabel 2.193.

Tabel 2.193.
Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Jenis Industri	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Besar	498	501	495	528	554
2	Kecil dan Menengah	320.411	320.590	320.770	319.689	335.673

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

c. Pengembangan Klaster Industri

Pembinaan industri dengan pendekatan klaster industri sejak Tahun 2008-2012 mengalami perkembangan yang baik, dari Tahun 2008-2010 sebanyak 6 klaster, untuk Tahun 2011 sebanyak 7 klaster dan Tahun 2012 sebanyak 5 klaster. Fokus pengembangan klaster yaitu klaster logam mesin, tekstil; klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka; serta klaster agro, kimia dan hasil hutan ditunjukkan pada Tabel 2.194.

Tabel 2.194.
Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Jenis industri	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Klaster Logam,Mesin, Tekstil	1	3	2	0	0
2	Jumlah Klaster Komponen Otomotif, elektronika & Aneka	3	1	2	4	0
3	Jumlah Klaster agro, kimia &hasil hutan	2	2	2	3	5
4	Pengembangan Klaster Industri	6	6	6	7	5

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

d. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan kelompok pengrajin industri yang mendapat bantuan peralatan sebanyak 115 paket pada Tahun 2008 meningkat menjadi 230 paket pada Tahun 2012 yang ditunjukkan pada Tabel 2.195.

Tabel 2.195.
Jumlah Bina Kelompok Pengrajin Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapat bantuan (paket)	115	73	127	210	230

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2013

e. Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri

Dalam pengembangan kelembagaan usaha sektor industri sejak Tahun 2008 - 2012 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 3 lembaga industri meliputi Pokja Industri pada FPESD, Dekranasda, dan Mitra Praja Utama.

8. Transmigrasi

a. Sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di 19 provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama antara daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran, telah dilakukan upaya-upaya kerjasama antar daerah di 19 provinsi lokasi transmigrasi diluar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

b. Nota kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan daerah calon penerima transmigran agar dapat segera merealisasikan *MoU* yang telah disepakati, yaitu sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 349 naskah di 19 provinsi luar Jawa.

c. Capaian Pengiriman Transmigran

Realisasi pengiriman transmigran sampai dengan Tahun 2012 mencapai sebesar 3.796 KK (50,61%) dari target RPJMD Tahun 2008 - 2013 sebanyak 7.500 KK, tidak tercapainya target karena kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sangat terbatas dan tidak sebanding

dengan animo masyarakat serta ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran. Capaian pengiriman transmigran Jawa Tengah dari Tahun 2008–2012 dari kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.194.

Tabel 2.196.
Capaian Pengiriman Transmigran
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2008	900
2	2009	913
3	2010	593
4	2011	690
5	2012	700

Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013.

d. Meningkatnya kualitas menajemen pengelolaan dan pelayanan transmigran

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan kepada calon transmigran telah dilaksanakan pembinaan di 35 kabupaten/kota diantaranya melalui pembenahan data transmigrasi, penyebarluasan informasi transmigrasi dan pembenahan mekanisme rekruitmen.

e. Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU)

Pemberian pelatihan kepada calon transmigran dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki sehingga diharapkan transmigran mampu mengelola potensi Sumber Daya Alam di lokasi transmigrasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Perkembangan pelatihan calon transmigran yang dilakukan Balatrans Penca Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.197.

Tabel 2.197.
Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2008	559
2	2009	590
3	2010	660
4	2011	780
5	2012	475
Jumlah		**3.064**

Sumber: Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dari jumlah transmigran sebanyak 3.796 KK, sebanyak 3.064 KK (80,71%) telah dilakukan pelatihan, sedangkan sebanyak 732 KK (19,29%) tidak dilakukan pelatihan dikarenakan pengiriman calon transmigran dilakukan pada akhir tahun, sehingga tidak sempat dilakukan pelatihan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.

Konsumsi makanan penduduk Jawa Tengah mencapai Rp.255,95 ribu atau 50,49% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 17,41% digunakan untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan tembakau, masing-masing sebesar 29,32% dan 11,06% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,47%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2.198.

Tabel 2.198.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
A	**Rata-ratapengeluaran Konsumsi (Rp)**	**179.373**	**188.823**	**214.180**	**228.402**	**255.950**
B	**Distribusi Pengeluaran konsumsi (%)**					
1	Padi-padian	17,12	19,35	20,05	17,62	17,41
2	Umbi-umbian	0,64	0,61	0,56	0,51	0,47
3	Ikan	3,86	4,33	4,16	3,93	3,87
4	Daging	2,86	3,32	3,07	3,22	3,3
5	Telur dan Susu	5,82	6,57	6,44	5,87	6,16
6	Sayur-sayuran	7,91	7,20	8,16	8,31	7,24
7	Kacang-kacangan	4,65	5,69	5,11	4,11	4,02
8	Buah-buahan	4,16	3,77	3,31	4,68	4,69
9	Minyak dan Lemak	5,14	4,03	3,92	4,03	3,83
10	Bahan Minuman	3,90	4,23	4,37	4,24	4,18
11	Bumbu-bumbuan	2,46	2,39	2,45	2,27	2,1
12	Konsumsi lainnya	2,68	3,53	3,34	2,33	2,34
13	Makanan dan Minuman jadi	29,49	23,58	24,24	28,58	29,32
14	Tembakau, sirih	9,30	11,40	10,82	10,31	11,06
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Susenas 2012 Modul Konsumsi BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka relatif tinggi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan non pangan, hal ini terjadi pada masyarakat

modern yang kebutuhan sekunder bahkan tersier sudah mulai terpenuhi. Pengeluaran untuk konsumsi non makanan sebesar Rp.251,03 ribu atau 49,51% dari total pengeluaran. Pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 34,69%. Pengeluaran konsumsi untuk non makanan dapat dilihat pada Tabel 2.199.

Tabel 2.199.
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
A	**Rata-ratapengeluaran Konsumsi (Rp ribu)**	**161.805**	**161.800**	**180.317**	**224.438**	**251,03**
B	**Distribusi Pengeluaran konsumsi (%)**					
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	37,77	42,91	42,87	35,05	34,69
2	Barang dan Jasa	37,12	35,83	36,08	36,74	38,20
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	7,06	6,47	6,17	6,53	6,02
4	Barang-barang yang tahan lama	12,57	9,11	8,95	13,99	13,81
5	Pajak dan asuransi	2,77	3,50	3,90	3,21	3,18
6	Keperluan pesta dan upacara	2,71	2,18	2,03	4,48	4,10
	Jumlah					

Sumber : Susenas 2012 Modul Konsumsi BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

2.4.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai NTP maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.42.

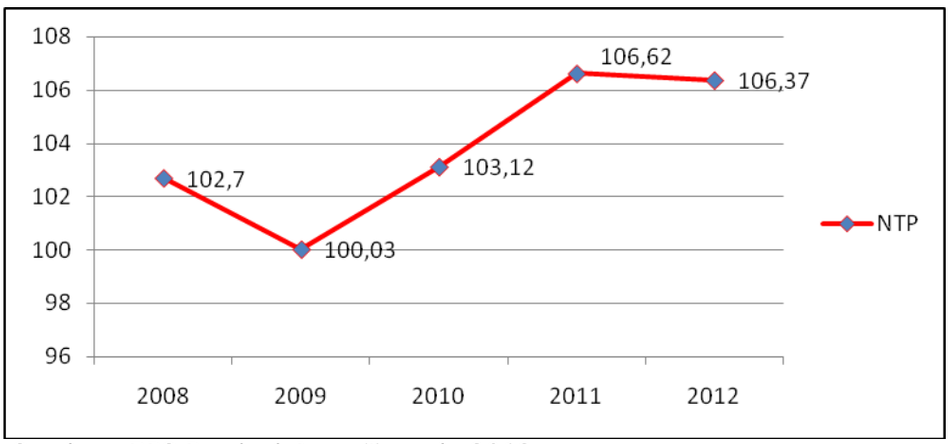

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Gambar 2.42
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

2.4.4 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu aspek yang mendukung daya saing daerah adalah keberadaan infrastruktur perhubungan, yang akan memudahkan akses distribusi barang dan jasa.

1. Prasarana Jalan, didukung dengan telah beroperasinya Jalan Tol Semarang - Ungaran sepanjang 10,85 km pada Tahun 2011; Jalan Tol Ungaran - Bawen sepanjang 11,95 km yang akan terselesaikan pada Tahun 2013; Jalan Tol Solo-Kertosono sepanjang 20,9 km (bagian dari Jalan Tol Solo - Mantingan sepanjang 181 km) serta Jalan Tol Bawen - Solo sepanjang 40,84 km yang diharapkan dapat terselesaikan pada Tahun 2014; tahap pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pantura sepanjang 172 km (Pejagan - Pemalang 58 km, Pemalang - Batang 35 km dan Batang - Semarang 75 km). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.200.

Tabel 2.200.
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun	Panjang Jalan (km)	Banyak Kendaraan (unit)	Ratio (%)
2008	25.646,36	7.399.020	34,7
2009	26.135,19	8.593.911	30,4
2010	26.333,33	9.318.749	28,1
2011	26.533,33	10.481.143	25,3
2012	26.368,79	11.521.288	22,8

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS Provinsi Jawa Tengah , 2013 (diolah)

2. Perhubungan Darat, didukung dengan17 buah Terminal Tipe A, 47 buah Terminal Tipe B dan 55 buah Terminal Tipe C, 3.236 unit Bus AKAP, 6.345 unit Bus AKDP; Pembangunan *Double Track* Brebes - Cepu yang ditargetkan akan selesai secara keseluruhan Tahun 2014, KA Komuter Tegal - Semarang serta Jogja - Solo, 149 Stasiun, 121 gerbong penumpang dan 6.550 gerbong barang, serta Pelabuhan Penyeberangan Kendal yang direncanakan untuk melayani Kendal–Kumai.

3. Perhubungan Laut, didukung dengan 9 Pelabuhan Laut termasuk Pelabuhan Utama Tanjung Emas Semarang yang saat ini dalam pengembangan dan modernisasi pelayanan serta telah dilengkapi dengan fasilitas gudang/ lapangan penumpukan peti kemas seluas 352.384 m^2, *Crane* sampai dengan 40 ton untuk pelayanan bongkar muat barang dan peti kemas, dan 10 dermaga/tambatan dengan kedalaman sampai dengan minus 10 m; KMC Kartini I untuk melayani lintas Semarang – Jepara - Karimunjawa, serta KMP Muria dan KMP *Express* Bahari untuk melayani lintas Jepara - Karimunjawa.

4. Perhubungan Udara, didukung dengan 5 bandar udara termasuk 2 bandar udara yang dalam tahap pengembangan yaitu Bandar Udara pengumpul sekunder skala internasional Bandara Ahmad Yani Semarang dengan rencana kapasitas penumpang 4.000.000 penumpang, landasan pacu sepanjang 2.680 meter, kapasitas *appron* untuk 2 pesawat B 767 dan 8 pesawat B 737 serta pengembangan Bandar Udara Karimunjawa Jepara dengan *run way* sepanjang 1.200 meter.

Berkaitan dengan penataan ruang, perbandingan (*overlay*) antara peta penggunaan lahan eksisting dengan peta peruntukan sebagaimana dalam rencana tata ruang wilayah RTRW, diketahui bahwa kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW pada Tahun 2013, sebesar 62%.

2.4.5 Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2008 - 2012 terus menurun, pada Tahun 2008 sebesar 52,29%, sedangkan pada Tahun 2011 menjadi sebesar 48,47%, namun pada Tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 49%. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.201.

Tabel 2.201.
Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio Ketergantungan (%)	52,29	52,16	50,31	48,47	49
2	Penduduk (Juta Orang)	32,63	32,86	32,38	32,64	33,27
3	Penduduk usia 0-14 tahun (Juta Orang)	8,67	8,78	8,52	8,37	8,44
4	Penduduk usia +65 tahun (Juta Orang)	2,53	2,48	2,32	2,28	2,46
5	Penduduk usia 15-64 tahun (Juta Orang)	21,42	21,60	21,54	21,97	22,37

Sumber:BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

b. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama empat tahun terakhir yang paling dominan adalah lulusan SD ke bawah. Secara keseluruhan sejak Tahun 2008 - 2011 rasio lulusan SD ke bawah, SMP, maupun DI/II/III dan Universitas mengalami kondisi yang berfluktuatif, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.202.

Tabel 2.202.
Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD ke Bawah	28,72	28,78	25,97	28,00	27,08
2	SMP	8,58	8,79	8,80	9,34	9,20
3	SMA	7,42	7,94	11,15	8,61	8,96
4	DI/II/III dan Universitas	2,70	2,65	2,90	2,82	3,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

c. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama kurun waktu 2008-2012, sektor pertanian memberikan kontribusi paling tinggi dan dikuti sektor perdagangan dan sektor industri.

Namun jika dilihat perkembangan tiap tahun, sektor pertanian selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan dari Tahun 2009 sebanyak 5,86 juta orang dan pada Tahun 2012 menjadi sebanyak 5,06 juta orang. Lain halnya dengan sektor-sektor lain yang mengalami kenaikan meskipun ada pula yang fluktuatif seperti sektor perdagangan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.203.

Tabel 2.203.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012 (Juta orang)

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	5,70	5,86	5,62	5,38	5,06
2	Industri	2,70	2,66	2,81	3,05	3,30
3	Perdagangan	3,25	3,46	3,39	3,40	3,45
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	1,76	1,84	1,96	2,06	2,17
5	Lainnya (Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, *Real Estate* dan Usaha Persewaan)	2,05	2,02	2,03	2,03	2,16

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

d. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Penyerapan tenaga kerja selama kurun waktu 2008–2012 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu Sekolah Dasar ke bawah sebesar 46,14 juta orang dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 14,79 juta orang. Penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi hanya sekitar 4,68 juta orang. Perbaikan kualitas tenaga kerja ditunjukkan oleh kecenderungan meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dari 0,88 juta orang pada Tahun 2008 meningkat menjadi 1,08 juta orang pada Tahun 2012, sebagaimana data pada Tabel 2.204.

Tabel 2.204.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	Tahun					Jumlah
	2008	2009	2010	2011	2012	
SD ke Bawah	9,37	9,46	8,41	9,14	9,01	46,14
Sekolah Menengah Pertama	2,80	2,89	2,85	3,05	3,06	14,79
Sekolah Menengah Atas	2,42	2,61	3,61	2,81	2,98	13,52
Diploma I/II/III dan Universitas	0,88	0,87	0,94	0,92	1,08	4,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

2.5 Analisis Gambaran Umum

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat disajikan capaian indikator kinerja memuat bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20018-2013 sang tercermin dalam ketiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana terlihat pada tabel 2.205.

Tabel 2.205
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
I.	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
A.	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	5,61	5,14	5,84	6,01	6,34	6,52	<
1.2.	Laju Inflasi	9,55	3,32	6,88	2,68	4,24	8,51	<
1.3.	**PDRB per kapita**							
	- PDRB per kapita ADHB (Juta)	11,406	12,322	13,730	15,380	17,140	15,493	>
	- PDRB per kapita ADHK Tahun 2000 (Juta)	5,220	5,471	5,773	6,114	6,494	6,519	>
1.4.	Indeks Gini	0,303	0,283	0,291	0,362	0,355	0,23	>
1.5.	**Pemerataan pendapatan versi BANK DUNIA**							
	- Kriteria 40% I	22,53	24,11	22,75	20,15	18,79	NA	
	- Kriteria 40% II	38,42	37,75	36,95	36,30	32,21	NA	
	- Kriteria 20% III	39,05	38,14	40,30	43,55	49,00	NA	
1.6.	Indeks Williamson ADHB	0,7092	0,7035	0,6971	0,6972	0,704	0,70	<
1.7.	Persentase Penduduk Miskin (Maret)	19,23	17,72	16,56	15,76	15,34	14,34	<
1.8.	Angka Kriminalitas yang tertangani	4,02	3,91	3,92	4,26	3,61	NA	
1.9.	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	71,6	72,1	72,49	72,94	73,36	73,9	<
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,1	71,25	71,4	71,55	71,71	73,5	<
	- Angka Melek Huruf (Persen)	89,24	89,46	89,95	90,34	90,45	97,0	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,86	7,07	7,24	7,29	7,39	7,0	>
	- Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp PPP)	633,59	636,39	637,27	640,41	643,53	625,8	>
B.	**Kesejahteraan Sosial**							
1.	**Pendidikan**							
1.1.	**Angka Partisipasi Kasar**							
	- APK SD/MI (%)	106,79	107,31	108,00	114,93	114,98	NA	
	- APK SMP/MTS (%)	92,62	96,93	99,40	99,72	100,50	98	>
	- APK SMA/SMK/MA (%)	53,51	54,87	64,62	64,93	67,00	70	<
1.2.	**Angka Partisipasi Murni (APM)**							
	- SD/MI (Jawa Tengah)	90,99	95,82	97,08	96.04	98,30	98	>
	- SMP/MTs (Jawa Tengah)	71,5	75,29	76,87	78.33	78.92	NA	
	- SM/MA (Jawa Tengah)	45,78	49,19	50,12	51.46	53.00	NA	
1.3.	**Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15 -64 Tahun)**	15.463.731	15.835.454	15.809.519	15.916.207	-		
	- APT SD	56,12	55,35	54,42	54,00	-	NA	
	- APT SLTP	16,76	16,94	17,76	18,02	-	NA	
	- APT SLTA +	19,76	20,39	21,61	22,06	-	NA	
2.	**Kesehatan**							
2.1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	114,42	117,02	104,97	116,01	116,34	102/100.000 KH	<
2.2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	9,71	10,37	10,62	10,34	10,75	9,8/1.000 KH	<
2.3.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	10,25	11,74	12,02	11,5	11,85	12/1.000 KH	>
2.4.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,13	0,12	0,13	0,13	0,04	0,82	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
3.	**Pembangunan Gender**							
3.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	64,66	65,03	65,79	66,45	66,8	65,6	>
3.2.	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,76	59,96	67,96	68,99	70,66	60,9	>
4.	**Ketenagakerjaan**							
4.1.	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja	15.463.658	15.835.382	15.809.447	15.916.135	16.132.390	NA	
C.	**Seni Budaya dan Olahraga**							
1.	**Kebudayaan**							
1.1	Jumlah Grup Kesenian	6.624	7.917	7.917	7.917	9.857	NA	
1.2	Jumlah Gedung	8	8	8	8	8	NA	
1.3	Jumlah Seniman	10.927	11.695	11.686	11.178	11.269	NA	
2.	**Pemuda dan Olahraga**							
2.1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	55	55	72	72	72	NA	
2.2.	Jumlah SP3 yang dibina	0	0	8	33	34	NA	
2.3.	Jumlah Pemuda Pelopor	0	15	15	15	15	NA	
2.4.	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	60	60	70	100	295	NA	
2.5.	Jumlah klub olahraga	-	3.516	3.925	4.230	4.230	NA	
2.6.	Jumlah Gedung Olahraga	-	15.550	17.250	19.291	19.291	NA	
II.	**PELAYANAN UMUM**							
A.	**Pelayanan Urusan Wajib**							
1.	**Pendidikan**							
1.1.	**Pendidikan dasar**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
1.1.1.	**Angka Partisipasi sekolah**							
	- SD/MI (7-12 Tahun)	98,83	98,8	98,95	98,62	98,87	NA	
	- SMP/MTs (13-15 Tahun)	84,27	84,59	85,33	88,39	89,59	NA	
1.1.2.	**Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs**							
	- Rasio SD/MI per 10000 penduduk Usia 7-12 Tahun	63,35	63,28	62,88	63,67	64,07	NA	
	- Rasio SMP/MTs per 10000 penduduk Usia 13-15 tahun	21,93	23,08	25,55	25,77	26,63	NA	
1.1.3.	**Rasio Guru terhadap murid**							
	- SD/MI	17,22	16,32	16,04	16,46	15,18	NA	
	- SMP/MTs	15,65	14,9	15,04	14,25	14,36	NA	
1.2.	**Pendidikan menengah**							
1.2.1.	Angka Partisipasi sekolah	53,36	52,84	53,72	55	58,56	NA	
1.2.2.	Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk Usia 16-18 tahun	13,18	14,22	15,89	16,69	22,04	NA	
1.2.3.	Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA	13,26	13,13	10,94	9,99	10,27	NA	
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	6,65	5,56	5,18	4,57	4,17	NA	
1.2.5.	Angka Melek Huruf	89,24	89,46	89,95	90,34	90,45	97,3	<
1.3.	**Fasilitas Pendidikan :**							
1.3.1.	**Kondisi Bangunan Baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA**							
	- SD/MI/SDLB	54	62	70	85,38	94,75	NA	
	- SMP/MTs/SMPLB	60	68	73	82,86	96,76	NA	
	- SMA/SMK/MA	20	25	30	76,53	80	NA	
1.4.	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**							
1.4.1.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	59,22	62,04	68,41	68,59	70,50	65	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
1.5.	**Angka Putus Sekolah (APS)**							
1.5.1.	- SD/MI/SDLB	0,30	0,22	0,22	0,16	0,12	0,16	>
1.5.2.	- SMP/Mts/SMPLB	0,98	0,72	0,68	0,50	0,38	0,38	*
1.5.3.	- SMA/SMK/MA	0,11	0,17	0,10	0,09	0,08	0,08	*
1.6.	**Angka Kelulusan**							
1.6.1.	- SD/MI	95,17	95,98	96,29	98,40	99,95	97,44	<
1.6.2.	- SMP/Mts	92,83	93,96	94,00	99,05	99,15	99,1	<
1.6.3.	- SMA/SMK/MA	93,13	92,03	94,19	95,00	95,59	98,5	>
1.6.4.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts	90,04	92,01	92,64	93,78	94,57	NA	
1.6.5.	Angka Melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	71,95	74,13	75,62	76,99	81,07	NA	
1.7.	**Nilai Ujian Akhir Nasional :**							
1.7.1.	- SD/MI/SDLB	6,76	6,64	7,40	7,31	7,06	7,49	<
1.7.2.	- SMP/MTs/SMPLB	6,43	6,89	7,16	6,75	6,80	6,77	>
1.7.3.	- SMA/SMK/MA	7,08	7,27	7,19	7,72	7,73	7,75	<
1.8.	**Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4**							
1.8.1.	- Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	11,30	12,00	18,83	20,99	31,01	NA	
1.8.2.	- Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4	22,90	25,90	34,11	45,40	51,56	NA	
1.8.3.	- Pendidik SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi S1/D4	73,80	74,70	76,03	78,01	84,57	NA	
1.8.4.	- Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4	82,50	83,20	85,81	88,48	91,85	NA	
2.	**Kesehatan**							
2.1.	Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	1 : 37.894	1 : 38.528	1 : 37.480	1 : 37.651	1 : 38.110	NA	
2.2.	**Rasio dokter per satuan penduduk**							
	- Dokter Umum	0,104	0,109	0,111	0,129	0,128	NA	
	- Dokter Spesialis	0,049	0,065	0,066	0,072	0,065	NA	
	- Dokter Gigi	0,027	0,029	0,029	0,032	0,033	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
2.3.	**Rasio tenaga medis per satuan penduduk**							
	- Perawat	-	0,753	0,766	0,75	0,824	NA	
	- Bidan	-	0,379	0,385	0,401	0,434	NA	
	- Tenaga Farmasi	-	0,111	0,112	0,134	0,161	NA	
	- Tenaga Gizi	-	0,045	0,046	0,047	0,047	NA	
2.4.	Cakupan Balita Usia 0-6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif (%)	28,96	40,21	37,18	45,36	25,60	NA	
2.5.	**Kondisi Penyakit Menular :**							
	- IR DBD per 100.000 penduduk	59,2	57,9	56,8	15,3	19,29	NA	
	- CFR DBD (%)	1,19	1,42	1,29	0,93	1,52	NA	
	- CDR TB (%)	47,97	48,15	55,38	59,52	58,45	NA	
	- CR TB (%)	83,9	85,01	85,15	82,9	83,64	NA	
2.6.	**HIV / AIDS**							
	- Kasus HIV	259	143	373	755	607	NA	
	- Kasus AIDS	170	430	501	521	797	NA	
2.7.	**Persentase Penduduk Miskin Dalam Keikutsertaan JAMKESMAS dan JAMKESDA**							
	- Persentase Penduduk Penerima JAMKESMAS	119,2	90,55	91,52	90,1	98,61	NA	
	- Persentase Penduduk Penerima JAMKESDA	-	-	1,75	17,29	15,69	NA	
2.8.	Persentase Rumah Sakit Yang Dibina Untuk Akreditasi	13,36	16,3	22,22	21,86	51,33	NA	
3.	**Pekerjaan umum**							
3.1.	**Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi**						NA	
	- Baik (km)	2.139,097	2.158,745	2.190,014	2.199,250	2.211,052	NA	
	- Sedang (km)	387,558	371,050	366,627	358,417	347,385	NA	
	- Rusak (km)	12,445	9,905	8,980	7,953	7,184	NA	
	- Jumlah (km)	2.539,700	2.539,700	2.565,621	2.565,621	2.565,621	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
3.2.	**Kondisi Jaringan Jembatan Kewenangan Provinsi**							
	- Baik (m)	18.915,11	19.117,79	19.344,00	19.642,00	19.842,37	NA	
	- Sedang (m)	6.118,40	5.946,12	5.722,00	5.436,00	5.251,95	NA	
	- Rusak (m)	301,49	271,09	269,00	257,00	240,68	NA	
	- Jumlah (m)	25.335,00	25.335,00	25.335,00	25.335,00	25.335,00	NA	
3.3.	**Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi**							
	- Kondisi jaringan irigasi baik (%)	41	47	49	61	66	72	<
	- Kondisi jaringan irigasi sedang (%)	53	47	51	38	34	NA	
	- Kondisi jaringan irigasi rusak (%)	6	6	0	1	0	NA	
3.4.	**Pemenuhan Kebutuhan Air Baku**							
	- Kebutuhan Air Baku (juta m3/tahun)	709,128	714,518	719,734	709,18	714,895	NA	
	- Ketersediaan Air Baku (juta m3/tahun)	284,04	300,105	317,003	326,21	343,212	NA	
	- Persentase (%)	40,05	42	44,04	46	48,01	10	>
3.5.	**Cakupan Pelayanan Air Bersih :**							
	- Perkotaan (%)	33	37	38,7	38,9	40,6	63	<
	- Perdesaan (%)	8	9	10,4	18	20,3	30,90	<
3.6.	**Pelayanan Sertifikasi Hasil Uji** (Sertifikat)	178	382	357	507	573	NA	
3.7.	**Cakupan rumah tinggal bersanitasi**							
	- Cakupan Sanitasi (%)	52,9	54,73	57,7	58,4	60,03	NA	
	- Cakupan Tempat pembuangan sampah (%)	77,41	77,09	53,33	48,73	41,34	NA	
3.8.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	34,364	40,539	42,263	52,613	52,613	NA	
4.	**Perumahan**							
4.1.	**Rasio Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni**							
	- Rasio Rumah Layak Huni	72,14	69,94	74,45	76,67	76,56	NA	
	- Rasio Rumah Tidak Layak Huni	27,86	30,06	25,55	23,33	23,44	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
4.2.	**Kebutuhan Rumah Menurut Kabupaten/Kota**	72,14	69,94	74,45	76,67	76,56	NA	
	- Jumlah KK	-	-	-	-	9.905.547	NA	
	- Jumlah Rumah	-	-	-	-	8.400.823	NA	
	- Kebutuhan rumah (*Backlog*)	-	-	-	-	1.498.724	NA	
	- Persentase Kebutuhan Rumah	-	-	-	-	17,84	NA	
4.3.	**Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani**							
	- Jumlah Capaian per Tahun (Ha)	9,85	10,78	9,36	12,18	16,58	NA	
	- Kumulatif Capaian (Ha)	9,85	20,63	30	42,17	58,75	NA	
	- Presentase Capaian per Tahun	1,05	1,15	1	1,3	1,77	NA	
	- Presentase Capaian Kumulatif	1,05	2,2	3,2	4,5	6,26	NA	
5.	**Perhubungan**							
5.1.	**Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis**							
	- Jumlah pelabuhan	-	9	9	9	9	NA	
	- Jumlah bandara	-	4	4	4	4	NA	
	- Jumlah stasiun KA	-	140	140	140	140	NA	
	- Jumlah terminal bis Tipe A	15	16	16	16	17	NA	
5.2.	**Perkembangan Pelayanan Angkutan Darat**							
	- Jumlah Ijin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	840	840	840	902	902	NA	
	- Jumlah Ijin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	367	367	367	367	367	NA	
	- Angkutan wisata (kendaraan)	952	1.502	1.791	2.095	2.249	NA	
	- Jumlah bus (unit)	11.536	10.174	10.174	10.174	10.490	NA	
	- Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667	NA	
	- Jumlah terminal bis Tipe A	15	16	16	16	17	NA	
5.3.	**Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan**							
	- Rambu Jalan	243	564	878	2.502	1.902	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- RPPJ	40	-	12	65	101	NA	
	- APILL	1	-	-	-	-	NA	
	- Guardrail	360	-	464	824	904	NA	
	- Marka Jalan	-	-	23.200	61.785	52.815	NA	
5.4.	**Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian**							
	- Jumlah penumpang (orang)	7.889.666	8.957.670	9.376.298	7.586.582	9.655.794	NA	
	- Jumlah barang terangkut (ton)	1.882.028	1.748.849	1.796.157	448.788	1.562.214	NA	
	- Jumlah stasiun KA	140	140	140	140	140	NA	
	- Jumlah Perlintasan KA di Jalan Provinsi	-	1.427	1.506	1.570	1.614	NA	
5.5.	**Perkembangan Pelayanan ASDP**							
	- Jumlah penumpang KM. Muria (orang)	20.851	8.720	16.350	65.925	65.886	NA	
	- Jumlah penumpang KMC. Kartini I (orang)	10.521	13.259	15.977	13.102	13.227	NA	
5.6.	**Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut**							
5.6.1.	Jumlah pelabuhan	9	9	9	9	9	NA	
5.6.1.1.	Pelabuhan Tanjung Emas							
	a. Kunjungan kapal (call)	3.994	3.914	2.221	1.919	1.703	NA	
	b. GRT (GT)	17.253.846	17.453.846	12.556.730	14.739.666	12.538.366	NA	
	c. Kargo (ton)	5.868.383	7.487.270	7.863.850	11.593.685	5.841.235	NA	
	d. Kontainer (Teus)	373.644	356.451	384.522	313.480	269.044	NA	
	e. Penumpang (orang)	403.569	392.606	449.645	318.527	238.525	NA	
5.6.1.2.	Pelabuhan Tanjung Intan							
	a. Kunjungan kapal (call)	1.723	2.140	1.249	309	448	NA	
	b. GRT (GT)	18.083.880	21.153.538	21.882.020	2.519.752	3.669.263	NA	
	c. Kargo (ton)	6.601.033	37.511.612	23.895.627	1.949.073	5.568.781	NA	
5.7.	**Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara**							
5.7.1.	Jumlah bandara	-	4	4	4	4	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
5.7.1.1.	Bandara Ahmad Yani							
	a. Penumpang domestik (orang)	1.370.012	1.627.706	1.954.901	2.400.686	2.888.087	NA	
	b. Penumpang internasional (orang)	37.994	23.278	38.603	32.256	114.673	NA	
	c. Barang domestik (kg)	18.226.293	7.944.179	23.862.533	25.062.038	11.037.345	NA	
	d. Barang internasional (kg)	555.968	1.645.400	1.641.079	1.680.832	598.392	NA	
5.7.1.2.	Bandara Adi Soemarmo							
	a. Penumpang domestik (orang)	516.403	574.453	780.852	970.615	1.200.787	NA	
	b. Penumpang internasional (orang)	137.764	111.957	119.694	115.522	48.961	NA	
	c. Barang domestik (kg)	6.044.690	1.995.359	2.542.982	3.349.969	4.128.433	NA	
	d. Barang internasional (kg)	2.020.733	24.786	75.311	150.723	358.495	NA	
6.	**Lingkungan Hidup**							
6.1.	**Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**							
	- Informasi status mutu air (SPM) sungai	-	2	3	4	6	100 (Target SPM 2013)	<
	- Informasi status mutu udara ambien (SPM) kab/kota	-	25	35	35	35	100 (Target SPM 2013)	<
	- Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	-	100	100	100	100	100 (Target SPM 2013)	*
7.	**Pertanahan**							
7.1.	**Pelayanan Urusan Pertanahan**							
7.1.1	Penggantian tanah kas desa :							
	- Luas semula (ha)	124.824	212.079	505.277	345.091	173.550	NA	
	- Keterangan	Untuk kepenti-ngan umum (pembangunan jalan tol, tower PLN, dll)						
	- Luas menjadi (ha)	181.439	361.101	665.860	386.436	237.196	NA	
	- Keterangan	Tanah pertanian baru						
	- Stimulasi pembuatan sertifikat lahan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Kawasan lindung (ha)	2.534	1.750	280	98	200	NA	
	- Keterangan	Sebagai stimulan						
	- Lahan pertanian pangan berkelanjutan (ha)	0	0	22	46	124	NA	
	- Keterangan							
8.	**Kependudukan dan catatan sipil**							
8.1.	Persentase Kepemilikan KTP	69,55	72,27	70,63	68,98	83,4	NA	
8.2.	Kepemilikan Akte Lahir Usia 0-18	25,19	27,61	31,7	30,35	31,49	NA	
8.3.	Persentase Pasangan Berakte Nikah Rata-rata Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	32,28	NA	
8.4.	Kepemilikan KTP							
9.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
9.1.	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**							
9.1.1.	**Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Berdasarkan Pendidikan**							
	- Lulus S-3 (%)	0,05	0,01	0,03	0,03	0,01	NA	
	- Lulus S-2 (%)	6,78	7,77	9,19	10,07	10,84	NA	
	- Lulus S-1 (%)	32,08	34,86	36,83	39,27	40,59	NA	
	- Lulus D-3 (%)	7,94	29,6	21,56	21,74	21,67	NA	
	- Lulus SMA sederajat (%)	34,02	30,64	28,97	25,95	24,27	NA	
	- Lulus SMP sederajat (%)	2,09	1,85	1,58	1,3	1,15	NA	
	- Lulus SD sederajat (%)	1,09	1,16	1,14	0,99	0,88	NA	
	- Jumlah Pegawai Perempuan (Org)	5.913	6.086	6.306	6.345	6.215	NA	
9.1.2.	**Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan**							
	- Jabatan eselon II	12 (18,75%)	9 (13,23%)	7 (10,29%)	9 (13,43%)	10 (14,92%)	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Jabatan eselon III	95 (22,25%)	104 (23,05%)	106 (23,71%)	111 (24,12%)	119 (26,98%)	NA	
	- Jabatan eselon IV	364 (29,26%)	402 (32,05%)	413 (32,77%)	430 (32,77%)	431 (34,89%)	NA	
	- Pekerja perempuan di pemerintah	5912 (32,32%)	6352 (34,2%)	6273 (34,7%)	6.345 (35,78%)	6190 (37,2%)	NA	
	- Jumlah pekerja perempuan	6.314.818	6.585.048	6.543.610	6.674.759	6.566.616	NA	
	- Persentase pekerja perempuan di lembaga Pemerintah	0,09	0,1	0,1	0,095	0,09	NA	
9.2.	**Jumlah dan Persentase Anggota Legislatif**							
	- Laki-laki	85 (85%)	81 (81%)	81 (81%)	81 (81%)	79 (79%)	NA	
	- Perempuan	15 (15%)	19 (19%)	19 (19%)	19 (19%)	21 (21%)	30%	<
9.3.	**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan TerpaduPerempuan dan Anak Korban Kekerasan**							
9.3.1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pengaduan	-	-	96,75	99,17	100	NA	
9.3.2.	Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat	-	-	7,92	9,91	20.23	NA	
9.3.3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPR/PKT rumah sakit	-	-	80,97	35,25	35.3	NA	
9.3.4.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	-	-	49,33	50	28.0	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
9.3.5.	Cakupan petugas rehabsos terlatih	-	-	56	56	9.2	NA	
9.3.6.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi peremuan dan anak korban kekerasan	-	-	100	100	100	NA	
9.3.7.	Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	-	-	100	100	100	NA	
9.3.8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus KTP/A	-	-	96	96	NA	NA	
9.3.9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	-	63	91	93.1	NA	
9.3.10.	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yg memiliki kemampuan pendampingan KTP/A	-	-	-	12,24	26,5	NA	
9.3.11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	-	86,47	84,37	84	NA	
9.3.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial	-	-	85,09	81,59	81.9	NA	
9.3.13.	Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	-	-	56	56	56	NA	
9.4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	67,21	66,05	66,76	65,72	65,09	NA	
9.5.	Rasio KDRT	0,01%	-	-	-	0,028%	NA	
9.6.	Patisipasi angkatan kerja perempuan (%)	-	56,29	58,05	58,81	57,35	NA	
9.7.	Persentase anak yang bekerja usia 10-17	NA	9,95	7,87	7,9	9,06	NA	
10.	**Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera**							
10.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	-	-	-	0,98	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
10.2.	**Peserta KB Aktif**							
	- Jumlah PUS	6.357.836	6.487.025	6.561.254	6.683.596	6.738.688	NA	
	- Peserta KB Aktif	4.964.579	5.080.590	5.155.761	5.285.530	5.403.576	NA	
	- Persentase	78,09	78.32	78.58	79.08	80.19	NA	
10.3.	**DO KB di Provinsi Jawa Tengah**							
	- Jumlah (orang)	642.671	655.569	829.455	911,924	960.277	NA	
	- Persentase	11,46	11,69	13,11	14,71	15,09	9	>
10.4.	**Unmet Need KB**							
	- Jumlah PUS	6.357.836	6.487.025	6.561.254	6.683.596	6.738.688	NA	
	- Jumlah (orang)	790.980	758.084	760.704	729.796	691.640	NA	
	- Unmet Need KB (%)	12,44	11,69	11,59	10,95	10,26	7	>
10.5.	Peserta KB Mandiri	3.030.907	2.827.153	2.938.270	2.903.225	2.964.527	NA	
10.6.	**Keluarga Sejahtera dan Sejahtera 1**							
	- Jumlah Kepala Keluarga	9.288.433	9.489.024	9.650.555	9.816.537	9.841.123	NA	
	- Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	3.095.490	2.997.410	2.908.390	2.826.038	2.793.948	NA	
	- Jumlah Keluarga Sejahtera I	1.745.308	1.813.895	1.855.649	1.886.682	1.905.066	NA	
11.	**Sosial**							
11.1.	**Kualitas Sarpras Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**							
	- Jumlah Panti Sosial	52	52	52	52	52	NA	
	- Jumlah Panti Sosial Yang di Rehab	9	8	8	5	11	NA	
	- Persentase	17,31	15,38	9,62	9,62	21,15	NA	
11.2.	**Jumlah Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Melakukan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial**							
	- Jumlah Panti	52	52	52	52	52	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Realisasi	52	52	52	52	52	NA	
	- Persentase	100	100	100	100	100	NA	
11.3.	**Penanganan PMKS**							
	- Populasi PMKS	6.701.000	6.584.535	6.243.091	6.111.535	6.090.369	NA	
	- Jumlah Penanganan	2.835	6.260	42.706	118.935	144.217	NA	
	- Persentase	0,04	0,1	0,7	1,95	2	NA	
11.4.	**Jumlah PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial**							
	- Populasi PMKS (orang)	6.701.000	6.584.535	6.243.091	6.111.535	6.090.369	NA	
	- Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial (orang)	1.678	3.491	3.003	4.426	7.257	NA	
	- Persentase	0,03	0,05	0,05	0,07	0,12	NA	
11.5.	**Penguatan Kapasitas PSKS**							
	- Populasi PSKS	197.316	197.316	197.316	197.316	197.316	NA	
	- Penguatan Kapasitas	300	710	1.067	1.008	2.612	NA	
	- Persentase	0,15	0,36	0,54	0,51	1,32	NA	
11.6.	**Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Yang Menerapkan Standar Pelayanan**							
	- Balai Resos	27	27	27	27	27	NA	
	- Standar Pelayanan	1	1	1	1	1	NA	
12.	**Ketenagakerjaan**							
12.1.	**Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**							
	- Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	15.463.658	15.835.382	15.809.447	15.916.135	16.132.890	NA	
	- Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	24.411.601	24.669.525	23.874.585	23.905.331	23.933.408	NA	
	- Rasio Kesempatan Kerja (%)	63,35	64,19	66,22	66,58	67,41	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
12.2.	**Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial**							
	- Jumlah Kasus	94	1.063	2.349	511	4.017	NA	
	- Status (Terselesaikan)	100%	100%	100%	100%	100%	NA	
12.3.	**Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**							
	- Jumlah (orang)	16.690.966	17.087.649	16.856.330	16.918.797	17.095.031	NA	
	- Persentase (%)	68,37	69,27	70,60	70,77	71,43	NA	
12.4.	**Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**							
	- Jumlah Penganggur (orang)	1.227.308	1.252.267	1.046.883	1.002.662	962.010	NA	
	- TPT (%)	7,35	7,33	6,21	5,93	5,63	5,8	<
12.5.	**Pencari Kerja Yang Ditempatkan**							
	- Pencari Kerja yang Terdaftar			602.024	580.564	671.603	NA	
	- Pencari Kerja yang Ditempatkan			88.671	242.193	219.374	NA	
	- Persentase			14,73	41,72	32,66	NA	
12.6.	PDRB ADHK Tahun 2000 per Tenaga Kerja	10,87	11,16	11,83	12,45	13,07	NA	
12.7.	Proporsi Tenaga Kerja dan Pekerja Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	60,60	61,51	59,93	58,17	55,40	NA	
12.8.	**Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding KHL**							
	- UMK (Rp/bln/orang)	601.419	679.083	734.874	780.801	834.255	NA	
	- KHL (Rp/bln/orang)	667.715	752.389	801.210	830.216	864.859	NA	
	- Rasio (%)	90,10	90,30	91,81	94,09	96,42	NA	
12.9.	**Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Yang Mengikuti Program Jamsostek**							
	- Jumlah Perusahaan	8.683	9.737	18.978	19.664	21.899	NA	
	- Jumlah Tenaga Kerja	649.529	643.574	1.330.917	1.966.390	2.186.821	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
12.10.	Jumlah Pekerja Sektor Non Formal Yang Mengikuti Program Jamsostek (orang)	27.755	36.954	33.107	29.969	32.784	NA	
13.	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**							
13.1.	**Persentase koperasi aktif**							
	- Jumlah Koperasi	17.618	25.076	25.427	26.346	26.857	NA	
	- Jumlah Koperasi aktif (unit)	12.426	19.850	19.617	20.571	21.308	NA	
	- Persentase koperasi aktif (%)	70,53	79,16	77,15	78,08	79,34	NA	
13.2.	**Jumlah Koperasi Sehat KSP/USP**							
	- Jumlah koperasi simpan pinjam (KSP/USP)	15.285	16.157	19.129	19.881	20.296	NA	
	- Jumlah koperasi sehat (unit)	-	40	189	116	1.733	NA	
	- Persentase koperasi sehat (%)	-	0,25	0,99	0,58	8,54	NA	
13.3.	**Usaha Mikro dan Kecil**							
13.3.1.	- Jumlah UMKM (Unit)	64.294	65.878	67.616	70.222	80.583	NA	
13.3.2.	- Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	264.762	278.000	285.335	293.877	345.622	NA	
13.3.3.	- Asset (Rp. Milyar)	3.976	4.334	4.448	5.266	6.816	NA	
13.3.4.	- Omzet (Rp. Milyar)	9.527	10.194	10.463	14.476	18.972	NA	
13.4.	**Realisasi KUR**							
13.4.1.	Jumlah Umkm	367.553	474.188	914.809	1.208.828	1.784.123	NA	
13.4.2.	Jumlah Realisasi (Milyar)	1.955.330.404.158	2.428.009.836.470	4.795.803.119.365	7.304.678.122.381	11.960.316.436.865	NA	
14.	**Penanaman Modal**							
14.1.	**Jumlah Investor PMDN dan PMA**							
	- PMA	10	3	9	16	13	NA	
	- PMDN	28	27	16	27	17	NA	
	- Jumlah	38	30	25	43	30	NA	
14.2.	**Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA**							
	- Persetujuan							
	- Jumlah Proyek	86	81	125	166	131	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Nilai Investasi (Trilyun)	22,312	48,037	7,242	26,698	55,808	NA	
14.3.	**Realisasi Izin Usaha Tetap**							
	- Jumlah Proyek	50	36	46	64	48	NA	
	- Nilai Investasi (Trilyun)	2,716	3,51	8,32	6,414	2,993	NA	
14.4.	**Rasio daya serap tenaga kerja**							
14.5.	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN	15.052	6.885	12.794	19.785	45.322	NA	
14.6.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	38	30	25	43	30	NA	
14.7.	Rasio daya serap tenaga kerja	396	230	512	460	1.511	NA	
14.8.	**Nilai Realisasi PMDN dan Pertumbuhan Realisasi PMDN**							
	- Nilai Realisasi PMDN (Milyar)	1.336,34	2.570,34	2.825,40	6.430,00	1.633,95	NA	
	- Pertumbuhan realisasi PMDN (%)	383,36	92,34	9,92	127,58	74,59	NA	
14.9.	**Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal**							
14.9.1.	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor /Bidang Usaha Unggulan (sektor/ bidang usaha/tahun)	-	-	-	-	1	1	*
14.9.2.	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/ tahun)	3	3	3	4	6	1	>
14.9.3.	Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal provinsi (kali/tahun)	3	3	5	4	6	1	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
14.9.4.	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga KerjaA sing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi(%).	-	-	-	60	60	100	<
14.9.5.	Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (kali/kali)	2	2	2	2	2	1	>
14.9.6.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%)	-	-	-	75	75	100	<
14.9.7.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (kali)	2	2	2	3	3	1	>
15.	**Kebudayaan**							
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	8	7	7	8	8	NA	
15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Lokasi)	2	2	2	2	2	NA	
15.3.	**Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman**							
15.3.1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	8	7	7	8	8	NA	
15.3.2.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Lokasi)	2	2	2	2	2	NA	
15.3.3.	Jumlah cagar budaya (candi, situs)	198	198	198	198	199	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
15.3.4.	Jumlah lokasi cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs)	-	13	12	10	12	NA	
15.3.5.	Jumlah Museum	43	43	43	48	48	NA	
15.3.6.	Jumlah Pengunjung Museum	-	-	379.357	996.320	1.201.642	NA	
16.	**Kepemudaan dan Olahraga**							
16.1.	Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan)	12	12	9	11	10	NA	
16.2.	Pelatihan dan pengembangan generasi muda (kegiatan)	4.185	5.370	10.000	3.493	3.500	NA	
16.3.	Jumlah kegiatan olahraga (kegiatan)	20	23	23	23	27	NA	
16.4.	Jumlah Kelompok Kewirausahaan Pemuda	0	0	10	25	25	NA	
16.5.	**Lapangan olahraga**							
17.	**Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri**							
17.1.	**Kondusivitas Wilayah**							
17.1.1.	**Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok**							
	- Pelajar	4	45	9	0	0	NA	
	- Mahasiswa	135	101	123	80	167	NA	
	- Buruh	52	70	51	72	73	NA	
	- Masyarakat	245	151	197	174	251	NA	
	- Jumlah	436	367	380	326	491	NA	
17.1.2.	**Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan**							
	- Ideologi	0	2	3	2	0	NA	
	- Politik	59	44	72	31	4	NA	
	- Ekonomi	75	122	93	103	73	NA	
	- Sosbud	266	93	118	137	378	NA	
	- Hukam	36	106	94	53	36	NA	
	- Jumlah	436	367	380	326	491	NA	
17.3.	**Jumlah Tindak Pidana**							
	- Lapor	17.008	17.391	19.645	19.764	19.094	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Selesai	12.945	12.850	12.700	10.708	12.039	NA	
17.4.	**Jumlah Tindak Pidana Menonjol**							
	- Lapor	7.738	7.857	8.948	8.971	9.614	NA	
	- Selesai	5.357	5.246	6.117	5.186	4.926	NA	
17.5.	**Demokrasi**							
17.5.1.	**Indeks Demokrasi Indonesia**							
	- Kebebasan Sipil	-	86,48	84,83	84,05	-	NA	
	- Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	-	78,75	55	51,88	-	NA	
17.6.	**Kegiatan pembinaan politik daerah**							
	- Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	1	35	6	9	6	NA	
	- Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol	-	10	3	4	4	NA	
	- Penguatan budaya dan etika politik masyarakat	1	6	4	4	4	NA	
	- Jumlah	2	51	13	17	14	NA	
18.	**Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
18.1.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,73	0,75	0,77	0,77	0,78	NA	
18.2.	**Penyelesaian Pelanggaran Perda**							
	- Jumlah Pelanggar Perda	252	359	126	2740	1926	NA	
	- Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	252	359	126	2740	1926	NA	
	- Persentase	100	100	100	100	100	NA	
18.3.	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012	-	56,69	81,81	83,41	76,58	NA	
18.4.	Rasio SISKAMLING per jumlah desa/kelurahan		0,49	5,45	8,79	12,02	NA	
18.5.	**Sertifikasi ISO 9001:2008**							
	- Jumlah UPP	3	3	3	2	2	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
18.6.	**Diklat Aparatur**							
	- Teknis	835	973	552	490	995	NA	
	- Fungsional	547	568	409	260	480	NA	
	- Kepemimpinan	267	532	468	420	676	NA	
	- Pemerintah Daerah	210	290	64	35	40	NA	
	- Prajabatan	1.100	4.410	4.581	5.917	2.387	NA	
18.7.	Pertumbuhan ekonomi	5,61	5,14	5,84	6,01	6,34	6,25-6,75	>
18.8.	Kemiskinan	19,23	17,48	16,11	16,21	14,98	13,44	<
18.9.	**Penyelesaian Pelanggar Perda**							
	- Jumlah Pelanggar Perda	252	359	126	2740	1926	NA	
	- Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	252	359	126	2740	1926	NA	
	- Persentase	100	100	100	100	100	NA	
19.	**Ketahanan Pangan**							
19.1.	**Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah Menurut Kabupaten/Kota**							
	- Luas lahan Sawah	990.652	-	-	-	991.524	NA	
	- Luas (Ha) penurunan/ kenaikan lahan sawah	872	-	-	-	872	NA	
	- Persentase (%) penurunan/kenaikan lahan sawah	0,09	-	-	-	0,09	NA	
19.2.	Jumlah Penduduk yang bekerja di sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Orang)	5.697.121	5.864.827	5.616.529	5.376.452	5.064.377	NA	
19.3.	**Kesediaan pangan utama (Juta Ton)**							
19.3.1.	**Ketersediaan Padi, Jagung, Ubi Kayu**							
	- Padi	5,13	5,39	5,68	5,28	5,75	NA	
	- Jagung	2,44	2,78	2,78	2,52	2,77	NA	
	- Ubi Kayu	2,83	3,13	3,29	2,98	3,27	NA	
19.3.2.	**Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Kedelai	142,25	148,88	159,79	95,43	129,55	NA	
	- Kacang.Tanah	154,25	146,19	145,1	110,08	129,32	NA	
	- Kacang.Hijau	81,43	93,92	70,02	104,87	100,35	NA	
	- Ubi Jalar	103,10	129,43	121,20	139,02	146,94	NA	
	- Gula	272,01	227,21	242,67	244,19	329,19	NA	
19.3.3.	**Ketersediaan Daging, Susu, Telur**							
	- Daging	265	303	306	319	337	NA	
	- Susu	220	317	383	446	498	NA	
	- Telur	198	282	266	273	288	NA	
	- Ketersediaan Energi per Kapita Tahun 2008 – 2012 (k.kal/kap/hr)	2.458	3.010	3.277	3.886	3.592	NA	
	- Ketersediaan Protein per Kapita Tahun 2008– 2012 (gram/kap/hari)	73,48	80,7	86,28	109,82	92,24	NA	
19.3.4.	**Skor PPH Jawa Tengah**							
	- Padi-padian	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25	=
	- Umbi-umbian	1,90	2,00	1,93	2,40	2,50	2,5	*
	- Pangan Hewani	14,30	16,00	12,10	17,88	17,85	24	<
	- Minyak & lemak	4,80	4,60	5,50	4,95	5,00	5	*
	- Buah/biji berminyak	1,00	1,00	1,42	0,97	1,00	1	>
	- Kacang-kacangan	8,90	8,00	9,21	10,00	10,00	10	*
	- Gula	2,40	2,10	1,79	2,27	2,48	2,5	<
	- Sayur & buah	24,90	25,00	22,67	25,18	26,00	30	<
	- Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	*
	- Skor PPH Jateng	83,20	83,70	86,02	88,66	89,87	100	<
19.3.5.	**Capaian Konsumsi Kelompok Pangan**							
	- Beras (Kg/Kap/Th)	100,57	96,93	108,43	102,48	90,49	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	19,36	12,61	21,99	27,52	32,31	NA	
	- Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	33,15	41,98	21,10	38,44	37,21	NA	
	- Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	76,80	87,45	69,43	76,57	73,98	NA	
19.3.6.	**Konsumsi Energi Per Kapita/Hari**							
	- Padi-padian	1230	1550,3	1228,84	1094,80	1033,02	1000	>
	- Umbi-umbian	78,00	90,70	98,75	100,51	118,89	120	<
	- Pangan Hewani	145,30	184,00	121,87	178,80	178,52	240	<
	- Minyak & lemak	196,20	210,10	200,00	188,10	200,18	200	>
	- Buah/biji berminyak	40,00	45,00	39,99	37,90	40,15	60	<
	- Kacang-kacangan	90,00	93,00	99,78	137,60	158,99	100	>
	- Gula	99,00	95,00	97,61	97,80	99,24	100	<
	- Sayur dan Buah	101,00	115,00	91,30	100,70	104,12	120	<
	- Lain-lain	13,10	14,90	14,90	67,30	69,29	60	>
20.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
20.1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	8.574	8.576	8.576	8.576	8.578	NA	
20.2.	PKK aktif	8.574	8.574	8.576	8.577	8.578	NA	
20.3.	Posyandu Aktif	36.897	47.579	48.124	48.124	48.187	NA	
20.4.	**Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat**							
20.4.1.	**UED-SP, Bumdes dan Pasar Desa**							
	- UED-SP	30	10	30	49	34	NA	
	- Bumdes	-	-	29	29	29	NA	
	- Pasar Desa	20	60	29	39	28	NA	
21.	**Perpustakaan**							
21.1.	**Jumlah perpustakaan**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Perpustakaan Desa	277	356	435	521	711	NA	
	- Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi	1	1	1	1	1	NA	
	- Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota	35	35	35	35	35	NA	
	- Jumlah Perpustakaan Keliling	35	35	35	58	80	NA	
21.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	432.455	431.377	494.665	517.148	595.200	NA	
21.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	39.627	67.127	171.068	184.568	229.963	NA	
B.	**Pelayanan Urusan pilihan**							
1.	**Pertanian**							
1.1.	**Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Hektar**							
	- Padi (ton)	9.136.405	9.600.416	10.110.830	9.391.959	10.232.934*	10.416.429,84	<
	- Beras (ton)[a]	5.130.875	5.391.456	5.678.098	5.274.390	5.729.529	NA	
	- Jagung (ton)	2.679.914	3.057.845	3.058.710	2.772.575	3.041.630*	3.151.159,51	<
	- Kedelai (ton)	167.345	175.156	187.992	112.273	152.416*	195.586,88	<
	- Tebu (ton)	3.885.829	3.216.557	4.118.607	3.516.328	4.555.355	4.745 Juta	<
	- Gula (ton)[a]	272.007	227.214	242.660	244.192	329.191	365.000	<
	- Daging (kg)	183.770.371	203.841.029	228.189.441	239.459.443	252.218.874	247.802.156	>
	- Susu (lt)	74.031.934	91.762.220	100.149.736	104.141.255	105.516.134	106.248.855	<
	- Telur (kg)	191.355.603	249.804.428	250.226.811	257.175.536	271.819.998	262.010.159	>
1.2.	**Produktivitas Tanaman Pangan**							
	- Padi	55,06	55,65	56,13	54,47	57,70 (ASEM)	NA	
	- Jagung	41,92	46,21	48,41	53,3	54,97 (ASEM)	NA	
	- Kedelai	14,96	15,91	16,48	13,69	15,69 (ASEM)	NA	
	- Ubi Kayu	164,32	192,65	206,10	202,17	217,61 (ASEM)	NA	
	- Ubi Jalar	133,10	167,77	172,91	196,34	208,72 (ASEM)	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
1.3.	**Produksi Hortikultura**							
	- Komoditas (Ton)							
	- Cabai Merah	100.083	139.993	134.357	119.130	130.127	145.000	<
	- Bawang Merah	379.903	406.725	506.357	372.256	381.319	425.000	<
	- Kentang	263.147	288.654	265.123	250.402	252.607	300.000	<
1.4.	**Produksi Tanaman Perkebunan Utama**							
	- Komoditas (ton)							
	- Kopi	14.292	15.010	16.225	9.837	33.474	15.800	>
	- Kakao	1.084	1.231	1.377	1.417	1.890	NA	
	- Kelapa	174.962	177.714	179.491	180.162	183.048	180.000	>
	- Karet	732	795	1.187	1.402	1.580	NA	
	- Cengkeh	5.869	6.108	6.558	4.236	7.571	NA	
	- Teh	5.579.95	5.512	6.132	6.105	6.436	NA	
	- Nilam	12.464	15.811	17.489	13.971	12.487	NA	
1.5.	**Populasi Ternak**							
	- Jenis Ternak							
	- Sapi Potong (ekor)	1.442.033	1.525.250	1.554.458	1.937.551	2.051.407	1.675.044	>
	- Sapi Perah (ekor)	118.424	120.667	122.489	149.931	154.398	124.500	>
	- Kambing (ekor)	3.356.801	3.499.848	3.691.096	3.724.452	3.889.878	NA	
1.6.	**Perkembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluh**							
	- Jumlah Balai Penyuluhan dan Posluhdes yang . berkualitas	245	258	497	522	528 dan3.233*	NA	
	- Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian	0,59	1,61	8,5	30,2	34,01	NA	
1.7.	**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**							
	ADHB (%)							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Tanaman Pangan	13,93	13,92	13,7	13,31	13,18	NA	
	- Tanaman Perkebunan	1,63	1,69	1,51	1,54	1,47	NA	
	- Peternakan	2,80	2,89	2,90	2,85	2,78	NA	
	ADHK (%)							
	- Tanaman Pangan	13,78	13,53	13,15	12,39	12,07	NA	
	- Tanaman Perkebunan	1,82	1,84	1,68	1,66	1,62	NA	
	- Peternakan	2,47	2,5	2,49	2,47	2,42	NA	
1.8.	**Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB**							
2.	**Kehutanan**							
2.1.	**Luas Rehabilitasi Hutan**							
	- Luas hutan (dalam dan luar kawasan)	-	992.955	1.710.230	1.392.251	1.412.503	NA	
	- Luas lahan kritis	-	697.397	696.797	720.763	720.763	NA	
	- Lahan yang direhabilitasi	-	43.764	37.306	198.686	119.911	NA	
	- Persentase Lahan yang direhabilitasi	-	6,27	5,35	27,56	16,63	NA	
2.2.	**Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB**							
	- Nilai total PDRB (dalam juta)	367.135.954,90	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13	NA	
	- Nilai Sektor Kehutanan(dalam juta)	1.903.219,00	2.032.962,00	2.354.617,00	2.643.961,00	2.754.602,00	NA	
	- Kontribusi (%)	0,52	0,51	0,53	0,53	0,50	NA	
3.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
3.1.	**Pertambangan Tanpa Ijin**							
3.1.1.	**Penertiban Area Penambangan Liar**							
	- Luas area penambangan liar (ha)	NA	100	92,43	92,43	43,67	NA	
	- Luas area penambangan liar yang ditertibkan . (ha)	NA	50	82,21	80,43	37,12	NA	
	- Persentase	NA	50%	88,94%	87,02	85%	NA	
3.2.	**Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Nilai Sektor Pertambangan (juta rupiah)	3.514.457,82	3.852.796,77	4.302.563,07	4.726.493,18	4.726.486,17	NA	
	- Nilai total PDRB (juta rupiah)	367.135.954,90	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13	NA	
	- Kontribusi (%)	0,96	0,97	0,97	0,95	0,85	NA	
3.3.	**Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi**							
	- Rasio Elektrifikasi (%)	72,7	72,7	73,5	76,6	80,0	Meningkat 2,45%	>
	- Pembangunan jaringan tengangan menengah (JTM)	6,4	7,0	8,8	12,9	22,7	NA	
	- Pembangunan jaringan tengangan rendah (JTR) (kms)	4,8	6,5	9,9	13,2	26,3	NA	
	- Pembangunan PLTMH (unit)	2,0	3,0	5,0	7,0	9,0	NA	
	- Pembangunan PLTS SHS (unit)	490,0	559,0	655,0	1929,0	2637,0	NA	
	- Pembangunan Demplot Gas Rawa (unit)	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	NA	
	- Pembangunan Demplot Biogas	0,0	8,0	16,0	24,0	44,0	NA	
4.	**Pariwisata**							
4.1.	**Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata**							
	- Jumlah obyek wisata (OW)	255	257	266	284	385	NA	
	- Obyek wisata yang memiliki rencana pengembangan destinasi wisata (%).	5	10	15	15	20	NA	
	- Jumlah obyek wisata berstandar nasional (OW)	27	28	30	34	37	NA	
	- Jumlah obyek wisata berstandar internasional (OW)	10	13	15	17	20	NA	
	- Jumlah obyek wisata memiliki UMKM dan Industri Kreatif bidang pariwisata (OW)	100	125	150	175	200	NA	
	- Jumlah desa wisata (desa)	65	85	115	119	125	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
4.2.	**Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata**							
	- Jumlah Tenaga Kerja di bidang pariwisata (orang)	16.369	19.419	19.807	21.340	21.520	NA	
	- Jumlah Pramuwisata Madya (orang)	29	90	117	189	249	NA	
4.3.	**Kunjungan Wisata**							
4.3.1.	**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara**							
	- Wisnus	15.762.384	21.515.146	22.275.146	21.838.351	25.240.021	19.625.627	>
	- Wisman	302.000	273.150	317.805	392.895	372.463	327.578	>
4.3.2.	**Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan**							
	- Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,22	2,23	2,25	2,26	2,31	2,3	*
	- Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,91	1,92	1,94	1,96	2,01	2,0	*
	- Rata-rata belanja wisatawan mancanegara (US dollar per hari)	150	160	170	284	298	200	>
	- Rata-rata belanja wisatawan nusantara (rupiah per hari)	225.000	245.000	275.000	474.000	498.000	336.000	>
4.4.	**Kinerja Promosi dan Pemasaran Wisata**							
	- Jumlah obyek wisata yang memiliki kelengkapan bahan promosi (OW)	65	70	75	90	100	NA	
	- Jumlah obyek wisata yang menyelenggarakan event pariwisata. (OW)	135	150	175	200	225	NA	
	- Jumlah obyek wisata yang dipasarkan dalam event pariwisata luar negeri (OW)	28	30	35	35	37	NA	
4.5.	**Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**	11.835.092,67	12.893.358,32	14.374.000,32	16.210.492,05	18.279.752,84	NA	
	- Hotel	1.193.421,83	1.362.722,98	1.547.333,66	1.711.438,05	1.898.282,67	NA	
	- Restoran	10.433.598,17	11.252.640,99	12.495.126,54	14.137.771,81	15.982.272,76	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
	- Hiburan dan Rekreasi	208.072,67	277.994,35	331.540,12	361.282,19	399.197,41	NA	
	- Jumlah Sektor Pariwisata	11.835.092,67	12.893.358,32	14.374.000,32	16.210.492,05	18.279.752,84	NA	
	- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	3,26	3,24	3,23	3,25	3,28	NA	
5.	**Kelautan dan Perikanan**							
5.1.	**Produksi Perikanan**							
	- Produksi Perikanan Tangkap	192.117,80	213.296,80	231.119,20	269.043,20	283.957,60	203.758,70	>
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	128.705,80	145.015,10	189.949,40	244.545,50	251.135,80	266.323,20	<
	- Ekspor Produk Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2012 (Kg/Tahun)	17.794.068,80	16.596.516,84	16.551.920,24	23.791.384,54	19.608.246,32	NA	
5.2.	**Konsumsi Ikan**							
5.2.1	Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Penduduk (Kg/Kapita/Tahun)	15,05	15,23	15,95	16,55	17,50	14,41	>
5.3.	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**							
5.4.	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**							
5.4.1.	**Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan**							
	- Pendapatan nelayan (Rp)	5.878.807,86	7.144.737,40	7.788.712,80	9.900.000	10.000.000	5.949.450	>
	- Pendapatan pembudidaya ikan (Rp)	2.065.187,16	2.044.500	2.535.260	3.372.526	3.673.000	2.663,23	>
5.5.	**Luas Terumbu Karang**							
	- Luas terumbu karang (ha)	221,20	1.237,43	1.355,61	1.373,78	987,64	NA	
	- Luas terumbu karang kondisi baik (ha)	36,70	58,60	451,65	430,97	404,95	NA	
	- Luas terumbu karang kondisi sedang (Ha)	2,50	405,21	76,28	88,51	5,20	NA	
	- Luas terumbu karang kondisi rusak (Ha)	182	773,62	827,69	857,71	577,48	NA	
5.6.	**Luas Hutan Mangrove**							
	- Luas hutan mangrove (ha)	11.019,62	21.450,99	25.819,30	20.153,26	25.655,22	NA	
	- Luas hutan mangrove kondisi baik (ha)	4.319,95	14.673,27	15.325,75	14.822,23	17.432,06	NA	
	- Luas hutan mangrove kondisi sedang (ha)	6.019,25	4.939,53	6.079,67	2.277,58	4.739,78	NA	
	- Luas hutan mangrove kondisi rusak (ha)	680,42	1.838,19	4.413,89	3.053,45	3.483,38	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
6.	**Perdagangan**							
6.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	19,7	19,7	19,5	19,7	20,3	NA	
6.2.	**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah**							
	- Nilai total PDRB	367.135.954,90	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13	NA	
	- Nilai Sektor Perdagangan	59.990.034,69	65.647.179,51	72.954.035,12	82.612.875,54	95.028.163,85	NA	
	- Kontribusi (%)	16,34	16,50	16,41	16,56	17,08	NA	
6.3.	**Ekspor bersih perdagangan (Jt US$)**	731	416	-397	-209	-779	NA	
	- Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)	3.185	2.885	3.674	4.259	4.513	NA	
	- Nilai impor non migas (Jt US$)	2.454	2.469	4.071	4.468	5.292	NA	
	- Ekspor Bersih Perdagangan (Jt US$)	731	416	-397	-209	-779	NA	
6.4.	**Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu**							
	- Jumlah ijin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	114	77	477	334	462	NA	
	- Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	351	632	396	396	529	NA	
6.5.	**Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Ijin Usaha Perdagangan Dalam Negeri**							
	- Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (unit)	294.982	320.482	353.965	384.873	415.829	NA	
	Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri (unit)							
	- SIUP	279.121	304.771	329.213	356.999	358.733	NA	
	- TDP	15.861	15.711	24.752	27.874	57.096	NA	
7.	**Perindustrian**							
7.1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	33,1	32,8	32,9	33,3	32,8	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
7.2.	**Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Milyar Rupiah)**							
	- Nilai total PDRB	367.135.954,90	397.903.943,75	444.666.007,00	498.763.824,16	556.479.872,13	NA	
	- Nilai Sektor Industri	125.006.771,42	130.352.154,42	146.132.837,59	165.850.520,22	182.715.245,06	NA	
	- Kontribusi (%)	34,05	32,76	32,86	33,25	32,83	NA	
7.3.	**Pertumbuhan Industri**							
	- Besar	498	501	495	528	554	NA	
	- Kecil dan Menengah	320.411	320.590	320.770	319.689	335.673	NA	
7.4.	**Pengembangan Klaster Industri**							
	Jenis industri							
	- Jumlah Klaster Logam, Mesin, Tekstil	1	3	2	0	0	NA	
	- Jumlah Klaster Komponen Otomotif, elektronika & Aneka	3	1	2	4	0	NA	
	- Jumlah Klaster agro, kimia & hasil hutan	2	2	2	3	5	NA	
	- Pengembangan Klaster Industri	6	6	6	7	5	NA	
7.5.	Cakupan Jumlah kelompok pengrajin yang mendapat bantuan (paket)	115	73	127	210	230	NA	
8.	**Ketransmigrasian**							
8.1.	Pengiriman Transmigran (KK)	900	913	593	690	700	1500	<
8.2.	Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran (KK)	559	590	660	780	475	NA	
III.	**DAYA SAING DAERAH**							
A.	**Kemampuan Ekonomi Daerah**							
1.	**Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian**							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	179.373	188.823	214.180	228.402	255.950	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
		2008	2009	2010	2011	2012		
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	161.805	161.800	180.317	224.438	251,03	NA	
2.	**Pertanian**							
2.1.	Nilai tukar petani	102,7	100,03	103,12	106,62	106,37	107,84	<
B.	**Fasilitas wilayah/Infrastruktur**							
1.	**Perhubungan**							
1.1.	**Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian**							
1.1.1.	Jumlah Penumpang (orang)	7.889.666	8.957.670	9.376.298	7.586.582	9.655.794	NA	
1.1.2.	Jumlah barang terangkut (ton)	1.882.028	1.748.849	1.796.157	448.788	1.562.214	NA	
C.	**Fokus Iklim Berinvestasi**							
1.	**Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
1.1.	Angka Kriminalitas	4,02	3,91	3,92	4,26	3,61	NA	
1.2.	Jumlah Demo/Unjuk Rasa	436	367	380	326	491	NA	

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja.

Analisis kinerja keuangan Tahun 2008-2013, dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah secara spesifik diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pokok-pokok yang diatur dalam peraturan daerah tersebut meliputi :

1. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
2. Azas umum dan struktur APBD;
3. Penyusunan rancangan APBD;
4. Penetapan APBD;
5. Pelaksanaan APBD;
6. Perubahan APBD;
7. Pengelolaan kas;
8. Penatausahaan keuangan daerah;
9. Akuntansi keuangan daerah;
10. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
11. Kerugian daerah;
12. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
13. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; dan
14. Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Sedangkan pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur yang ditetapkan setiap tahun yaitu pada akhir tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD pada awal tahun berikutnya. Kinerja

keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2008 - 2012 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 - 2012 Provinsi Jawa Tengah

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)					r (%)
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.698.843.477.590**	**4.000.735.711.227**	**4.785.133.227.424**	**5.564.233.151.730**	**6.629.308.010.656**	**15,80**
1.1	Pajak Daerah	3.068.130.112.015	3.236.777.063.381	3.893.699.996.503	4.599.046.986.897	5.590.597.156.499	16,37
1.2	Retribusi Daerah	321.963.374.782	127.405.510.531	127.651.268.654	64.549.242.508	68.250.252.455	-25,98
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	131.312.950.178	153.848.189.957	195.631.744.316	211.976.158.779	238.231.932.823	16,27
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	177.437.040.615	482.704.947.358	568.150.217.951	688.660.763.546	732.228.668.879	54,32
2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.504.184.018.219**	**1.691.853.080.166**	**1.811.657.949.152**	**1.950.189.365.492**	**2.318.806.099.223**	**11,53**
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	450.692.147.219	557.673.479.166	614.565.942.152	622.219.342.492	751.282.698.223	13,98
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.053.491.871.000	1.130.742.601.000	1.168.787.757.000	1.276.180.223.000	1.516.892.951.000	9,69
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	3.437.000.000	28.304.250.000	51.789.800.000	50.630.450.000	-
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**387.113.200**	**4.071.260.500**	**29.525.812.916**	**33.247.286.501**	**2.746.365.589.588**	2.437,5
3.1	Dana Penyesuaian	229.975.200	3.437.850.000	2.067.000.000	1.740.750.000	2.694.197.224.000	39.002,9
3.2	Dana Insentif Daerah	-	-	24.590.163.000	27.209.938.000	16.371.911.000	-
3.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	-	-	-	-	35.124.829.427	-
3.4	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	-	3.103.572.000	-	-
3.5	Pendapatan Lainnya	157.138.000	633.410.500	2.868.649.916	1.193.026.501	671.625.161	138,47
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.203.414.609.009**	**5.696.660.051.893**	**6.626.316.989.492**	**7.547.669.803.723**	**11.694.479.699.467**	**23,66**

Sumber : DPPAD dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Capaian kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang ditunjukan dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah dari tahun ke tahun dengan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pada Tahun 2012 realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.11,694 Trilyun, mengalami kenaikan sebesar 124,74% dari Tahun 2008 sebesar Rp.5,203 Trilyun. Hal ini menunjukan selama lima tahun (2008-2012) kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah baik.

Berdasarkan realisasi tersebut, rata-rata pertumbuhan PAD Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 sebesar 15,80%. Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 16,37%. Pajak Daerah yang menjadi sumber utama pendapatan daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tanah.

Di sisi lain rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2008 - 2012 sebesar 11,53%, dengan rata-rata pertumbuhan terbesar pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang mencapai 13,98%. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan cukup signifikan, dikarenakan oleh adanya perubahan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang semula diadministrasikan langsung pada APBD kabupaten/kota, sejak Tahun 2012 diadministrasikan pada APBD Provinsi.

Kondisi pencapaian tersebut karena didukung dengan arah kebijakan pendapatan daerah, yaitu :

a. Penerimaan PAD yang bersumber dari peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
b. Peningkatan Dana Perimbangan yang bersumber dari :
   1) Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
   2) Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
   3) Peningkatan alokasi DAU;
   4) Konfirmasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi dana lain (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah/DID).

Kebijakan tersebut juga didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta penyempurnaan prasarana dan sarana.

Secara rinci gambaran persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.1.

Tabel 3.2
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah		
	Target	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	(%)
2008	5.131.037.275.000	5.203.414.609.009	101,41%
2009	5.340.393.051.000	5.696.660.051.893	106,67%
2010	5.687.506.960.000	6.626.316.989.492	116,51%
2011	7.079.922.222.000	7.547.669.803.723	106,61%
2012	11.423.264.720.000	11.694.769.699.467	102,37%
Persentase Pertumbuhan dari Tahun 2008 ke Tahun 2012			124,74%

Sumber : DPPAD dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

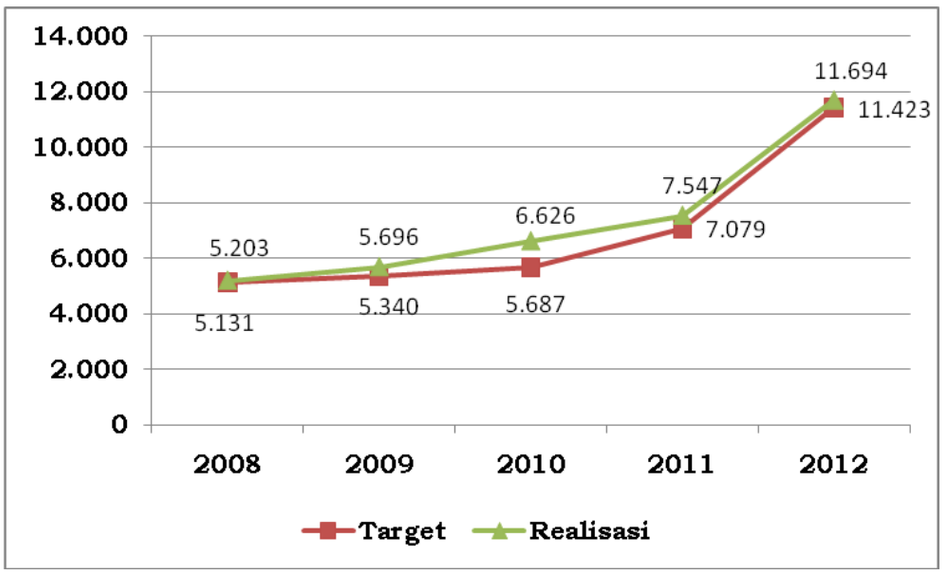

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Di Jawa Tengah proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah kurun waktu lima tahun (2008 – 2012) sangat tinggi, yaitu mencapai lebih dari 70%, bahkan pada Tahun 2011 mencapai sebesar 73,72%, dengan sumber terbesar berasal dari pajak daerah. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 28% hingga 30%, dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.3
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	Proporsi (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**71,08**	**70,23**	**72,21**	**73,72**	**56,69**
1.1	Pajak Daerah	58,96	56,82	58,76	60,93	47,81
1.2	Retribusi Daerah	6,19	2,24	1,93	0,86	0,58
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,52	2,31	2,95	2,81	2,04
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3,41	8,47	8,57	9,12	6,26
2	**DANA PERIMBANGAN**	**28,91**	**29,70**	**27,34**	**25,84**	**19,82**
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8,66	9,79	9,27	8,24	6,42
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,25	19,85	17,64	16,91	12,97
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	0,06	0,43	0,69	0,43
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**0,01**	**0,07**	**0,45**	**0,44**	**23,49**
3.1	Dana Penyesuaian	0,00	0,06	0,03	0,02	23,04
3.2	Dana Insentif Daerah	-	-	0,37	0,36	0,14
3.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	-	-	-	-	0,30
3.4	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	-	0,04	-
3.5	Pendapatan Lainnya	0,00	0,01	0,04	0,02	0,01
	JUMLAH PENDAPATAN	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah, 2013

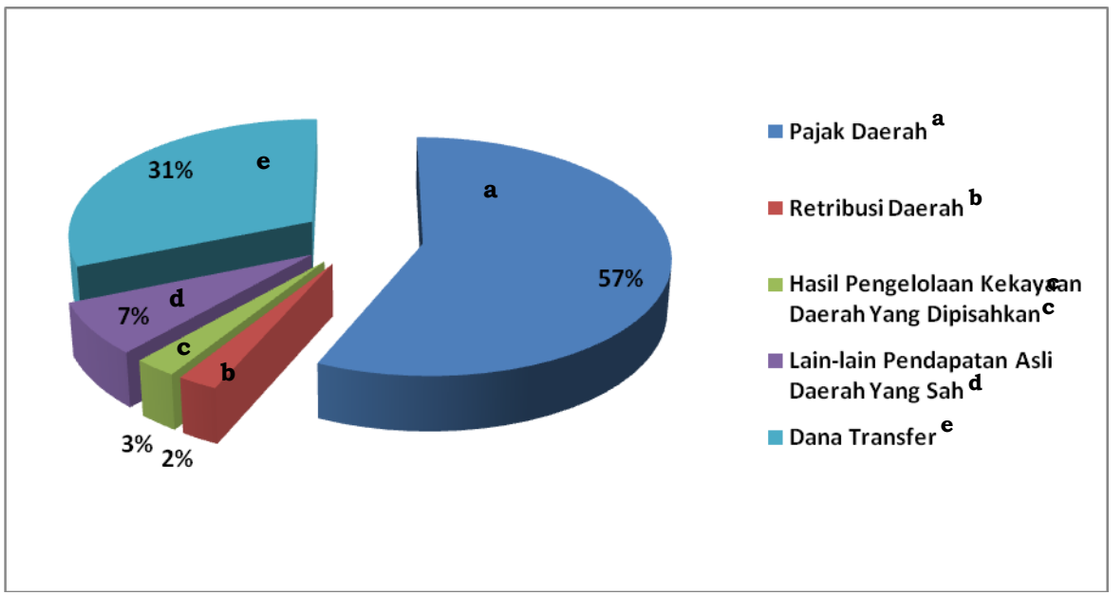

Gambar 3.2
Rata-Rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2012

b. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan pembelanjaan pada periode Tahun 2008 – 2013 dilakukan melalui analisis belanja daerah.

Adapun kebijakan Belanja Daerah Tahun 2008 – 2013 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

1) **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :
   a) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
   b) Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
   c) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
   d) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
   e) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik;
   f) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
   g) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada kabupaten/kota;
   h) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) **Belanja Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :
   a) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
   b) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;

c) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2008 – 2012 dan persebaran proporsinya dapat dilihat dalam Tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	r (%)
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.360.057.527.019**	**3.212.099.612.278**	**3.796.513.883.763**	**5.296.203.049.438**	**8.540.012.836.860**	**28,64**
1.1	Belanja Pegawai	876.807.193.057	941.583.100.416	1.069.384.502.236	1.177.690.905.798	1.241.600.971.683	9,13
1.2	Belanja Bunga	331.000	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Hibah	385.489.980.026	67.953.604.079	68.261.172.243	104.349.805.298	3.123.911.500.052	716,16
1.4	Belanja Bantuan Sosial	412.423.155.700	401.255.900.875	344.916.345.000	384.067.344.000	7.548.325.000	-25,86
1.5	Belanja Bagi Hasil	1.058.172.720.189	1.108.957.858.458	1.182.878.412.851	1.694.471.481.205	2.253.337.259.092	21,92
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	626.139.791.522	687.190.390.450	1.116.008.176.210	1.932.795.166.600	1.908.190.237.800	36,02
1.7	Belanja Tidak Terduga	1.024.355.525	5.158.758.000	15.065.275.223	2.828.346.537	5.424.543.233	151,63
2	**BELANJA LANGSUNG**	**1.802.604.949.407**	**1.988.013.500.673**	**2.171.519.886.296**	**2.480.502.777.738**	**2.906.831.268.274**	**12,73**
2.1	Belanja Pegawai	250.055.680.344	213.820.985.029	209.968.578.170	203.990.528.090	318.033.644.866	9,19
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.022.442.665.892	1.227.133.927.452	1.542.074.983.760	1.812.185.241.550	1.977.523.313.263	18,08
2.3	Belanja Modal	530.106.603.171	547.058.588.192	419.476.324.366	464.327.008.098	611.274.310.145	5,55
	JUMLAH	**5.162.662.476.426**	**5.200.113.112.951**	**5.968.033.770.059**	**7.776.705.827.176**	**11.446.844.105.134**	**19,59**

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Tabel 3.5
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Proporsi (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**65,08**	**61,77**	**63,61**	**68,10**	**74,61**
1.1	Belanja Pegawai	16,98	18,11	17,92	15,14	10,85
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Hibah	7,47	1,31	1,14	1,34	27,29
1.4	Belanja Bantuan Sosial	7,99	7,72	5,78	4,94	0,07
1.5	Belanja Bagi Hasil	20,50	21,33	19,82	21,79	19,69
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	12,13	13,21	18,70	24,85	16,67
1.7	Belanja Tidak Terduga	0,02	0,10	0,25	0,04	0,05
2	**BELANJA LANGSUNG**	**34,92**	**38,23**	**36,39**	**31,90**	**25,39**
2.1	Belanja Pegawai	4,84	4,11	3,52	2,62	2,78
2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,80	23,60	25,84	23,30	17,28
2.3	Belanja Modal	10,27	10,52	7,03	5,97	5,34
	JUMLAH	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung, dengan komposisi terbesar dari Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan. Tahun 2012 terjadi kenaikan signifikan pada komponen Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Hibah sebesar 27,29%, yang disebabkan karena adanya pengadministrasian dana BOS kepada provinsi, yang semula diserahkan kepada kabupaten/kota.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan :

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian;
c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan perencanaan anggaran;
d. Membentuk dana cadangan.

Kebijakan keuangan daerah, baik angka kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2008 – 2012 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp.000)					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
1.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**848.298.787.646**	**683.817.617.209**	**904.356.288.232**	**1.239.075.792.299**	**707.735.960.463**	1,75
1.1.1	SILPA	329.786.228.234	587.388.161.436	850.362.509.157	1.232.139.507.665	705.308.166.992	31,26
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	400.000.000.000	-	-	-	-	-
1.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	288.903.869	-	-	-	-	-
1.1.4	Penerimaan Piutang Daerah	51.766.069.007	30.771.447.094	-	-	-	-
1.1.5	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	5.000.000.000	-	-	-	-	-
1.1.6	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	44.826.000.000	50.000.000.000	48.795.000.000	425.000.000	800.000.000	-0,44
1.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	-	-	-	6.411.284.634	1.627.793.471	-
1.1.8	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat	-	100.000.000	200.000.000	100.000.000	-	-
1.1.9	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM dan IKM	12.151.515.739,00	9.491.491.445	3.570.639.030	-	-	-
1.1.10	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman	1.753.139.365	668.410.250	359.959.182	-	-	-
1.1.11	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Bantuan Peralatan Untuk IKM	761.007.076	1.229.692.208	472.886.809	-	-	-
1.1.12	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pembangunan Gedung BPR / BKK	849.114.373	690.039.776	408.369.054	-	-	-
1.1.13	Penerimaan Dana Bergulir Fasilitasi Usaha Perikanan	-	1.920.000.000	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp.000)					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.1.14	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri	817.500.000	1.558.375.000	70.625.000	-	-	-
1.1.15	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir kepada Kelompok Tani di seluruh Kecamatan	-	-	116.300.000	-	-	-
1.1.16	Penerimaan Dana Bergulir Badan Kredit Desa	299.309.983	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**848.298.787.646**	**683.817.617.209**	**904.356.288.232**	**1.239.075.792.299**	**707.735.960.463**	1,75
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**300.092.189.109**	**330.002.046.994**	**330.500.000.000**	**304.731.601.854**	**200.000.000.000**	-8,01
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	155.159.000.000	143.156.000.000	130.500.000.000	104.731.601.854	50.000.000.000	-22,15
3.2.2	Pembayaran Utang Pokok	388.300.973	-	-	-	-	-
3.2.3	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan	49.350.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	-
3.2.4	Pemberian Dana Bergulir	1.612.500.000	-	-	-	-	-
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir Sapi Kereman	675.000.000	-	-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Utang Daerah	92.907.388.136	136.846.046.994	-	-	-	-
3.2.7	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	150.000.000.000	200.000.000.000	150.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**300.092.189.109**	**330.002.046.994**	**330.500.000.000**	**304.731.601.854**	**200.000.000.000**	-8,01
	Pembiayaan Netto	548.206.598.537	353.815.570.215	573.856.288.232	934.344.190.445	507.735.960.463	10,97
	PEMBIAYAAN NETTO	**548.206.598.537**	**353.815.570.215**	**573.856.288.232**	**934.344.190.445**	**507.735.960.463**	10,97

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2008 – 2012 yang telah di audit dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	r (%)
1.	**ASET**						
1.1	**Aset Lancar**	**427.326.458.325**	**693.554.877.108**	**692.624.084.077**	**317.542.011.926**	**457.710.283.347**	
	Kas	427.326.458.325	693.554.877.108	692.624.084.077	317.542.011.926	457.710.283.347	13,04
1.1.1	Kas di Kas Daerah	423.307.355.289	631.000.464.438	612.839.837.356	266.393.014.834	395.181.175.177	9,49
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.730.376.966	254.043.821	4.874.129	101.370.398	1.170.376.247	7,10
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaaan	288.726.070	229.908.523	479.702.283	943.490.966	1.133.919.165	51,29
1.1.4	Kas di Bendahara BLUD	-	62.070.460.326	79.299.670.309	50.104.135.728	60.224.812.158	5,19
1.2	**Setara Kas**	**175.000.000.000**	**160.000.000.000**	**540.000.000.000**	**390.000.000.000**	**300.000.000.000**	44,52
	Deposito	175.000.000.000	160.000.000.000	540.000.000.000	390.000.000.000	300.000.000.000	44,52
1.3	**Piutang**	**40.446.160.419**	**57.020.492.487**	**42.081.263.227**	**385.695.021.424**	**444.944.587.914**	21,16
1.3.1	Piutang Pajak	-	-	617.732.098	428.558.165.326	539.864.832.499	13,25
1.3.2	Piutang Retribusi	35.317.529.919	53.960.630.016	38.199.269.058	71.926.372.798	89.809.182.284	34,18
1.3.3	Piutang Lainnya	-	3.059.862.471	3.264.262.071	2.830.042.071	2.385.796.071	9,68
1.3.4	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	
1.3.5	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	
1.3.6	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat	-	-	-	-	-	
1.3.7	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
1.3.8	Bagian Lancar Tagihan Angsuran	-	-	-	-	-	
1.3.9	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	
1.3.10	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	107.630.500	-	-	-	-	

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	r (%)
1.3.11	Piutang lainnya	5.021.000.000	-	-	-	-	
1.3.12	Cadangan Piutang tak tertagih	-	-	-	-117.619.558.771	-187.115.222.939	
1.4	**Persediaan**	**62.676.045.347**	**80.357.680.869**	**85.961.633.327**	**141.636.261.285**	**88.575.244.146**	15,62
1.4.1	Persediaan	62.676.045.347	80.357.680.869	85.961.633.327	141.636.261.285	88.575.244.146	15,62
	Jumlah Aktiva Lancar	**705.448.664.091**	**990.933.050.464**	**1.360.666.980.631**	**1.234.873.294.635**	**1.291.230.115.408**	18,27
2	**Investasi Jangka Panjang**						
2.1	**Investasi Non Permanen**	**45.441.777.886**	**24.509.325.887**	**17.616.068.085**	**7.437.128.725**	**5.148.018.872**	38,13
2.1.1	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	
2.1.2	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	
2.1.3	Pinj kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
2.1.4	Investasi dalam surat utang negara	-	-	-	-	-	
2.1.5	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	
2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	45.441.777.886	29.790.269.207	22.876.978.805	16.345.661.571	15.019.788.286	-23,58
2.1.7	Investasi Non Permanen Lainnya – Diragukan tertagih	-	-5.280.943.320	-5.260.910.720	-8.908.532.846	-9.871.769.414	21,35
	Jumlah Investasi Non Permanen	**45.441.777.886**	**24.509.325.887**	**17.616.068.085**	**7.437.128.725**	**5.148.018.872**	38,13
2.2	**Investasi Permanen**	**1.393.914.639.276**	**1.496.251.163.657**	**2.329.454.927.339**	**2.627.319.899.666**	**2.935.431.521.576**	21,89
2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.393.914.639.276	1.496.251.163.657	2.329.454.927.339	2.627.319.899.666	2.935.431.521.576	21,89
2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**1.439.356.417.162**	**1.520.760.489.544**	**2.347.070.995.424**	**2.634.757.028.391**	**2.940.579.540.448**	**20,96**
3	**Aset Tetap**						
3.1	**Tanah**	**8.203.692.533.733**	**9.164.048.725.046**	**9.123.002.466.987**	**10.895.240.717.844**	**10.933.715.124.551**	7,76
3.1.2	Tanah	8.203.692.533.733	9.164.048.725.046	9.123.002.466.987	10.895.240.717.844	-	7,76
3.2	**Peralatan dan Mesin**	**891.026.745.764**	**1.028.546.866.404**	**1.166.104.946.106**	**1.277.710.847.229**	**1.441.311.604.292**	12,8
3.2.1	Alat-alat Berat	56.105.334.189	59.213.815.085	63.566.175.390	71.302.881.591	80.188.002.426	9,38
3.2.2	Alat-alat Angkutan	187.103.115.114	204.047.436.272	220.119.170.597	230.860.987.074	225.300.705.990	4,85

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	r (%)
3.2.3	Alat Bengkel	23.738.599.019	39.804.245.190	44.723.934.946	58.870.654.439	65.864.632.190	30,89
3.2.4	Alat Pertanian & Peternakan	13.642.456.793	16.429.971.070	19.298.645.385	21.542.041.870	25.770.300.405	17,29
3.2.5	Alat Kantor & Rumah Tangga	328.483.033.931	367.346.876.406	418.075.206.759	471.044.290.526	544.865.977.296	13,50
3.2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	34.693.825.045	43.518.832.774	49.360.005.264	53.264.466.373	60.975.860.289	15,31
3.2.7	Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur	2.914.927.165	4.206.653.825	5.634.847.003	312.503.834.093	1.539.303.980	-4,26
3.2.8	Alat-alat Kedokteran	177.898.525.825	239.189.271.903	285.126.161.906	65.721.537.080	357.246.194.337	31,84
3.2.9	Alat Laboratorium	65.165.009.383	52.974.329.579	58.119.284.556	688.775.980	77.520.199.676	5,52
3.2.10	Alat Keamanan	1.281.919.300	1.715.074.300	1.868.124.300	1.643.407.203	1.686.760.703	8,33
3.2.11	Alat Olah Raga	-	100.360.000	213.390.000	267.971.000	353.667.000	42,64
3.3	**Gedung dan Bangunan**	**1.419.895.421.912**	**1.512.817.592.367**	**1.586.914.348.887**	**1.714.491.360.453**	**1.821.777.453.550**	42,64
3.3.1	Bangunan Gedung	1.248.175.947.261	1.497.217.239.292	1.579.436.948.192	1.700.341.997.756	1.800.236.643.553	17,19
3.3.2	Bangunan Monumen	171.719.474.651	15.600.353.075	7.477.400.695	14.149.362.697	21.540.809.997	12,30
3.4	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	**681.698.398.272**	**1.251.278.943.158**	**1.585.189.987.541**	**1.927.897.968.822**	**2.238.371.351.915**	22,39
3.4.1	Jalan dan Jembatan	456.687.146.112	1.103.528.368.406	1.397.329.732.186	1.639.485.129.210	1.874.242.814.627	17,16
3.4.2	Bangunan Air (Irigasi)	152.224.874.900	120.367.511.028	152.659.195.250	251.365.489.657	316.956.393.255	29,47
3.4.3	Instalasi dan Jaringan	72.786.377.260	27.383.063.724	35.201.060.105	37.047.349.955	47.172.144.033	25,82
3.5	**Aset Tetap Lainnya**	**38.806.963.300**	**40.350.635.195**	**44.288.844.837**	**36.225.682.831**	**33.508.917.146**	-3,97
3.5.1	Buku dan perpustakaan	9.341.967.642	13.412.461.361	14.890.851.731	15.062.245.123	17.219.816.053	7,42
3.5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	5.597.725.651	5.202.498.730	6.815.313.002	7.311.621.066	7.668.415.066	11,80
3.5.3	Hewan/Ternak dan tumbuhan	23.867.270.007	21.735.675.104	22.582.680.104	13.851.816.642	8.620.686.027	78,49
3.6	**Kontruksi dalam pengerjaan**	**13.236.132.111**	**12.174.781.932**	**16.469.970.197**	**6.306.095.422**	**11.100.915.522**	-29,21
3.6.1	Kontruksi dalam pengerjaan	13.236.132.111	12.174.781.932	16.469.970.197	6.306.095.422	11.100.915.522	-29,21
3.7	**Akumulasi Penyusutan**	-	-	-	-	-	
3.7.1	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Asset Tetap	**11.248.356.195.092**	**13.009.217.544.102**	**13.521.970.564.555**	**15.857.872.672.601**	**16.479.785.366.976**	10,20

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	r (%)
4.	**Dana Cadangan**	-	-	-	-	-	
4.1	Dana Cadangan	-	-	151.593.517.977	369.727.819.616	-	1,44
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	**151.593.517.977**	**369.727.819.616**	-	1,44
5.	**Aset Lainnya**						
5.1	Tagihan Penjualan Anggaran	-	-	-	-	-	
5.2	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	
5.3	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	
5.4	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	88.205.000.000	-	-	-	
5.5	Aset tak berwujud	-	-	-	-	-	
5.6	Aset Lain-lain	-	1.570.569.684	1.570.569.684	150.423.651.668	141.860.701.367	23,67
	Jumlah Aset Lainnya		**89.775.569.684**	**1.570.569.684**	**150.423.651.668**	**141.860.701.367**	2,24
	Jumlah Aset	**13.393.161.276.345**	**15.610.686.653.794**	**17.382.872.628.271**	**20.247.654.466.911**	**21.403.447.535.936**	12,52
6.	**Kewajiban**						
6.1	**Kewajiban Jangka Pendek**						
6.1.1	Uang Perhitungan Pihak Ketiga	12.998.743.585	2.895.137.567	-	1.286.836.955	1.197.908.139	19,76
6.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
6.1.3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
6.1.4	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	
6.1.5	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	
6.1.6	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keu Bukan Bank	-	-	-	-	-	
6.1.7	Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-	-	
6.1.8	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	r (%)
6.1.9	Utang jangka Pendek Lainnya	148.781.834.986	165.247.865.136	437.655.060.548	407.448.918.964	252.382.713.427	32,74
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	161.780.578.571	168.143,002.703	437.655.060.548	408.735.755.919	253.580.621.566	29,89
6.2	**Kewajiban Jangka Panjang**						
6.2.1	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
6.2.2	Utang Luar Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
6.2.3	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	
6.2.4	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	-	-	-	-	-	
6.2.5	Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-	-	
6.2.6	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Jumlah Kewajiban	**161.780.578.571**	**168.143.002.703**	**437.655.060.548**	**408.735.755.919**	**253.580.621.566**	29,91
7.	**Ekuitas Dana Cadangan**						
7.1	**Ekuitas dana Lancar**						
7.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	588.958.731.120	850.362.509.157	1.232.139.507.665	705.308.166.992	755.371.554.796	13,41
7.1.2	Kas di Kasda Hutang Pihak Ketiga (Non SILPA)	-	-	-	-	-	
7.1.3	Kas di Pengeluaran Kas Hutang Pihak Ketiga (Non SILPA)	-	-	-	-	-	
7.1.4	Pendapatan yang ditangguhkan	368.983.620	297.230.384	484.576.412	947.007.979	1.140.820.412	39,87
7.1.5	Cadangan Piutang	40.446.160.419	57.020.492.487	42.081.263.227	385.695.021.424	444.944.587.914	5,45
7.1.6	Cadangan Persediaan	62.676.045.347	80.357.680.869	85.961.633.327	141.636.261.285	88.575.244.146	15,62
7.1.7	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-148.781.834.986	-165.247.865.136	-437.655.060.548	-407.448.918.964	-252.382.713.427	32,74
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**543.668.085.520**	**822.790.047.761**	**923.011.920.083**	**826.137.538.716**	**1.037.649.495.842**	13,98

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	r (%)
7.3	**Ekuitas Dana Investasi**						
7.3.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Pendek	1.439.356.417.162	-	-	-	-	
7.3.2	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	1.520.760.489.544	2.347.070.995.424	2.634.757.028.391	2.940.579.540.448	20,01
7.3.3	Diinvestasikan dalam aset Tetap	11.248.356.195.092	13.009.217.544.102	13.521.970.564.555	15.857.872.672.601	16.479.785.366.976	10,19
7.3.4	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	89.775.569.684	1.570.569.684	150.423.651.668	141.860.701.367	13,70
7.3.5	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**12.687.712.612.254**	**14.619.753.603.330**	**15.870.612.129.663**	**18.643.053.352.660**	**19.562.225.608.791**	13,67
7.4	**Ekuitas Dana Cadangan**						
7.4.1	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-	151.593.517.977	369.727.819.616	549.991.811.737	47,60
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	**-**	**-**	**151.593.517.977**	**369.727.819.616**	**549.991.811.737**	47,60
	JUMLAH EKUITAS DANA	**13.231.380.697.774**	**15.442.543.651.091**	**16.945.217.567.723**	**9.838.918.710.992**	**21.149.866.914.370**	24,55
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**13.393.161.276.345**	**15.610.686.653.794**	**17.382.872.628.271**	**20.247.654.466.911**	**21.403.447.535.936**	12,52

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	**Rasio Likuiditas :**					
1.1	Rasio Lancar	4,36	5,89	3,11	3,02	5,09
1.2	Rasio Quick	3,97	5,42	2,91	2,67	4,74
2	**Solvabilitas:**					
2.1	Rasio Total hutang terhadap Total asset	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01
2.2	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,01	0,01	0,03	0,02	0,24
3	**Rasio Aktivitas:**					
3.1	Rata-rata Umur Piutang	2,96	3,12	2,73	10,34	13,27
3.2	Rata-rata Umur Persediaan (hari)	339,58	324,84	353,10	293,26	474,33

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuditas yang digunakan dalam analisis yaitu :

1. Rasio Lancar
   Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2012 adalah sebesar 5,09. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 5 kali lebih.
2. Rasio *Quick*
   Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio *Quick* pada Tahun 2012 adalah sebesar 4,74. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset
   Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2012 sebesar 0,01. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal
   Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak

lain. Pada Tahun 2012 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

Rasio aktivitas merupakan perbandingan antara pendapatan daerah dengan pengeluaran pada satu periode tertentu untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan.

Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama (hari) yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah) menjadi kas. Sedangkan rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama (hari) dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik).

Berdasarkan Tabel 3.8, rasio rata-rata umur piutang Tahun 2012 sebesar 13,27. Hal ini menunjukkan bahwa piutang yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat yang berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah.

Rata-rata umur persediaan Tahun 2012 sebesar 474,33 hari, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mencukupi *input* berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan *output* pelayanan publik dalam satu tahun relatif baik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008-2013

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.

b. Belanja Tidak Langsung : Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga.

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2008 – 2012) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsional, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil dengan persentase yang relatif besar.

Guna mengetahui proporsi penggunaan anggaran belanja daerah, dilakukan analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.9 dan Tabel 3.10.

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Uraian	Realisasi (Rp)			
		2009	2010	2011	2012
1	**Belanja Tidak Langsung**	**941.583.100.416**	**1.069.384.502.236**	**1.177.690.905.798**	**1.241.600.971.683**
	Gaji dan Tunjangan	941.583.100.416	1.069.384.502.236	1.177.690.905.798	1.241.600.971.683
2	**Belanja Langsung**	**511.683.014.880**	**577.568.338.947**	**622.880.466.339**	**638.228.692.478**
	Belanja Pegawai	213.820.985.029	209.968.578.170	203.990.528.090	318.033.644.866
	Belanja Pegawai BLUD	34.599.253.348	44.949.942.850	60.247.811.000	35.729.386.259
	Belanja Barang & Jasa	263.262.776.503	322.649.817.927	358.642.127.249	284.465.661.353
	Total Belanja	**1.453.266.115.296**	**1.646.952.841.183**	**1.800.571.372.137**	**1.879.829.664.161**

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Tengah

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
1	2008	N.A	N.A	N.A
2	2009	1.453.266.115.296	5.530.115.159.945	26,28
3	2010	1.646.952.841.183	6.298.533.770.059	26,15
4	2011	1.800.571.372.137	8.081.437.429.030	22,28
5	2012	1.879.829.664.161	11.646.844.105.134	16,14

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Pada Tabel 3.9 digambarkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama Tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan kenaikan gaji setiap tahun. Namun, pada Tabel 3.10 digambarkan bahwa selama Tahun 2008 – 2012 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur dibandingkan dengan total belanja daerah semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Provinsi Jawa Tengah semakin baik, seiring penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelum-nya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang secara konsep APBD setiap tahun bernilai Rp.0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan dampak dari pelaksanaan APBD, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11 dan 3.12.

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012

No	Uraian	2010		2011		2012	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)
1	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**6.626.316.989.492**	100,00	**7.547.669.803.723**	100,00	**11.694.479.699.467**	100,00
	Dikurangi Realisasi :						
	a. Belanja Daerah	5.968.033.770.059	90,07	7.776.705.827.176	103,03	11.446.844.105.134	97,88
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	330.500.000.000	4,99	304.731.601.854	4,04	200.000.000.000	1,71
	Surplus/Defisit Riil	**327.783.219.433**	4,95	**-533.767.625.307**	-7,07	**47.635.594.333**	0,41
2	**Surplus/Defisit Riil Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan**						
2.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	850.362.509.157	69,02	1.232.139.507.665	174,70	705.308.166.992	93,37
2.2	Pencairan Dana Cadangan	-	0,00	-	0,00	-	-
2.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0,00	-	0,00	-	-
2.4	Penerimaan Piutang Daerah	-	0,00	-	0,00	-	-
2.5	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	0,00	-	0,00	-	-
2.6	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	48.795.000.000	3,96	425.000.000	0,06	800.000.000	0,11
2.7	Penerimaan Dana Bergulir		0,00	6.411.284.634	0,91	1.627.793.471	0,22
2.8	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat	200.000.000	0,02	100.000.000	0,01	-	-
2.9	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM dan IKM	3.570.639.030	0,29	-	-	-	-
2.10	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman	359.959.182	0,03	-	-	-	-
2.11	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Bantuan Peralatan Untuk IKM	472.886.809	0,04	-	-	-	-

No	Uraian	2010		2011		2012	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)
2.12	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pembangunan Gedung BPR/BKK	408.369.054	0,03	-	-	-	-
2.13	Penerimaan Dana Bergulir Fasilitasi Usaha Perikanan	-		-	-	-	-
2.14	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri	70.625.000	0,01	-	-	-	-
2.15	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir kepada Kelompok Tani di seluruh Kecamatan	116.300.000	0,01	-	-	-	-
2.16	Penerimaan Dana Bergulir Badan Kredit Desa	-	0,00	-	-	-	-
3	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**904.356.288.232**	**73,40**	**1.239.075.792.299**	**175,68**	**707.735.960.463**	**93,69**
4	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan**	**1.232.139.507.665**	**100,00**	**705.308.166.992**	**100,00**	**755.371.554.796**	**100,00**

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Tengah 2010 - 2012

No	Uraian	2010		2011		2012	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
1.	Jumlah SILPA	1.232.139.507.665	-	705.308.166.992	-	755.371.554.796	-
2.	Pelampauan penerimaan PAD	885.718.870.424	71,88	405.569.163.730	57,50	340.213.715.656	45,04
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	50.222.509.152	4,08	60.985.391.492	8,65	73.319.757.656	9,71
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.868.649.916	0,23	1.193.026.501	0,17	(306.007.412)	-0,04
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	(295.412.698.941)	- 23,97	(248.260.752.824)	-35,20	(454.033.262.758)	-60,11
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-	
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran wajib dan mengikat dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan pada Tahun 2009 sejumlah Rp.2,496 Trilyun menjadi sejumlah Rp.4,020 Trilyun pada tahun 2012, dengan pengeluaran terbesar pada belanja tidak langsung. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	r (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**2.055.699.716.874**	**2.267.328.190.310**	**2.874.990.733.540**	**3.500.362.774.008**	**19,62**
	- Belanja Pegawai	941.583.100.416	1.069.384.502.236	1.177.690.905.798	1.241.600.971.683	9,71
	- Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.108.957.858.458	1.182.878.412.851	1.694.471.481.205	2.253.337.259.092	27,63
	- Belanja Tidak Terduga	5.158.758.000	15.065.275.223	2.828.346.537	5.424.543.233	67,53
B	**Belanja Langsung**	**297.862.029.851**	**367.599.760.777**	**418.889.938.249**	**320.195.047.612**	**4,60**
	- Belanja Pegawai BLUD	34.599.253.348	44.949.942.850	60.247.811.000	35.729.386.259	7,75
	Belanja Barang dan Jasa	**263.262.776.503**	**322.649.817.927**	**358.642.127.249**	**284.465.661.353**	4,34
	- Belanja Bahan Pakai Habis	**81.656.912.558**	**99.678.447.247**	**111.661.342.849**	127.219.976.731	16,01
	- Belanja Jasa Kantor	**136.574.223.229**	**178.175.652.788**	**201.779.423.551**	110.885.430.295	(0,45)
	- Belanja Premi Asuransi	**4.740.951.885**	**4.940.111.685**	**5.373.485.381**	5.634.579.036	5,94
	- Belanja perawatan kendaraan bermotor	**40.290.688.831**	**39.855.606.207**	**39.827.875.468**	40.725.675.291	0,37
C	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**143.156.000.000**	**280.500.000.000**	**304.731.601.854**	**200.000.000.000**	**23,40**
	- Dana Cadangan	-	150.000.000.000	200.000.000.000	150.000.000.000	2,78
	- Penyertaan Modal	143.156.000.000	130.500.000.000	104.731.601.854	50.000.000.000	(26,95)
	Total (A+B+C)	**2.496.717.746.725**	**2.915.427.951.087**	**3.598.612.273.643**	**4.020.557.821.620**	**17,31**

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2014 – 2018

3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014 – 2018

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2008 - 2012, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2014 - 2018, yaitu sebagai berikut :

a. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Penambahan jenis pungutan retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
c. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/ wajib pajak;
e. Pemberlakuan Pajak Rokok pada Tahun 2014 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
f. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*;
g. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;
h. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;
i. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
j. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
k. Meningkatkan kontribusi BUMD;
l. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 disusun dengan asumsi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2011 - 2013;
b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dihitung mendasarkan kenaikan rata-rata Tahun 2011 - 2013 dikurangi dengan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB P2);
c. Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian yang menyangkut kebijakan pusat dihitung sama dengan penerimaan tahun lalu.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah selama Tahun 2014 – 2018 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.14, Gambar 3.3 dan Gambar 3.4.

Tabel 3.14
Proyeksi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Target 2013 (Rp.000)	Proyeksi (Rp. 000)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	**PAD**	**7.413.086.681**	**8.347.874.665**	**9.978.524.374**	**11.532.744.564**	**13.372.095.965**	**15.553.593.230**
1.1	Pajak Daerah	6.018.189.560	7.097.094.340	8.562.642.726	9.894.960.536	11.469.799.088	13.335.338.648
1.2	Retribusi Daerah	74.296.390	78.031.283	83.728.251	89.928.185	96.606.758	103.802.660
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	263.267.935	279.440.000	315.988.577	359.841.133	412.743.290	477.013.772
1.4	Lain-lain PAD	1.057.332.796	893.309.042	1.016.164.820	1.188.014.710	1.392.946.829	1.637.438.150
2	**Dana Perimbangan**	**2.477.186.612**	**2.606.901.162**	**2.563.926.158**	**2.601.925.907**	**2.641.825.643**	**2.683.720.365**
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	723.804.733	723.804.733	759.994.969	797.994.718	837.894.454	879.789.176
2.1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.670.859.369	1.803.931.189	1.803.931.189	1.803.931.189	1.803.931.189	1.803.931.189
2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	82.522.510	79.165.240	-	-	-	-
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2.774.830.631**	**2.782.382.356**	**2.776.706.650**	**2.776.706.650**	**2.776.706.650**	**2.776.706.650**
3.1	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	2.725.059.810	2.750.306.650	2.750.306.650	2.750.306.650	2.750.306.650	2.750.306.650
3.2	Dana Insentif Daerah	21.826.131	3.000.000	-	-	-	-
3.3	Pendapatan Hibah	27.910.690	29.075.706	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000
3.4	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**12.665.103.924**	**13.737.158.183**	**15.319.157.182**	**16.911.377.121**	**18.790.628.258**	**21.014.020.245**

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah, 2013

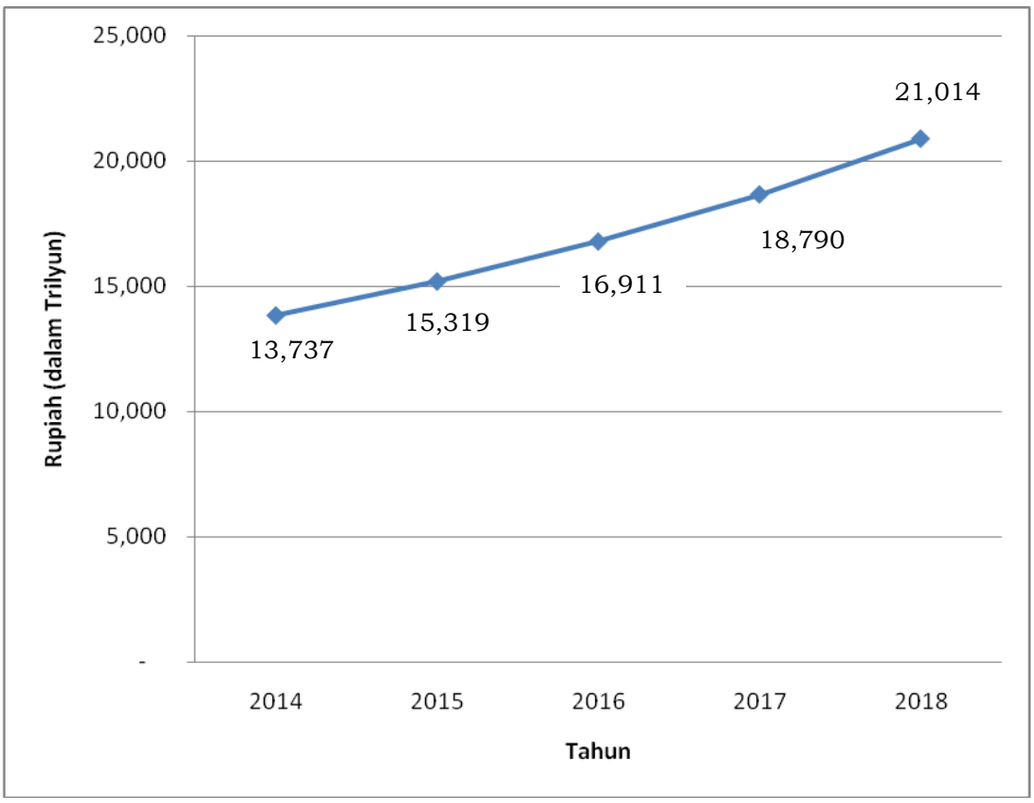

Gambar 3.3
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014– 2018

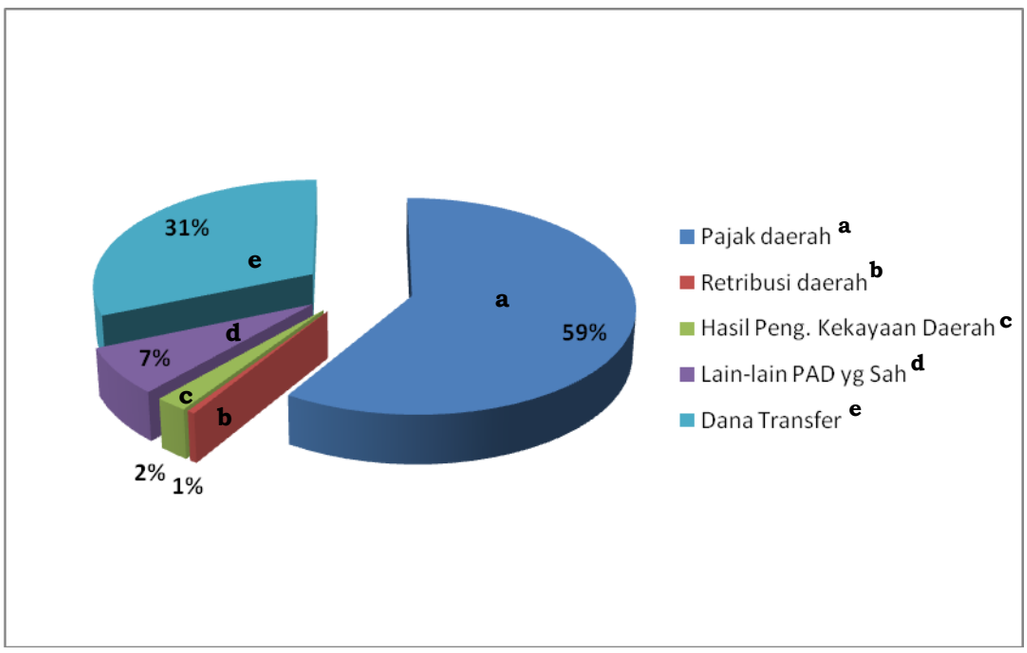

Gambar 3.4
Proyeksi Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Dari Tabel 3.14 dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan akan mengalami peningkatan PAD rata-rata sebesar 15,99 % per tahun, terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Selain itu peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan. Sedangkan untuk DAU dan DAK

belum dapat diprediksi karena berkaitan dengan kinerja daerah. Selanjutnya informasi alokasi DAU dan DAK untuk tahun berikutnya baru akan disampaikan pada akhir tahun.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, jenis pendapatan asli daerah terdapat perubahan, yaitu jenis pajak daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Selanjutnya untuk retribusi daerah telah ditentukan jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya kepada kabupaten/kota.

3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014 – 2018

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan;
b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
c. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
d. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
g. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

Secara lengkap, proyeksi kebutuhan belanja daerah Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	**Belanja Tidak Langsung**	**3.684.753.723.000**	**4.028.626.542.000**	**5.725.888.465.000**	**6.388.500.619.250**	**7.153.900.321.000**	**8.040.146.969.000**
1	Belanja Pegawai	998.664.531.000	1.277.912.547.000	2.443.698.229.000	2.655.707.260.250	2.894.217.420.000	3.162.541.350.000
2	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.648.195.192.000	2.720.713.995.000	3.227.190.236.000	3.672.793.359.000	4.194.682.901.000	4.807.605.619.000
3	Belanja Tidak Terduga	37.894.000.000	30.000.000.000	55.000.000.000	60.000.000.000	65.000.000.000	70.000.000.000
B	**Belanja Langsung**	**371.614.222.000**	**522.406.398.000**	**585.947.802.400**	**657.456.334.000**	**738.885.476.800**	**831.008.984.000**
1	Belanja Pegawai BLUD	43.765.540.000	53.976.413.000	52.956.303.000	58.251.933.000	64.077.126.000	70.484.838.000
2	**Belanja Barang dan Jasa**	**327.848.682.000**	**468.429.985.000**	**532.991.499.400**	**599.204.401.000**	**674.808.350.800**	**760.524.146.000**
2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	134.039.381.000	145.968.488.000	162.187.651.000	178.406.416.000	196.247.057.000	215.871.762.000
2.1	Belanja Jasa Kantor	136.620.069.000	257.670.736.000	295.321.346.400	340.193.392.000	391.222.400.800	449.905.761.000
2.3	Belanja Premi Asuransi	6.593.439.000	13.261.593.000	13.261.593.000	13.261.593.000	13.261.593.000	13.261.593.000
2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	50.595.793.000	51.529.168.000	61.220.909.000	67.343.000.000	74.077.300.000	81.485.030.000
C	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**235.791.000.000**	**40.000.000.000**	**275.000.000.000**	**275.000.000.000**	**300.000.000.000**	**300.000.000.000**
1	Dana Cadangan	-	-	200.000.000.000	200.000.000.000	150.000.000.000	-
2	Penyertaan Modal	235.791.000.000	40.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	300.000.000.000
	Total (A+B+C)	**4.292.158.945.000**	**4.591.032.940.000**	**6.586.836.267.400**	**7.320.956.953.250**	**8.192.785.797.800**	**9.171.155.953.000**

Sumber : Bappeda dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

3.3.2.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 – 2018

Proyeksi pembiayaan daerah di masa yang akan datang dari sisi penerimaan yaitu menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta membentuk dana cadangan dari sisi pengeluaran. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Proyeksi (Rp. 000.-)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Penerimaan Pembiayaan**					
1.1	SILPA	300.000.000	0	0	0	0
1.2	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	0	0	0	0	0
1.3	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM & IKM	0	0	0	0	0
1.5	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman	0	0	0	0	0
1.6	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Peralatan untuk IKM	0	0	0	0	0
1.7	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.8	Penerimaan Dana Bergulir Penempatan TKI ke LN	0	0	0	0	0
1.9	Penerimaan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat	0	0	0	0	0
1.10	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kepada Kelompok Tani	0	0	0	0	0
1.11	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pembangunan Gedung BPR/BKK	0	0	0	0	0
1.12	Pencairan Dana Cadangan Pemilukada	0	0	0	0	550.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000.000**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**					
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	200.000.000	200.000.000	150.000.000	0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	40.000.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000	300.000.000
2.3	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan	0	0	0	0	0
2.4	Pembayaran Utang Daerah	0	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**40.000.000**	**275.000.000**	**275.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013

3.3.2.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan	13.737.158.183.000	15.186.085.363.000	16.778.305.303.000	18.657.556.441.000	20.880.948.428.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	550.000.000.000
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)	300.000.000.000	0	0	0	0
4	Pembayaran Pokok Hutang (Bunga)	0	0	0	0	0
	Total Penerimaan	14.037.158.183.000	15.186.085.363.000	16.778.305.303.000	18.657.556.441.000	21.430.948.428.000
	Dikurangi :					
5	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat (Prioritas I)	4.591.032.940.000	6.586.836.267.400	7.320.956.953.250	8.192.785.797.800	9.171.155.953.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**9.446.125.243.000**	**8.599.249.095.600**	**9.457.348.349.750**	**10.464.770.643.200**	**12.259.792.475.000**

Sumber : Bappeda dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah. yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum dialokasikan dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	**Kapasitas Keuangan Daerah**	**14.037.158.183.000**	**15.186.085.363.000**	**16.778.305.303.000**	**18.657.556.441.000**	**21.430.948.428.000**
	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)	**4.591.032.940.000**	**6.586.836.267.400**	**7.320.956.953.250**	**8.192.785.797.800**	**9.171.155.953.000**
1.1	Belanja Tidak Langsung	4.028.626.542.000	5.725.888.465.000	6.388.500.619.250	7.153.900.321.000	8.040.146.969.000
1.2	Belanja Langsung	522.406.398.000	585.947.802.400	657.456.334.000	738.885.476.800	831.008.984.000
1.3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.000.000.000	275.000.000.000	275.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**9.446.125.243.000**	**8.599.249.095.600**	**9.457.348.349.750**	**10.464.770.643.200**	**12.259.792.475.000**
2	**Rencana alokasi pengeluaran prioritas II**	**3.632.651.487.000**	**3.933.424.123.600**	**4.629.844.614.750**	**5.409.420.267.200**	**6.108.810.794.000**
2.1	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH	2.257.058.944.000	2.585.715.678.000	3.183.539.050.000	3.833.563.192.000	4.410.141.594.000
2.2	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah	989.312.748.000	1.035.540.358.000	1.104.038.020.000	1.201.483.307.000	1.289.489.977.000
2.3	Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya	386.279.795.000	312.168.087.600	342.267.544.750	374.373.768.200	409.179.223.000
3	**Rencana alokasi pengeluaran prioritas III**	**5.813.473.756.000**	**4.665.824.972.000**	**4.827.503.735.000**	**5.055.350.376.000**	**6.150.981.681.000**
3.1	Tambahan Penghasilan Pegawai	678.208.792.000	0	0	0	0
3.2	Uang Lembur	4.485.421.000	0	0	0	0
3.3	Bantuan Hibah :	3.038.721.398.000	3.020.537.333.000	3.020.537.333.000	3.070.537.333.000	3.970.537.333.000
	- Hibah BOS	2.750.306.650.000	2.750.306.650.000	2.750.306.650.000	2.750.306.650.000	2.750.306.650.000
	- Hibah Lainnya	288.414.748.000	270.230.683.000	270.230.683.000	320.230.683.000	1.220.230.683.000
3.4	Bantuan Sosial	31.666.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000
3.5	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2.060.392.145.000	1.616.787.639.000	1.778.466.402.000	1.956.313.043.000	2.151.944.348.000
4	**Surplus Anggaran Riil/Berimbang**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Bappeda dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

Dengan demikian, diketahui Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Prioritas I, II dan III, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Alokasi									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Prioritas I	4.591.032.940.000	32,71	6.586.836.267.400	43,37	7.320.956.953.250	43,63	8.192.785.797.800	43,91	9.171.155.953.000	42,79
2	Prioritas II	3.632.651.487.000	25,88	3.933.424.123.600	25,90	4.629.844.614.750	27,59	5.409.420.267.200	28,99	6.108.810.794.000	28,50
3	Prioritas III	5.813.473.756.000	41,41	4.665.824.972.000	30,72	4.827.503.735.000	28,77	5.055.350.376.000	27,10	6.150.981.681.000	28,70
	Total	**14.037.158.183.000**	**100**	**15.186.085.363.000**	**100**	**16.778.305.303.000**	**100**	**18.657.556.441.000**	**100**	**21.430.948.428.000**	**100**

Sumber : Bappeda dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besaran persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dirancang untuk menunjang prioritas dimaksud. Berdasarkan evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya relatif baik untuk peningkatan alokasi pendanaan secara bertahap.

Dengan demikian kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat ditampilkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Proyeksi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	**Pendapatan**	**13.737.158.183.000**	**15.186.085.363.000**	**16.778.305.303.000**	**18.657.556.441.000**	**20.880.948.428.000**
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**8.347.874.665.000**	**9.978.524.375.000**	**11.532.744.566.000**	**13.372.095.968.000**	**15.553.593.233.000**
1	Pajak Daerah	7.097.094.340.000	8.562.642.726.000	9.894.960.536.000	11.469.799.088.000	13.335.338.648.000
2	Retribusi Daerah	78.031.283.000	83.728.252.000	89.928.185.000	96.606.758.000	103.802.660.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	279.440.000.000	315.988.577.000	359.841.135.000	412.743.293.000	477.013.775.000
	Lain-lain PAD yang sah	893.309.042.000	1.016.164.820.000	1.188.014.710.000	1.392.946.829.000	1.637.438.150.000
B	**Dana Perimbangan**	**2.606.901.162.000**	**2.430.854.338.000**	**2.468.854.087.000**	**2.508.753.823.000**	**2.550.648.545.000**
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	723.804.733.000	759.994.969.000	797.994.718.000	837.894.454.000	879.789.176.000
2	DAU	1.803.931.189.000	1.670.859.369.000	1.670.859.369.000	1.670.859.369.000	1.670.859.369.000
3	DAK	79.165.240.000	-	-	-	-
C	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**2.782.382.356.000**	**2.776.706.650.000**	**2.776.706.650.000**	**2.776.706.650.000**	**2.776.706.650.000**
2	**Belanja**	**13.997.158.183.000**	**14.911.085.363.000**	**16.503.305.303.000**	**18.357.556.441.000**	**21.130.948.428.000**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**9.837.614.877.000**	**10.391.713.437.000**	**11.216.004.354.250**	**12.209.250.697.000**	**14.191.128.650.000**
1	Belanja Mengikat	4.028.626.542.000	5.725.888.465.000	6.388.500.619.250	7.153.900.321.000	8.040.146.969.000
2	Prioritas III	5.808.988.335.000	4.665.824.972.000	4.827.503.735.000	5.055.350.376.000	6.150.981.681.000
B	**Belanja Langsung**	**4.159.543.306.000**	**4.519.371.926.000**	**5.287.300.948.750**	**6.148.305.744.000**	**6.939.819.778.000**
1	Prioritas I	522.406.398.000	585.947.802.400	657.456.334.000	738.885.476.800	831.008.984.000
2	Prioritas II	3.632.651.487.000	3.933.424.123.600	4.629.844.614.750	5.409.420.267.200	6.108.801.794.000
3	Prioritas III	4.485.421.000	-	-	-	-
	Surplus/Defisit	**(260.000.000.000)**	**275.000.000.000**	**275.000.000.000**	**300.000.000.000**	**(250.000.000.000)**
3	**Pembiayaan**	**260.000.000.000**	**(275.000.000.000)**	**(275.000.000.000)**	**(300.000.000.000)**	**250.000.000.000)**
A	Penerimaan	300.000.000.000	-	-	-	550.000.000.000
B	Pengeluaran	40.000.000.000	275.000.000.000	275.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000
	Total APBD	**14.037.158.183.000**	**15.186.085.363.000**	**16.778.305.303.000**	**18.657.556.441.000**	**21.430.948.428.000**

Sumber : DPPAD, Biro Keuangan dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut akan dilaksanakan berbagai program dalam rangka mengatasi permasalahan dan untuk pencapaian target indikator pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan melalui dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Mengingat besarnya permasalahan dan keterbatasan APBD Provinsi Jawa Tengah diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu APBN, APBD Kabupaten/Kota, Lembaga Donor, *Corporate Social Responsibility*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL) dan partisipasi masyarakat.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, serta kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Di samping itu juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya masih banyak yaitu pada Tahun 2008 sebanyak 6,189 juta (19,23%) turun menjadi 4,863 juta (14,98%) pada Tahun 2012. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 3,633 juta orang (21,96%) menurun menjadi 2,916 juta orang (16,55%), dan di perkotaan sebanyak 2,556 juta orang (16,34%) menurun menjadi 1,946 juta orang (13,11%). Sedangkan garis kemiskinan meningkat dari Rp.168.168,- per kapita/bulan menjadi Rp.233.769,- per kapita/bulan. Tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dikarenakan masih banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dari sisi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, dapat dijelaskan kondisi kemiskinan di Jawa Tengah kurun waktu Tahun 2008 - 2012 menunjukkan tren yang menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 4,25 menjadi 2,39 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 1,24 menjadi 0,57. Menurunnya capaian P1 dan P2 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin kecil.

Berdasarkan data BPS Tahun 2012, terdapat 15 kabupaten di Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata angka Jawa Tengah dan nasional, yaitu Wonosobo, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, Demak, Sragen, Klaten, Purworejo, Grobogan, Cilacap dan Blora.

Selanjutnya berdasarkan data PPLS Tahun 2011, terdapat rumah tangga (ruta) yang dikategorikan sangat miskin dan miskin sebanyak 1.195.368 ruta, hampir miskin 1.155.102 ruta dan rentan miskin lainnya 1.893.736 ruta. Melalui pemetaan interval persentase rumah tangga miskin (sangat miskin dan miskin) dibandingkan total rumah tangga yang dilakukan Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 50 kecamatan (15 kabupaten) termasuk kategori kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi, 234 kecamatan (27 kabupaten) kategori sedang dan 289 kecamatan (30 kabupaten/kota) kategori rendah.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, dan permodalan. Di samping itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kelayakan kecukupan pangan.

Apabila dicermati lebih lanjut dalam kurun waktu Tahun 2008 - 2012 tingkat penurunan penduduk miskin di Jawa Tengah cenderung mengalami pelambatan, berturut-turut dari 1,51%, 1,16%, 0,8%, dan terakhir 0,4%. Melambatnya penurunan angka kemiskinan antara lain dikarenakan luasnya cakupan wilayah keberadaan penduduk miskin yang ditangani, terbatasnya pendanaan, belum sinergisnya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan antar pemangku kepentingan, dan belum optimalnya peran dunia usaha/swasta.

2. Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, dari 16,69 juta orang di Tahun 2008 menjadi 17,09 juta orang di Tahun 2012. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dari 15,46 juta orang pada Tahun 2008 menjadi 16,13 juta orang pada Tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama, jumlah pengangguran di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 1,22 juta orang pada Tahun 2008 menjadi 0,96 juta orang pada Tahun 2012. Berkurangnya jumlah pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berturut-turut dari Tahun 2008 sampai 2012 yaitu 7,35%, 7,33%, 6,21%, 5,93%, dan 5,63%. Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja.

Selain hal tersebut, dalam setahun terakhir (Februari 2012 - Februari 2013) hampir semua sektor mengalami penurunan jumlah pekerja terutama pada Sektor Pertanian turun sebesar 8,07%; Sektor Jasa, Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan sebesar 4,14%; Sektor Transportasi, Perdagangan dan Komunikasi sebesar 12,26%; Sektor Lembaga Keuangan, *Real Estate* dan Usaha Persewaan sebesar 2,07% dan Sektor Lainnya sebesar 41,99%. Di sisi lain terdapat sektor-sektor yang mengalami kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yaitu Sektor Industri sebesar 9,55%; Sektor Konstruksi sebesar 13,50%; dan Sektor Perdagangan sebesar 2,70%.

Permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35

jam seminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur yaitu sebanyak 4,74 juta pada Tahun 2012.

Masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing dalam memasuki pasar kerja. Apabila tenaga kerja yang tersedia tidak mampu terserap pasar kerja maka akan berpotensi menambah jumlah pengangguran. Di sisi lain, SDM instruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja semakin berkurang dan prasarana sarana Balai Latihan Kerja (BLK) belum memadai.

Sektor Industri, Konstruksi dan Perdagangan merupakan sektor "penampung" peralihan tenaga kerja dari Sektor Pertanian. Komposisi penurunan jumlah pekerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri, Perdagangan dan Konstruksi perlu diperhatikan utamanya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, mengingat pada sektor tersebut dominan diterapkan sistem kerja *outsourcing* dan informal, yang rentan dengan perubahan kondisi perekonomian.

Secara umum permasalahan pengangguran di Jawa Tengah disebabkan pada 2 (dua) hal, yaitu masuknya usia produktif ke dalam angkatan kerja dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi.

3. Kesejahteraan Pekerja

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah pada Tahun 2013 (Februari) sebanyak 16,13 juta orang tersebar di berbagai lapangan pekerjaan.

Permasalahan terkait dengan kesejahteraan pekerja di Jawa Tengah antara lain rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu sampai dengan Tahun 2012 baru mencapai 96,42%; belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja utamanya pada akses layanan kesehatan dan kepemilikan rumah layak huni; dan belum optimalnya perlindungan tenaga kerja. Kesejahteran pekerja perlu terus diupayakan peningkatannya untuk menghindari terjadinya proses pemiskinan berikutnya, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.

4. Pendidikan

Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terkait dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan kepastian dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain APM SD/MI/SDLB baru mencapai 98,30 dan APM SMP/MTs/SMPLB mencapai 78,92 (Tahun 2012), yang masih perlu didorong untuk mencapai target MDGs dan Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*) sebesar 100% pada tahun 2015. Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/MA/SMK baru mencapai 67%. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan Angka Pendidikan yang Ditamatkan berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun), yang masih didominasi lulusan SD. Untuk itu pembangunan pendidikan dihadapkan permasalahan untuk meningkatkan APK SMA/MA/SMK dan Rata-rata Lama Sekolah. Selain itu, belum memasyarakatnya pendidikan non formal sebagai alternatif pendidikan formal merupakan permasalahan dan tantangan yang perlu diupayakan penyelesaiannya.

Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat masih rendahnya kualitas siswa, pendidik/tenaga kependidikan, serta prasarana sarana. Sementara hasil Nilai Ujian Akhir Nasional belum optimal yaitu masih di kisaran angka 6 - 7. Ke depan ditargetkan dapat mencapai nilai 7,5 untuk SD/MI dan 7 untuk SMP/MTs.

Terkait pendidik/tenaga kependidikan adalah masih rendahnya kesejahteraan, kualifikasi S1/D4 (mencapai sekitar 70%), dan sertifikasi pendidik. Kondisi prasarana sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi beserta kompetensinya, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal yang penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan "identitas" sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan budi pekerti di kalangan siswa sekolah. Materi seperti budi pekerti, bahasa, dan kesenian merupakan subyek potensial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa.

5. Kesehatan

Permasalahan terkait dengan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah adalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 114,42/100.000 Kelahiran Hidup (Tahun 2008) menjadi 116,34/100.000 Kelahiran Hidup (Tahun 2012). Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat, serta kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan pada kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 9,71/1000 Kelahiran Hidup (Tahun 2008) menjadi 10,75/1000 Kelahiran Hidup (Tahun 2012) antara lain disebabkan *asfiksia* (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR), infeksi neonatus, *pneumonia*, diare, dan gizi buruk.

Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI Eksklusif. Persentase bayi usia 0 – 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif pada Tahun 2012 menunjukkan jumlah yang kecil yaitu 25,60% dari jumlah bayi sebanyak 577.407 bayi.

Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskemas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Namun masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak antara lain disebabkan belum terpenuhinya prasarana dan sarana serta meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular seperti penemuan kasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan

kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan serta keterbatasan prasarana sarana di Puskesmas dan rumah sakit; masih tingginya kasus DBD dikarenakan kondisi iklim tidak stabil dan tingginya curah hujan sehingga berpotensi pada meningkatnya perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti,* belum optimalnya kegiatan PSN; tingginya kasus HIV/AIDS dimungkinkan karena semakin meningkatnya perilaku seks bebas, penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang serta belum optimalnya upaya pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan dan penyediaan pelayanan rawat inap kelas III khususnya untuk masyarakat miskin (Jamkesmas dan Jamkesda).

6. Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Permasalahan terkait pembangunan bidang sosial adalah belum optimalnya penanganan PMKS dikarenakan peningkatan jumlah PMKS yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan, serta tingginya jumlah penduduk miskin.

Selain itu akurasi data penanganan PMKS yang masih lemah didukung dengan pelaporan kabupaten/kota yang belum kontinyu, menyebabkan perencanaan dan implementasi program penanganan PMKS sampai saat ini belum optimal.

Balai Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu sistem penanganan PMKS berbasis kelembagaan yang implementasi operasionalnya berdasarkan Standar Pelayanan. Namun hingga saat ini, belum semua balai rehabilitasi sosial menerapkan Standar Pelayanan secara optimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta prasarana sarana pendukung pemulihan sosial PMKS.

Terkait dengan upaya penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum simultan dengan penanganan PMKS, dikarenakan belum optimalnya kapasitas PSKS dalam mengimplementasikan ketrampilan dan pengetahuan untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial PMKS.

Disamping itu, belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam penanganan PMKS dan penguatan kapasitas PSKS, antara lain dikarenakan belum sepenuhnya institusi yang menangani permasalahan sosial berjalan efektif dan masih menginduk pada SKPD dengan tupoksi lainnya, belum optimalnya alokasi anggaran untuk mendukung penanganan PMKS serta belum semua kabupaten/kota menyediakan prasarana sarana pelayanan rehabilitasi sosial.

7. Keadilan Gender dan Perlindungan Anak

Kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000, yang pada intinya mengintruksikan kepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk mengintegrasikan perspektif gender (aspirasi, pengalaman, masalah dan kebutuhan) perempuan serta laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.

Dalam kaitan ini perspektif keadilan gender berfungsi sebagai cara pandang untuk semua upaya penguatan kapasitas birokrasi dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, serta diharapkan dapat mendukung birokrasi dalam menjalankan tata kerja dan tupoksinya.

Terkait dengan perlindungan anak, telah diterbitkan Perda Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang mengamanatkan upaya perlindungan anak melalui pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko kerentanan terhadap anak-anak dengan mengurangi angka kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya. Sementara itu dalam tataran publik, berbagai permasalahan nampak dari masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani di tingkat provinsi pada kurun waktu 5 tahun (2008-2012) melonjak tajam, dari 22 kasus menjadi 480 kasus, sedangkan di tingkat kabupaten/kota meningkat dari 1.098 kasus menjadi 2.883 kasus.

Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih rendah. Hal ini disebabkan terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi di bidang politik dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif.

Dari sisi perlindungan anak, permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya sistem perlindungan anak utamanya terhadap anak rentan (kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak). Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan, penanganan, dan pengurangan risiko terhadap anak-anak yang rentan. Sedangkan penanganan terhadap anak yang berkebutuhan khusus lebih ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

8. Seni Budaya Jawa

Seni dan budaya merupakan elemen penting yang sangat diperlukan dalam kehidupan, karenanya perlu dilindungi dan dilestarikan. Melalui seni diharapkan mampu meningkatkan dinamika kehidupan, sedangkan melalui budaya diharapkan dapat memperkuat jati diri sehingga mampu menangkal pengaruh dari luar yang bersifat negatif.

Dalam konteks pencapaian visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*, seni budaya Jawa merupakan identitas cita, rasa dan karsa masyarakat Jawa yang diekspresikan melalui tutur, sikap, perilaku dan karya yang mengandung nilai-nilai adiluhung. Nilai-nilai adiluhung mengacu kepada penghargaan yang sangat tinggi terhadap sifat luhur manusia dalam tata kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Di era globalisasi, sangat ironis ketika banyak masyarakat yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Melalui pembelajaran budaya, diharapkan dapat diketahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Permasalahan terkait dengan seni budaya Jawa adalah kecenderungan semakin memudarnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, belum terinternalisasikannya ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu *"ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani"* dalam kehidupan sehari-hari, semakin rendahnya intensitas dan kualitas penggunaan bahasa Jawa, belum optimalnya upaya untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian Jawa, serta kurangnya pembelajaran budaya. Selain itu masih rendahnya upaya untuk melakukan perlindungan situs, bangunan, budaya, benda dan karya seni yang bernilai sejarah tinggi.

9. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat dan Antar Wilayah

Indeks Gini merupakan indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2008 – 2012 cenderung memburuk yaitu sebesar 0,303 pada Tahun 2008, menjadi 0,355 pada Tahun 2012. Indeks tersebut menunjukkan pergeseran kelompok ketimpangan pendapatan masyarakat dari kelompok ketimpangan rendah menjadi ketimpangan sedang.

Sementara tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dilihat dengan Indeks Williamson. Selama kurun waktu Tahun 2008 – 2012, capaian Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,7092 menjadi 0,7042. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa ketimpangan distribusi pembangunan di kabupaten/kota masih cukup tinggi.

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, diketahui bahwa masih cukup banyak kabupaten yang berada pada kelompok relatif tertinggal (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di bawah rata-rata) yaitu Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Blora, Rembang, Demak, Temanggung, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Oleh karena itu perlu adanya upaya lebih intensif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memprioritaskan pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal tersebut.

10. Energi

Gambaran Jawa Tengah terkait dengan energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Komposisi pemakaian energi sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah minyak bumi 63,60%, gas bumi 11,47%, batubara 21,28%, dan Energi Baru Terbarukan (EBT) 3,65%.

Permasalahan lain adalah pelayanan energi (listrik dan migas) yang masih terbatas dan belum merata, serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat. Belum optimalnya pelayanan listrik bagi masyarakat terlihat masih adanya 1.784.430 KK yang

belum menikmati listrik dan tersebar di 4.175 dusun, walaupan rasio elektrifikasi Jawa Tengah Tahun 2012 sudah mencapai 79,98%, di atas rata-rata rasio elektrifikasi nasional sebesar 75,2%. Hal tersebut terjadi terutama di wilayah pedesaan yang belum terlayani oleh pasokan listrik, yang menunjukkan bahwa infrastruktur energi masih perlu ditingkatkan, dengan mengupayakan pembangunan jaringan listrik pedesaan serta mengembangkan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi.

Pengembangan potensi energi baru terbarukan juga mengalami kendala antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 masih belum mengakomodir peran pemerintah daerah dan jaminan terhadap produsen dalam pengembangan *biofuel*, biaya investasi masih tinggi, potensi berada di daerah terpencil dan masih adanya subsidi pemerintah (BBM dan listrik).

Budaya hemat energi di masyarakat juga belum menjadi hal yang membudaya sehingga masih terjadi kecenderungan pemakaian energi yang boros. Hal tersebut dapat dilihat pada realisasi bahan bakar minyak bersubsidi (premium) Tahun 2012 sebesar 3.017.768 KL, melebihi kuota sebesar 3.017.675 KL.

Saat ini Jawa Tengah telah mengembangkan sumber-sumber energi non fosil atau EBT untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat seperti Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), *solar cell,* biogas, biomassa, dan *biofuel*, namun pemanfaatannya dalam bauran energi Tahun 2012 masih sebesar 3,65%. Pengelolaan energi baru terbarukan juga masih terdapat masalah karena belum optimalnya kelembagaan.

11. Pangan

Jawa Tengah memiliki luasan lahan sawah sebesar 992 ribu hektar (30,47%) dan lahan bukan sawah sebesar 2,26 juta hektar (69,53%). Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu padi sebesar 3,1 juta ton dan memberikan kontribusi pangan nasional sebesar 14,83%. Di samping itu beberapa komoditas juga menunjukkan peningkatan, meliputi jagung (3,041 juta ton), daging (252,218 ribu ton), telur (271,819 ribu ton) dan susu (105,516 ribu ton). Meskipun demikian secara umum Jawa Tengah belum mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, sehingga belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumberdaya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

12. Iklim Investasi

Pengembangan iklim investasi di Jawa Tengah merupakan salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Namun dalam pelaksanaannya dirasa masih belum optimal dalam meningkatkan jumlah investor ke Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan dari capaian realisasi jumlah investor yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari 64 investor pada Tahun 2011 menjadi 48 investor pada Tahun 2012.

Permasalahan pengembangan iklim investasi antara lain kurangnya informasi dan promosi investasi (penyediaan *website*, *booklet* dan profil investasi); kepastian dan kemudahan pengurusan perijinan, regulasi dan waktu pengurusan; terbatasnya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi; belum optimalnya dukungan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandar udara dan energi); serta sinergitas pemangku kepentingan terkait.

13. Koperasi dan UMKM

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dapat berperan sebagai penyangga sekaligus penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Jumlah koperasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada periode 2008 - 2012, namun persentase koperasi yang aktif baru mencapai 79,34% pada Tahun 2012. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Jawa Tengah belum sepenuhnya memahami kelembagaan koperasi sebagai badan hukum usaha yang mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UMKM antara lain rendahnya kualitas SDM yang berkompeten berdampak pada belum optimalnya kinerja manajemen pengelolaan, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun modern, kualitas produk belum memenuhi standar, lemahnya akses pasar dan jejaring pemasaran, kurangnya informasi perbankan dan akses permodalan, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha serta belum terpadunya upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM.

14. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Jawa Tengah mengalami penurunan, dari 392.895 orang pada Tahun 2011 menjadi 372.463 orang pada Tahun 2012. Sedangkan untuk wisatawan nusantara mengalami peningkatan, dari 21.838.351 orang pada Tahun 2011 menjadi 25.240.021 orang pada Tahun 2012. Fluktuasi kunjungan wisatawan tersebut antara lain dikarenakan belum maksimalnya daya saing obyek wisata daerah, belum optimalnya pengembangan potensi *event* dan kegiatan wisata berbasis wilayah dan kurangnya promosi wisata Jawa Tengah secara nasional maupun internasional.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya keterkaitan lintas destinasi wisata unggulan (Dieng - Borobudur, Solo - Sangiran, Nusakambangan, Karimunjawa, Tegal - Pekalongan dan Rembang - Blora); masih rendahnya kualitas SDM pelaku wisata; infrastruktur dan prasarana sarana yang mendukung aksesibilitas; dan belum optimalnya kerjasama para pemangku kepentingan dalam mengembangkan wisata di Jawa Tengah.

15. Aset Daerah

Permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah terkait dengan aset daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah yang ditunjukkan dengan masih banyaknya *asset idle* (dari 86 obyek terdapat 45 *asset idle*) dan aset yang sudah dikelola baik melalui sistem kerjasama pihak ketiga (3 obyek), pinjam pakai (11 obyek) dan disewakan (27 obyek), namun hasilnya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

16. Reformasi Birokrasi

Permasalahan mendasar yang dihadapi Jawa Tengah dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Penataan struktur kelembagaan dilakukan secara parsial karena masih menunggu regulasi yang mengatur organisasi perangkat daerah. Hal lain yang perlu lebih ditingkatkan yaitu berkaitan dengan pengembangan etos dan budaya kerja.

Aspek-aspek lain yang belum dikembangkan secara baik adalah belum efektifnya manajemen SDM dalam peningkatan profesionalitas aparatur, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, masih terjadi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya sistem pengawasan internal, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan dinamika masyarakat.

17. Politik

Pembangunan politik merupakan bagian dari gerak pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terwujud ketertiban politik. Permasalahan dalam pembangunan politik Jawa Tengah yaitu masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, serta masih belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula. Hal ini tercermin dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang baru mencapai 55,73% atau 15.261.268 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 27.385.985 pemilih. Selain itu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik dan penentuan arah pembangunan yang bersifat strategis dirasakan masih belum optimal.

18. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan ketertiban masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Kondisi wilayah yang aman dan tertib ditandai dengan terwujudnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman berupa kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum berikut bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, masih dijumpai permasalahan yaitu terbatasnya jumlah

personil aparat keamanan, rasio jumlah personil aparat kepolisian terhadap masyarakat baru mencapai 1 : 1.131 dari kondisi ideal 1 : 600. Dengan kondisi demikian masih diperlukan dukungan masyarakat dalam berperan aktif untuk mewujudkan kondusivitas daerah.

19. Infrastruktur dan Perhubungan

Infrastruktur merupakan struktur pembentuk ruang untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah dalam pembangunan infrastruktur adalah belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur yang sejalan dengan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengembangan wilayah. Permasalahan tersebut ditandai yaitu :

a. **Infrastruktur Fisik,** terkait dengan Pekerjaan Umum dan Perhubungan antara lain belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah, utamanya untuk kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pembangunan Jalan Tol Bawen - Solo dan Tol Brebes – Semarang; belum optimalnya prasarana sarana transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah utamanya terkait kondisi kinerja pelayanan, keselamatan transportasi, integrasi antar moda transportasi dan pengembangan sistem transportasi massal; belum optimalnya kondisi prasarana sarana sumber daya air, terkait dengan kondisi jaringan irigasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian utamanya irigasi kewenangan kabupaten/kota; masih luasnya area genangan banjir; meningkatnya luasan rob terutama di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah akibat penurunan muka air tanah, meningkatnya muka air laut, daya dukung dan tampung drainase serta sungai yang sudah tidak memadai; ketersediaan tampungan air baku yang belum merata dan dalam kondisi yang belum optimal sehingga masih terdapat wilayah yang mengalami kekeringan; rendahnya akses masyarakat terhadap air minum terlindungi dan rendahnya pelayanan sanitasi layak; pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara terpadu antar wilayah dan belum memperhatikan kesehatan lingkungan; rendahnya pengelolaan jasa konstruksi; serta masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
b. **Infrastruktur Non Fisik,** terkait dengan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, antara lain : pemenuhan kualitas prasarana sarana pendidikan baik bangunan sekolah, ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung (perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer) yang masih belum optimal dan merata; belum terpenuhinya prasarana dan sarana di Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK serta jumlah dan sebaran Puskesmas yang masih kurang; belum optimalnya kondisi panti-panti sosial sehingga memerlukan upaya peningkatan; serta belum optimalnya prasarana dan sarana publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
c. **Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)**, antara lain : masih terbatasnya kapasitas *bandwith* internet; kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada *data center*; keterbatasan pengetahuan dan SDM aparatur serta masyarakat

terhadap TI dan kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI.

20. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah saat ini adalah meningkatnya kerusakan ekosistem teresterial, serta pesisir dan laut, yang ditandai dengan masih tingginya luas lahan kritis, rusaknya *catchment area* yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut baik *mangrove* maupun terumbu karang, meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan akibat kerusakan ekosistem yang cukup tinggi, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan meningkatnya pencemaran lingkungan industri penghasil limbah B3 dan limbah cair B3 serta limbah padat atau *sludge* B3.

Penyebab kerusakan lingkungan lainnya adalah terjadinya alih fungsi lahan, terutama lahan sawah menjadi peruntukkan lainnya. Rata-rata pengurangan luas lahan sawah di Jawa Tengah adalah 201 Ha/tahun, dengan luas lahan sawah pada Tahun 2012 sebesar 991.524 Ha.

21. Penanggulangan Bencana

Jawa Tengah mempunyai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi yang diakibatkan karena besarnya jumlah penduduk termasuk di dalamnya adalah penduduk miskin dan berpendidikan rendah serta letak geografis berada dalam *ring of fire.* Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana, keterbatasan sumber daya, serta masih rendah dan belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

4.2 Lingkungan Strategis

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan, serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan strategis perlu mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan ke depan.

1. Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1) Geo-Strategis

Letak Jawa Tengah yang berada di antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan daerah Jawa Tengah. Selain itu juga, Jawa Tengah termasuk dalam jalur transportasi utama yang menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan sebagai jalur distribusi barang dan jasa yang strategis di Pulau Jawa.

Keragaman hayati yang didukung dengan potensi sumberdaya alam yang beragam, menjadikan wilayah Jawa Tengah cukup strategis sebagai wilayah penyangga kehidupan di Pulau Jawa. Dengan didominasi oleh potensi pertanian yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, menjadikan Jawa Tengah memiliki kekuatan geostrategis sebagai basis utama politik pertanian nasional.

Kekuatan lainnya yang dimiliki adalah kondisi topografi yang terdiri dari daratan yang terbentang di sepanjang pantai utara dan selatan, serta pegunungan yang terbentang di daerah tengah. Karakter topografi inilah yang membentuk pola hidrologi dan iklim yang sangat baik, dan mendukung pengembangan pertanian sebagai sektor utama pembangunan Jawa Tengah, serta menjadi penyeimbang bagi lingkungan di wilayah provinsi sekitar sebagai satu kesatuan *bio region* Pulau Jawa.

2) Sumber Daya Manusia

Salah satu kekuatan besar yang dimiliki Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan adalah jumlah penduduk yang cukup banyak (urutan ke-4 terbanyak secara nasional), yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bukan hanya jumlah penduduk yang besar, namun didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang baik, yang ditunjukkan dengan IPM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah.

Kekuatan lain yang dimiliki masyarakat Jawa Tengah adalah karakter masyarakat yang kuat dan berbudaya, mengedepankan tenggang rasa, *tepo saliro*, gotong royong, dan pekerja keras, serta tetap melestarikan kearifan lokal yang beragam warisan nenek moyang. Kekuatan ini dapat menjadi modal dasar pada pembentukan masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya menuju pada cita-cita pembangunan Jawa Tengah yang berkepribadian dalam kebudayaan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1) Kependudukan

Jumlah penduduk Jawa Tengah yang cukup besar, tetapi tidak diiringi dengan penyebaran penduduk secara merata, dapat menjadi kelemahan yang dimiliki Jawa Tengah dalam proses pembangunan ke depan. Kondisi ini dapat dilihat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata pada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Selain itu penyebaran penduduk yang lebih terfokus di daerah perkotaan, juga menjadi kendala dalam proses pembangunan Jawa Tengah. Situasi tersebut dapat menggambarkan tumbuhnya kantong-kantong ekonomi yang tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan.

Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan penganggur di Jawa Tengah menjadi tugas rumah yang cukup besar untuk segera diselesaikan dalam proses membangun Jawa Tengah ke depan. Hingga Tahun 2012, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah mencapai 4,863 juta orang atau 14,98% dari total penduduk Jawa Tengah. Selain itu, angka pengangguran juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 0,96 juta orang atau 5,63% dari total angkatan kerja.

Kondisi ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah secara ekonomi maupun sosial yang berada di bawah standar hidup layak, serta keterbatasan akses masyarakat pada sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Hal ini merupakan kelemahan Jawa Tengah yang harus segera dilakukan penyelesaian strategis agar

percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2) Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan wilayah digambarkan dengan Indeks Williamson yang menunjukkan angka mendekati 1, yang artinya kesenjangan wilayah di Jawa Tengah masih cukup tinggi dan menjadi kelemahan dalam proses pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kesenjangan wilayah di sini, ditunjukkan dengan ketidakmerataan penyebaran penduduk, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, serta sarana sosial yang mendukung kehidupan masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan.

Hal ini juga terjadi disebabkan oleh luasnya wilayah Jawa Tengah, tetapi tidak didukung dengan kebijakan pembangunan wilayah yang adil, hingga ke pelosok daerah. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah, terutama kesenjangan wilayah antara Pantura dan Pansela, serta wilayah timur dan barat. Untuk itu, perlu penyikapan yang baik dan konsisten guna memberikan solusi terbaik, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan Jawa Tengah untuk masyarakat secara adil dan merata.

3) Birokrasi

Disharmonis kebijakan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi kendala besar dalam proses membangun Jawa Tengah. Di era otonomi daerah, masih terdapat kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinergis. Hal ini antara lain disebabkan belum kewenangan penanganan untuk beberapa urusan pembangunan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Selain itu kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai menjadi salah satu penyebab produk kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Disisi lain penetapan kebijakan anggaran yang kurang proporsional dan belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan hakiki dari pelaksanaan pembangunan.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1) Ekonomi Global

Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti *ASEAN Economic Community* (AEC) dan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA), menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk Indonesia termasuk Jawa Tengah terbuka cukup besar, terutama ke Cina, yang berpenduduk lebih besar dari Eropa. Sementara dengan diberlakukannya AEC 2015, maka peluang kerja-sama perdagangan serta pintu pasar dengan negara-negara ASEAN juga semakin terbuka bebas.

Dengan semakin terbukanya peluang dan pangsa pasar global, serta diiringi kebutuhan akan produk-produk yang hanya dihasilkan di Indonesia, maka peluang Jawa Tengah untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal dan khas juga semakin tinggi. Peluang inilah yang harus bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh Jawa Tengah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

2) Perkembangan Teknologi

Teknologi saat ini telah menguasai dunia. Dengan teknologi yang semakin maju dan tak terbatas, terutama teknologi informasi, menjadikan akses informasi ke seluruh belahan dunia mudah didapatkan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya, guna mempromosikan produk barang dan jasa lokal ke seluruh mancanegara.

Selain itu, sejalan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang pembangunan lainnya, juga merupakan peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta produktivitas produk-produk lokal, sehingga mampu memberikan nilai tambah dan mengembangkan varian produk-produk lokal yang mampu bersaing di pasar global.

b. Ancaman (*Threat*)

1) Globalisasi

Globalisasi sebagai sebuah bentuk proses interaksi antar individu dan negara tanpa dibatasi wilayah teritorial administratif, tidak hanya membuka peluang positif bagi relasi Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia, tetapi juga memberikan ekses negatif bagi perkembangan karakter dan budaya bangsa. Selain itu, globalisasi kerap menjadi sumber pemiskinan ekonomi suatu negara, apabila tidak dibarengi dengan proteksi yang kuat dari negara tersebut.

Kondisi yang terjadi saat ini, krisis Eropa belum menemui titik terang serta perekonomian AS belum sepenuhnya pulih. Hal ini akan berdampak pada ekonomi dunia yang semakin sulit diprediksi.

Disamping itu, dengan berlakunya AEC perlu diwaspadai dampak negatif yang mungkin muncul, antara lain membanjirnya produk-produk negara-negara anggota ASEAN. Jika hal ini tidak disikapi dengan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan produk dalam negeri secara bijak, maka tidak menutup kemungkinan AEC dapat mengancam perekonomian Indonesia terutama di daerah.

2) Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim merupakan fenomena global yang dapat mengancam penghidupan dan kehidupan manusia. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim (misalnya *El Niño*, *La Niña* dan *Indian Dipole*). Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian dan lain-lain.

Anomali cuaca tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas pertanian, yang berdampak pada upaya meningkatkan dan memantapkan ketersediaan pangan. Selain itu di wilayah pesisir,

fenomena perubahan iklim menjadi ancaman hebat karena berpengaruh terhadap kenaikan suhu air laut dan tinggi rata-rata permukaan air laut.

Kejadian bencana banjir dan tanah longsor juga menjadi indikasi tingginya ancaman kehidupan di Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun, frekuensi kejadian bencana tersebut semakin meningkat. Tidak hanya diakibatkan oleh alam, namun bencana ini lebih banyak akibat ulah manusia yang memberikan andil pada terjadinya fenomena perubahan iklim di dunia. Ancaman ini harus diwaspadai dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi yang baik terhadap perubahan iklim terutama untuk Indonesia yang rawan terhadap dampak perubahan iklim dunia.

4.3 Isu Strategis

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh ~~yang~~ besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan Kemiskinan

Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Fenomena empiris secara historis mengemuka bahwa akar kemiskinan terletak dalam hubungan-hubungan kekuasaan (*power relations*) yang terbentuk dari cara produksi – konsumsi manusia terhadap sumberdaya strategis, antara lain berupa tanah, air, dan udara; akses pembangunan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; serta ruang dan waktu.

Selain itu, kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

2. Pengurangan Pengangguran

Isu pengangguran di Jawa Tengah hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terjadi

fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri dan perdagangan.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

3. Pembangunan Infrastruktur

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, baik secara regional, nasional maupun internasional, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Dalam hal ini tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang

Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya, baik di lingkup regional Jawa Tengah maupun nasional. Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif, agar memberikan dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kabupaten/kota di wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat.

Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah rasio elektrifikasi di Jawa Tengah, mengingat terutama di wilayah perdesaan masih belum sepenuhnya terlayani pasokan listrik. Untuk itu pembangunan infrastruktur energi perlu ditingkatkan melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan serta

pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai *collective goods*. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dalam mendukung perwujudan desa berdikari, karena melalui teknologi informasi yang mampu menjangkau hingga tingkat desa, maka komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih terbuka dan intensif.

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya penanganan rob, pembangunan pelabuhan, bandar udara, transportasi massal dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan *soft power* melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; peningkatan *Public Private Parthnership* (PPP) dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif.

Pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.

4. Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal penting dalam keberlanjutan penghidupan bagi masyarakat. Saat ini, situasi pangan di Jawa Tengah berada pada tataran konstruksi ketahanan pangan, walaupun secara statistik Jawa Tengah berada pada surplus komoditas pangan dan merupakan kontributor pangan nasional. Namun yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tata kelola produksi pangan justru membuka ruang yang sangat luas bagi pemilik modal dan industri besar untuk memproduksi pangan secara massal, sehingga produsen pangan kecil menjadi tidak berdaya dan rakyat menjadi tergantung pada produk pangan massal. Sehingga dalam konteks ini, persoalan terbesar pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat adalah pada ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kemampuan pangan lokal berdaulat, yang didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.

Kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan pemerintah Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan. Kedaulatan pangan ini akan menjadi strategi alternatif untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati.

Kedaulatan pangan di Jawa Tengah diwujudkan melalui empat pilar, yaitu : 1) reformasi agraria dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal; 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil; dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.

5. Kedaulatan Energi

Kebutuhan energi saat ini menjadi hal yang cukup penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi adalah meningkatnya ketergantungan energi baik pada level nasional maupun daerah yang bersumber pada energi fosil.

Gambaran kebutuhan energi di Jawa Tengah juga memiliki kecenderungan dan pola yang sama dengan nasional. Ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan bekerjanya rantai ekonomi energi dalam moda transportasi, listrik, maupun industri yang menggunakan pasokan energi fosil. Sementara pemanfaatan potensi sumber energi non fosil, terutama sumber EBT di Jawa Tengah masih belum optimal. Sedangkan potensi sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif baru cukup besar seperti panas bumi, air, serta potensi lahan yang cukup luas sebagai area pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Isu inilah yang juga menjadi salah satu kunci kebijakan pemerintah Jawa Tengah, untuk menemukan terobosan baru dalam pengadaan energi, yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna sehingga secara berangsur-angsur ketergantungan terhadap energi fosil terutama di Jawa Tengah dapat tereduksi dan menggeser paradigma pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan.

Upaya penanganan isu strategis kedaulatan energi ini bukan merupakan upaya jangka pendek maupun menengah, tetapi merupakan upaya jangka panjang yang harus dirintis sejak saat ini, sebelum ketergantungan terhadap energi fosil semakin tak terkendali. Upaya kunci yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan energi alternatif berbasis gas, sumberdaya energi baru terbarukan, maupun bahan bakar nabati, yang dikelola secara

mandiri di level lokal, sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah.

6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional yang juga terjadi di Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Berkenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, daerah perlu mengantisipasi dengan melakukan langkah-langkah konkrit utamanya terkait pemantapan sistem manajemen kepegawaian meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara.

Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum *rembug*.

Kondusivitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Jawa Tengah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2013-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

5.1. Visi

Visi Provinsi Jawa Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2013 - 2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Jawa Tengah yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2018 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

"*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*" . Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan *tepo seliro*; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
2. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia.

Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya.

Prinsip Berdikari adalah membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri masyarakat secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan,

ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.

Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah.

Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola yang demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang dilandasi semangat dan nilai keutamaan *"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".*

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari *"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"* merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan *"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"*.

5.2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. **Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan**

   Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat keberdikarian sebuah bangsa.

Kedaulatan pangan dan energi sebagai *pengejawantahan* bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Jawa.

2. **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran**

   Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

3. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"**

   Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

4. **Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan**

   Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya.

5. **Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak**

   Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

6. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat**

   Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

7. **Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. **Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan**

   Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

   Sasaran : Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno.

2. **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran**

   Tujuan :
   a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
   b. Menurunkan jumlah penganggur;
   c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM;
   d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi;
   e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan;
   f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri;
   g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;
   h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;
   i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

   Sasaran :
   a. Menurunnya angka kemiskinan;
   b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
   c. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
   d. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;
   e. Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM;
   f. Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;

g. Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas;
h. Meningkatnya realisasi investasi;
i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;
j. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
k. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
l. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;
m. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"

Tujuan :

a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
c. Melaksanakan penegakan hukum.

Sasaran :

a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas;
c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
g. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
h. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
i. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Tujuan :

a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

Sasaran :

a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;

b. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;
c. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
e. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi;
f. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;
g. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
h. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa;
i. Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Tujuan :

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.

Sasaran :

a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
c. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Tujuan :

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;
d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

Sasaran :

a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
b. Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR);
c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan;
d. Meningkatnya kualitas pendidikan;
e. Meningkatnya budaya baca masyarakat;
f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni;
g. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.

7. **Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan**

Tujuan :

a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;
d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Sasaran :

a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;
c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;
d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat;
e. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi;
f. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;
g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator yang digunakan dalam upaya pencapaian misi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan	Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno	Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno	Persentase capaian sasaran pembangunan	-	-	-	50	-	100
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran	1. Menurunkan jumlah penduduk miskin	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	14,44	11,58 s.d 11,37	9,05 s.d 8,75	8,60 s.d 8,35	8,25 s.d 8,00	7,80 s.d 7,60
	2. Menurunkan jumlah penganggur	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,02	5,31 s.d 4,77	4,93 s.d 4,62	4,66 s.d 4,43	4,49 s.d 4,27	4,32 s.d 4,20
	3. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi	a. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan,	1) Jumlah regulasi kedaulatan pangan 2) Ketersediaan pangan utama	6 5.701.257	1 5.724.620	1 5.746.958	1 5.769.946	1 5.793.026	1 5.816.198

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	3) Persentase penguatan cadangan pangan	60	75	80	90	95	100
			4) Persentase ketersediaan stok, harga dan akses pangan di daerah	95	97	100	100	100	100
			5) Skor Pola Pangan Harapan	90	90,75	91,13	91,5	91,86	92,23
			6) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	80	80	80	80
			7) Persentase penanganan daerah rawan pangan	50	55	60	60	60	60
			8) Jumlah produksi padi (Juta Ton)	10,14	10,18	10,22	10,26	10,31	10,35
			9) Jumlah produksi tebu (Juta Ton)	5,02	5,12	5,22	5,33	5,43	5,54
			10) Jumlah produksi daging (Juta Kg)	265,14	274,42	282,66	291,14	299,87	308,87
			11) Persentase Penyuluh yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Keahlian	34,01	40	50	60	70	80
			12) Tingkat konsumsi ikan	17,82	18,69	19,59	20,55	21,55	22,59
		b. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal	1) Rasio Elektrifikasi	82,12	85,02	87,42	90,01	91,40	92,12
			2) Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi	6,1	6,92	7,74	8,54	9,38	10,2

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Mengembangkan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM	1) Jumlah produk/ komoditas OVOP	70	105	140	175	210	245
			2) Persentase koperasi sehat	15,02	15,70	16,20	17,15	18,30	19,50
			3) Persentase koperasi aktif	79,73	80,71	81,05	81,45	81,90	82,50
	5. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan	Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan	1) Jumlah UP2K yang aktif (unit)	332	200	200	200	200	200
			2) Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	119	148	183	213	233	253
			3) Jumlah pasar desa yang direvitalisasi (unit)	196	246	311	376	416	461
			4) Jumlah UED-SP yang aktif (unit)	173	248	333	418	493	553
	6. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggu-naan produk dalam negeri	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	1) Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)	4,70	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
			2) Kontribusi Sektor - terhadap PDRB (%)	31,6	32,1	32,3	32,5	32,5	32,6
	7. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi	Meningkatnya realisasi investasi	1) Jumlah investor (PMA/ PMDN)	32	33	36	37	39	40
			2) Nilai investasi (Trilyun)	3,088	3,228	3,374	3,525	3,682	3,846
	8. Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan	a. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	67,63	68,22	68,81	69,40	69,99
			2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	69,99	70,49	70,99	71,49	71,99
		b. Meningkatnya kualitas hidup serta perlin-dungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	3) Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak	48,6	62,8	77,1	94,3	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan	1) APM SD/SDLB/MI/ Paket A	98,60	99,42	100	100	100	100
			2) APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	100,52	100,54	100,56	100,58	100,60	100,60
			3) APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	79,00	79,20	79,30	79,50	79,75	80,00
			4) APK SMA/SMALB/ MA/Paket C	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
		d. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat	1) Jumlah desa vokasi yang dikembangkan	286 desa	35 desa	35 desa	35 desa	35 desa	35 desa
			2) Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi pendidikan kemasyarakatan	40.481	37.500	38.000	39.000	40.000	41.000
			3) Jumlah kewirausahaan pemuda	380 org (80 Klpk)	560 org (80 klpk)	650 org (85 Kplk)	680 org (85 Klpk)	700 org (90 Klpk)	720 org (90 Klpk)
	9. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	1) Persentase penanganan PMKS	2,62	0,63	0,64	0,64	0,64	0,62
			2) Persentase penguatan kapasitas PSKS	4,66	4,87	5,01	5,23	5,31	5,42

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, *"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"*	1. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, ber-dedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima	a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) e. Terwujudnya tertib administrasi	1) *Indonesia Governance Index* (IGI) 2) Promosi Jabatan Struktural secara terbuka 3) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM 4) Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan melalui PTSP 5) Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP (%) 6) Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akte kelahiran 7) Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK	5,90 Es. I, III, IV 9 100 85,17 31,49 35	5,92 Es. I, II, III, IV 11 100 100 45 35	5,94 Es. I, II, III, IV 13 100 100 55 35	5,96 Es. I, II, III, IV 15 100 100 60 35	5,98 Es. I, II, III, IV 17 100 100 70 35	6,00 Es. I, II, III, IV 19 100 100 80 35
	2. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel	a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	1) Implementasi Aksi PPK	Prov, Kab. Pemalang, Kt. Semarang	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	2) Opini BPK (WTP)	Prov, 10 k/k	Prov, 13 k/k	Prov, 16 k/k	Prov, 22 k/k	Prov, 28 k/k	Prov, 35 k/k
		c. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3) Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 SKPD	2 SKPD	15 SKPD	59 SKPD	59 SKPD	59 SKPD
	3. Melaksanakan penegakan hukum	Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan	1) Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disusun	17 Perda	18 Perda	20 Perda	22 Perda	24 Perda	26 Perda
			2) Persentase penindakan pelanggaran perda	100	100	100	100	100	100
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan	1. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Persentase penanganan konflik sosial	75	80	85	90	95	100
	2. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat	a. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa	1) Meningkatnya peran masyarakat/sikap toleransi dan gotong royong	Me-ning-kat	Me-ning-kat	Me-ning-kat	Me-ning-kat	Me-ning-kat	Me-ning-kat
			2) Kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik							
	3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	a. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat b. Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi c. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik	1) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2) Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu : • Pilgub dan wagub 2018 • Pilpres 2014 • Pilleg 2014 • Pilkada kab/ kota 2017 3) Persentase keterwakilan politik perempuan di Lembaga Parlemen	66,85 58,46 - - 64,40 % Prov : 21%	67,48 - 75% 75% 66,52 % Prov : 30%	68,11 - - - 68,64 % Prov : 30%	68,74 - - - 70,76 % Prov : 30%	69,37 - - - 72,88 % Prov : 30%	70,00 75% - - 75% Prov : 30%
	4. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan	a. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa b. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa	1) Persentase penerapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyeleng-garaan Misi Kesenian) 2) Persentase dan jumlah lokasi pelestarian cagar budaya	100 2,01 & 4 Lok	100 2,5 & 5 Lok	100 2,5 & 5 Lok	100 2,5 & 5 Lok	100 2,5 & 5 Lok	100 2,5 & 5 Lok

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Meningkatnya Pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan Masyarakat	3) Penerapan kurikulum pelajaran budaya Jawa pada jenjang pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	1. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	a. Persentase pelaksanaan *rembug* masyarakat dalam pengambilan keputusan	100	100	100	100	100	100
			b. Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	11,4	14,3	28,6	42,9	57,1	71,4
	2. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat	a. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	a. Indeks Gini	0,352	0,349	0,347	0,344	0,341	0,337
		b. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah	b. Indeks Williamson	0,7023	0,7015	0,7007	0,7000	0,6993	0,6986

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan b. Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	1) Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH	118,62	118	117,5	117	116,5	116,00
			2) Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	10,41	12,5	12	12	11,5	11
			3) Angka Kematian Balita (AKABA)/1000 KH	11,80	11,9	11,85	11,8	11,75	11
			4) Angka Kematian DBD (%)	<1,2	<1	<1	<1	<1	<1
			5) Angka Kesakitan *DBD* (Per 100.000 pddk)	45,52	<20	<20	<20	<20	<20
			6) Persentase *Drop Out* Keluarga Berencana	15,09	14,75	14,50	14,00	13,75	13,50
			7) Persentase *Unmet Need*	10,26	10,00	9,75	9,50	9,25	9,00
			8) Persentase *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	76	77	78	79	79,50	80
	2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan	a. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan	1) Angka rata-rata lama sekolah	7,39 (2012)	7,65	7,78	7,91	8,04	8,17
			2) APK PAUD/TK	70,55	72,00	75,00	77,00	79,00	80,00
			3) APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	100,52	100,54	100,56	100,58	100,60	100,60
			4) APK SMA/SMALB/MA/ Paket C	70	72	74	76	78	80
			5) APM SD/SDLB/MI/ Paket A	98,60	99,42	100	100	100	100
			6) APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	79,00	79,20	79,30	79,50	79,75	80,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Meningkatnya kualitas pendidikan	1) Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	99,95	99,96	99,97	99,97	99,98	99,98
			2) Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs	99,17	99,19	99,21	99,23	99,25	99,25
			3) Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/SMK	99,92	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99
			4) Persentase ruang kelas SD/SDLB/MI sesuai SNP	61,53	64,50	65,00	65,50	70,00	70,50
			5) Persentase ruang kelas SMP/SMPLB/MTs sesuai SNP	78,06	78,40	79,00	79,55	80,25	80,75
			6) Persentase ruang kelas SMA/SMALB/MA/SMK sesuai SNP	80,50	81,00	84,00	86,00	88,00	90,00
			7) Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
			8) Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
			9) Persentase SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100
			10) Persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	1) Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	732.050	768.653	807.085	847.439	889.811	934.302
			2) Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi	203.126	213.282	223.946	235.144	246.901	259.246
			3) Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan	781	851	921	991	1.061	1.131
	4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni	4) Persentase cakupan layanan air minum perkotaan	63,99	67,00	75,00	76,50	77,50	78,00
			5) Persentase cakupan layanan air minum perdesaan	49,13	50,50	52,80	55,00	57,00	59,00
			6) Persentase cakupan layanan sanitasi	64,50	69,00	72,00	73,50	75,00	76,00
			7) Rasio rumah layak huni	76.67	76,73	76,74	76,75	76,76	76,77
	5. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	1) Persentase kondisi jaringan irigasi baik	72	74	76	78	80	82
			2) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	50,12	52	54	56	58	60
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa	1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan	a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86,54	86,92	87,56	88,24	88,92	89,60
			2) Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m	50,44	54,14	59,00	64,84	71,21	77,87

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	transportasi;	b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat	3) Persentase panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	67,62	69,60	72,20	75,33	78,74	82,30
			4) Jumlah kab/kota yang melakukan pengembangan angkutan umum dan massal di Jawa Tengah	1 Kab 1Kota	1Kota	2Kota	2Kota	2Kota 1 Kab	2Kota
			5) Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan	-	-	1desa	1desa	1desa	1desa
			6) Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	18,71	22,00	34,00	47,00	60,00	73,00
			7) Lokasi ketersediaan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi	43	9	25	25	25	25
			8) Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir	100% (167.000 Ha)	3% (5.000 Ha)	3% (5.000 Ha)	3% (5.000 Ha)	3% (5.000 Ha)	3% (5.000 Ha)
			9) Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	35	35	59	59	59	59
	3. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	1) Persentase Informasi status mutu air (SPM)	100	100	100	100	100	100
			2) Persentase Informasi status mutu udara ambien (SPM)	100	100	100	100	100	100
			3) Persentase pengaduan akibat dugaan pecemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)	100	100	100	100	100	100
			4) Jumlah luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan	40	40	40	40	40	40
			5) Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	5	10	15	20	25	30
			6) Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)	8.959	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
			7) Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,53	0,53	0,63	0,73	0,83	0,93

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8) Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang	6,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
	4. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1) Jumlah BPBD kab/kota berdasar Perda	28	33	35	35	35	35
			2) Jumlah Desa Tangguh Bencana	25	27	29	31	33	35

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025

RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD tersebut adalah : **"Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari"** . Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta pengembangan jaringan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Kurun waktu pelaksanaan RPJMD berada pada Tahap II dan III RPJPD. Pada Tahap II (2010-2014) diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya pada Tahap III (2015-2019) diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014

Visi Indonesia 2014 adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan" dengan misi : (1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, terdapat 11 (sebelas) prioritas nasional yaitu : (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Kesebelas prioritas nasional tersebut dilaksanakan melalui berbagai program aksi di seluruh wilayah dengan memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan di setiap wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut, arah pembangunan kewilayahan untuk Jawa-Bali (Jawa Tengah termasuk di dalamnya), diarahkan guna tetap mempertahankan fungsi lumbung pangan nasional, mengembangkan industri pengolahan secara terkendali dan memperkuat interaksi perdagangan, serta meningkatkan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional sebagai wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Keterkaitan isu strategis, visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2010 – 2014 tercermin dalam Gambar 6.1.

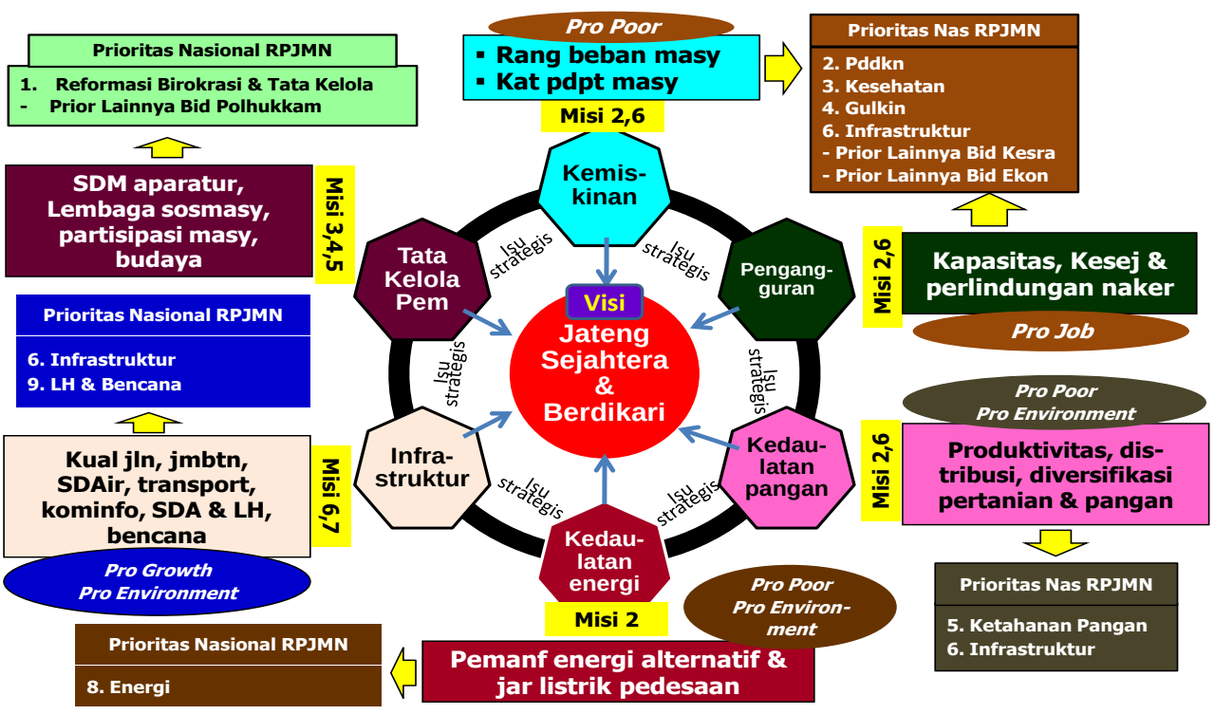

Gambar 6.1
Keterkaitan Isu Strategis, Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 – 2014

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lain

1) RPJMD Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua" dengan misi : (1) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; (2) Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan; (3) Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik; (4) Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan; dan (5) Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Demikian pula terkait permasalahan dan isu strategis juga terdapat kesamaan antara lain berkenaan dengan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi dan infrastruktur.

Berkenaan dengan upaya peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan khususnya untuk wilayah perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah, arah kebijakan wilayah dirumuskan sebagai berikut :

a) Bidang Sosial dan Pemerintahan, meliputi :
   1. Kesehatan dengan fokus penanganan keluarga miskin;
   2. Pendidikan dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa;
   3. Batas wilayah dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas.

b) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, meliputi :
   1. Penataan ruang dan permukiman dengan fokus koordinasi penataan ruang;
   2. Lingkungan hidup dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;
   3. Pengelolaan sumber daya air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;
   4. Infrastruktur jalan dan jembatan dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;
   5. Perhubungan dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan.

c) Bidang Ekonomi, meliputi :
   1. Pertanian dengan fokus pemberantasan hama, pertanian multi aktivitas (padi, ternak), serta relokasi dan optimalisasi *check point* ternak dan hasil hutan;
   2. Perdagangan dan jasa dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan;
   3. Pariwisata dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.

2) RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu: "Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru". Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi yaitu : (1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; (2) Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; (3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Meskipun rumusan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 agak berbeda dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 namun di dalamnya terdapat semangat yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Berbagai permasalahan yang dihadapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah hampir terdapat kemiripan antara lain berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pangan, energi, koperasi dan UMKM, pariwisata, investasi, politik, prasarana wilayah atau infrastruktur dan lingkungan hidup.

3) RPJMD Provinsi Jawa Timur

Visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 adalah "Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi "Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD Untuk Rakyat".

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, berkecukupan atau tidak kekurangan baik fisik atau materi maupun rohani. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera tidak jauh berbeda dengan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Isu strategis yang mengemuka untuk ditangani berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, lingkungan hidup dan pengembangan wilayah.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD disusun dengan mempedomani dan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut :

1. **Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan**

   a. **Strategi**

   Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi politik, konsultasi, koordinasi, komunikasi, demokratisasi, pemanfaatan potensi lokal, kerjasama dan kemitraan, serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan.

   b. **Arah Kebijakan**

   Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai-nilai dasar Trisakti Bung Karno.

2. **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran**

   a. **Strategi**

   1) Pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
   2) Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja;
   3) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
   4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
   5) Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi;
   6) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
   7) Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;
   8) Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal;
   9) Perlindungan petani dan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
   10) Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, energi alternatif, dan peningkatan jaringan listrik perdesaan;
   11) Peningkatan budaya hemat energi;
   12) Peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha baru;
   13) Peningkatan produktivitas dan kapasitas Koperasi dan UMKM;
   14) Pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan;
   15) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/ kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal;
   16) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
   17) Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;
   18) Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
   19) Pengarusutamaan gender dan hak anak;
   20) Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

21) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
22) Peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat;
23) Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS.

b. Arah Kebijakan

1) Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah;
2) Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi;
3) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;
4) Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria;
5) Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
6) Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan;
7) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan;
8) Meningkatkan budaya hemat energi;
9) Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi;
10) Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;
11) Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan;
12) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster;
13) Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
14) Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
15) Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;
16) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
17) Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA;
18) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
19) Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*;

20) Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
21) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;
22) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
23) Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat;
24) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"

a. Strategi

1) Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur;
2) Peningkatan pengelolaan dan keterbukaan pengembangan sistem karier kepegawaian;
3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik;
4) Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
5) Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
6) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
7) Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara PTSP;
8) Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di provinsi dan seluruh kabupaten/kota;
9) Peningkatan manajemen administrasi keuangan dan aset;
10) Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD Provinsi;
11) Penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
12) Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

b. Arah Kebijakan

1) Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka;
2) Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik;
3) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
4) Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan;
5) Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota;
6) Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah;

7) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
8) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;
9) Mengoptimalisasikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah;
10) Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggar peraturan daerah;
11) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

a. Strategi

1) Penguatan peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah;
2) Perluasan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
3) Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal;
4) Penguatan kapasitas kader partai politik dan relawan organisasi masyarakat;
5) Perumusan kebijakan dan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik;
6) Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Jawa melalui lembaga pendidikan, penyelenggaraan *event* tertentu dan penggunaan atribut-atribut Jawa dalam kegiatan formal.

b. Arah Kebijakan

1) Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;
2) Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
3) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;
4) Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar;
5) Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik;
6) Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini;
7) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

a. Strategi

1) Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan;
2) Peningkatan partisipasi dan fungsi kontrol masyarakat, perguruan tinggi, Ormas dan dunia usaha dalam pembangunan;

3) Peningkatan sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan kepada masyarakat;
4) Peningkatan pemerataan pembangunan daerah.

b. Arah Kebijakan

1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum *rembug*;
2) Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan;
3) Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
4) Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa;
5) Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

a. Strategi

1) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan;
2) Optimalisasi pelayanan KB;
3) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
4) Peningkatan budaya baca masyarakat;
5) Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lingkungan permukiman;
6) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
7) Peningkatan dan pengembangan kondisi prasarana sarana dan ketersediaan air baku serta kondisi jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian dan air minum;
8) Pemantapan kinerja dalam rangka pengawalan pencapaian target SPM dalam 9 (sembilan) bidang urusan kewenangan Pemerintah Provinsi.

b. Arah Kebijakan

1) Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis;
2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;
5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
6) Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;

7) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional);
8) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan;
9) Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan;
10) Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

a. Strategi

1) Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan;
2) Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan;
3) Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan serta kapasitas SDM;
4) Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik;
5) Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi;
6) Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;
7) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur dan transportasi strategis untuk percepatan penanganan kebutuhan dan masyarakat;
8) Fasilitasi pemenuhan cakupan sarana komunikasi dan informasi;
9) Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS;
10) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
11) Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir;
12) Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;
13) Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat;
14) Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana.

b. Arah Kebijakan

1) Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
2) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);

3) Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik.
4) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal *(mass rapid transport*) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
5) Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
6) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan;
7) Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa;
8) Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi;
9) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;
11) Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH;
12) Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
13) Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;
14) Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2014

Tahun 2014 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program-program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai, serta dengan mendasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah

untuk mengembangkan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan dan pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan. Koordinasi (*rembugan*) menjadi salah satu agenda dalam mencapai tujuan serta peningkatan sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus pada Tahun 2014, maka pembangunan daerah **Tahun 2014** ditujukan untuk **"Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat"**, dengan **arah kebijakan** meliputi :

a. Peningkatan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
b. Peningkatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
c. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna mendukung pengembangan wilayah;
e. Peningkatan upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana guna mencapai pembangunan berkelanjutan;
f. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*);
g. Pemantapan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas wilayah.

2. Arah Kebijakan Tahun 2015

Pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari fokus tahun sebelumnya serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah, maka pembangunan daerah pada **Tahun 2015** ditujukan untuk "**Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat"**, dengan **arah kebijakan** meliputi :

a. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
b. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah;
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas;
d. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
e. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
f. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah.

3. Arah Kebijakan Tahun 2016

Pembangunan daerah pada **Tahun 2016** ditujukan untuk "**Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap",** dengan **arah kebijakan** meliputi :

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
b. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
d. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;
e. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;
f. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2017

Pembangunan daerah pada **Tahun 2017** ditujukan untuk "**Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Guna Mewujudkan Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat",** dengan **arah kebijakan** meliputi :

a. Peningkatan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
b. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, Koperasi dan UMKM;
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
d. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur;
e. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
f. Penguatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan penciptaan kondusivitas wilayah.

5. Arah Kebijakan Tahun 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima pelaksanaan RPJMD, ditujukan untuk "**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari"**, dengan **arah kebijakan** meliputi :

a. Peningkatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;

d. Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan;
e. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan;
f. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan penciptaan kondusivitas wilayah.

Keterkaitan antara Misi dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dapat dijabarkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi 1 : Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan			
1	Meningkatnya demokratisasi, kesejahte-raan dan nilai - nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno.	Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi politik, konsultasi, koordinasi, komunikasi, demokratisasi, pemanfaatan potensi lokal, kerjasama dan kemitraan, serta memelihara nilai - nilai kearifan kebudayaan.	Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai - nilai dasar Trisakti Bung Karno.
Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran			
1	Menurunnya angka kemiskinan.	a. Pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin; b. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar destinasi pariwisata.	a. Mengurangis penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah; b. Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
2	Menurunnya Pengangguran.	a. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja; b. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; c. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.	Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi.
3	Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.	a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan; c. Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumberdaya lokal; d. Perlindungan petani dan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian; e. Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi.	a. Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan; b. Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/ kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria; c. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumberdaya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4	Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal.	a. Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, energi alternatif, dan peningkatan jaringan listrik perdesaan; b. Peningkatan budaya hemat energi;	a. Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan tekno-logi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan; b. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan; c. Meningkatkan budaya hemat energi.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
5	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas KUMKM.	a. Peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha baru; b. Peningkatan produktivitas dan kapasitas Koperasi dan UMKM;	a. Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal; b. Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi.
6	Meningkatnya kelembagaan ekonomi perdesaan.	Pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan.	Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan.
7	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas.	a. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/ kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal; b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.	a. Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster; b. Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal; c. Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
8	Meningkatnya realisasi investasi.	Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah.	Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
9	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak.	a. Pengarusutamaan gender dan hak anak; b. Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak; c. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan; d. Peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat.	a. Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; b. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; c. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*; d. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak; e. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan BOS pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah; f. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik; g. Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat.
10	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus.		
11	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan.		
12	Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat.		
13	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.	Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta PSKS.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"			
1	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas.	a. Peningkatan kapasitas dan integritas SDM Aparatur; b. Peningkatan pengelolaan dan keterbukaan pengembangan sistem karier kepegawaian.	Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka.
2	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi.	Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel.	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3	Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.	a. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik; b. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel.	a. Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik; b. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi.
4	Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	a. Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi; b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik; c. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara PTSP.	a. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perijinan; b. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/ kota.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
5	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.	Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.	a. Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di provinsi dan seluruh kabupaten/kota b. Peningkatan manajemen administrasi keuangan dan aset; c. Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD Provinsi.	a. Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah; b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; c. Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi.
7	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.		
8	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.		
9	Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	Penegakan peraturan perundang-undangan daerah.	a. Mengoptimalisasikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah; b. Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggar peraturan daerah.
Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan			
1	Tertanganinya konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama.	Penguatan peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah.	Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
2	Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa.	Perluasan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.	Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
3	Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik.		
4	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.	a. Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal; b. Penguatan kapasitas kader partai politik dan relawan organisasi masyarakat; c. Perumusan kebijakan dan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik.	a. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah; b. Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan ormas yang terdaftar; c. Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik.
5	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi.		
6	Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik		
7	Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa.	Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Jawa melalui lembaga pendidikan, penyelenggaraan *event* tertentu dan penggunaan atribut-atribut Jawa dalam kegiatan formal.	a. Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini; b. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.
8	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa.		
9	Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak			
1	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	a. Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan; b. Peningkatan partisipasi dan fungsi kontrol masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan; c. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan kepada masyarakat.	a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum *rembug*; b. Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan; c. Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa.
2	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.	Peningkatan pemerataan pembangunan daerah.	a. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, Perguruan Tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; b. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.
3	Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.		
Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat			
1	Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan.	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan.	Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis.
2	Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/*Contraceptive Prevalance Rate* (CPR).	Optimalisasi pelayanan KB.	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
3	Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan.	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.	a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; b. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; c. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
4	Meningkatnya kualitas pendidikan.		
5	Meningkatnya budaya baca masyarakat.	Peningkatan budaya baca masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan.
6	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni.	a. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lingkungan permukiman; b. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan.	a. Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional).
7	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.	Peningkatan dan pengembangan kondisi prasarana sarana dan ketersediaan air baku serta kondisi jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian dan air minum.	a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan; b. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan			
1	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan.	a. Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan; b. Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan; c. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan serta kapasitas SDM.	a. Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; b. Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura - Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya); c. Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik.
2	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda yang ramah lingkungan serta keselamatan transportasi.	a. Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik; b. Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi.	Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal *(mass rapid transport*) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
3	Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis.	Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai.	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal.
4	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat.	Peningkatan kerjasama dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur dan transportasi strategis untuk percepatan penanganan kebutuhan dan masyarakat.	1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan; 2) Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), CSR serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa.
5	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi.	Fasilitasi pemenuhan cakupan sarana komunikasi dan informasi.	Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
6	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mengantisipasi dampak perubahan iklim.	a. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS; b. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH); c. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir; d. Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.	a. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda; c. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH; d. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat; e. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup.
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.	a. Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.	Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini masih terdapat permasalahan utama pengembangan wilayah di Jawa Tengah, yaitu pembangunan ekonomi yang belum merata pertumbuhannya, diindikasikan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah-wilayah tertentu dan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Pengembangan wilayah Jawa Tengah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berdikari dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dengan memperhatikan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan, guna mencapai :

a. Pembangunan yang merata dan harmonis antar wilayah;
b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah;
c. Pembangunan ekonomi dengan berbasis potensi lokal;
d. Keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dengan kawasan budidaya.

6.2.1 Strategi Pengembangan Wilayah

Strategi dalam rangka pengembangan wilayah Jawa Tengah dilakukan melalui :

a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
b. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan;
c. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung;
d. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah;
e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah;
f. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;
g. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional berdasarkan permasalahan, kekuatan dan potensi endogen.

6.2.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan untuk perwujudan strategi pengembangan wilayah Jawa Tengah meliputi :

a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, melalui upaya :
   1) Pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
   2) Peningkatan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah;
   3) Pengembangan interkoneksi antara pusat kegiatan dan *hinterland*;
   4) Pemantapan perkembangan kawasan di sepanjang Pantura dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang Pansela.

b. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan, melalui upaya :
   1) Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas terutama di wilayah tengah dan selatan;
   2) Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
   3) Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik agar terdistribusi merata;
   4) Pengembangan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor yang terkait pemanfaatan sumber daya air;
   5) Pengembangan sistem pelayanan prasarana permukiman yang terpadu guna mencapai kualitas lingkungan permukiman yang baik.

c. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung, melalui upaya:
   1) Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS);
   2) Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan yang merata;
   3) Peningkatan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis;
   4) Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air.

d. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah, melalui upaya :
   1) Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, energi dan rumah layak huni;
   2) Pengembangan ekonomi padat karya untuk mengurangi pengangguran.

e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah, melalui upaya:
   1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas;
   2) Pengendalian konversi lahan sawah dengan mengimplementasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   3) Pengembangan kawasan berdasarkan potensi unggulan baik di perdesaan maupun perkotaan;
   4) Pengembangan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besar;
   5) Mendorong fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan.

f. Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan, melalui upaya :
   1) Peningkatan akses masyarakat terhadap lahan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama di perdesaan yang termasuk wilayah tertinggal dan di kawasan perbatasan;
   2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal;
   3) Mendorong pengembangan investasi pada wilayah tertinggal, terutama di wilayah selatan.

g. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional dan antar pihak, melalui upaya :
   1) Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah;
   2) Pemantapan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat dan inheren, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan, sebagai berikut :

a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan, antara lain diarahkan pada : penyediaan modal usaha rakyat berupa modal kerja, pembimbingan dan pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah; pemberian jaminan ketersediaan dan distribusi sarana produksi yang bersubsidi bagi petani dan nelayan; peningkatan kualitas sumber daya pekerja dan kesejahteraan buruh; pemberian jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus; dan peningkatan kapasitas infrastruktur;

b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan pada : sinkronisasi dan harmonisasi hubungan dan regulasi antara provinsi dan kabupaten/kota; perkuatan sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi; pemantapan kondusivitas wilayah; penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan *on-line*; pengembangan kelembagaan non pemerintah yang independen guna penyelenggaraan mekanisme sistem pengaduan masyarakat; serta pengembangan demokratisasi dan wawasan kebangsaan;

c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan, antara lain diarahkan pada: pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan pola karier yang terbuka; serta penerapan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah provinsi;

d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, antara lain diarahkan pada : penerapan sistem *on-line* dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah guna penerapan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; pelaksanaan politik anggaran secara efisien, efektif dan proporsional; serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.

Dalam melaksanakan perspektif kebijakan umum tersebut, Gubernur memiliki peran di dalam *integrated perfectoral system* atau sebagai penyelaras dalam pola hierarki hubungan antara pusat dan daerah, dimana Gubernur memiliki kedudukan dan fungsi ganda yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Oleh karena itu, maka dalam implementasi kebijakan umum pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai *intermediary agency*

(penghubung) bagi berbagai kepentingan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga nasional, serta ke semua lapisan masyarakat, secara proporsional, melalui: 1) kegotongroyongan; 2) memperkuat proses partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan melalui *rembugan*; 3) emansipatoris dan tidak melahirkan ketergantungan rakyat; 4) penyempurnaan kebijakan daerah dan desa untuk membangun pijakan sosial guna memperkuat modal sosial dan kearifan lokal; 5) memperkuat kelembagaan sosial; serta 6) melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Jawa.

7.2. Program Pembangunan

Mendasarkan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka dirumuskan 11 (sebelas) Program Unggulan sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu :

1. Pendidikan Politik Masyarakat;
2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;
3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan Desa Mandiri;
5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6. Rakyat Sehat;
7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;
9. Pembangunan Infrastruktur;
10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah *Ijo Royo-Royo*;
11. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut:

1. **Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan**

   Kebijakan pembangunan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 memiliki karakter berbasis pada nilai ideologi, berdasarkan Trisakti Bung Karno, yaitu Bardaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Kekuatan karakter tersebut diterjemahkan sebagai landasan gerak dalam membangun Jawa Tengah. Landasan Trisakti diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara dan daerah, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat kedaulatan daerah, yang akan memberikan implikasi pada kondisi berdikari di bidang ekonomi, serta melahirkan karakter politik yang lebih berdaulat pada rakyat Jawa Tengah yang kaya dengan kearifan lokal.

Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi dan Berkepribadian di bidang Kebudayaan, merupakan haluan politik bagi : 1) kerangka kerja pada seluruh pelaksanaan program dan perwujudan misi bagi tercapainya visi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 2) konsistensi, sinergitas dan kesinambungan kerja pada implementasi program; serta 3) alat ukur obyektif kinerja dan hasil kerja dari pelaksanaan program dan pertanggungjawaban.

Misi ini memberikan kerangka atas 6 (enam) misi lainnya, serta memberikan *guideline* agar transformasi nilai Trisakti terlihat dalam setiap misi yang akan dijadikan landasan program unggulan dan kegiatan strategis pembangunan jangka menengah Tahun 2013-2018.

Program pembangunan yang mendukung misi ini adalah Program percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada :

a. **Rakyat Sehat**, melalui jaminan dasar kesehatan dengan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah;
b. **Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah**, dengan : meningkatkan dan memperluas jangkauan penyelenggaraan pendidikan; meningkatkan tunjangan guru honorer dan tenaga kependidikan tidak tetap;
c. **Peningkatan Kesejahteraan Pekerja**, dengan meningkatkan sumber daya pekerja; meningkatkan upah minimum buruh; memfasilitasi hunian yang layak untuk buruh; penyediaan modal usaha rakyat; serta perluasan lapangan pekerjaan dengan mendorong penanaman modal;
d. **Mewujudkan Desa Mandiri,** dengan menggali dan mengembangkan sumber daya potensial kawasan perdesaan, menyediakan modal usaha rakyat baik berupa modal kerja, bimbingan dan pendampingan untuk usaha mikro, kecil dan menengah, penerbitan Kartu Petani dan Kartu Nelayan, mengembangkan jamaah produksi (kelompok usaha produksi yang *pro poor* bersifat kolektif berbasis masyarakat desa, yang beranggotakan 20 - 30 orang dengan 50% perempuan, mempunyai bidang usaha pertanian dalam arti luas atau pengelolaan hasil pertanian) serta mengembangkan lumbung ganjaran (gerakan membangun lumbung desa menuju kemandirian melalui kelompok tani yang berjumlah minimal 40 orang dengan luas hamparan 10 hektar);
e. **Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak** dengan penerapan perencanaan pembangunan responsif gender dan anak.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
b. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha;
c. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM;
d. Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal;
e. Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor;

f. Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM;
g. Pengembangan Industri Logam, Mesin, dan Tekstil;
h. Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan;
i. Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka;
j. Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan;
k. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi;
l. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
m. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah;
n. Pengembangan Agribisnis;
o. Peningkatan Ketahanan Pangan;
p. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan;
q. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
r. Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian;
s. Pengembangan Perikanan Tangkap;
t. Pengembangan Perikanan Budidaya;
u. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
v. Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah;
w. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
x. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas;
y. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
z. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
aa. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
bb. Pelayanan Keluarga Berencana;
cc. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
dd. Peningkatan Kesempatan Kerja;
ee. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
ff. Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
gg. Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
hh. Pelayanan Kesehatan;
ii. Kesehatan Lingkungan;
jj. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
kk. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
ll. Promosi dan Pemberdayaan;
mm. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan;
nn. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
oo. Pendidikan Dasar;
pp. Pendidikan Menengah;
qq. Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal;
rr. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
ss. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
tt. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
uu. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
vv. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

3. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"**

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada :

a. **Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi**, dengan menerapkan transparansi penerimaan dan pengeluaran anggaran berbasis *online*; menerapkan sistem remunerasi kepegawaian; sinkronisasi dan harmonisasi peraturan provinsi dan kabupaten/kota serta penegakan hukumnya;
b. **Menguatkan Sistem Pelayanan Publik**, dengan mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi dua arah bersama masyarakat, mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi, menyediakan sarana prasarana penunjang pelayanan publik dan secara rutin menggelar dialog antar tingkatan pemerintahan;
c. **Pendidikan Politik Masyarakat,** dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilih melalui Pemilu dan Pilkada terutama pada kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum *rembugan*;
d. **Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa** dalam kehidupan, dengan komitmen sikap dan laku bagi pelaku pembangunan agar tidak korupsi, kolusi, nepotisme, bekerja berdasarkan kompetensi, objektivitas dan transparansi, menjunjung tinggi nilai gotong-royong dan harmonis, tanpa ego sektoral dan berorientasi *outcome*.

Adapun program pembangunan yang mendukung misi ini adalah :

a. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
c. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah;
d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
e. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah;
f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;
h. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
i. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH;
j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
k. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah;
l. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
m. Penataan Administrasi Kependudukan.

4. **Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan**

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada :

a. **Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa** sebagai landasan bagi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan penyelenggaraan/kualitas mata ajaran muatan lokal terutama budi pekerti; serta meningkatkan fungsi dan peran budi pekerti dalam kehidupan;

b. **Pendidikan Politik Masyarakat**, dengan penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik masyarakat, penerapan demokrasi yang lebih berkualitas dan berimplementasi pada kehidupan sosial politik masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai pluralisme, keadilan dan persamaan hak asasi manusia;
c. **Mewujudkan Desa Mandiri**, dengan kelengkapan pranata media informasi desa dan pola *rembugan*; menempatkan Trisakti Bung Karno sebagai ukuran obyektif dalam membangun relasi sosial di dalam masyarakat, meliputi : berdaulat dalam mengambil keputusan yang berarti independen, kemitraan dan *nguwongke,* mandiri dalam melaksanakan tugas, yang berarti kompeten, obyektif, rasional dan realistis, berkepribadian dalam membangun relasi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kelanggengan; menempatkan gotong royong sebagai nilai-nilai dasar yang diinternalisasikan sebagai ciri khas kepribadian masyarakat Jawa Tengah, *blokosuto, sembodo, nguwongke* dan *enthengan.*

Adapun program pembangunan yang mendukung misi ini adalah :

a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
b. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
d. Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat dan Rakyat Terlatih;
e. Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
f. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
g. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
h. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
i. Pendidikan Dasar;
j. Pendidikan Menengah;
k. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada :

a. **Menguatkan Sistem Pelayanan Publik**, dengan pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi yang mengedepankan keterbukaan sekaligus membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b. **Meningkatan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak**, dengan mendorong keberminatan perempuan dalam berpolitik dan partisipasi anak dalam pembangunan;
c. **Mewujudkan Desa Mandiri,** dengan menempatkan desa sebagai subyek yang menjadi basis sekaligus orientasi politik pembangunan serta memposisikan kota sebagai simpul jejaring kerja pembangunan penyangga kawasan perdesaan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui optimalisasi sumber daya secara ber-kelanjutan.

Adapun program pembangunan yang mendukung misi ini adalah :

a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pengembangan Wilayah Perbatasan;
c. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
d. Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;
e. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
f. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada :

a. **Rakyat Sehat**, dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh masyarakat;

b. **Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah**, dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; serta meningkatkan penyelenggaraan dan kualitas mata pelajaran muatan lokal;
c. **Menguatkan Sistem Pelayanan Publik**, dengan koordinasi, pembinaan, pengawasan untuk perbaikan kinerja dan sistem pelayanan publik, proses penyempurnaan kebijakan pelayanan publik inklusif dari hulu ke hilir, serta pelayanan perijinan;
d. **Mewujudkan Desa Mandiri,** dengan menginisiasi dan mendorong terbentuknya Desa Berdikari di setiap kabupaten/kota serta melakukan koordinasi dan pendampingan kepada kabupaten/kota yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap wilayah desa; bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai fasilitator untuk mendorong warga dan desa menggali kearifan lokal dalam budaya setempat serta mendorong penggunaan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam proses membangun desa berdikari;
e. **Pembangunan Infrastruktur,** dengan menyediakan prasarana dan sarana ekonomi, kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi untuk bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Adapun program pembangunan yang mendukung misi ini adalah :

a. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
b. Pelayanan Kesehatan;
c. Kesehatan Lingkungan;
d. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
e. Promosi dan Pemberdayaan;
f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
g. Pendidikan Dasar;
h. Pendidikan Menengah;
i. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
j. Pengembangan Budaya Baca;
k. Pelayanan Keluarga Berencana;
l. Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan;
m. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi;

n. Pembangunan Perumahan;
o. Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
p. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, serta Jaringan Pengairan Lainnya;
q. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada :

a. **Pembangunan Infrastruktur**, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang sesuai dan berdayaguna serta melakukan modernisasi sistem dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas; perbaikan dan pemeliharaan jalan/jembatan serta rancang bangun sistem transportasi yang terjangkau dan saling terintegrasi antar moda; standarisasi dan regulasi transportasi publik; perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi dalam rangka kedaulatan pangan dan penanggulangan bencana banjir/kekeringan; penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi (drainase, persampahan, dan air limbah) sistem regional;
b. **Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah *Ijo Royo-Royo***, dengan meningkatkan program penghijauan secara masif di lahan-lahan kritis; konservasi lingkungan dan penghijauan untuk menjamin kesinambungan lingkungan hidup serta meminimalisir bencana alam; mengembangkan Ruang Terbuka Hijau; menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan; konservasi ekosistem pesisir dan laut; menegakkan regulasi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota melalui penegakan hukum terutama pada alih fungsi lahan; serta mengembangkan manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi);
c. **Mewujudkan Desa Mandiri**, dengan menyediakan informasi produk desa (konsultasi, promosi, diskusi dan sebagainya) dalam suatu portal *database* yang dapat diakses dengan *website*, atau media lain yang terjangkau.

Adapun program pembangunan yang mendukung misi ini adalah :

a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan;
b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
d. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
e. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai ;
f. Pengembangan Perhubungan Darat;
g. Pengembangan Perhubungan Laut;
h. Pengembangan Perhubungan Udara;
i. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
j. Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR;
k. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
l. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
m. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

n. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
o. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
p. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
q. Perencanaan Tata Ruang;
r. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
s. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
t. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Guna melihat keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum, dan Program Pembangunan
Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
Misi 1 : Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan									
1	Meningkat-nya demokrati-sasi, Kesejahte-raan dan nilai - nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno	Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk ber-kontribusi dalam mengatasi permasalahan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi politik, konsultasi, koordinasi, komunikasi, demokratisasi, pemanfaatan potensi lokal, kerjasama dan kemitraan, serta memelihara nilai	Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai - nilai dasar Trisakti Bung Karno.	Persentase capaian sasaran pembangunan	-	100 %	Program percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah	1. Perenca-naan Pemba-ngunan 2. Otda, Pemerin-tahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepega-waian dan Persan-dian	Bappeda; Inspektorat; Biro Keuangan; Biro Adm Bangda.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		- nilai kearifan kebudayaan.							
Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran									
1	Menurunnya angka kemiskinan	a. Pengurangan beban pengeluaran dan meningkat-kan pendapatan masyarakat miskin; b. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar destinasi pariwisata.	a. Mengurangi penduduk miskin diprioritas - kan pada wilayah kabupaten/ kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah; b. Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengem-bangan desti-nasi wisata.	Persentase Angka Kemiskinan	14,44% (Sept, 2013)	7,80 – 7,60%	1. Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3. Penguatan Kelemba-gaan Masyarakat	Ketenaga-kerjaan, Pemberda-yaan Masyarakat	Disnakertrans-duk, Bapermas-des, Seluruh SKPD Pendukung
2	Menurunnya Penganggur-an	a. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja b. Perluasan dan pengem-bangan	Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02% (Agustus, 2013)	4,32 - 4,20%	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenaga-kerjaan	Disnakertrans-duk

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		kesempatan kerja c. Peningkatan perlindungan dan kese-jahteraan tenaga kerja					3. Perlindung-an dan Pengembang an Lembaga Ketenagaker-jaan		
3	Terjaminnya kedaulatan pangan me-lalui keter-sediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkau an, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehu-tanan b. Peningkatan akses masya-rakat terha-dap pangan c. Peningkatan diversifikasi dan konsum-si melalui sumberdaya lokal d. Perlindungan petani dan lahan per-tanian serta	1) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani di-dukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang berwa-wasan ling-kungan 2) Mengembang kan regulasi ketahanan pangan/ kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan per-tanian yang	a) Jumlah regulasi kedaulatan pangan b) Ketersediaan pangan utama (Ton Beras) c) Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah d) Persentase penguatan cadangan pangan e) Persentase penanganan daerah rawan pangan f) Skor Pola Pangan Harapan	a) 6 b) 5.701.257 c) 95 d) 60 e) 50 f) 90,00	a) 11 b) 5.816.198 c) 100 d) 100 e) 60 f) 92,23	1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Pengembang an Diversi-fikasi dan Pola Kon-sumsi Pangan 3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 4. Pengembang an Agribisnis 5. Pengembang an Perikanan Tangkap 6. Pengembang an Perikanan Budidaya 7. Pengembang an SDM dan	Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perencana-an Pem-bangunan	BKP, Dinas Pertanian & TPH, Disnakeswan, Disbun, Dislutkan, Balitbang.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		pengendalian alih fungsi lahan	didukung dengan reformasi agraria 3) Meningkat-kan keter-sediaan, distribusi, keterjangkau an, kualitas, keamanan pangan berbasis sumberdaya lokal dan penanganan rawan pangan, serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	g) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan h) Jumlah produksi padi (Juta Ton) i) Jumlah produksi tebu (Juta Ton) j) Jumlah produksi daging (Juta Kg) k) Produksi perikanan tangkap (Ton) l) Produksi perikanan budidaya (Ton) m) Tingkat konsumsi ikan (Kg/Kapita/ Tahun) n) Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian o) Jumlah desa inovatif	g) 80% h) 10,14 i) 5,02 j) 265,14 k) 286.797,18 l) 267.760,99 m) 17,82 n) 34,01 % o) 5	g) 80% h) 10,35 i) 5,548 j) 308,871 k) 339.638,91 l) 386.017,37 m) 22,59 n) 80 % o) 58	Penyuluhan Pertanian 8. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasa-ran Produksi Perikanan 9. Program Pengembang an IPTEK dan Inovasi Daerah		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
4	Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal	a. Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, energi alternatif dan peningkatan jaringan listrik perdesaan b. Peningkatan budaya hemat energi	1) Meningkat-kan peman-faatan potensi panas bumi, energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana dan tepat guna yang ramah lingkungan 2) Meningkat-kan pemba-ngunan jaringan listrik perdesaan 3) Meningkat-kan budaya hemat energi	a) Rasio Elektrifikasi b) Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi	a) 82,12 b) 6,1	a) 92,12 b) 10,2	1. Pengembang an Energi Baru Terba-rukan dan Konservasi Energi 2. Pengembang an Ketena-galistrikan dan Migas	Energi dan SDM	Dinas ESDM
5	Meningkat-nya jumlah dan kualitas daya saing dan produk-tivitas	a. Peningkatan fasilitasi pengembang an wira-usaha baru b. Peningkatan	1) Mengembang kan wira-usaha baru diarahkan pada usaha kreatif yang	a) Jumlah produk/komo-ditas OVOP b) Persentase koperasi sehat	a) 70 b) 15,02	a) 245 b) 19,50	1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 2. Peningkatan	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi & UMKM

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
	Koperasi dan UMKM	produktivitas dan kapasitas Koperasi dan UMKM	memiliki nilai tambah tinggi 2) Meningkat-kan kapa-sitas dan produktivitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) diarahkan pada fasili-tas akses modal kerja, pembimbing-an teknis dan pendam-pingan manajerial berbasis sumber daya lokal	c) Persentase koperasi aktif	c) 79,73	c) 82,50	Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha 3. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM 4. Pengembang an Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal 5. Pengembang an Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan		
6	Meningkat-nya kelemba-gaan ekonomi pedesaan	Pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan	Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan.	a) Jumlah UP2K yang aktif (unit) b) Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit) c) Jumlah pasar desa yang	a) 332 b) 119 c) 196	a) 200 b) 253 c) 461	Penguatan kelembagaan masyarakat	Pemberda-yaan masyarakat dan desa	Bapermasdes

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
				direvitalisasi (unit) d) Jumlah UED-SP yang aktif (unit)	d) 173	d) 553			
7	Meningkat-nya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	a. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/ kerjasama usaha serta mengembang kan keung-gulan lokal b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memi-liki keung-gulan kom-paratif dan kompetitif	1) Optimalisasi pengembang an akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster 2) Peningkatan kualitas, keberaga-man, produk-tivitas, dan promosi serta men-dorong penerapan standar mutu produk lokal 3) Membangun kesadaran bersama	a) Nilai Ekspor Non Migas b) Nilai Impor Non Migas	a) $4.063 Juta b) $5.186 Juta	a) $6.159 Juta b) $4.931 Juta	1. Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor 2. Peningkatan Logistik Dae-Rah, Akses Pasar Dalam Negeri Dan Pemberdaya-an UDKM 3. Pengembang an Industri Logam, Mesin, dan Tekstil 4. Pengembang an Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan 5. Pengembang an Industri Alat Transportasi,	Perdagang-an, Perin-dustrian	Dinperindag

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			untuk mengutama-kan penggu-naan produk dalam negeri				Elektronika dan Aneka		
8	Meningkat-nya realisasi investasi	Peningkatan iklim penana-man modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah.	Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global	a) Jumlah investor (PMA/PMDN) b) Nilai Investasi (PMA/PMDN)	a) 32 b) 3,088 T	a) 40 b) 3,846 T	1. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3. Penyiapan Potensi Sum-ber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Penanaman Modal	BPMD
9	Meningkat-nya keadilan gender dan perlindungan anak	a. Pengarusuta maan gender dan peng-arusutamaan hak anak b. Peningkatan kualitas hidup SDM serta pengu-atan perlin-dungan	1) Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA 2) Meningkat-kan kualitas hidup dan perlindu-ngan terha-dap perem-	a) Indeks Pembangunan Gender (IPG) b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) c) Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak	a) 66,80 (2012) b) 70,66 (2012) c) 48,6	a) 69,99 b) 71,99 c) 100	1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 2. Pelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan	Pemberda-yaan Perem-puan & Perlindun-gan Anak, Pendidikan, Kesehatan, Sosial	BP3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		terhadap perempuan dan anak	puan dan anak 3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking* 4) Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran 5) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional	d) APM SD/SDLB/MI/Paket A e) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B f) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B g) APK SMA/SMALB/MA/Paket C h) Persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4 i) Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan j) Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi pendidikan kemasyarakatan k) Jumlah kewirausahaan pemuda	d) 98,60% e) 100,52% f) 79,00% g) 70,00% h) 74,00 i) 286 desa j) 40.481 orang k) 380 org (80 Kelompok)	d) 100% e) 100,60% f) 80,00% g) 80,00% h) 80,00 i) 461 desa vokasi j) 195.500 orang k) 3310 org (430 Kelompok)	Anak 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Pelayanan Keluarga Berencana 5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 6. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 7. Pelayanan Kesehatan 8. Kesehatan Lingkungan 9. Sumber Daya Manusia Kesehatan 10. Promosi dan Pemberdayaan 11. Manajemen, Informasi dan Regulasi		
10	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus								
11	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan							
12	Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat	Peningkatan kualitas dan keterampilan masyarakat							

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah; 6) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik; 7) Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat.				Kesehatan 12. Pendidikan Dasar 13. Pendidikan Menengah 14. Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal 15. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 16. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		
13	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh	Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan	18.075 orang	173.355 orang (Akumulasi s.d. 2018)	1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Pemberdayaan Kelembagaan Kese-		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
	pelayanan dan reha-bilitasi yang berperspektif HAM	Sosial (PMKS)	Sosial (PSKS)				jahteraan Sosial 3. Pemberda-yaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpen-cil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahte-raan Sosial (PMKS) lainnya		
Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, *"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"*									
1	Meningkat-nya profesi-onalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas	a. Meningkat-kan kapasi-tas dan integritas SDM Aparatur; b. Keterbukaan sistem karier kepegawaian	Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kom-peten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pem-binaan karier yang terbuka	a) *Indonesia Governance Index* (IGI) b) Promosi Jabatan secara struktural terbuka c) Persentase Indeks Demo-krasi Indonesia	a) 5,90 b) Promosi terbuka untuk eselon I, III dan IV c) 66,85	a) 6,00 b) Promosi terbuka eselon I,II, III, IV c) 70,00	1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2. Penyelengga-raan Kepega-waian dan Perangkat Daerah 3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintah an Umum, Administra-si Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai-an dan Persandian	BKD, Inspektorat, Setda, Satpol PP, Badan Diklat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
2	Meningkat-nya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelengga-raan pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	1) Memprioritas kan peru-bahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik 2) Meningkat-kan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi	a) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM b) Persentase sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI	a) 9 UPP b) 100	a) 19 UPP b) 100	1. Peningkatan Profesionalis-me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Penyeleng-garaan Pemerintahan Umum 3. Peningkatan kerjasama Pemerintah Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintah an Umum, Administra-si Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai-an dan Persandian	Inspektorat, Setda
3	Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	a. Pengembang an sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi b. Penyediaan prasarana sarana	1) Meningkat-kan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepas-tian serta transparansi proses perizinan	Persentase pelaya-nan perizinan dan non perizinan melalui PTSP	100%	100%	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Otonomi Daerah, Pemerintah an Umum, Administra-si Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai-an dan	Setda, BPMD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		penunjang pelayanan publik c. Peningkatan kapasitas SDM penye-lenggara PTSP	2) Meningkat-kan investasi pada seluruh kabupaten/ kota					Persandian, Penanaman Modal	
4	Terwujudnya tertib administrasi kependu-dukan	Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil	a) Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP (%) b) Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran c) Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK	a) 85,17 b) 31,49 c) 35	a) 100 b) 80 c) 35	Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudu kan dan Catatan Sipil	Dinas Naker-transduk
5	Terwujudnya Penyelengga-raan Peme-rintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	a. Implementasi Aksi Pence-gahan dan Pemberantas an Korupsi (PPK) di provinsi dan seluruh kabupaten/ kota	1) Implementasi aksi difokus-kan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan peng-anggaran,	d) Implementasi Aksi PPK e) Opini BPK (WTP)	d) Provinsi, Kabupaten Pemalang, Kota Semarang e) Provinsi dan 10 ka-bupaten/ kota	d) Provinsi dan 35 ka-bupaten/ kota e) Provinsi dan 35 ka-bupaten/ kota	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Peningkatan dan Pengem-bangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintah an Umum, Administra-si Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai-	BKD, Inspektorat, Satpol PP, Setda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	b. Peningkatan manajemen administrasi keuangan dan aset c. Integrasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD Provinsi	serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 3) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis Teknologi Informasi	f) Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	f) 2 SKPD Provinsi	f) 59 SKPD (Seluruh SKPD Provinsi)	3. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	an dan Persandian	
	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)								

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
6	Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan	a. Optimalisasi pelaksanaan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan b. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah	1) Optimalisasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah (perda) 2) Penanganan pelanggar peraturan perundang-undangan daerah melalui tindakan-tindakan preventif dan represif	a) Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang disusun b) Persentase penindakan pelanggaran perda	a) 17 Perda b) 100%	a) 77 Perda b) 100%	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum, Satpol PP
Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan									
1	Tertanganinya konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Optimalisasi peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah	Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Komin-	Persentase penanganan konflik sosial	75%	100%	1. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 2. Peningkatan Kemampuan Perlindu-	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pendidikan, Kebudayaan	Bakesbangpoldagri, Dinas Pendidikan, Dinas Budpar, Satpol PP

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			da), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik				ngan Masyarakat dan Rakyat Terlatih 3. Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		
2	Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa	Perluasan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di lingkungan pendidikan formal maupun non formal	Meningkatnya peran masyarakat/sikap toleransi dan gotong royong	Meningkat	Meningkat	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
3	Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik								

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
4	Meningkat-nya partisi-pasi politik masyarakat	a. Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal b. Penguatan kapasitas kader partai politik dan relawan organisasi masyarakat c. Mendorong tindakan afirmatif melalui perumusan kebijakan dan pening-katan kapa-sitas perem-puan di bidang politik	1) Meningkat-kan pendi-dikan politik masyarakat pada kelom-pok pemilih pemula dan masyarakat berpendidik-an rendah 2) Meningkat-kan kapa-sitas kader partai politik dan relawan ormas yang terdaftar 3) Meningkat-kan komit-men politik dan kapa-sitas perem-puan di bidang politik	Persentase penggunaan hak pilih dalam Pemilu : • Pilgub dan Wagub 2018 • Pilpres 2014 • Pilleg 2014 • Pilkada Kab/kota 2017	58,46% 71,01% (2009) 71,26% 64,40%	75% 75% 75% 75%	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat		
5	Meningkat-nya peran partai politik dan organi-sasi masya-rakat dalam proses demokrasi								
6	Meningkat-nya keterwa-kilan perem-puan di dalam politik			Persentase keterwakilan politik perempuan di Lembaga Parlemen	Provinsi : 21%	Provinsi : 30%	Keserasian Kebijakan PKHPA		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
7	Meningkat-nya pemaha-man masya-rakat atas budaya Jawa	Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Jawa melalui lembaga pendidikan, penyelenggaraan *event* tertentu dan penggunaan atribut-atribut Jawa dalam kegiatan formal	1) Meningkat-kan pendi-dikan karak-ter dan budaya sejak dini 2) Meningkat-kan pelesta-rian dan pengembang an seni dan budaya	a) Persentase pene-rapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyeleng-garaan Misi Kesenian) b) Persentase dan jumlah lokasi pelestarian cagar budaya c) Penerapan kurikulum pelajaran budaya Jawa pada jenjang pendidikan	a) 100% b) 2,01% (4 lokasi) c) 100%	a) 100% b) 2,5% (5 lokasi) c) 100%	1. Pendidikan Dasar, 2. Pendidikan Menengah 3. Pelestarian dan Pengem-bangan Kesenian dan Cagar Budaya		
8	Meningkat-nya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhu-ran budaya Jawa								
9	Meningkat-nya pelaksa-naan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat								

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
Misi 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak									
1	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	a. Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan b. Peningkatan partisipasi dan fungsi kontrol masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha c. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum *rembug* masyarakat	1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum *rembug* 2) Publikasi kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa 3) Meningkatkan partisipasi aktif anak dalam pembangunan yang responsif anak	Persentase pelaksanaan *rembug* masyarakat dalam pengambilan keputusan	100	100	1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 3. Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 4. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 5. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bappeda, BP3AKB

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
2	Berkurang-nya kesenja-ngan pemba-ngunan antar wilayah	a. Peningkatan pemerataan pembangun-an daerah b. Peningkatan fungsi pengawasan pembangun-an c. Meningkat-kan peran Perguruan Tinggi sebagai mitra pembangun-an	1) Meningkat-kan peme-rataan pem-bangunan dengan pendekatan kewilayahan 2) Meningkat-kan keter-libatan aktif masyarakat dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan penga-wasan 3) Peningkatan pemanfaatan hasil pene-litian Pergu-ruan Tinggi di Jawa Tengah	a) Indeks Gini b) Indeks Williamson	a) 0,352 b) 0,7023	a) 0,337 b) 0,6986	Pengembangan Wilayah Perbatasan		
3	Meningkat-nya ketepat-an waktu dan mutu pelak-sanaan pem-bangunan daerah								
Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat									
1	Menurunnya angka kema-tian dan angka kesakitan	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan	Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar	a) Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH b) Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	a) 118,62 b) 10,41	a) 116,00 b) 11	1. Pencegahan dan Penang-gulangan Penyakit 2. Pelayanan Kesehatan	Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana dan Keluarga	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BP3AKB, Dinas PSDA, Dinas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan	dan rujukan serta pemerataan tenaga medis	c) Angka Kematian Balita (AKABA)/1000 KH d) Angka Kematian DBD (%) e) Angka Kesakitan *DBD (Per100.000 pddk)* f) Angka penemuan kasus HIV/AIDS, TB paru g) Angka Kesakitan Malaria h) Angka Prevalensi Gizi Buruk i) Persentase*Drop Out* Keluarga Berencana j) Persentase*Unmet Need* k) Persentase (CPR)	c) 11,80 d) <1,2 e) 45,52 f) HIV/AIDS: 20%; TB paru: 115 g) 0,06 h) 0,08 i) 15,09% j) 10,26% k) 76%	c) 11 d) <1 e) <20 f) HIV/AIDS: 13%; TB paru: 122 g) 0,06 h) 0,04 i) 13,50% j) 9% k) 80%	3. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 4. Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 5. Kesehatan Lingkungan 6. Pelayanan Keluarga Berencana	Sejahtera, Pekerjaan Umum, Perumahan, Pemberdayaan Masyarakat	Cipkataru, Bapermasdes
2	Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/ *Contraceptive Prevalance Rate* (CPR)	Optimalisasi pelayanan KB							
3	Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;	1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak	a) Angka rata-rata lama sekolah b) APK PAUD/TK c) APK SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B	a) 7,39 (2012) b) 70,55 c) 100,52	a) 8,17 b) 80 c) 100,60	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Menengah		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 3) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;	d) APK SMA/ SMALB/MA/ Paket C e) APM SD/SDLB/ MI/Paket A f) APM SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B	d) 70,00 e) 98,60 f) 79,00	d) 80,00 e) 100 f) 80,00	4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
4	Meningkatnya kualitas pendidikan			a) Angka Kelulusan SD/ SDLB /MI b) Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/ MTs c) Angka Kelulusan SMA/ SMALB/MA d) Persentase ruang kelas SD/ SDLB/MI sesuai SNP e) Persentase ruang kelas SMP/ SMPLB/ MTs sesuai SNP f) Persentase ruang kelas SMA/ SMALB/ MA/SMK sesuai SNP	a) 99,95 b) 99,17 c) 99,92 d) 61,53 e) 78,06 f) 80,50 (2013)	a) 99,98 b) 99,25 c) 99,99 d) 70,50 e) 80,75 f) 90,00			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
				g) Persentase SD/SDLB/MI yang terakre-ditasi h) Persentase SMP/SMPLB/ MTs yang terakreditasi i) Persentase SMA/ SMALB/MA/SMK yang terakre-ditasi j) Persentase Pendidik berkualifikasi S1/D4	g) 100 h) 100 i) 100 j) 74	g) 100 h) 100 i) 100 j) 80			
7	Meningkat-nya Budaya Baca Masyarakat	Peningkatan budaya baca masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan	1) Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun 2) Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi 3) Jumlah perpus-takaan desa yang memenuhi stan-dar perpustakaan	732.050 203.126 781	934.302 259.246 1.131	1. Program Pengembang-an Budaya Baca 2. Program Pengembang-an Sarana dan Prasarana Perpustakaan 3. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan		Badan Arpus

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
8	Meningkat-nya pemenu-han kebutu-han air minum, sanitasi, perumahan layak huni	1. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan lingkungan permukiman 2. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan	1) Meningkat-kan kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan ling-kungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasil an rendah 2) Meningkat-kan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional)	a) Persentase cakupan layanan air minum perkotaan b) Persentase cakupan layanan air minum perdesaan c) Persentase cakupan layanan sanitasi d) Rasio rumah layak huni e) Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	a) 63,99 b) 49,13 c) 64,50 d) 76,67 e) 7,80	a) 78,00 b) 59,00 c) 76,00 d) 76,77 e) 21,02	1. Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan 2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 3. Pembangu-nan Peruma-han 4. Pemberdaya-an Komuni-tas Peruma-han		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
9	Meningkat-nya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	Peningkatan dan pengem-bangan kondisi prasarana dan sarana ketersedi-aan air baku serta kondisi jaringan irigasi dan untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian dan air minum	1) Meningkat-kan kualitas dan kapa-sitas prasa-rana dan sarana jaringan irigasi serta pengembang-an tam-pungan air baku secara berkelanjut-an 2) Meningkat-kan kerja-sama dalam pengembang-an dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku ber-basis pem-berdayaan.	a) Persentase kondisi jaringan irigasi baik b) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	a) 72% b) 50,12%	a) 82% b) 60%	1. Pengembang an dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan									
1	Meningkat-nya kinerja penanganan jalan dan jembatan	a. Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan b. Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan c. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamarga an serta kapasitas SDM	1) Meningkat-kan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan peme-liharaan ber-kala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupa-yakan pe-ningkatan peran serta masyarakat dalam peme-liharaan jln 2) Meningkat-kan pena-nganan pada ruas jalan dan jem-batan uta-manya untuk mendukung pembangun-an sosial,	a) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik b) Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m c) Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	a) 86,54% b) 50,44% c) 67,62%	a) 89,60% b) 77,87% c) 82,30%	1. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 2. Rehabilitasi/ Pemelihara-an Jalan dan Jembatan 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamarga an	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura - Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya) 3) Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan jembat-						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			an dan SDM teknis kebi-namargaan serta pe-ngembangan sistem infor-masi mana-jemen dan publik						
2	Meningkat-nya ketersedi-aan dan kondisi moda yang ramah lingkungan serta kese-lamatan transportasi	a. Peningkatan sarana prasarana dan pengembang an antar moda serta keselamatan transportasi publik b. Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi	Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan mas-sal *(mass rapid transport*) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan	a) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengembangan angkutan umum dan massal b) Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan perdesaan c) Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi d) Lokasi ketersediaan prasarana keselamatan perlintasan KA	a) 1 kab, 1 kota b) – c) 18,71 % d) 43 lokasi	a) 1 kab, 2 kota b) 4 desa c) 73,00 % d) 152 lokasi	Pengembangan Perhubungan Darat	Perhubung-an	Dinas Hubkominfo

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota	di jalan provinsi					
3	Meningkat-nya pena-nganan banjir dan pantai kritis	Peningkatan prasarana sarana pengen-dalian banjir dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal	Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir	167.000 ha (100%)	142.000 ha (85%)	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
4	Meningkat-nya kondisi dan keter-sediaan in-frastruktur dan trans-portasi strategis dan peran serta masyarakat	Peningkatan kerjasama dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur dan transportasi strategis untuk percepatan penanganan kebutuhan dan masyarakat	1) Meningkat-kan koordi-nasi, integra-si, sinkroni-sasi dan fasi-litasi dalam pengembang an, penye-diaan dan penanganan infrastruktur strategis (Jalan Tol,	Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis.	100%	100%	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamarga an 2. Pengembang an, Pengelo-laan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA Lainnya	Pekerjaan Umum; Perhubung-an	Dinas Bina Marga, Dinas PSDA, Dinas Cipkataru, Dinas Hubkominfo, Bappeda.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			Jalan strategis pendukung perekonomian, Waduk/ Embung, pengendalian daya rusak air); transportasi (Bandar udara, Pelabuhan, Terminal, Kereta Api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/ kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura				3. Pengembangan Perhubungan Darat 4. Pengembangan Perhubungan Laut 5. Pengembangan Perhubungan Udara		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			2) Meningkat-kan upaya dukungan pembiayaan dan pena-nganan dari pemerintah dan kerjasama pemerintah dan swasta / *Public Private Parthnership*, CSR serta mengupayak an dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/ kota dan desa						
5	Meningkat-nya kualitas pengelolaan teknologi informasi	Peningkatan penggunaan teknologi informasi	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemerintahan	Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	35 SKPD	59 SKPD	1. Pengemba-ngan Komu-nikasi, Infor-masi Dan Media Massa		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			yang akuntabel dan transparan				2. Pos, Teleko-munikasi, Meteorologi dan SAR		
6	Terwujudnya pembangun-an berwawa-san lingkung-an yang mengantisi-pasi dampak perubahan iklim	a. Peningkatan penyelengga-raan pena-taan ruang berbasis DAS b. Peningkatan Ruang Ter-buka Hijau (RTH) c. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir d. Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	1) Meningkat-kan peman-faatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2) Meningkat-kan pema-haman dan kesadaran para pihak terhadap arti pentingnya fungsi dan manfaat penataan ruang sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda 3) Meningkat-kan pengelolaan	a) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang denga RTRW b) Persentase informasi status mutu air c) Persentase informasi status mutu udara ambien d) Persentase pengaduan akibat dugaan pecemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti e) Jumlah luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan f) Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	a) 62 b) 100 c) 100 d) 100 e) 70 ha f) 5%	a) 70 b) 100 c) 100 d) 100 e) 200 ha f) 30%	1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfaatan dan Pengen-dalian Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan 7. Perlindung-an dan Konservasi Sumber		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			dan sebaran RTH 4) Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat 5) Meningkatkan rehabilitasi, konservasi, dan pengendalian kerusakan lingkungan	g) Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan h) Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB i) Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang j) Penanaman Mangrove	g) 8.959 ha h) 0,53% i) 6% j) 8,08 ha	g) 50.000 ha h) 0,93% i) 50% j) 40,75 ha	Daya Alam 8. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 9. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 10. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	a. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan	Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi - rekonstruksi)	a) Jumlah BPBD kabupaten/kota berdasar Perda b) Jumlah Desa Tangguh Bencana	a) 28 BPBD b) 25 desa	a) 35 BPBD b) 35 desa	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
		masyarakat b. Meningkat-kan koor-dinasi antar *stakeholder* dalam penanggulan gan bencana							

7.3. Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan (regionalisasi) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek homogenitas, nodalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukowonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Cakupan wilayah, potensi dan arah pengembangan pada setiap wilayah tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.1.

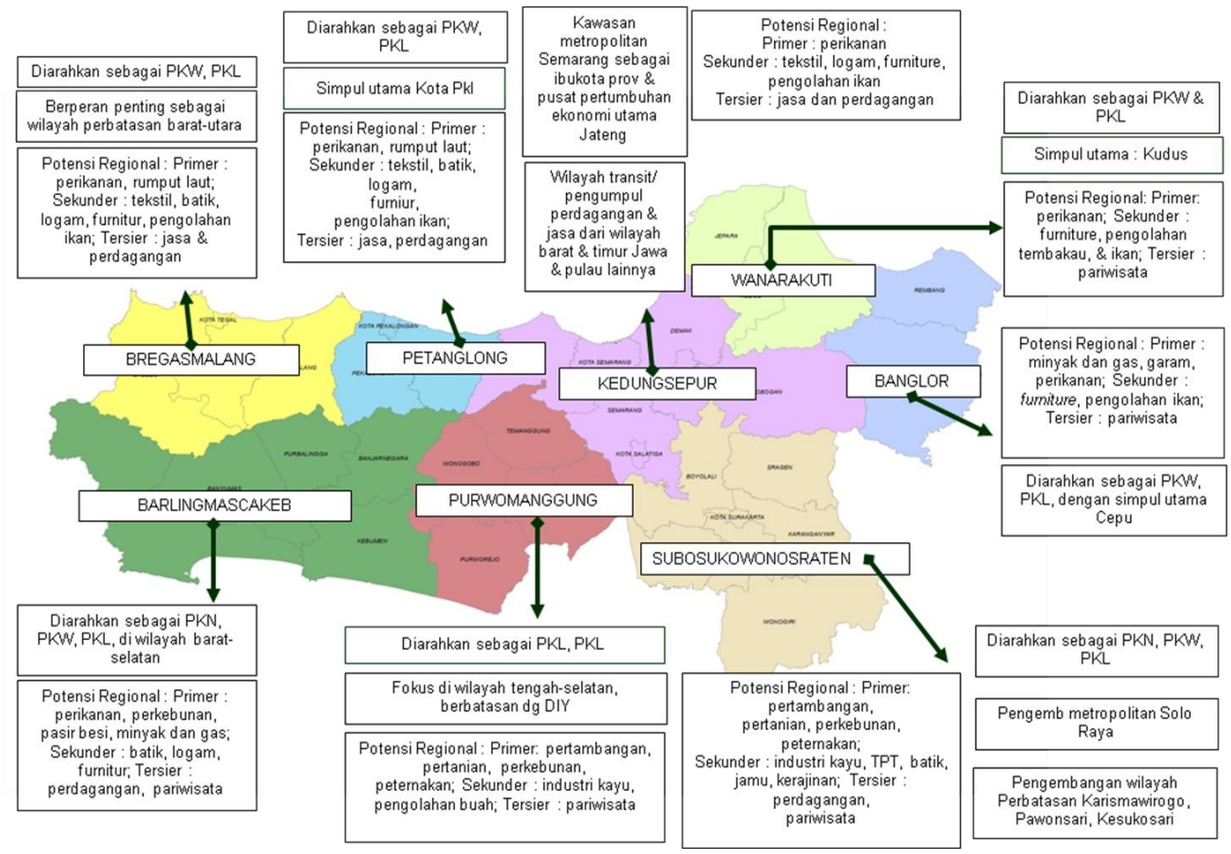

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Gambar 7.1. Peta Potensi 8 Wilayah Pengembangan

1. Kedungsepur

Wilayah pengembangan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Fungsi wilayah diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebagai PKN, arah pengembangan wilayah adalah pada: (1) perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; (2) pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; (3) perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; (4) dan perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan

Kedungsepur adalah : (1) primer berupa perikanan; (2) sekunder berupa tekstil, logam, *furniture*, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

a. Kabupaten Kendal : industri unggulan garmen, tas, alas kaki; klaster jambu biji getas merah dan pisang raja bulu; serta destinasi wisata Curug Sewu dan Pantai Sendang Sikucing;
b. Kota Semarang : industri unggulan batik, tas, alas kaki; klaster bandeng, batik semarangan, olahan pangan, *handycraft;* serta destinasi wisata Sam Pho Kong, Maerokoco, Pantai Kota Semarang, Kota Lama, Pecinan Kota Semarang, dan Lawang Sewu;
c. Kabupaten Demak : industri unggulan garmen, garam, ikan olahan; kawasan agropolitan Kota Tani Utama di Kecamatan Wonosalam, dengan komoditas unggulan jambu delima, jambu citra, kacang hijau, belimbing demak, domba dan kelinci; klaster hortikultura, jambu lele (bule), batik sisik, konveksi pakaian dalam, pengasapan ikan, kerupuk; serta destinasi wisata Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijogo;
d. Kabupaten Semarang : industri unggulan eceng gondok, pupuk organik; kawasan agropolitan Sub Terminal Agribisnis (STA) Candigaron di Kecamatan Sumowono, dengan komoditas unggulan kopi; klaster gula kelapa, padi organik, aksesoris kain perca, bio farmaka, tanaman hias, industri logam, kopi gunung kelir, kerajinan lidi, batik gemawang, susu sapi, eceng gondok, tahu serasi; serta destinasi wisata Bandungan, Candi Gedong Songo, Museum Kereta Api Ambarawa, Rawapening, Umbul Sidomukti, dan Air Terjun Semirang;
e. Kota Salatiga : industri unggulan makanan, batik; serta klaster kelinci, pupuk cair organik, sapi, makanan olahan, susu, batik dan bordir;
f. Kabupaten Grobogan : industri unggulan genteng, jagung, mebel; klaster genteng, kerajinan bambu, jagung, pupuk organik; serta destinasi wisata Bledug Kuwu, sumber api abadi Mrapen, Makam Kyai Ageng Selo, Kyai Tarub dan Bulan Kejawen.

2. Wanarakuti

Wilayah pengembangan Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, diarahkan sebagai PKW dan PKL. Simpul utama berada di kawasan perkotaan Kudus, didukung oleh perkotaan Jepara, Pecangaan, Tayu, Pati dan Juwana. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, industri, pertambangan dan perikanan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Wanarakuti adalah potensi: (1) primer berupa perikanan; (2) sekunder meliputi *furniture*, pengolahan tembakau, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

a. Kabupaten Jepara : industri unggulan tenun dan mebel; klaster tenun troso, mebel, kacang tanah, pariwisata; serta destinasi wisata Karimun-jawa, Pantai Kartini, Bandengan dan Pulau Panjang;
b. Kabupaten Kudus : industri unggulan bordir, gebyok, makanan; klaster gebyok rumah adat, pariwisata, bordir, genteng dan batu bata; serta destinasi wisata Air Terjun Montel, Wana Wisata Rahtawu, Rejanu Air Tiga

Rasa, Situs Purba Pati Ayam, Makam Sunan Muria di Colo, Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus, Museum Kretek;

c. Kabupaten Pati : industri unggulan tapioka, batik, kuningan; Agropolitan, Minapolitan TPI Bajo Mulyo I dan Bajo Mulyo II di Kecamatan Juwana, dengan komoditas unggulan cumi, kakap merah, pindang, jeruk pamelo dan kelapa kopyor; klaster tapioka, pengolahan hasil laut, kerajinan kuningan, konveksi, buah-buahan, budidaya bandeng air tawar, kopi, sutera alam, makanan ringan, batik tulis bakaran, *handycraft*, kapuk; serta destinasi wisata Waduk Gunungrowo, Kebon Kopi Jolong, Goa Pancur dan Wareh.

3. Subosukowonosraten

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Wilayah tersebut sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya yaitu Kartasura, Sukoharjo, Ngemplak, Mojosongo, Colomadu, Karanganyar, Jaten, dan Sragen. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari Boyolali dan Klaten, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Wonogiri dan Boyolali (Ampel).

Pengembangan wilayah diarahkan untuk pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di wilayah bagian timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah bagian selatan-barat, dikenal dengan nama Karismawirogo (Karanganyar–Sragen–Magetan–Ngawi–Ponorogo), Pawonsari (Pacitan–Wonogiri–Wonosari/Gunung Kidul) dan Kesukosari (Klaten–Sukoharjo–Wonosari/Gunung Kidul). Sektor unggulan wilayah Subosukowonosraten adalah pariwisata, industri dan pertanian. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Subosukowonosraten adalah potensi: (1) primer meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, Tekstil Produk Tekstil, batik, jamu, kerajinan; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

a. Kota Surakarta : industri unggulan batik, mebel; klaster limbah koran, Kampoeng Batik Laweyan, Kampung Wisata Batik Kauman, sangkar burung, *shuttlecock*, mebel; serta destinasi wisata Taman Satwataru Jurug;
b. Kabupaten Boyolali : industri unggulan tembaga, pupuk organik; agropolitan Goasebo, STA Ampel di Kecamatan Ampel, dengan komoditas unggulan pepaya, salak, jahe, kobis, bunga kol, wortel, tomat dan cabe; minapolitan kampung lele di Kecamatan Banyudono, Sawit dan Teras dengan komoditas unggulan utama ikan lele, didukung ikan mas dan nila; klaster logam Tumang; serta destinasi wisata kawasan unggulan wisata Solo-Selo-Borobudur;
c. Kabupaten Sukoharjo : industri unggulan batu mulia, mete; klaster pertanian organik, sapi, tahu dan makanan olahan, jamur, mebel, rotan trangsan, lurik, batik; dan destinasi Desa Wisata Wirun;
d. Kabupaten Karanganyar : industri unggulan atsiri, konveksi; agropolitan Suthomadansih, STA Watusambang di Kecamatan Matesih, dengan komoditas unggulan wortel, bawang putih, kentang, tanaman obat-obatan/biofarmaka, sayuran, duku, salak lawu, durian, pisang,

strawberry, tanaman hias, ketela rambat, ikan dan tomat; klaster Kelompok Tani Blumbang, batik, biofarmaka; serta destinasi wisata Candi Sukuh, Candi Cetho, Air Terjun Grojogan Sewu dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I;

e. Kabupaten Wonogiri : industri unggulan batu mulia, mete; klaster : mebel, tanaman obat, mete, genteng, ketela pohon, ternak; serta destinasi wisata Waduk Gajah Mungkur dan Pantai Sembukan;
f. Kabupaten Sragen : industri unggulan batik, mebel; klaster mebel, alat rumah tangga, konveksi, batik, ikan, sapi brangus, padi organik; serta destinasi wisata budaya Sangiran dan Gunung Kemukus;
g. Kabupaten Klaten : industri unggulan logam, mebel, tenun; minapolitan di Kecamatan Tulung, Polanharjo dan Karanganom dengan komoditas ikan nila; klaster lereng merapi, lurik, keramik, makanan olahan, konveksi, bordir, sulam, batik, logam ceper; serta destinasi wisata Candi Prambanan dan Plaosan, Rowo Jombor, serta Deles Indah.

4. Bregasmalang

Wilayah pengembangan Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, yang diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL yang berperan penting di wilayah perbatasan barat-utara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Fokus pengembangan wilayah ini adalah pada pengembangan simpul-simpul pusat pertumbuhan koridor perkotaan Brebes-Tegal-Adiwerna-Slawi, perkotaan Pemalang dan sekitarnya, perkotaan Comal, perkotaan Ketanggungan-Kersana, serta perkotaan Bumiayu dan sekitarnya. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perikanan, industri, pertanian, agroindustri, pariwisata ditunjang oleh kehutanan dan energi. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Bregasmalang adalah : (1) primer meliputi perikanan dan rumput laut; (2) sekunder terdiri dari tekstil, batik, logam, *furniture*, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

a. Kabupaten Brebes : industri unggulan telur asin, keramik, batik, rebana; agropolitan Jalabaritangkas, STA Larangan di Kecamatan Larangan, dengan komoditas unggulan bawang merah dan cabe merah; klaster telur asin, bawang merah, rebana, agrowisata, rumput laut; serta destinasi wisata Waduk Malahayu;
b. Kota Tegal : industri unggulan *shuttlecock*; minapolitan di Kecamatan Tegal Timur, Tegal Barat, Margadana, dengan komoditas ikan bandeng dan udang; klaster itik dan batik; serta destinasi wisata Pantai Alam Indah;
c. Kabupaten Tegal : industri unggulan komponen mesin dan perkapalan; klaster batik, mesin, hortikultura, *shuttlecock*, padi organik; serta destinasi wisata Guci dan Purwahamba;
d. Kabupaten Pemalang : industri unggulan pakaian jadi/garmen; agropolitan Waliksarimadu, STA Belik di Kecamatan Belik, dengan komoditas unggulan cabe, tomat, paprika, kentang, nanas, sawi, kobis, alpokat, manggis, *strawberry*, durian, nilam, ayam potong, ayam ras pedaging; minapolitan di Kecamatan Ulujami, dengan komoditas kepiting soka, ikan bandeng dan udang; klaster : konveksi dan desa wisata; serta destinasi wisata Pantai Widuri dan Agropolitan.

5. Petanglong

Wilayah Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, yang diarahkan sebagai PKW dan PKL dengan simpul utama pada kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Petanglong adalah potensi: (1) primer berupa perikanan dan rumput laut; (2) sekunder meliputi tekstil, batik, logam, *furniture*, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

a. Kabupaten Pekalongan : industri unggulan kopi olahan, batik, tenun; agropolitan dengan Kota Tani Utama di Kecamatan Doro, dengan komoditas unggulan rambutan, teh, durian, jambu biji, sapi, domba; klaster melon, batik simbangkulon, kebalong, tenun dan konveksi, getah pinus, kerajinan bambu, jamur tiram; dan destinasi wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri.
b. Kabupaten Batang : industri garmen dan mebel; agropolitan Sorbanwali, STA Limpung di Kecamatan Limpung, dengan komoditas unggulan bawang daun, cabai rawit, kentang, durian, jagung, teh, kopi, nilam, sapi simental, perikanan air tawar, madu, kerupuk, teh rakyat; klaster emping mlinjo, minyak atsiri, perikanan, pariwisata argo binangkit, batik, kerajinan kulit; galangan kapal; serta destinasi wisata Agro Pagilaran, Pantai Sigandu dan Ujungnegoro;
c. Kota Pekalongan : industri unggulan batik, tenun, galangan kapal; serta klaster perikanan, percetakan kain, pakaian jadi dan tekstil, canting batik cap dan tulis, tempe, perbengkelan dan logam, tenun ATBM dan batik; minapolitan; serta destinasi wisata Pantai Pasir Kencana dan Slamaran.

6. Barlingmascakeb

Wilayah Barlingmascakeb meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Fokus pengembangan wilayah diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Kota-kota utama di wilayah ini yaitu Purwokerto, Cilacap, Ajibarang, Wangon, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Bobotsari, Purworejo Klampok, Adipala, Buntu, Maos, Kroya, Majenang, Gombong, Karanganyar, dan Kebumen. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Barlingmascakeb adalah: (1) primer berupa perikanan, perkebunan, pasir besi, minyak dan gas; (2) sekunder berupa batik, logam, *furniture*; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

a. Kabupaten Banjarnegara : industri unggulan batik, keramik; agropolitan Jakabaya, STA Batur di Kecamatan Batur dengan komoditas sayuran; klaster pariwisata Dieng, keramik Klampok, olahan makanan Barasnack, batik Gumelem; serta destinasi wisata Dieng dan Seruling Mas;
b. Kabupaten Purbalingga : industri unggulan knalpot, gula kelapa; agropolitan Bunga Kondang, STA Kejajar di Kecamatan Bukateja dengan

komoditas unggulan kelapa, lada, kayu hutan, jeruk, melati gambir, durian, pisang, duku, jagung, padi, kacang tanah, ketela pohon dan kambing; klaster agrowisata Derang, batik, knalpot, dan sapu; serta destinasi wisata Goa Lawa dan Owabong;

c. Kabupaten Banyumas : industri unggulan minyak nilam, batik; minapolitan di Kecamatan Kedungbanteng, dengan komoditas unggulan gurami; klaster gula kelapa, minyak atsiri, batik; serta destinasi wisata Kawasan Baturraden;
d. Kabupaten Cilacap : industri unggulan sabut kelapa, ikan, gula; agropolitan dengan Kota Tani Utama di Kecamatan Majenang, dengan komoditas unggulan pisang, sukun, karet, sapi dan kambing; klaster makanan olahan hasil laut, olahan makanan, sabutret, batik; serta destinasi wisata Nusakambangan, Pantai Teluk Penyu dan Benteng Pendem;
e. Kabupaten Kebumen : industri unggulan sabut kelapa, makanan; klaster anyaman pandan, sabut kelapa, batik; serta destinasi wisata Gua Jatijajar, Gua Petruk, Waduk Sempor, Pantai Karangbolong, Logending, Suwuk, dan Wisata Geologi Karangsambung.

7. Purwomanggung

Wilayah Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, berfungsi sebagai PKW dan PKL di bagian tengah dan selatan Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, didukung oleh sektor perkebunan, dan peternakan. Simpul utama sebagai penggerak ekonomi adalah Kota Magelang dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan berskala nasional, didukung oleh koridor perkotaan Magelang-Mungkid-Borobudur-Muntilan-Salam, koridor perkotaan Purworejo-Kutoarjo, koridor perkotaan Temanggung-Parakan, Wonosobo, Kertek, dan Wadas Lintang. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Purwomanggung adalah: (1) primer berupa pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan; (2) sekunder berupa industri kayu dan pengolahan buah; dan (3) tersier berupa pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

a. Kabupaten Purworejo : industri unggulan mebel, bambu, gula kelapa; Agropolitan Bagelen, STA Krendetan di Kecamatan Bagelen, dengan komoditas unggulan kambing Etawa, buah-buahan, padi; klaster gula kelapa, kambing Etawa Kaligesing, jagung; serta destinasi wisata Gua Seplawan, Pantai Jatimalang dan Ketawang;
b. Kabupaten Wonosobo : industri unggulan gula kelapa, pupuk organik; Agropolitan Rojonoto, STA Sempol di Kecamatan Sukoharjo, dengan komoditas unggulan salak, jagung, durian, kelapa dan kambing; klaster carica, wisata Desa Reco, domba; dan destinasi wisata Dieng;
c. Kabupaten Magelang : industri unggulan batu pahat, karoseri; Agropolitan Merapi Merbabu, STA Sewukan di Kecamatan Dukun, dengan komoditas unggulan cabai, tomat, kobis, buncis perancis, jeruk manis, klengkeng, duku, jagung, ketela pohon, ketela rambat, sapi, bunga potong, produk olahan, dendeng abon, kripik nangka, durian; klaster pariwisata

Borobudur, pahat batu, slondok, salak nglumut; serta destinasi wisata yaitu kawasan wisata Candi Borobudur, Mendut, Pawon dan Ketep Pass;

d. Kota Magelang : industri unggulan makanan; klaster pengolahan makanan ringan, kerajinan, batik, konveksi; dan destinasi wisata Taman Kyai Langgeng;
e. Kabupaten Temanggung : industri unggulan kopi, tenun; STA Soropadan, Agropolitan Kota Tani Utama, STA Kranggan di Kecamatan Kranggan, dengan komoditas unggulan kopi dan durian; klaster kopi, genteng dan batu bata, kerajinan tangan, makanan ringan, batik; serta destinasi wisata Mata Air Jumprit dan Air Terjun Lawe.

8. Banglor

Wilayah pengembangan Banglor meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora. Arah pengembangan wilayah difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, ditunjang oleh koridor perkotaan Rembang-Lasem. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Arah pengembangan sektor unggulan dilakukan dalam wadah kerjasama perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang disebut sebagai regionalisasi Ratubangnegoro (Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro). Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Banglor adalah: (1) primer berupa minyak dan gas, garam, perikanan; (2) sekunder berupa *furniture*, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa pariwisata.

Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :

a. Kabupaten Rembang : industri unggulan batik, garam; klaster genteng dan batu bata, garam rakyat, gula tumbu, batik tulis Lasem, bordir dan konveksi di Kecamatan Sedan, mangga, pengolahan hasil perikanan; serta destinasi wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini dan Wana Wisata Mantingan;
b. Kabupaten Blora : industri unggulan mebel, keramik, batik; klaster pertanian, mineral dan bahan tambang, pariwisata, *handycraft* dan mebel, pangan olahan, batik; serta destinasi wisata Waduk Tempuran dan Wana Wisata Hutan Jati Blora.

Potensi industri unggulan pada setiap wilayah dapat dilihat pada Gambar 7.2.

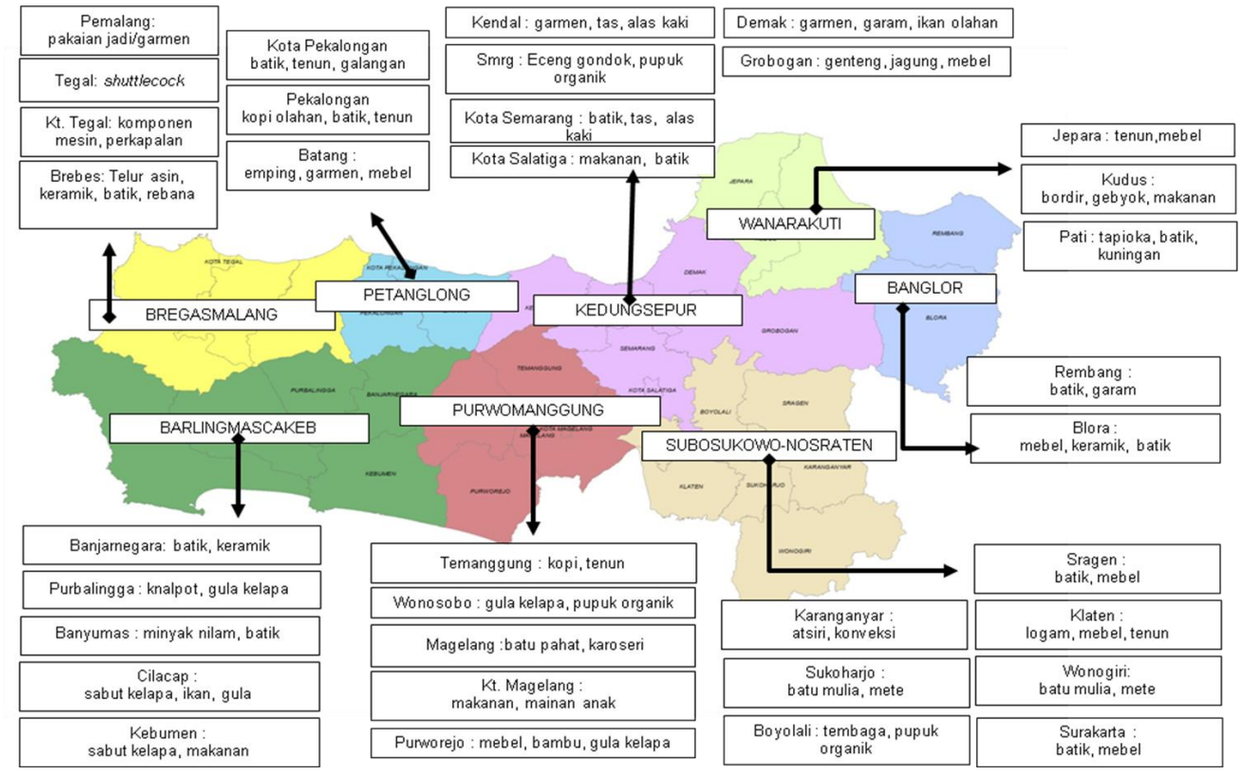

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Gambar 7.2. Peta Potensi Industri Unggulan

Peta Potensi Klaster pada setiap wilayah dapat dilihat pada Gambar 7.3.

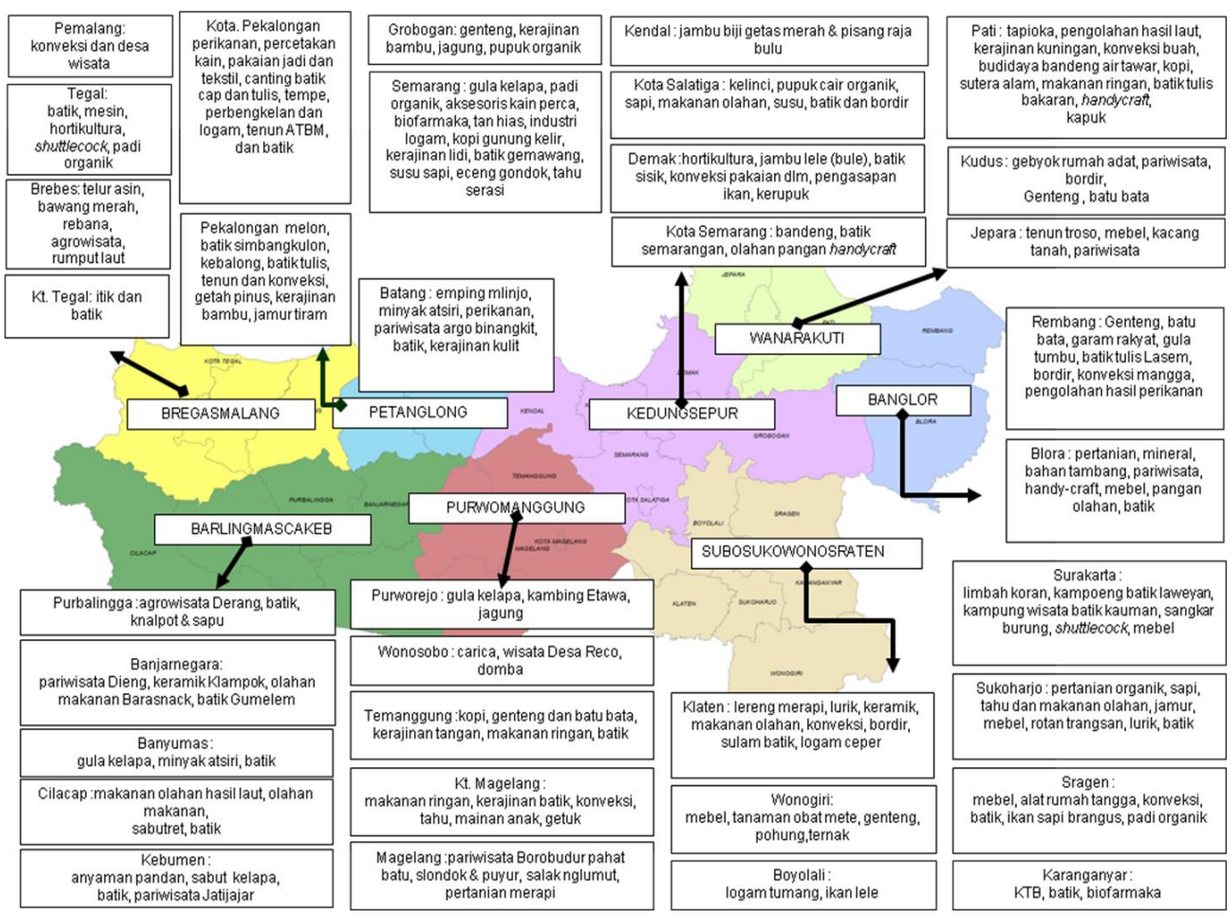

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Gambar 7.3. Peta Potensi Klaster

Sebagai arahan implementasi sektoral dalam mendukung perwujudan tujuan pengembangan wilayah di Jawa Tengah, maka ditetapkan program indikatif pengembangan wilayah sebagai berikut :

1. **Strategi 1** : Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
   a. Pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) maupun pusat pegiatan perdesaan, dengan :
      1) Pengembangan dan peningkatan fungsi kota;
      2) Revitalisasi fungsi pusat kegiatan sesuai hierarki;
      3) Pengembangan ekonomi kota secara terintegrasi;
      4) Fasilitasi dukungan penyediaan sarana dan prasarana di perdesaan.
   b. Peningkatan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah, dengan **:**
      1) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana dasar wilayah;
      2) Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu di PKN Kedungsapur, Surakarta dan PKW Purwokerto.
   c. Pengembangan interkoneksi antara pusat kegiatan dan *hinterland*, dengan **:**
      1) Peningkatan jaringan distribusi perdagangan dan jasa;
      2) Pengembangan jaringan dan konektivitas antar dan inter wilayah;
      3) Pengembangan transportasi perdesaan (angkutan perdesaan).
   d. Pemantapan perkembangan kawasan di sepanjang Pantai Utara dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang Pantai Selatan Jawa Tengah, dengan :
      1) Pemantapan pengembangan kawasan di sepanjang pantai selatan Jawa Tengah;
      2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Tengah;
      3) Pengendalian ijin pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi di wilayah pantura;
      4) Peningkatan penanganan infrastruktur banjir dan rob di wilayah Pantura;
      5) Percepatan pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS).

2. **Strategi 2 :** Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan Provinsi Jawa Tengah
   a. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas terutama di wilayah tengah dan selatan Jawa Tengah, dengan :
      1) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan;
      2) Pemantapan jalan pengumpan lintas utara - tengah - selatan.
   b. Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, dengan :
      1) Fasilitasi aktivasi dan optimalisasi jalur-jalur kereta api;
      2) Fasilitasi pengembangan rute angkutan umum antar wilayah;
      3) Fasilitasi Pengembangan Bandara Wirasaba Purbalingga.

c. Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik agar terdistribusi merata, dengan:
   1) Pengembangan energi baru terbarukan;
   2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik.
d. Pengembangan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor yang terkait pemanfaatan sumber daya air, dengan :
   1) Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya air secara optimal dan lestari;
   2) Pengembangan sistem jaringan irigasi dan air bersih yang terdistribusi merata dan pengembangan air baku;
   3) Peningkatan konservasi sumber-sumber air.
e. Pengembangan sistem pelayanan prasarana permukiman yang terpadu guna mencapai kualitas lingkungan permukiman yang baik, dengan :
   1) Pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan terpadu;
   2) Pengembangan prasarana limbah komunal dan drainase.

3. Strategi 3 : Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung
a. Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis DAS, dengan :
   1) Optimalisasi upaya rehabilitasi lahan dan hutan;
   2) Peningkatan pengawasan terhadap perusakan hutan dan lahan.
b. Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan yang merata, dengan :
   1) Pengendalian alih fungsi RTH;
   2) Pengembangan insentif dan disinsentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan RTH;
   3) Optimalisasi sebaran RTH.
c. Peningkatan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis, dengan :
   1) Pengembangan rekayasa teknologi pada penanganan lahan kritis;
   2) Pengembangan pertanian lahan kering pada lahan kritis.
d. Merehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air, dengan :
   1) Optimalisasi upaya rehabilitasi daerah resapan air;
   2) Pengembangan imbal jasa lingkungan antara daerah hulu dengan hilir.

4. Strategi 4 : Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah
a. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan rumah layak huni, dengan :
   1) Peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, wilayah tertinggal, dan wilayah perbatasan;
   2) Pembangunan perumahan layak huni bagi penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan.

b. Pengembangan ekonomi padat karya untuk mengurangi pengangguran, dengan :
   1) Pengembangan industri kecil menengah;
   2) Pengembangan UMKM.

5. **Strategi 5** : Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapita nya rendah
   a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas, dengan :
      1) Pengembangan agribisnis;
      2) Pengembangan teknologi pertanian;
      3) Peningkatan kualitas dan kuantitas alsintan.
   b. Pengendalian konversi lahan sawah, dengan :
      1) Optimalisasi implementasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
      2) Pengendalian izin pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
   c. Pengembangan kawasan berdasarkan potensi unggulan baik di perdesaan maupun perkotaan, dengan :
      1) Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan secara optimal;
      2) Pengembangan klaster pariwisata, pertanian, dan industri.
   d. Pengembangan industri unggulan daerah, baik skala kecil, menengah, maupun besar, dengan :
      1) Penetapan kawasan industri;
      2) Peningkatan investasi;
      3) Pengembangan sarana prasarana penunjang industri;
      4) Penyiapan SDM.
   e. Mendorong fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan, dengan :
      1) Pengembangan kelembagaan pengelola bantuan modal;
      2) Penguatan institusi permodalan;
      3) Peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk permodalan.

6. **Strategi 6** : Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan
   a. Peningkatan akses masyarakat terhadap lahan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama di perdesaan yang termasuk wilayah tertinggal dan di kawasan perbatasan, dengan :
      1) Inventarisasi lahan untuk reforma agraria;
      2) Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian;
      3) Pengembangan kelembagaan penguatan redistribusi lahan dan/atau akses masyarakat terhadap lahan.
   b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal, dengan :
      1) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di wilayah tertingal;
      2) Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah tertinggal;

3) Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih;
4) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan.

c. Mendorong pengembangan investasi pada wilayah tertinggal, terutama di wilayah selatan, dengan :
1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga perizinan;
2) Peningkatan stabilitas keamanan;
3) Pengembangan sistem informasi pengurusan perizinan;
4) Optimalisasi pengurusan perizinan satu atap.

d. Sinergitas pengembangan kawasan perbatasan dengan :
1) Peningkatan keselarasan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur lainnya;
2) Peningkatan keselarasan regulasi dan implementasi kebijakan pembangunan;
3) Peningkatan keselarasan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

7. Strategi 7 : Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional dan antar pihak

a. Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah, dengan :
1) Pengembangan kerjasama antar wilayah /daerah;
2) Fasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah;
3) Fasilitasi pengembangan kelembagaan kerjasama antar wilayah/ daerah.

b. Pemantapan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan, dengan :
1) Penerapan skema *Public Private Partnership* (PPP) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur;
2) Pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan dan swasta lainnya untuk pembangunan sektor lainnya.

8. Strategi 8 : Penanggulangan bencana

a. Penanggulangan risiko bencana dengan :
1) Peningkatan kesiapsiagaan bencana;
2) Pencegahan dan mitigasi bencana;
3) Penguatan penanganan tanggap darurat;
4) Rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. Memperkecil faktor kerentanan terhadap bencana dengan :
1) Pengurangan kerentanan fisik terhadap prasarana dasar, kontruksi dan bangunan;
2) Pengurangan kerentanan ekonomi terhadap kemiskinan, penghasilan dan nutrisi;
3) Pengurangan kerentanan sosial terhadap pendidikan, kesehatan, politik, hukum, dan kelembagaan;
4) Pengurangan kerentanan lingkungan terhadap sumber daya air, tanaman, hutan dan lahan.

c. Penguatan kelembagaan dan manajemen bencana dengan :

1) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan formal dan non formal;
2) Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3) Peningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan lintas pelaku dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Melalui serangkaian kegiatan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif dalam melakukan KLHS dinyatakan bahwa dari 153 program yang tertuang dalam RPJMD terdapat 25 program yang diindikasikan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Terkait dengan hal tersebut dalam implementasinya perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi guna mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

8.1 Urusan Wajib

1. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK (4-6 tahun); APK PAUD (0-6 tahun); dan Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.
b. Program Pendidikan Dasar
   Indikator yang akan dicapai yaitu APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A; APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B; Angka Putus Sekolah SD/ SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs; Angka Kelulusan SD/SDLB/MI dan SMP/MTs/SMPLB; Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/ MTs; Persentase ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang menerapkan Kurikulum 2013.
c. Program Pendidikan Menengah
   Indikator yang akan dicapai yaitu APK dan APM SMA/SMALB/MA/ SMK/Paket C; Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK; Angka Kelulusan SMA/MA/SMK; Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK; Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar; Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar; Persentase SMA/MA/SMK

yang memiliki sanitasi layak; dan Persentase SMA/MA/SMK yang menerapkan Kurikulum 2013.

d. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Kelulusan Paket A, B, C; Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B; Persentase buta aksara usia > 15 tahun; Persentase kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM; Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi; dan Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan.

e. Program Pendidikan Khusus

Indikator yang akan dicapai yaitu APK Pendidikan Khusus; Angka Lulus Pendidikan Khusus; dan Persentase Ruang Kelas Pendidikan Khusus sesuai standar nasional pendidikan.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pendidik PAUD, SD/SDLB/MI, SMP/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK sederajat yang berkualifikasi S1/D4; dan Persentase pendidik PAUD, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK sederajat yang bersertifikat pendidik.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase SD/SDLB/MI, SMP/ SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi; Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang melaksanakan MBS dengan baik.

h. Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perguruan tinggi yang terfasilitasi.

i. Program Pendidikan Berkelanjutan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan; dan Persentase sekolah yang melaksanakan ekstra kurikuler pramuka.

2. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Penemuan Kasus Baru TB (*Case Detection Rate/*CDR); Angka Penemuan Kasus Baru HIV-AIDS; Angka Penemuan Kasus Baru Kusta; Angka Penemuan Kasus Diare Balita; Angka Penemuan Kasus ISPA Balita; Angka Kesakitan Malaria; Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) *Rate*; Cakupan UCI Desa; dan Proporsi Kejadian Luar Biasa Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (KLB PD3I).

b. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar; Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar; Proporsi kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan makanan minuman sesuai standar.

c. Program Pelayanan Kesehatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan pertolongan persalinan Tenaga Kesehatan; Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani; Cakupan kunjungan bayi; Prevalensi Gizi Buruk; Proporsi Puskesmas yang memiliki ijin operasional; Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar; Proporsi Puskesmas terakreditasi; Rasio Puskesmas per jumlah penduduk; Proporsi RS yang memiliki izin operasional; Proporsi RS terakreditasi; Proporsi RS terklasifikasi; Proporsi RS PONEK terstandar; NDR RSUD, BOR RSJD, LOS RSJD, Cakupan Pelayanan Rawat Jalan dan Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD.

d. Program Kesehatan Lingkungan
Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Proporsi Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat; dan Proporsi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat.

e. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi; Proporsi Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi; dan Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi.

f. Program Promosi dan Pemberdayaan
Indikator yang akan dicapai yaitu Proporsi Rumah Tangga Sehat; Proporsi kabupaten/kota yang menerbitkan regulasi di bidang kesehatan; Proporsi Pasar yang menyediakan garam beryodium; Proporsi desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri; Proporsi penduduk miskin non kuota yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK); dan Persentase kabupaten/kota mengalokasikan 10% APBD untuk Kesehatan.

g. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan.

h. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Cakupan Pelayanan BLUD.

3. Pekerjaan Umum

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase panjang jalan dan jembatan yang memenuhi kriteria kecepatan (aspek kapasitas/lebar); Persentase panjang jalan dan jembatan yang sudah memenuhi kriteria stuktur sebagai jalan kolektor; dan terfasilitasinya pembangunan JJLS.

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium); Persentase panjang jalan yang sudah dileger; Terfasilitasinya prasarana sarana kebina-margaan; dan Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis

(Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, *underpass* Jatingaleh Kota Semarang dan *flyover* Palur Sukoharjo).

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan terfasilitasinya Pengembangan Daerah Irigasi, antara lain Daerah Irigasi Slinga Purbalingga, Cikawung Cilacap, Progopistan Temanggung serta Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif.

e. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan air baku.

f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sungai dalam kondisi baik dan terfasilitasinya pembangunan waduk/embung diantaranya : Matenggeng Cilacap, Logung Kudus, Kuningan Brebes, Pidekso Wonogiri, Gondang Karanganyar.

g. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Indikator yang akan dicapai yaitu menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir; dan terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah Pantura.

h. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani.

i. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi. Target RPJMD terkait air minum dan sanitasi dalam rangka memenuhi capaian MDG's diperlukan sumber pendanaan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta sumber pendanaan lainnya.

j. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi melalui jumlah uji dan penyebaran informasi serta pelaku jasa konstruksi.

4. Perumahan Rakyat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Perumahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani; dan Rasio Rumah Layak Huni.

b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani; dan Persentase KTP2D yang tertangani.

5. Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tata Ruang
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki Rencana Tata Ruang; dan Persentase kabupaten/ kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

b. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

6. Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase program/kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD; dan Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan kualitas SDM Perencana.

c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu; Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran; Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi; dan Evaluasi dokumen perencanaan.

d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

e. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan.

f. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam.

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

h. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan penerapan Litbang; dan Pengembangan SIDa di Jawa Tengah.

7. Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perhubungan Darat
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pelayanan dan kinerja angkutan umum; Meningkatnya ketersediaan prasarana keselamatan; Terlaksananya fasilitasi pengembangan angkutan umum dan massal, perkeretaapian dan pengembangan ASDP.

b. Program Pengembangan Perhubungan Laut
Indikator yang akan dicapai yaitu beroperasinya kapal KMC Kartini I dan Kemujan; Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelabuhan Kendal; Terfasilitasinya pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, Karimunjawa Jepara dan pelabuhan lainnya serta pengembangan keselamatan pelayaran.

c. Program Pengembangan Perhubungan Udara
Indikator yang akan dicapai yaitu terfasilitasinya pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Dewandaru Karimunjawa, Ngloram Cepu dan Wirasaba Purbalingga; dan terlaksananya fasilitasi pengembangan, pemantauan, dan pembinaan perhubungan udara.

d. Program Pos, Telekomunikasi dan SAR
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya fasilitasi pengembangan pelayanan Pos Telekomunikasi dan SAR.

8. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Indikator yang akan dicapai yaitu informasi status mutu air (SPM); Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM); Pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran pada UMKM/obyek domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan permukiman kumuh; Pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B3 bagi pelaku usaha dan/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (di luar proper); Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi UMKM/obyek usaha dan/kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya konservasi lahan melalui penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan penanaman tanaman unggulan lokal daerah/ tanaman lokal.

c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Indikator yang akan dicapai yaitu penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir melalui bangunan pencegah abrasi/erosi dan tanaman penghijauan; Informasi status mutu udara ambien; Meningkatnya lokasi lahan bekas tambang yang direklamasi; dan pembangunan sumur pantau.

e. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaannya melalui ADIWIYATA.

f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya informasi lingkungan hidup Jawa Tengah.

9. Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya bidang tanah yang terpetakan; Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan; Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik fungsinya; dan Sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator yang akan dicapai yaitu Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP; Persentase Penduduk 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran; dan Jumlah kabupaten/kota yang mengoperasikan SIAK.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Indikator yang akan dicapai yaitu produk kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Tengah; Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan; Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur; dan Produk hukum kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak serta responsif anak skala provinsi.

b. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio program, kegiatan serta anggaran responsif gender di SKPD Provinsi; Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator yang ingin dicapai yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan; Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen; Persentase perempuan di lembaga swasta; Rasio ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta *Trafficking*; Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak; Rasio kabupaten/kota yang memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak-hak anak; Rasio KDRT pada perempuan dan anak.

d. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
   Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Keluarga Berencana
   Indikator yang akan dicapai yaitu Peserta KB aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*; Menurunkan *Drop Out* (DO) KB; dan *Unmet Need*.
b. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
   Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun.
c. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD
   Indikator yang akan dicapai yaitu Produk hukum pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah peserta KB mandiri; dan Persentase anggota UPPKS yang ber-KB.
e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita
   Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kabupaten/kota yang telah membentuk jaringan KB – KS.

13. Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial; dan Jumlah Perintis Kemerdekaan/keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan sosial.
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP; dan Jumlah PMKS yang ditangani melalui Panti Sosial milik Pemerintah.
c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan.
d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS.
e. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah TAGANA yang dikerahkan ke lokasi kejadian bencana; dan Kabupaten/Kota memiliki prasarana dan sarana penanggulangan bencana.

14. Ketenagakerjaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja; dan Jumlah AKAN.

b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator yang akan dicapai yaitu Produktivitas tenaga kerja; Laju PDRB per tenaga kerja; dan Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja.

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHL; serta Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya koperasi aktif, koperasi sehat dan koperasi provinsi berkualitas.

b. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal
Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah produk/komoditas OVOP di Jawa Tengah.

c. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efekivitas Pembiayaan
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya UMKM yang telah mengakses kredit usaha.

d. Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
Indikator yang akan dicapai yaitu jangkauan pemasaran produk KUMKM.

e. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah KUMKM yang dilatih.

16. Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Indikator yang akan dicapai yaitu Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing; dan Terselenggaranya Promosi peluang penanaman modal provinsi.

b. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN); Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMA/PMDN); Daya serap tenaga kerja; Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi; Implementasi

Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); serta Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; dan Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat.

c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan.

17. Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah, melalui jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya; Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya; Jumlah regulasi pengembangan kebudayaan; Cakupan kelompok budaya yang dibina; Cakupan organisasi kesenian; Cakupan SDM Kesenian (Jumlah seniman yang dibina, sejarawan, ahli kepurbakalaan); Cakupan fasilitas seni; Cakupan tempat kesenian (jumlah gedung kesenian); Jumlah misi kesenian (pengiriman seni ke LN); Cakupan kajian seni; Cakupan gelar seni (Jumlah pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai); serta Jumlah kelompok kesenian.

b. Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
Indikator yang akan dicapai yaitu terpeliharanya pelestarian kesenian dan Cagar Budaya daerah, melalui Jumlah cagar budaya (candi, situs) yang dilestarikan; Jumlah warisan budaya dunia Nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu; Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola; Jumlah situs/kawasan yang diinventarisir dan ditetapkan; Jumlah museum yang dioptimalkan; serta Jumlah pengunjung museum.

c. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melalui Jumlah organisasi penghayat dan upacara tradisional di Jawa Tengah (Jumlah penghayat, Jumlah organisasi penghayat; serta Jumlah upacara tradisional).

18. Kepemudaan dan Olah Raga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga
Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan melalui jumlah fasilitasi pengembangan kemitraan.

b. Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan partisipasi/peran aktif pemuda dalam pembangunan melalui Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3).

c. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda melalui kewirausahaan pemuda.

d. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan pembibitan atlet, prestasi dan budaya olahraga melalui kompetisi keolahragaan dan fasilitasi olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi; serta Jumlah atlet yang dibina melalui PPLPD.

e. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga
Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga melalui peningkatan kualitas SDM olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan IPTEK dan industri olahraga.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keolahragaan melalui jumlah klub olahraga.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kondusivitas daerah provinsi dan kabupaten/kota.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Indikator yang akan dicapai yaitu penanganan konflik sosial dan pembentukan kader tibumtranmas.

e. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya penggunaan hak pilih dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilukada kabupaten/kota; Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah.

f. Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)
Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio jumlah Ratih/Linmas dengan jumlah penduduk.

g. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Indikator yang akan dicapai yaitu pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah penyusunan Peraturan Daerah; dan Persentase penindakan pelanggaran Perda.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO; Jumlah UPP yang melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Perapatan pilar batas; Perawatan pilar batas; Pengendalian kinerja SKPD; Penyusunan LKPJ dan EKPPD; Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan lintas kabupaten/kota; serta Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu Diklat

c. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya laporan LPPD Provinsi; Pemetaan kapasitas Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan *desk* Pemilukada.

d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri.

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

g. Program Pengelolaan Aset Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu persentase aset yang dikelola dengan baik.

h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Opini WTP); Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

i. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
Indikator yang akan dicapai yaitu terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional.

j. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

k. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu penyelenggaraan promosi jabatan secara terbuka; dan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat.

21. Ketahanan Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah regulasi kedaulatan pangan; Ketersediaan pangan utama beras; Penguatan cadangan pangan; Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah; serta Penanganan daerah rawan pangan.

b. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Indikator yang akan dicapai yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

c. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah pengurus Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) yang dilatih; Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terlatih; Jumlah aparat desa/kelurahan yang terlatih; Jumlah Desa Mandiri.

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk; Persentase PKK aktif di kabupaten/kota; Meningkatnya strata Posyandu dari strata Mandiri ke strata Model/integrasi.

c. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah UP2K yang aktif; Jumlah BUMDes yang terbentuk; Jumlah pasar desa yang direvitalisasi; dan Jumlah UED – SP yang aktif.

23. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi.

24. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku; dan Peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan.

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah arsip yang dilestarikan.

c. Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah media pemasyarakatan kearsipan.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah pengunjung/ pengguna arsip.

25. Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra).
b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
   Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran; Persentase SKPD bidang kominfo yang melakukan sosialisasi kebijakan nasional.
c. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo.
d. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
   Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi; dan Persentase SKPD yang telah meng-*update* data di *website*nya hingga tahun n-1.

26. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Budaya Baca
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Pengunjung Perpustakaan; dan Jumlah pendataan dan pemberian nomor pokok perpustakaan.
b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah perpustakaan penerima bantuan rak dan koleksi buku; serta Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi.
c. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti Bintek.
d. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan
   Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah pengembangan perpustakaan se-Jawa Tengah; dan Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan.

8.2 Urusan Pilihan

1. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Agribisnis
   Indikator yang akan dicapai yaitu Produksi padi, jagung, kedelai, bawang merah, kentang, cabe besar, tebu, kopi, kakao, kelapa, karet, cengkeh, teh, daging, susu, dan telur.
b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
   Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas Balai Penyuluhan dan Posluhdes; serta Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani hanya akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2014, selanjutnya secara nasional nomenklatur program diubah menjadi Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian.

c. Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas Balai Penyuluhan dan Posluhdes; serta Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian.

2. Kehutanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis; serta Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan.

b. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK; dan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

c. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Indikator yang akan dicapai yaitu Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan; serta Persentase pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan.

d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kawasan konservasi yang meningkat kualitas pengelolaannya; dan Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan dan kajian cekungan air tanah.

b. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya Rasio Elektrifikasi.

c. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase mitigasi bencana alam dan geologi.

d. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi.

e. Program Peningkatan SDM bidang ESDM
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang teknik penambangan yang benar dan ramah lingkungan; serta Dokumen perencanaan bidang ESDM. Program ini dilaksanakan Tahun 2014, sedangkan Tahun 2015-2018 menggunakan Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah.

4. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemasaran Pariwisata
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Indikator yang akan dicapai yaitu rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara; serta rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara dan nusantara.

c. Program Pengembangan Kemitraan
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jejaring dengan kelompok sadar wisata.

5. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Indikator yang akan dicapai yaitu rata-rata pendapatan wanita pesisir dan taruna pesisir.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan yang aktif.

c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Indikator yang akan dicapai yaitu produksi perikanan tangkap dan rata-rata pendapatan nelayan.

d. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Indikator yang akan dicapai yaitu produksi perikanan budidaya dan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan.

e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat konsumsi ikan dan ekspor produk perikanan.

f. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator yang akan dicapai yaitu luas penanaman mangrove dan luas terumbu karang buatan.

6. Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai ekspor non migas; Nilai impor non migas; Ekspor bersih perdagangan; dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

b. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM
Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal; Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri; dan Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok.

c. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); dan Persentase penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kabupaten/kota.

7. Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil (ILMT)
Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah); Jumlah klaster Logam, Mesin dan Tekstil; dan Persentase kemampuan ILMT menjadi pemasok industri besar.

b. Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (IAKHH)
Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor industri pengolahan PDRB; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah); Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan; dan Persentase kemampuan sentra IAKHH menjadi pemasok industri besar.

c. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA)
Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah); Jumlah klaster komponen otomatis elektronika dan aneka; Persentase kemampuan sentra IATEA menjadi pemasok industri besar.

d. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang
Indikator yang akan dicapai yaitu Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri.

8. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan indikator yang akan dicapai yaitu Kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan kawasan transmigrasi; dan Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator yang akan dicapai yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya diklat dan bintek aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya capaian laporan kinerja SKPD.
6. Program Jasa Pelayanan Kesehatan
Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				**9.837.175.877**		**10.391.713.437**		**11.216.004.354,25**		**12.209.250.697**		**14.191.128.650**		**57.845.273.015,25**	
	1. Belanja Pegawai				1.955.682.339		2.443.698.229		2.655.707.260,25		2.894.217.420		3.162.541.350		13.111.846.598,25	59 SKPD
	2. Belanja Hibah				3.038.626.398		3.020.537.333		3.020.537.333		3.070.537.333		3.970.537.333		16.120.775.730,00	PPKD
	3. Belanja Bantuan Sosial				31.666.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000		145.666.000,00	PPKD
	4. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota				2.720.713.995		3.227.190.236		3.672.793.359		4.194.682.901		4.807.605.619		18.622.986.110,00	PPKD
	3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes				2.060.487.145		1.616.787.639		1.778.466.402		1.956.313.043		2.151.944.348		9.563.998.577,00	PPKD
	6. Belanja Tidak Terduga				30.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		280.000.000,00	PPKD
B.	**BELANJA LANGSUNG**				**4.159.982.306**		**4.519.371.926**	**-**	**5.287.300.949**	**-**	**6.148.305.744**		**6.939.819.778**		**27.054.780.702,86**	**-**
	URUSAN WAJIB				**2.993.454.145**		**3.349.906.910**		**3.971.597.233**		**4.652.531.520**		**5.258.850.721**		**20.226.340.529,70**	
1	**Urusan Pendidikan**				**196.953.150**		**197.424.402**		**234.213.698**		**286.913.018**		**343.340.966**		**1.258.845.234,39**	Dindik
	1. Program Pendidikan				5.540.000		5.983.200		7.060.176		8.825.220		10.325.507		37.734.103,40	
	Anak Usia Dini	- APK PAUD/TK (4-6 th)	70,55	72,00		75,00		77,00		79,00		80,00		80,00		
	(PAUD)[7) 11)]	- APK PAUD (0-6 th),	40,10	50,00		53,00		56,00		59,00		65,00		65,00		
		- % lembaga PAUD yang terakreditasi	47,00	50,00		53,00		56,00		59,00		62,00		62,00		
	2. Program Pendidikan				30.243.150		30.362.602		36.435.122,40		45.543.903,00		55.661.664,80		198.246.442,20	Dindik
	Dasar[7) 11)]	- APK SD/ SDLB/MI/ Paket A	109,08	109,10		109,13		109,17		109,20		109,25		109,25		
		- APM SD/ SDLB/MI/ Paket A	98,60	99,42		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		- APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	100,52	100,54		100,56		100,58		100,60		100,60		100,60		
		- APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	79,00	79,20		79,30		79,50		79,75		80,00		80,00		
		- Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,11	0,09		0,08		0,07		0,06		0,05		0,05		
		- Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,34	0,30		0,25		0,20		0,15		0,10		0,10		
		- Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	99,95	99,96		99,97		99,97		99,98		99,98		99,98		
		- Angka Kelulusan SMP/ MTs/SMPLB	99,17	99,17		99,19		99,21		99,23		99,25		99,25		
		- Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI	7,20	7,09		7,11		7,13		7,14		7,15		7,15		
		- Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS	6,80	6,86		6,87		6,88		6,89		6,90		6,90		
		- % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan *) tidak termasuk mebelair **) termasuk mebelair	94,78*) / 61,53 **)	64,50		65,00		65,50		70,00		70,50		70,50		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan *) tidak termasuk mebelair **) termasuk mebelair	98,79*) / 78,06 **)	78,40		79,00		79,55		80,25		80,75		80,75		
		- % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar *) tidak termasuk mebelair **) termasuk mebelair	70,99*) / 43,55 **)	44,50		45,50		46,50		47,50		48,50		48,50		
		- % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar	73,22	76,00		78,00		80,00		82,00		84,00		84,00		
		- % SD/MI yang memiliki sanitasi layak	48,00	69,50		70,50		71,50		72,50		73,50		73,50		
		- % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak	50,00	68,10		70,10		72,25		76,12		80,00		80,00		
		- % SD/MI yang melaksanakan Kurikulum 2013	3,00	5,00		10,00		25,00		50,00		100,00		100,00		
		- % SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013	5,00	10,00		20,00		40,00		80,00		100,00		100,00		
	3. Program Pendidikan Menengah[7) 11)]				26.450.000		26.866.000		32.239.200,00		40.299.000,00		51.418.067,20		177.272.267,20	Dindik
		- APK SMA/ SMALB/MA/ SMK Paket C	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		
		- APM SMA/ SMALB/MA/ Paket C	55,00	58,00		60,00		62,00		64,00		66,00		66,00		
		- Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK	0,07	0,07		0,06		0,06		0,06		0,05		0,05		
		- Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99,92	99,95		99,96		99,97		99,98		99,99		99,99		
		- Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK	7,31	7,73		7,74		7,74		7,75		7,75		7,75		
		- % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	80,5	81,00		84,00		86,00		88,00		90,00		90,00		
		- % SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar	90,02	91,00		92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		
		- % SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak	10,00	26,01		28,63		31,28		33,87		36,49		36,49		
		- % SMA/MA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	5,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
	4. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal[7)]				56.500.000		56.447.600		67.737.120		84.671.400		99.065.538		364.421.658,00	Dindik dan 23 SKPD
		- Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A	94,47	95,35		95,40		95,45		95,50		96,00		96,00		
		- Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	90,80	96,20		96,25		96,30		96,35		96,50		96,50		
		- Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C	75,20	98,20		98,25		98,30		98,40		98,50		98,50		
		- Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	2,00	2,60		3,20		3,80		4,40		5,00		5,00		
		- Persentase Buta Aksara >15 tahun	4,00	3,50		3,00		2,5		2,00		1,50		1,50		
		- Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM	14,00	15,00		15,50		16,00		17,00		17,50		17,50		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Jumlah Pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan	40.481	37.500		38.000		39.000		40.000		41.000		195.500		23 SKPD
		- Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan	286 Desa	35 desa		35 desa		35 desa		35 desa		35 desa		461 desa		
	5. Program Pendidikan Khusus				9.200.000		9.300.000		11.095.000		13.734.200		12.000.000		55.329.200,00	Dindik
		- Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus	52,00	54,00		56,00		58,00		60,00		62,00		62,00		
		- Angka Lulus pendidikan khusus	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		- Persentase Ruang kelas pendidikan khusus sesuai standar nasional pendidikan	73,00	75,00		76,00		78,00		79,00		80,00		80,00		
	6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan[7)]				31.540.000		30.411.000		35.884.980		43.061.976		55.295.480		196.193.436,00	Dindik
		- Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	31,05	31,10		31,85		32,60		33,35		34,10		34,10		
		- Persentase Pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1/D4	51,58	53,61		56,47		58,35		60,24		61,14		61,14		
		- Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi S1/D4	85,05	86,41		87,71		89,02		90,36		91,71		91,71		
		- Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK berkualifikasi S1/D4	93,06	93,50		94,00		94,50		95,00		95,50		95,50		
		- Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	15,00	16,00		16,75		17,50		18,25		19,00		19,00		
		- Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik	47,00	47,52		48,14		48,76		49,38		50,00		50,00		
		- Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik	55,00	56,60		58,70		60,80		62,90		65,00		65,00		
		- Persentase Pendidik SMA/SMALB/ma dan SMK bersertifikat pendidik	51,00	59,93		64,00		66,00		68,00		70,00		70,00		
	7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				25.480.000		25.454.000		29.272.100		33.955.636		39.048.981		153.210.717,40	Dindik
		- % SD/SDLB/MI yang terakreditasi	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		- % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		- % SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		- % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik	30,00	30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		50,00		
		- % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik.	50,00	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		
		- % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8. Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi				5.450.000		5.722.500		6.580.875		7.568.006		9.884.000		35.205.381,25	Dindik
		- % perguruan tinggi yang terfasilitasi	10,00	25,00		30,00		35,00		45,00		50,00		50,00		
	9. Program Pendidikan Berkelanjutan				6.550.000		6.877.500		7.909.125		9.253.676		10.641.728		41.232.028,94	Dindik
		- % sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan	0,50	1,00		5,00		10,00		25,00		50,00		50,00		
		- % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka	0,50	0,50		10,00		25,00		50,00		100,00		100,00		
2	**Urusan Kesehatan**				**1.077.874.641**		**1.105.846.336**		**1.206.702.277**		**1.354.006.011**		**1.494.714.530**		**6.239.143.794,44**	
	1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit[6)]				3.375.000		3.591.000		4.129.650		4.955.580		5.698.917		21.750.147,00	
		1 Angka Penemuan kasus baru TB (CDR)	115	116		117		118		120		122		122		DINKES
		2 Angka Penemuan Kasus baru HIV/AIDS	20	18		16		15		14		13		13		DINKES
		3 Angka Penemuan Kasus baru kusta	5,8	6		6,5		7		7,5		8		8		DINKES
		4 Angka Penemuan kasus Diare Balita	35	40		45		50		55		60		60		DINKES
		5 Angka Penemuan kasus ISPA balita	42	45		48		52		56		60		60		DINKES
		6 Angka Kesakitan Malaria	0,08	0,07		0,07		0,07		0,07		0,06		0,06		DINKES
		7 Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<30	<30		<25		<25		<20		<20		<20		DINKES
		8 Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<55	<55		<50		<50		<45		<45		<45		DINKES
		9 AFP Rate (/100000)	2	2		2		2		2		2		2		DINKES
		10 Cakupan UCI	98,9	98,9		98,9		99		99		99		99		DINKES
		11 Proporsi KLB PD31	100	100		100		100		100		100		100		DINKES
	2. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan[6)]				3.950.000		4.020.000		4.824.000		5.788.800		6.715.008		25.297.808,00	
		1 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar	55	60		65		70		75		80		80		DINKES
		2 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	30	40		50		60		70		80		80		DINKES
		3 Proporsi Kab/Kota melakukan binwas makanan minuman sesuai standar	28,57	42,86		57,14		71,43		85,71		100		100		DINKES
	3. Program Pelayanan Kesehatan[6)]				281.025.915		287.775.956		345.331.147		431.663.934		505.046.803		1.850.843.755,20	
		1. Cakupan Pertolongan Persalinan nakes	97,50	97,50		98,00		98,00		98,50		98,50		98,50		Dinkes
		2. Cakupan Neonatal Komplikasi yg ditangani	75,00	80,00		81,00		83,00		84,00		85,00		85,00		Dinkes
		3. Cakupan kunjungan Bayi	97,00	97,00		97,50		97,50		98,00		98,00		98,00		Dinkes
		4. Prevalensi Gizi Buruk	0,08	0,05		0,05		0,05		0,04		0,04		0,04		DINKES
		5. Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional (%)	NA	10		25		50		75		100		100		Dinkes
		6. Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar (%)	11	13		16		18		20		22		22		Dinkes
		7. Proporsi Puskesmas terakreditasi (%)	6	7		10		12		13		15		15		Dinkes

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8. Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	1 : 38.110	1 : 37.500		1 : 37.000		1 : 36.500		1 : 36.000		1 : 35.500		1 : 35.500		Dinkes
		9. Proporsi RS yg memiliki ijin operasional	98	43,7		60		79,26		97,41		100		100		Dinkes
		10. Proporsi RS terakreditasi	0,37	4,44		11,11		18,52		29,93		37,04		37,04		Dinkes
		11. Proporsi RS terklasifikasi	68,4	6,67		21,11		27,41		36,3		40		75		Dinkes
		12. Proporsi RS PONEK terstandar	6,16	16,33		24,49		28,57		32,65		40,82		40,82		Dinkes
		13. NDR RSUD	32,5	30,5		28,5		27		26		25		25		4 RSUD
		14. BOR RSJD	63	65		70		73		75		80		80		3 RSJD
		15. LOS RSJD	28	30		29		28		27		25		25		3 RSJD
		16. Cakupan Pelayanan Rawat Jalan RSJD	24.645	118000		123300		128950		132700		146000		146000		3 RSJD
		17. Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD	3.146	10200		10750		11100		11440		11900		11900		3 RSJD
	4. Program Kesehatan Lingkungan[6)]				950.000		997.500		1.147.125		1.376.550		1.583.033		6.054.207,50	
		1. Desa melakukan STBM	2147	2247		2347		2447		2547		2697		2697		DINKES
		2 Proporsi TTU yg memenuhi syarat	77	78		79		80		81		82		82		DINKES
		3 Proporsi TPM yg memenuhi syarat	50	53		56		59		62		65		65		DINKES
	5. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan[6)]				8.314.841		8.417.000		9.679.550		11.615.460		13.357.779		51.384.630,00	
		1. Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	80,5	81		81,5		82		82,5		83		83		DINKES & 7 RSUD/RSJD
		2. Proporsi Pelatihan Kesehatan yg terakreditasi	10,50%	11%		11,50%		12%		12,50%		13%		13%		DINKES
		3. Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi	50,50%	51%		51,50%		52%		52,50%		53%		53%		DINKES
	6. Program Promosi dan Pemberdayaan[6)]				47.633.885		47.667.000		54.817.050		65.780.460		76.305.334		292.203.728,60	
		1 Proporsi Rumah Tangga Sehat	74,8	74,9		75		75,2		75,4		75,5		75,5		DINKES & 7 RSUD/RSJD
		2 Proporsi Kab/Kota yg menerbitkan regulasi bid kesehatan (ASI,PSN, KTR)	NA	5,71		11,43		17,43		17,14		22,86		28,57		DINKES
		3 Proporsi pasar yg menyediakan garam beryodium	NA	70		70		70		70		70		70		DINKES
		4 Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri	5,5	6		7		8		9		10		10		DINKES
		5 Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	28,31	28,01		27,79		27,57		27,35		27,12		27,12		DINKES
		6 Persentase Kab/Kota mengalokasikan 10 % APBD untuk kesehatan	11,42	14,2		17,14		20		22,85		25,71		25,71		DINKES
	7. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan[6)]				6.825.000		5.805.000		6.385.500		7.343.325		8.297.957		34.656.782,25	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan	21	21		21		21		21		21		21		DINKES
	8. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)				725.800.000		747.572.880		780.388.254		825.481.902		877.709.700		3.956.952.735,89	
		Persentase cakupan pelayanan BLUD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		7 RSUD/RSJD
3.	**Urusan Pekerjaan Umum**				**1.070.810.947**		**1.404.566.211**		**1.812.198.280**		**2.176.401.050**		**2.500.772.878**		**8.964.749.365,49**	
	1. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan[9)]				564.110.957		774.504.000		1.022.773.400		1.227.328.080		1.411.427.292		5.000.143.729,00	Dinas Bina Marga
		a Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m	50,44%	54,14%		59,00%		64,84%		71,21%		77,87%		77,87%		
		b Persentase panjang jembatan dengan lebar ≥ 9,00 m	78,13%	78,92%		79,72%		80,52%		81,32%		82,12%		82,12%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		c Persentase Panjang Jalan	67,62%	69,60%		72,20%		75,33%		78,74%		82,30%		82,30%		
		Provinsi sebagai jalan														
		kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)														
		d Persentase panjang	13,31%	14,10%		14,42%		14,73%		15,05%		15,36%		15,36%		
		Jembatan dengan beban														
		sesuai standar Bina														
		Marga														
	2. Program Rehabilitasi/				310.330.665		434.024.525		559.926.977		671.912.373		772.699.229		2.748.893.769,00	Dinas Bina
	Pemeliharaan Jalan	a Persentase panjang jalan	86,88%	86,54%		87,56%		88,24%		88,92%		89,60%		89,60%		Marga
	dan Jembatan[9)]	dalam kondisi baik														
		b Persentase panjang	79,00%	79,72%		81,24%		82,76%		84,28%		85,80%		85,80%		
		jembatan dalam kondisi														
		baik														
	3. Program Peningkatan				32.048.199		30.929.894		34.790.649		38.269.714		40.948.594		176.987.050,62	Dinas Bina
	Sarana dan Prasarana	a Persentase pemenuhan	83,33%	84,26%		85,66%		87,05%		88,45%		89,84%		89,84%		Marga
	Kebinamargaan[9)]	kebutuhan alat														
		kebinamargaan (alat														
		berat dan alat														
		laboratorium)														
		b Meningkatnya Persentase	73,46%	76,00%		80,60%		85,20%		89,80%		94,40%		94,40%		
		panjang jalan yang														
		sudah dileger														
		c Terfasilitasinya	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Prasarana Sarana														
		Kebinamargaan														
		d Terfasilitasinya	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		pembangunan														
		infrastruktur strategis														
	4. Program Pengembangan	Persentase jaringan irigasi	72 %	74 %	88.166.079	76 %	64.188.959	78 %	77.026.751	80 %	96.283.439	82 %	112.651.623	82 %	438.316.851,00	Dinas PSDA
	dan Pengelolaan	dalam kondisi baik														
	Jaringan Irigasi, Rawa															
	serta Jaringan															
	Pengairan Lainnya[9)]															
	5. Program Penyediaan	Persentase pemenuhan	50,12 %	52 %	8.850.000	54 %	9.558.000	56 %	11.469.600	58 %	13.763.520	60 %	15.965.683	60%	59.606.803,00	Dinas PSDA
	dan Pengelolaan Air	kebutuhan air baku														
	Baku[9)]															
	6. Program	Persentase sungai dalam	51,66 %	51,76 %	18.987.281	51,86 %	26.173.015	51,96 %	30.098.967	52,06 %	36.118.761	52,16 %	40.453.012	52,16 %	151.831.036,00	Dinas PSDA
	Pengembangan,	kondisi baik														
	Pengelolaan dan															
	Konservasi Sungai,															
	Danau dan Sumber															
	Daya Air Lainnya															
	7. Program Pengendalian	- Menurunnya luasan	100 %	3 %	27.589.766	3 %	35.985.918	3 %	41.383.805	3 %	49.660.566	3 %	57.109.651	85 %	211.729.706,00	Dinas PSDA
	Banjir dan Pengamanan	daerah genangan akibat	(167.000 Ha)	(5.000 Ha)		(5.000 Ha)		(5.000 Ha)		(5.000 Ha)		(5.000 Ha)		(142.000 Ha)		
	Pantai[9)]	banjir														
		- Terfasilitasinya	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas PSDA
		peningkatan pengamanan														
		pantai dan rob di wilayah														
		Pantura														
	8. Program Peningkatan	Jumlah kawasan	40	13	9.380.000	14	12.182.400	14	14.618.880	14	18.273.600	14	21.197.376	20	75.652.256,00	Dinas CKTR
	Prasarana dan Sarana	perkotaan kumuh,														
	Perkotaan Dan	prasarana dan sarana														
	Perdesaan[9)]	pendukung kegiatan														
		perekonomian, kawasan														
		perbatasan														
		kabupaten/kota dan														
		kawasan strategis yang														
		tertangani														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9. Program Peningkatan	Cakupan pelayanan air			7.913.000		13.878.000		16.653.600		20.817.000		24.147.720		83.409.320,00	Dinas CKTR,
	Kinerja Pengelolaan Air	minum dan sanitasi :														Bapermasdes
	Minum Dan Sanitasi[9)]	- Air Minum Perkotaan (%)	63,99	67,00		75,00		76,50		77,50		78,00		78,00		
		- Air Minum Perdesaan (%)	49,13	50,50		52,80		55,00		57,00		59,00		59,00		
		- Sanitasi (%)	64,50	69,00		72,00		73,50		75,00		76,00		76,00		
	10. Program	Meningkatnya penge-			3.435.000		3.141.500		3.455.650		3.973.998		4.172.697		18.178.844,88	Dinas CKTR
	Pembangunan dan	lolaan jasa konstruksi :														
	Pengelolaan	a Jumlah uji dan penye -														
	Bangunan Gedung	baran informasi jakon														
	serta Pengembangan	- Sertifikasi Hasil Uji	573	400		400		400		400		400		2000		Dinas CKTR
	Jasa Konstruksi	- Informasi Konstruksi	2	3		3		3		4		4		17		Dinas CKTR
		b Jumlah pelaku jasa konstruksi	585 orang	630 orang		710 orang		790 orang		870 orang		950 orang		3.950 orang		Dinas CKTR
4.	**Urusan Perumahan Rakyat**				**31.887.000**		**34.242.900**		**41.091.480**		**49.309.776**		**57.199.340**		**213.730.496,16**	
	1. Program Pembangunan				11.310.000		13.694.400		16.433.280		19.719.936		22.875.126		84.032.741,76	
	Perumahan[9)]															
		- Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	77	13		6		6		6		6		37		Dinas Ciptakarya,
		- Rasio Rumah Layak Huni	76,67	76,73		76,74		76,75		76,76		76,77		76,77		Dinas Ciptakarya, Bapermades
	2. Program Pemberdayaan				20.577.000		20.548.500		24.658.200		29.589.840		34.324.214		129.697.754,40	
	Komunitas Perumahan[9)]	- Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	7,8	12,83		14,88		16,92		18,97		21,02		21,02		Dinas Ciptakarya, Bapermades
		- Persentase KTP2D yang tertangani	9,58	10,96		12,6		14,24		15,89		17,53		17,53		Dinas Ciptakarya
5.	**Urusan Penataan Ruang**				**4.300.000**		**5.201.500**		**5.825.680**		**6.757.789**		**7.433.568**		**29.518.536,48**	
	1. Program Perencanaan	- Persentase Kawasan	-	3,3	3.300.000	6,6	3.965.500	9,9	4.441.360	13,2	5.151.978	16,5	5.667.175	16,5	22.526.012,96	Dinas CKTR
	Tata Ruang[10)]	Strategis Provinsi (KSP)														
		yang memiliki rencana														
		tata ruang														
		- Persentase Kab/Kota	-	20		40		60		80		100		100		Dinas CKTR
		yang memiliki Rencana														
		Detail Tata Ruang (RDTR)														
	2. Program Pemanfaatan	Persentase Kesesuaian	62	63	1.000.000	64	1.236.000	66	1.384.320	68	1.605.811	70	1.766.392	70	6.992.523,52	Dinas CKTR
	dan Pengendalian	Pemanfaatan Ruang														
	Pemanfaatan Ruang[10)]	dengan Rencana Tata														
		Ruang														
6.	**Urusan Perencanaan**				**21.351.750**		**22.089.695**		**24.474.739**		**27.500.820**		**29.909.279**		**125.326.282,95**	
	Pembangunan Daerah															
	1 Program Pengembangan				207.500		213.725		235.098		258.607		271.538		1.186.467,36	Bappeda
	Wilayah Perbatasan[9)]															
		- Persentase program/	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		kegiatan hasil														
		kesepakatan perbatasan														
		yang terakomodir dalam														
		RKPD														
		- Jumlah kebijakan	1 forum;	1 forum;		1 forum;		1 forum;		1 forum;		1 forum;		1 forum;		
		pengembangan wilayah	1 rekomendasi	1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		
		perbatasan														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 Program Peningkatan				166.000		170.980		188.078		206.886		217.230		949.173,89	Bappeda
	Kapasitas Kelembagaan															
	Perencanaan															
	Pembangunan Daerah	- Peningkatan Kualitas	26 kali FGD;	5 forum		5 forum		5 forum		5 forum		5 forum		25 Forum		
		SDM Perencana	1 forum fungsional	peningkatan		peningkatan		peningkatan		peningkatan		peningkatan		peningkatan		
			perencana; 4 kali	kapasitas		kapasitas		kapasitas		kapasitas		kapasitas		kapasitas		
			penilaian angka	pegawai; 1 forum		pegawai; 1		pegawai; 1		pegawai; 1		pegawai; 1		pegawai; 5		
			kredit fungsional	fungsional		forum		forum		forum		forum		forum		
			perencana	perencana;		fungsional		fungsional		fungsional		fungsional		fungsional		
				penilaian angka		perencana;		perencana;		perencana;		perencana;		perencana;		
				kredit 5 orang		penilaian		penilaian		penilaian		penilaian		penilaian		
				fungsional		angka kredit 5		angka kredit 5		angka kredit 5		angka kredit 5		angka kredit		
				perencana		orang		orang		orang		orang		25 orang		
						fungsional		fungsional		fungsional		fungsional		fungsional		
						perencana		perencana		perencana		perencana		perencana		
	3 Program Perencanaan				3.777.500		3.890.825		4.279.908		4.793.496		5.272.846		22.014.574,94	Bappeda
	Pembangunan Daerah[3)]															
		- Dokumen perencanaan	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD		1 Pergub RKPD		1 Pergub RKPD		1 Pergub RKPD		1 Pergub RKPD		5 Pergub RKPD		
		pembangunan daerah		1 Perda RPJMD										1 Perda RPJMD		
		yang ditetapkan tepat														
		- Persentase kesesuaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		dokumen perencanaan														
		dengan dokumen														
		penganggaran														
		- Persentase capaian antara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		target perencanaan														
		program/ kegiatan dengan														
		realisasi														
		- Evaluasi Dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen		
		perencanaan	evaluasi RKPD	evaluasi RKPD		evaluasi RKPD		evaluasi RKPD;		evaluasi RKPD		evaluasi RKPD		evaluasi RKPD;		
								1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
								evaluasi paruh		evaluasi tahun		evaluasi tahun		evaluasi paruh		
								waktu RPJMD		ke 4 RPJMD		ke 5 RPJMD		waktu RPJMD;		
														2 dokumen		
														evaluasi tahunan		
														RPJMD		
	4 Program Perencanaan				1.800.000		1.854.000		2.039.400		2.243.340		2.355.507		10.292.247,00	Bappeda
	Pembangunan Ekonomi															
		- Jumlah dokumen	5 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen		
		perencanaan														
		pembangunan ekonomi														
		daerah														
	5 Program Perencanaan				2.929.500		3.017.385		3.319.124		3.651.036		3.833.588		16.750.631,99	Bappeda
	Pembangunan Sosial															
	Budaya	- Jumlah dokumen	4 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen		
		perencanaan														
		pembangunan daerah														
		bidang kesejahteraan														
		rakyat														
		- Jumlah dokumen	5 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen		
		perencanaan														
		pembangunan daerah														
		bidang pemerintahan dan														
		kependudukan														
	6 Program Perencanaan				3.228.500		3.325.355		3.657.891		4.023.680		4.224.864		18.460.288,58	Bappeda
	Pembangunan	- Jumlah dokumen	9 dokumen	5 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		
	Prasarana Wilayah dan	perencanaan		6 kab/kota		12 kab/kota		12 kab/kota		5 kab/kota				35 kab/kota		
	Sumberdaya Alam	pembangunan daerah														
		bidang prasarana wilayah														
		dan sumber daya alam.														
	7 Program Perencanaan				790.000		813.700		895.070		984.577		1.033.806		4.517.152,85	Set. BPBD
	Pembangunan Daerah															
	Rawan Bencana															
		- Jumlah dokumen	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen		
		perencanaan														
		pembangunan daerah														
		rawan bencana														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8 Program Pengembangan				8.452.750		8.803.725		9.860.172		11.339.198		12.699.902		51.155.746,34	Balitbang
	IPTEK dan Inovasi	- Meningkatnya kualitas	29 rekomendasi	12 rekomendasi		12 rekomendasi		12 rekomendasi		12 rekomendasi		12 rekomendasi		60 rekomendasi		
	Daerah [4]	dan penerapan Litbang	(2012)													
		- Pengembangan SIDa di														
		Jateng														
		- Jumlah peningkatan	-	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
		kapasitas kelembagaan														
		Kab/Kota														
		- Jumlah klaster inovatif	-	6 klaster		6 klaster		6 klaster		6 klaster		6 klaster		30 klaster		
		- jumlah pengembangan	5 desa	9 desa		11 desa		12 desa		11 desa		10 desa		58 desa		
		desa inovatif														
		- Jumlah pengembangan	-	3 Kab/Kota		6 Kab/Kota		8 Kab/Kota		10 Kab/Kota		8 Kab/Kota		35 Kab/Kota		
		Kab/Kota inovatif														
7.	**Urusan Perhubungan**				**41.797.755**		**41.757.548**		**48.954.876**		**56.626.541**		**57.780.376**		**246.917.095,93**	
	1. Program Pengembangan				32.717.755		30.573.898		36.688.678		44.026.414		50.630.376		194.637.121,30	Dinas
	Perhubungan Darat [9]	a Persentase perijinan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		Perhubungan,
		AKDP														Informatika dan
		b Jumlah Kab/Kota yang	1 Kab, 1 Kota	1 Kota		2 kota		2 kota		2 kota 1 kab.		2 kota		3 kab/kota (PKN)		Telekomunikasi
		melakukan pengembangan														
		Angkutan Umum dan														Biro
		Massal di Jateng														Perekonomian
		c Jumlah Desa yang	-	-		1 desa		1 desa		1 desa		1 desa		4 desa		
		melakukan														
		pengembangan														
		Angkutan perdesaan														
		d Meningkatnya														
		Ketersediaan Prasarana														
		Keselamatan :														
		- jalan provinsi	18,71%	22,00%		34,00%		47,00%		60,00%		73,00%		73,00%		
		- perlintasan Kereta Api	43 lokasi	9 lokasi		25 lokasi		25 lokasi		25 lokasi		25 lokasi		152 lokasi		
		di jalan provinsi														
		e Meningkatkan	Waduk	Serayu,		Kendal,		Waduk		Waduk		Sungai		10 lokasi		
		Pengembangan	Malahayu,	Semarang,		Jepara,		Mrica dan		Mrica dan		Bengawan				
		Angkutan Sungai Danau	Sempor,	Jepara,		Waduk		Waduk		Penjalin,		Solo,				
		dan Penyeberangan	Wadaslintas,	Kendal,		malahayu,		Penjalin,		Sungai		Serayu,				
		(ASDP)	Kedungombo,	Cilacap		Sempor		Malahayu,		Bengawan		Waduk				
			Gajahmungkur,					Sempor,		Solo,		Mrica dan				
			Cacaban, Rawa					Jepara,		Serayu ,		Penjalin,				
			Pening, Mrica					Kendal		Cilacap		Kendal,				
												Cilacap				
						1 kapal		-		1 kapal				2 kapal		
		f Terlaksananya fasilitasi	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		
		Pengembangan														
		Perkeretaapian														
	2. Program Pengembangan				5.100.000		9.350.000		10.285.000		10.799.250		3.500.000		39.034.250,00	
	Perhubungan Laut [9]	a Beroperasinya Kapal KMC	KMCKartini 312	312 trip/th		312 trip/th		312 trip/th		312 trip		312 trip		KMC Kartini		Dinas
		Kartini 1 dan Kemujan	trip/th dan	dan 108 trip		dan 108 trip		dan 108 trip		/th dan		/th dan		312 trip/th		Perhubungan,
			Kemujan 108							108 trip		108 trip		Kemujan		Komunikasi dan
			trip/th											108 trip/th		Informatika
		b Meningkatnya	Terbangunnya	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		-		Kewajiban		
		Ketersediaaan Fasilitas	lapangan											Pemprov Jateng		
		Pelabuhan Kendal	penumpukan											utk pembangunan		
			seluas 200 x											Pelabuhan		
			126,5 m											Kendal terpenuhi		
														tahun 2017		
		c Terlaksananya Fasilitasi	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		
		Pengembangan Pelabuhan														
		dan Keselamatan														
		Pelayaran														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3. Program Pengembangan				3.175.000		850.000		850.000		500.000		500.000		5.875.000,00	
	Perhubungan Udara[9)]	a Terselesaikannnya	pengadaan s.d	Sisa lahan ±		-		-		-		-		Kewajiban		Dinas
		pengadaan tanah	2012 : 3,92 ha;	1,93 ha										pemprov		Perhubungan,
		Pengembangan Bandar	Prediksi s.d											Jateng tuntas		Komunikasi dan
		Udara Dewadaru	2013 : 7,4 ha											9,35 ha		Informatika
		b Terlaksananya Fasilitasi	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		
		pengembangan, peman-														
		tauan dan Pembinaan														
		Perhubungan Udara														
	4. Program Pos,	Terlaksananya fasilitasi	100,00%	100,00%	805.000	100,00%	983.650	100,00%	1.131.198	100,00%	1.300.877	100,00%	3.150.000	100%	7.370.724,63	Dinas
	Telekomunikasi dan	Pengembangan pelayanan														Perhubungan,
	SAR[9)]	Pos, Telekomunikasi dan														Komunikasi dan
		SAR														Informatika; Set.
																BPBD
8.	**Urusan Lingkungan Hidup**				**30.792.500**		**34.301.275**		**39.283.907**		**45.743.937**		**50.534.259**		**200.655.876,94**	
	1. Program Pengendalian															
	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan[10]				13.036.000		14.302.580		16.447.967		18.917.362		21.187.291		83.891.200,55	
		- Informasi status mutu air	6 (100%)	7 (100%)		8 (100%)		9 (100%)		10 (100%)		11 (100%)		11 (100%)		BLH
		(SPM)														
		- Jumlah pengaduan akibat	100% (2012)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BLH, Dinas ESDM
		dugaan pencemaran/														
		kerusakan lingkungan														
		yang ditindaklanjuti (SPM)														
		- Terlaksananya	27 UMKM/	8 UMKM/		8 UMKM/		8 UMKM/		8 UMKM/		8 UMKM/		40 UMKM/		BLH, Dinperindag,
		pengendalian dan	Obyek	Obyek		Obyek		Obyek		Obyek		Obyek		Obyek		Bapermasdes
		pengawasan thd sumber	Domestik	Domestik		Domestik		Domestik		Domestik		Domestik		Domestik		
		pencemaran pada														
		UMKM/obyek domestik	190 Usaha	205 Usaha		220 Usaha		235 Usaha		250 Usaha		265 Usaha		268 Usaha		BLH
		dan usaha dan/atau	dan/atau	dan/atau		dan/atau		dan/atau		dan/atau		dan/atau		dan/atau		
		kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		
		menengah/besar serta														
		penanganan pemukiman	Obyek Kumuh	1 Obyek Kumuh		1 Obyek Kumuh		1 Obyek Kumuh		1 Obyek Kumuh		1 Obyek Kumuh		5 Obyek Kumuh		BLH, Ro. Bina
		kumuh	Nihil	2 Bank Sampah		2 Bank Sampah		2 Bank Sampah		2 Bank Sampah		2 Bank Sampah		10 Bank Sampah		Produksi
		- Terlaksananya pembinaan	175 pelaku	100 pelaku		100 pelaku		100 pelaku		100 pelaku		100 pelaku		500 pelaku		BLH
		perbaikan kinerja														
		pengelolaan B-3 dan														
		limbah B-3 bagi pelaku														
		usaha dan/kegiatan														
		sesuai dengan peraturan														
		perundang-undangan														
		(di luar Proper)														
		- Pengawasan pelaksa-	7 usaha/keg	9 usaha/keg		10 usaha/keg		12 usaha/keg		11 usaha/keg		8 usaha/keg		50 usaha/keg		BLH
		naan dan pengelolaan														
		lingkungan hidup bagi														
		usaha dan/keg wajib														
		AMDAL atau UKL-UPL														
	2. Program Perlindungan				4.000.000		4.200.000		4.830.000		5.699.400		6.269.340		24.998.740,00	
	dan Konservasi Sumber	- Penanaman bibit tana-	450	220		220		220		220		220		1100		BLH
	Daya Alam[10)]	man konservasi di kawa-														
		san lindung di luar kawa-														
		san hutan (ha) (sampai														
		pemeliharaan 3 bln)														
		- Penanaman tanaman	22	20		20		15		15		15		85		BLH
		ungggulan lokal daerah/														
		tanaman langka (jenis)														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3. Program Pengelolaan				750.000		1.050.000		1.207.500		1.424.850		1.610.081		6.042.430,50	
	Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan kualitas	70	40		40		40		40		40		200		BLH
	(RTH)[10]	Ruang Terbuka Hijau														
		(RTH) di wilayah														
		perkotaan (ha)														
	4. Program Rehabilitasi				10.050.000		11.497.500		13.222.125		15.602.108		17.162.318		67.534.050,75	
	dan Pemulihan															
	Cadangan Sumber Daya															
	Alam[10]	- Bangunan pencegah	700	800		500		550		500		450		2800		BLH dan Dinas
		abrasi/erosi (m)														Perkebunan
		- tanaman penghijauan	40	40		40		40		40		40		200		BLH
		di wilayah pesisir (ha)														
		- Informasi status mutu	35 kab/kota	35 kab/kota		35 kab/kota		35 kab/kota		35 kab/kota		35 kab/kota		35 kab/kota		BLH
		udara ambien (SPM)														
		- Lokasi lahan bekas	6	3		2		2		2		2		11		Dinas ESDM
		pertambangan yg														
		direklamasi														
		- Pembangunan sumur	11	6		5		5		5		5		26		Dinas ESDM
		pantau (unit)														
	5. Program Pengembangan	Peningkatan kapasitas			2.450.000		2.681.000		2.949.100		3.391.465		3.561.038		15.032.603,25	
	Kapasitas Pengelolaan	SDM dan														
	Sumber Daya Alam dan	kelembagaannya														
	Lingkungan Hidup	- ADIWIYATA (sekolah)	9	12		17		21		22		24		24		BLH
	6. Program Peningkatan				506.500		570.195		627.215		708.752		744.190		3.156.851,89	
	Kualitas dan Akses	Tersedianya informasi	3	3		3		3		3		3		3		BLH
	Informasi Sumber Daya	lingkungan hidup Jawa														
	Alam	Tengah (jenis)														
9.	**Urusan Pertanahan**				**3.560.000**		**3.780.100**		**4.233.712**		**4.868.769**		**5.209.583**		**21.652.163,42**	
	Program Penataan	- Meningkatkan Bidang			3.560.000		3.780.100		4.233.712		4.868.769		5.209.583		21.652.163,42	Biro Tata
	Penguasaan,	tanah yang terpetakan														Pemerintahan
	Pemilikan,	(bidang tanah yang														Bapermades
	Penggunaan, dan	terpetakan).														Dinas Cipkataru
	Pemanfaatan Tanah	· Identifikasi HGU	48	10		10		16		16		15		67		
		· Identifikasi HGB	35	8		8		0		0		0		16		
		· Identifikasi HP	55	10		10		14		16		17		67		
		- Terselesaikannya	48	7		13		12		8		10		50		
		konflik- konflik														
		pertanahan (jumlah														
		konflik)														
		- Tergantikannya tanah	1.360.821	173.550		212.079		124.824		173.550		124.824		808.827		
		kas desa untuk	dengan	dengan		dengan		dengan		dengan		dengan		dengan		
		pembangunan	1.832.032	237.196		361.101		181.439		237.196		181.436		1.198.368		
		kepentingan umum dg														
		tanah yg lebih baik														
		nilainya														
		- Sertifikasi tanah	15.183	1.500		1.750		1.250		1.750		1.500		7.750		
		masyarakat dalam														
		kawasan lindung dan														
		LP2B														
10.	**Urusan Kependudukan**				**2.290.500**		**2.359.215**		**2.642.321**		**3.038.669**		**3.342.536**		**13.673.240,53**	
	dan Catatan Sipil															
	Program Penataan				2.290.500		2.359.215		2.642.321		3.038.669		3.342.536		13.673.240,53	
	Administrasi															
	Kependudukan	Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP (%)	85,17 (sampai 9 juli 2013)	100		100		100		100		100		100		Dinakertransduk

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Penduduk 0 - 18 Tahun memiliki Akta Kelahiran	31,49	45		55		65		70		80		80		Dinakertransduk
		Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK	35	35		35		35		35		35		35		Dinakertransduk
11.	**Urusan Pemberdayaan**				**8.838.569**		**8.603.247**		**9.893.735**		**11.581.546**		**13.121.609**		**52.038.705,96**	
	Perempuan dan															
	Perlindungan Anak															
	1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan[8)]	1 Produk Kebijakan PUG	2	3	1.066.000	3	515.550		592.883		681.815		749.996		3.606.243,74	BP3AKB
		2 Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan	5	1		1		1		0		0		3		BP3AKB
		3 Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur	1	1		2		2		1		1		2		BP3AKB
		4 Produk hukum kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, serta responsif anak skala provinsi	1 Perda	1 Pergub		-		-		-		-		1 Perda 1 Pergub		BP3AKB
	2 Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak[8)]				1.478.669		1.542.102		1.773.418		2.092.633		2.301.896		9.188.718,62	BP3AKB
		1 Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi (%)	35	40		48		58		63		68		68		
		2 Rasio Anggaran responsif gender di SKPD Provinsi (%)	14,1	16,3		19,2		23,2		26,1		28,3		28,3		
		3 Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (%)	62,85	62,85		65,99		69,28		72,74		76,37		76,37		
	3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak[8)]				5.406.500		5.676.825		6.528.349		7.638.168		8.783.893		34.033.735,03	BP3AKB
		1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66,80 (2012)	67,63		68,22		68,81		69,40		69,99		69,99		
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,66 (2012)	69,99		70,49		70,99		71,49		71,99		71,99		
		3. Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan	2,58	2,52		2,45		2,40		2,36		2,32		2,32		
		4. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	21	30		30		30		30		30		30		
		5. Persentase perempuan di lembaga swasta	89,44	92,37		93,88		94,65		95,34		95,82		95,82		BP3AKB

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6. Rasio ketercapaian SPM														
		Layanan Terpadu Korban														
		Kekerasan Berbasis														
		Gender dan Anak serta														
		trafficking :														
		- Cakupan ketersediaan	9,91	35,77		48,7		61,77		74,84		87,91		87,91		BP3AKB
		tenaga pelayanan pe-														
		ngaduan terlatih yang														
		mampu menindaklan-														
		juti pengaduan														
		- Cakupan ketersedian	11,6	14,6		14,6		17,6		20,6		23,6		23,6		BP3AKB
		petugas bantuan hkm														
		terlatih untuk men-														
		dampingi perempuan														
		dan anak korban dan														
		atau saksi KTP/KTA														
		- Cakupan layanan	92	100		100		100		100		100		100		BP3AKB
		pemulangan bagi														
		perempuan dan anak														
		korban kekerasan														
		7 Rasio kabupaten/kota	48,6	62,8		77,1		94,3		100		100		100		BP3AKB
		menuju Kota Layak Anak														
		8 Rasio kabupaten/kota	2,8 ; 2,8	5,7; 2,8		11,4; 5,7		17,1; 8,6		22,8; 11,4		28,6; 14,3		28,6		BP3AKB
		yang memenuhi														
		Perlindungan Anak,														
		kesejahteraan dan														
		hak-hak anak														
		9 Rasio KDRT pada perempuan dan anak	0,03	0,028		0,026		0,022		0,019		0,017		0,017		BP3AKB
	4 Program Peningkatan				887.400		868.770		999.086		1.168.930		1.285.823		5.210.008,57	BP3AKB
	Peran Serta Anak dan	Rasio forum anak yang	11,4	14,3		28,6		42,9		57,1		71,4		71,4		
	Kesetaraan Gender	terlibat dalam														
	dalam Pembangunan[8)]	pengambilan kebijakan														
12.	**Urusan Keluarga**				**3.899.652**		**3.980.217**		**4.546.476**		**5.283.145**		**5.966.394**		**23.675.883,19**	
	Berencana dan Keluarga															
	Sejahtera															
	1. Program Pelayanan Keluarga Berencana[6) 8)]				2.913.752		2.954.440		3.397.606		3.975.198		4.571.478		17.812.473,88	BP3AKB
		1. *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%)*	76,00	77,00		78,00		79,00		79,50		80,00		80,00		
		2. DO KB (%)	15,09	14,75		14,50		14,00		13,75		13,50		13,50		
		3. *Unmet Need* (%)	10,26	10,00		9,75		9,50		9,25		9,00		9,00		
	2. Program Peningkatan				236.650		243.750		272.999		319.409		351.350		1.424.158,56	BP3AKB
	Kesehatan Reproduksi															
	Remaja															
		Persentase usia	2,22	2,21		2,20		2,19		2,18		2,17		2,17		
		perkawinan perempuan														
		Pasangan Usia Subur														
		(PUS) kurang dari 20 tahun														
	3. Program Pengembangan				135.250		149.608		167.560		184.316		193.532		830.266,60	BP3AKB
	Model Operasional BKB,															
	Posyandu dan PAUD	Produk Hukum	1 Perda	0		1 Draft Pergub		1 Pergub		0		0		1 Pergub		
		pengembangan ketahanan														
		dan pemberdayaan														
		keluarga														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri				83.000		85.490		95.749		112.026		123.229		499.493,60	BP3AKB
		1. Jumlah KB Mandiri	2.964.527	2.994.172,27		3.024.113,99		3.054.355,13		3.084.898,68		3.115.747,67		3.115.747,67		
		2. Persentase UPPKS ber KB	82,97	83,50		83,75		84,00		84,25		84,50		84,50		
	5. Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita				531.000		546.930		612.562		692.195		726.804		3.109.490,55	BP3AKB
		Persentase kabupaten/ kota yang telah membentuk jaringan KB/KS	100	100		100		100		100		100		100		
13.	**Urusan Sosial**				**38.175.000**		**40.476.750**		**46.851.743**		**55.896.104**		**63.092.080**		**244.491.676,61**	
	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya[3)]				6.400.000		6.912.000		8.156.160		9.787.392		11.255.501		42.511.052,80	
		- Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial	6.177	6.421		7.411		6.776		6.821		7.311		34740		DINSOS
		- Jumlah perintis kemerdekaan/ keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan Sosial	54	54		54		54		54		54		270		DINSOS
	2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial[3)]				11.750.000		12.906.000		15.229.080		18.274.896		21.016.130		79.176.106,40	
		- Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP	27	27		27		27		27		27		27		DINSOS
		- Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah	4.112	4.092		4.092		4.092		4.092		4.092		20.460		DINSOS
	3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial				2.625.000		2.703.750		3.109.313		3.731.175		3.992.357		16.161.594,75	
		Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan	18.075	33.712		34.807		35.352		35.147		34.337		173.355		DINSOS
	4. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial[3)]				8.160.000		8.253.000		9.490.950		11.389.140		13.097.511		50.390.601,00	
		- Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.200	2.298		2.368		2.468		2.508		2.558		12.200		DINSOS
	5. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana[10)]				9.240.000		9.702.000		10.866.240		12.713.501		13.730.581		56.252.321,66	
		- Jumlah TAGANA yang dikerahkan kelokasi kejadian bencana	13	13		14		14		15		16		72		BPBD DINSOS
		- Kabupaten/Kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana	35	35		35		35		35		35		35		BPBD DINSOS

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	**Urusan Ketenagakerjaan**				**19.464.530**		**21.527.132**		**24.756.202**		**30.486.958**		**35.060.002**		**131.294.824,21**	
	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja[5)]				4.697.500		5.586.300		6.424.245		8.030.306		9.234.852		33.973.203,44	
		- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,02 (Agustus)	5,04		4,76		4,54		4,38		4,26		4,26		Dinakertransduk
		- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,72 (Agustus)	72,27		72,58		72,90		73,22		73,55		73,55		Dinakertransduk
		- Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	68,43	69,32		70,18		71,01		71,83		72,63		72,63		Dinakertransduk
		- Jumlah AKAN (orang)	84.700	85.000		85.300		85.500		81.000		80.000		80.000		Dinakertransduk
	2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja[5)]				7.337.080		7.970.486		9.166.059		11.457.574		13.176.210		49.107.410,29	
		- Produktivitas tenaga kerja (dalam juta rupiah)	13,9	14,23		14,91		15,63		16,41		17,23		17,23		Dinakertransduk
		- Laju PDRB per tenaga kerja (%)	13,9	14,23		14,91		15,63		16,41		17,23		17,23		Dinakertransduk
		- Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja	38,48	37,27		36,08		34,91		33,77		32,68		32,68		Dinakertransduk
	3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan[5)]				7.429.950		7.970.346		9.165.898		10.999.077		12.648.939		48.214.210,48	
		- Rasio Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHL (%)	97,3	97,4		97,5		97,6		97,7		97,8		97,8		Dinakertransduk
		- Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI	4.000	3.500		3.000		2.500		2.000		1.500		12.500		Dinakertransduk
15.	**Urusan Koperai dan Usaha Kecil Menengah**				**23.455.000**		**31.767.750**		**35.851.725**		**42.988.460**		**49.060.791**		**183.123.725,23**	
	1. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM [4)]	- Persentase koperasi aktif	79,73	80,71	2.880.000	81,05	3.348.000	81,45	3.783.240	81,90	4.539.888	82,50	5.220.871	82,50	19.771.999,20	Dinkop UMKM
		- Persentase Koperasi sehat	15,02	15,70		16,20		17,15		18,30		19,50		19,50		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas	-	32,75		43,00		52,00		61,00		71,00		71,00		
	2. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal [4]	- Jumlah Produk/komoditas OVOP (komoditas)	70	105	11.450.000	140	14.040.000	175	15.865.200	210	19.038.240	245	21.893.976	245	82.287.416,00	Dinkop UMKM Biro Perekonomian Kantor Perwakilan
	3. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efekivitas Pembiayaan[4] [5]	- Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha	17,97	22,00	1.800.000	24,00	2.646.000	25,00	2.989.980	25,50	3.587.976	25,80	4.126.172	25,80	15.150.128,40	Dinkop UMKM
	4. Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha [4]	- Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	5 prov	7prov	5.350.000	10 prov,1 LN	10.206.000	13 prov, 2 LN	11.532.780	16 prov, 3 LN	13.839.336	19 prov, 4 LN	15.638.450	19 prov, 4 LN	56.566.565,68	Dinkop UMKM
	5. Program Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM [4]	- Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)	11.912	12.950	1.975.000	14.175	1.527.750	15.625	1.680.525	17.375	1.983.020	19.575	2.181.321	19.575	9.347.615,95	Dinkop UMKM
16.	**Urusan Penanaman Modal**				**5.476.648**		**5.540.480**		**6.205.338**		**7.322.299**		**8.054.529**		**32.599.294,13**	
	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi [5]	1. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/ tahun	1	1	1.878.648	1	1.972.580	1	2.209.290	1	2.606.962	1	2.867.658	5	11.535.139,19	BPMD
		2. Jumlah Penyelenggaraan Promosi Peluang Penanaman Modal provinsi	5	1		1		1		1		1		5		BPMD Biro Perekonomian
	2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi [5]	1. Jumlah investor (PMA/PMDN)	32	33	3.100.000	36	3.045.000	37	3.410.400	39	4.024.272	40	4.426.699	185	18.006.371,20	
		2. Jumlah nilai investasi (PMA/ PMDN)	3,088 T	3,228 T		3,374 T		3,525 T		3,682 T		3,846 T		3,846 T		BPMD
		3. Daya serap tenaga kerja (orang)	1.448	1.434		1.342		1.333		1.290		1.283		6.682		BPMD

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4. Persentase pelayanan	60	100		100		100		100		100		100		BPMD
		perijinan dan														
		nonperijinan bidang														
		penanaman modal														
		melalui Pelayanan														
		Terpadu Satu Pintu														
		(PTSP) di Bidang														
		Penanaman Modal:														
		Pendaftaran														
		Penanamanan Modal														
		Dalam Negeri, Ijin														
		prinsip Penanamanan														
		Modal Dalam Negeri, Ijin														
		Usaha Penanamanan														
		Modal Dalam Negeri,														
		Perpanjangan Rencana														
		Penggunaan Tenaga														
		Kerja Asing (RPTKA),														
		Perpanjangan Izin														
		Mempekerjakan Tenaga														
		Kerja Asing (IMTA) yang														
		bekerja lebih di 1 (satu)														
		kabupaten/kota sesuai														
		kewenangan pemerintah														
		provinsi.														
		5. Persentase implementasi	100	100		100		100		100		100		100		BPMD
		Sistem Pelayanan														
		Informasi dan Perijinan														
		Investasi Secara														
		Elektronik (SPIPISE) (%)														
		6. jmlh penyelenggaraan	1	1		1		1		1		1		5		BPMD
		bimbingan pelaksanaan														
		kegiatan penanaman														
		modal kepada masyarakat														
		dunia usaha (kali)														
		7. Jmlh penyelenggaraan	1	1		1		1		1		1		5		BPMD
		sosialisasi kebijakan														
		penanaman modal kepada														
		masyarakat (kali)														
	3. Program Penyiapan				498.000		522.900		585.648		691.065		760.171		3.057.783,74	BPMD
	Potensi Sumberdaya,															
	Sarana dan Prasarana	Tersedianya Informasi	1	1		1		1		1		1		5		BPMD
	Daerah [5)]	Peluang Usaha Sektor														
		/Bidang Usaha Unggulan														
		(sektor/bidang/usaha/														
		tahun)														
17.	**Urusan Kebudayaan**				**19.026.700**		**18.455.535**		**20.430.659**		**23.495.257**		**25.390.255**		**106.798.405,30**	
	1. Program Pembinaan	Meningkatnya pemahaman			12.441.700		11.541.285		12.695.414		14.599.726		15.621.706		66.899.830,34	Dinas Budpar
	Tradisi, Kesenian dan	masyarakat terhadap														
	Nilai Budaya [1)]	nilai-nilai tradisi, kesenian														
		dan budaya daerah :														
		a. Jumlah penyelenggaraan	8	7		7		7		7		8		8		
		festival seni dan budaya														
		(kali)														
		b. Jumlah sarana	2	8		8		8		8		9		9		
		penyelenggaraan seni														
		dan budaya (lokasi)														
		c. Jumlah regulasi	1	1		1		1		1		1		1		
		pengembangan														
		kebudayaan														
		d. Cakupan kelompok	745	745		745		745		745		745		745		
		budaya yang dibina														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		e. Cakupan SDM Kesenian														
		(jumlah seniman yang	11.269	4.725		175		175		175		175		175		
		dibina sejarahwan, ahli														
		kepurbakalaan														
		f. Cakupan fasilitas seni	6	6		6		6		6		6		6		
		g. Cakupan tempat	3	3		3		4		7		9		9		
		kesenian (jumlah														
		gedung kesenian)														
		h. Jumlah misi kesenian	4	4		4		4		4		4		4		
		(pengiriman seni ke LN)														
		i. Cakupan kajian seni	1	1		1		1		1		1		5		
		j. Cakupan gelar seni :	20 Kab/Kota	30 Kab/Kota		35 Kab/Kota		35 Kab/Kota		35 Kab/Kota		35 Kab/Kota		35 Kab/Kota		
		- Jumlah pagelaran,	2 kali	2 kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		
		pameran, festival,														
		lomba dan pawai														
		k. Jumlah kelompok	9857	35		35		35		35		35		35		
		kesenian														
	2. Program Pelestarian	Terpeliharanya pelestarian														
	dan Pengembangan	kesenian dan BCB daerah			6.170.000		6.478.500		7.255.920		8.344.308		9.178.739		37.427.466,80	Dinas Budpar
	Kesenian dan Cagar															
	Budaya	a. Jumlah cagar budaya yang														
		dilestarikan :														
		- jumlah cagar budaya	199	200		200		200		200		200		200		
		(candi, situs)														
		- jumlah cagar budaya	4	5		5		5		5		5		5		
		yang dilestarikan (candi,														
		situs) lokasi														
		- Persentase (%)	2,01	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		
		b. Jumlah warisan budaya	6	6		6		6		6		6		6		
		dunia nasional yang														
		ditetapkan dan dikelola														
		secara terpadu														
		c. Jumlah koleksi naskah	2500	2500		2500		2500		2500		2500		2500		
		kuno yang diselamatkan														
		dan dikelola														
		d. Jumlah situs/kawasan	143	200		200		200		200		200		200		
		yang diinventarisir dan														
		ditetapkan														
		e. Jumlah museum yang	9	8		8		8		8		8		8		
		dioptimalkan														
		f. Jumlah pengunjung	1.201.642	1.300.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000		1.800.000		1.800.000		
		museum														
	3. Program Pembinaan	Meningkatnya penghayatan			415.000		435.750		479.325		551.224		589.809		2.471.108,16	Dinas Budpar
	Penghayat Kepercayaan	kepercayaan terhadap Tuhan														
	Terhadap Tuhan Yang	Yang Maha Esa														
	Maha Esa															
		- Jumlah organisasi														
		penghayat dan upacara														
		tradisional di Jateng														
		a. Jumlah penghayat (orang)	188.172	188.172		188.172		188.172		188.172		188.172		188.172		
		b. Jumlah organisasi	68	68		68		68		68		68		68		
		penghayat														
		c. Jumlah upacara	190	190		190		190		190		190		190		
		tradisional														
18.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				**31.690.300**		**30.347.115**		**33.381.827**		**38.935.769**		**41.245.183**		**175.600.194,00**	
	1. Program Pengembangan	Meningkatnya kinerja manajemen			965.000		1.013.250		1.114.575		1.281.761		1.345.849		5.720.435,00	DINPORA
	dan Keserasian	dan harmonisasi kebijakan														
	Kebijakan Kepemudaan	kepemudaan dan keolahragaan														
	dan Olahraga															
		- Jumlah fasilitasi	105 orang dan 2	210 orang dan 3		210 orang dan 3		210 orang dan 3		210 orang dan 3		210 orang dan 3		210 orang dan 3		
		Pengembangan Kemitraan	paket	paket		paket		paket		paket		paket		paket		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2. Program Peningkatan	Meningkatnya partisipasi/peran			4.142.500		4.087.125		4.495.838		5.260.130		5.786.143		23.771.736,00	DINPORA
	Penyadaran dan	aktif pemuda dalam														
	Pemberdayaan	pembangunan														
	Kepemudaan															
		- Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)	40	40		50		60		60		70		280		
	3. Program Peningkatan	Meningkatnya kewirausahaan			1.500.000		1.575.000		1.732.500		1.992.375		2.191.613		8.991.488,00	DINPORA
	Kewirausahaan dan	dan ketrampilan/kecakapan														
	Kecakapan Hidup	hidup pemuda														
	Pemuda	- Jumlah Kewirausahaan Pemuda	380 orang 80 kelompok	560 orang 80 kelompok		650 orang 85 kelompok		680 orang 85 kelompok		700 orang 90 kelompok		720 orang 90 kelompok		3310 orang 430 kelompok		
	4. Program Pembibitan,	Meningkatnya pembibitan atlet,			21.272.800		20.761.440		22.837.584		26.719.973		28.055.972		119.647.769,00	DINPORA
	Pembinaan dan	prestasi dan budaya olahraga														
	Pemasyarakatan															
	Olahraga	- Terselenggaranya kompetisi keolahragaan dan fasilitasi olahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional.	24.355 orang	39.042 orang		42.192 orang		41.164 orang		43.754 orang		42.669 orang				
		- Jumlah atlet yg dibina melalui PPLPD	120 atlet (2012)	142 atlet		150 atlet		160 atlet		165 atlet		170 atlet				
	5. Program Pengembangan	Meningkatnya kualitas dan			1.210.000		1.246.300		1.370.930		1.576.570		1.655.398		7.059.198,00	DINPORA
	Kapasitas	kapasitas kelembagaan organisasi														
	Kelembagaan/Organisasi	olahraga														
	Olahraga	- Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan IPTEK dan industri olahraga	1290 orang	1430 orang		1545 orang		1545 orang		1545 orang		1545 orang		1545 orang		
	6. Program Peningkatan	Meningkatnya kualitas dan			2.600.000		1.664.000		1.830.400		2.104.960		2.210.208		10.409.568,00	DINPORA
	Sarana dan Prasarana	kuantitas sarana dan prasarana														
	Kepemudaan dan	keolahragaan														
	Keolahragaan	- Jumlah Klub Olah Raga	105	105		105		105		105		105		525		
19.	**Urusan Kesatuan Bangsa**				**38.640.324**		**41.019.924**		**45.121.916**		**52.175.587**		**56.733.631**		**233.691.381,79**	
	dan Politik Dalam Negeri															
	1. Program Peningkatan	Kondusivitas daerah	35	35	10.170.270	35	13.881.284	35	15.269.412	35	17.712.518	35	18.598.144	35	75.631.626,73	Kesbanglinmas
	Keamanan dan	provinsi dan														Satpol PP
	Kenyamanan	kabupaten/kota di Jawa														Ro. Humas
	Lingkungan	Tengah														
	2. Program Pengembangan	Meningkatnya efektivitas	35	35	3.638.730	35	3.364.200	35	3.700.620	35	4.292.719	35	4.764.918	35	19.761.187,51	Kesbanglinmas
	Wawasan Kebangsaan[1)]	penyelenggaraan														
		pembangunan bidang														
		ketahanan ideologi negara,														
		wawasan kebangsaan, bela														
		negara, nilai-nilai sejarah														
		kebangsaan dan														
		penghargaan kebangsaan														
		skala provinsi (Kab/Kota)														
	3. Program Kemitraan	Meningkatnya kapasitas	280	300	1.459.000	320	1.520.400	340	1.672.440	360	1.940.030	380	2.134.033	380	8.725.903,84	Kesbanglinmas
	Pengembangan	aparatur kesbangpol														
	Wawasan Kebangsaan[1)]	tentang ketahanan														
		ideologi negara, wawasan														
		kebangsaan, bela negara,														
		nilai-nilai sejarah														
		kebangsaan dan														
		penghargaan kebangsaan														
		(jmlh aparatur kesbangpol)														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. Program Pemberdayaan				4.340.252		4.032.265		4.435.491		5.145.170		5.762.590		23.715.767,27	Kesbanglinmas
	Masyarakat untuk															Satpol PP
	Menjaga Ketertiban	- Persentase Penanganan	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		Ro. Tapem
	dan Keamanan[1)]	konflik sosial														
		- Pembentukan kader	-	1350		1350		1350		1350		675		6075		
		Tibumtranmas														
	5. Program Peningkatan				3.546.000		3.145.800		3.460.380		4.014.041		4.495.726		18.661.946,50	Kesbanglinmas
	Pendidikan Politik															
	Masyarakat[1)]															
		- Persentase Penggunaan														
		hak pilih dalam :														
		- Pemilu Legislatif	-	75		-	-	-	-	-	-	-	-	75		Kesbangpolinmas
		- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	-	75		-	-	-	-	-	-	-	-	75		Kesbangpolinmas
		- Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	58,46	-		-	-	-	-	-	-	75	-	75		Kesbangpolinmas
		- Pemilukada kabupaten/ kota	64,40	66,52		68,64	-	70,76	-	72,88	-	75	-	75		Kesbangpolinmas
		- Indeks Demokrasi	66,85	67,48		68,11		68,74		69,37		70,00		70,00		Kesbangpolinmas
		Indonesia di Jawa Tengah														
	6. Program Peningkatan	Rasio jumlah Ratih/	0,0084	0,0085	13.234.600	0,0086	12.846.330	0,0087	14.130.963	0,0088	16.250.607	0,0089	17.875.668	0,0089	74.338.168,65	Kesbangpolinmas
	Kemampuan	Linmas dengan jumlah														
	Perlindungan	penduduk														
	Masyarakat (LINMAS)															
	dan Rakyat Terlatih															
	(RATIH)[1)]															
	7. Program Pemeliharaan	Pengendalian dan	35 kab/kota	35 kab/kota	2.251.472	35 kab/kota	2.229.646	35 kab/kota	2.452.610	35 kab/kota	2.820.502	35 kab/kota	3.102.552	35 kab/kota	12.856.781,30	Satpol PP
	Kamtrantibmas dan	penanganan														
	Pencegahan Tindak	ketenteraman dan														
	Kriminal[1)]	ketertiban umum														
20.	**Urusan Otonomi Daerah,**															
	Pemerintahan Umum,				**225.753.873**		**232.885.308**		**252.673.838**		**287.331.484**		**314.674.550**		**1.313.319.053,21**	
	Administrasi Keuangan															
	Daerah, Perangkat Daerah,															
	Kepegawaian dan															
	Persandian															
	1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan[2)]	a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan daerah yang disusun	17 Perda	17 Perda	8.067.950	15 Perda	8.412.989	15 Perda	9.254.287	15 Perda	10.457.345	15 Perda	11.503.079	77 perda	47.695.649,73	Ro. Hukum
		b Persentase Penindakan pelanggaran Perda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum[2)]				35.192.914		33.818.931		35.200.824,56		40.480.948,25		44.529.043,07		189.222.661,30	
		a. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikai ISO	19 UPP	21 UPP		23 UPP		25 UPP		27 UPP		29 UPP		29 UPP		15 SKPD
		b. Jumlah UPP yang melakukan pengukuran IKM	9 UPP	11 UPP		13 UPP		15 UPP		17 UPP		19 UPP		19 UPP		Biro Orpeg
		c. Perapatan pilar batas	40 pilar	50 pilar		75 pilar		50 pilar		50 pilar		50 pilar		275 pilar		Biro Tapem
		d. Perawatan Pilar Batas	55 pilar	0		50 pilar		60 pilar		80 pilar		80 pilar		270 pilar		Biro Tapem
		e. Pengendalian kinerja SKPD	48 SKPD	48 SKPD		48 SKPD		48 SKPD		48 SKPD		48 SKPD		48 SKPD		Biro Adm. Bangda
		f. Penyusunan LKPJ dan EKPPD	1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD	1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD		1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD		1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD		1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD		1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD		1 Dok LKPJ 1 Dok EKPPD		Biro Adm. Bangda Biro Otda Kerjasama

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		g. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan lintas kabupaten/kota	3 Bakorwil	3 Bakorwil		3 Bakorwil		3 Bakorwil		3 Bakorwil		3 Bakorwil		3 Bakorwil		Bakorwil I, II dan III
		h. Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu Diklat	1.130 dok	1.353 dok		1.618 dok		1.910 dok		2.196 dok		2.613 dok		2.613 dok		Badan Diklat
	3. Program Peningkatan				3.269.400		3.432.870		3.776.157		4.229.296		4.483.054		19.190.776,43	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah[2)]	a. Laporan LPPD Provinsi	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		Ro. Otda
		b. Pemetaan kapasitas Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tahap sosialisasi di 35 Kab/Kota	7 Kab/kota		7 Kab/kota		7 Kab/kota		7 Kab/kota		7 Kab/kota		35 Kab/kota		Ro. Otda
		c. Desk Pemilukada	1 provinsi 7 kab/kota	-		17 kab/kota		7 kab/kota		4 kab/kota		7 kab/kota		35 Kab/kota		Ro. Otda
	4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi[2)]				4.045.000		5.822.250		6.404.475		7.365.146		8.101.661		31.738.532,13	Dishubkominfo
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan LPSE dlm Pengadaan Barang dan Jasa	100	100		100		100		100		100		100		
	5. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah[2)]				2.187.200		2.274.688		2.502.157		2.827.437		3.277.309		13.068.791,40	Ro. Otda
		a. MoU dan tindak lanjut kerjasama Luar Negeri	6 MoU	5 MoU		5 MoU		5 MoU		5 MoU		5 MoU		5 MoU		
		b. MoU dan tindak lanjut kesepakatan Dalam Negeri	16 MoU	16 MoU		16 MoU		16 MoU		16 MoU		16 MoU		16 MoU		
	6. Program Peningkatan				40.763.230		39.257.142		41.682.856,09		46.267.970,26		49.506.728,18		217.477.926,43	
	dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah[2]	Peningkatan PAD	11,82%	12,61%		19,53%		13,48%		15,95%		16,31%		16,31%		Ro. Keu DPPAD
	7. Program Pengelolaan Aset Daerah[2)]				6.021.030		5.850.995		6.436.094,28		7.401.508,42		8.141.659,26		33.851.286,77	
		Persentase Asset yang dikelola dengan baik	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		DPPAD
	8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH[2)]				10.001.420		10.501.491		11.551.640,10		13.284.386,12		14.612.824,73		59.951.761,94	
		- Opini WTP	provinsi & 10 kab/kota	provinsi & 13 kab/kota		provinsi & 16 kab/kota		provinsi & 22 kab/kota		provinsi & 28 kab/kota		provinsi & 35 kab/kota		provinsi & 35 kab/kota		Inspektorat
		- Jumlah SKPD yg menerapkan SPIP	2 SKPD	2 SKPD		15 SKPD		59 SKPD		59 SKPD		59 SKPD		59 SKPD		Inspektorat
	8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan[2)]				130.000		136.500		150.150		172.673		189.940		779.262,25	
		Persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang professional	85%	90%		92%		94%		97%		100%		100%		Inspektorat

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah				51.439.273		55.804.639		61.385.102,63		69.365.165,97		76.301.682,56		314.295.862,90	
		Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Set.DPRD
	10. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah[2)]				64.636.456		67.572.813		74.330.094,51		85.479.608,69		94.027.569,55		386.046.541,94	
		- Promosi jabatan secara terbuka	Eselon III dan IV	Eselon I, II, III dan IV		Eselon I, II, III dan IV		Eselon I, II, III dan IV		Eselon I, II, III dan IV		Eselon I, II, III dan IV		Eselon I, II, III dan IV		BKD, Badan Diklat, Ro.Orpeg
		- Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	29.581 orang	32.837 orang		36.133 orang		39.313 orang		42.658 orang		45.853 orang		45.853 orang		Badan Diklat
21.	**Urusan Ketahanan Pangan**				**50.068.700**		**13.155.000**		**15.037.950**		**17.892.482**		**20.277.890**		**116.432.021,15**	
	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan [4)]				45.768.700		8.640.000		9.936.000		11.923.200		13.711.680		89.979.580,00	
		- Jumlah regulasi kedaulatan pangan	6	1		1		1		1		1		11		BKP
		- Ketersediaan pangan utama Beras (ton)	5.701.257	5.724.620		5.746.958		5.769.946		5.793.026		5.816.198		5.816.193		BKP
		- Persentase Penguatan cadangan pangan (%)	60	75		80		90		95		100		100		BKP
		- Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	95	97		100		100		100		100		100		BKP
		- Persentase Penanganan daerah rawan pangan (%)	50	55		60		60		60		60		60		BKP
	2. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan [4)]				2.650.000		2.782.500		3.144.225		3.678.743		4.046.618		16.302.085,83	
		- Skor PPH	90,00	90,75		91,13		91,5		91,86		92,23		92,23		BKP
	3. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan [4)]				1.650.000		1.732.500		1.957.725		2.290.538		2.519.592		10.150.355,33	
		- Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80		80		80		80		80		80		BKP
22.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**17.960.304**		**19.302.302**		**22.642.138**		**28.302.672**		**33.114.126**		**121.321.541,93**	
	1. Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa				7.881.650		8.889.815		10.667.778		13.334.723		15.601.625		56.375.590,83	Bapermades
		1 Jumlah LPMD/K yang dilatih	8578 orang	70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		350 orang		
		2 Jumlah KPM yang dilatih	1035 orang	300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		300 orang		14.621 orang		
		3 Jumlah aparat desa/ kelurahan yang dilatih	33.004 orang	105 orang		105 orang		105 orang		105 orang		105 orang		3.2479 orang		
		4 Jumlah Desa Mandiri	N.A.	-		6 desa		30 desa		34 desa		30 desa		100 desa		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat[4)]				6.128.154		6.316.962		7.264.506		9.080.632		10.624.340		39.414.594,06	Bapermades
		1 Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk	NA	25 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		145 Kelompok		
		2 Persentase PKK aktif di kab/kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		3 Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina (unit)	15.838	500		750		1250		1500		1.000		20.838		
	3 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat[4)]				3.950.500		4.095.525		4.709.854		5.887.317		6.888.161		25.531.357,05	Bapermades
		1 Jumlah UP2K yang aktif	332 unit	200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		200 unit		1.332 unit		
		2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	119	148		183		213		233		253		253		
		3 Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi (unit)	196	246		311		376		416		461		461		
		4. Jumlah UED-SP yang aktif	173	248		333		418		493		553		553		
23.	**Urusan Statistik**				**1.586.000**		**1.633.580**		**1.796.938**		**2.030.540**		**2.132.067**		**9.179.124,88**	
	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah				1.586.000		1.633.580		1.796.938		2.030.540		2.132.067		9.179.124,88	Bappeda
		Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi														
		- JDA	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		- PDRB Provinsi	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		- Tabel I-O	-	1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen		
		- Tinjauan PDRB Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
24.	**Urusan Kearsipan**				**4.248.550**		**4.440.601**		**4.792.555**		**5.313.798**		**5.597.678**		**24.393.181,78**	
	1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				2.037.650		2.119.156		2.331.072		2.680.732		2.814.769		11.983.378,90	
		- Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	50	12		12		12		12		12		60		Badan Arpus
		- Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kearsipan melalui Bintek	250 SDM Pengelola Kearsipan	250		250		250		250		250		1.250		Badan Arpus
	2. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				1.754.400		1.842.120		1.934.226		2.030.937		2.132.484		9.694.167,47	
		Jumlah arsip yang dilestarikan	75.000 arsip	3000 arsip		3500 arsip		4000 arsip		4500 arsip		5000 arsip		95.000 arsip		Badan Arpus
	3. Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat				182.600		191.730		210.903		238.320		250.236		1.073.789,80	
		Jumlah Media pemasyarakatan Kearsipan	5	3		3		3		3		3		3		Badan Arpus

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				273.900		287.595		316.355		363.808		400.188		1.641.845,62	
		Jumlah pengunjung/ pengguna arsip	1.534	2.400		2.700		2.900		3.100		3.300		14.400		Badan Arpus
25.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				**17.230.752**		**18.040.737**		**20.000.143**		**23.136.997**		**25.071.229**		**103.479.857,28**	
	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa[9)]				7.583.252		7.766.590		8.698.580		10.177.339		11.195.073		45.420.833,88	
		- Jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)	11	3		5		5		5		6		35		Dishub
	2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Massa				8.077.500		8.586.010		9.444.611		10.861.303		11.621.594		48.591.017,49	
		- Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	68,55	70		75		80		95		100		100		Set. KPID
		- Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran	100	100		100		100		100		100		100		Set. KPID
		- SKPD bidang kominfo yang melakukan sosialisasi kebijakan nasional	3	3		3		3		3		3		3		Set. KPID, Dishub dan Biro Humas
	3. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi				1.570.000		1.438.138		1.581.951		1.787.605		1.912.737		8.290.430,92	
		Jumlah kajian dan penelitian untuk mene-tapkan kebijakan di bidang Kominfo	5	5		5		5		5		5		25		Balitbang dan Biro Humas
	4 Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				-		250.000		275.000		310.750		341.825	100	1.177.575,00	
		- Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	58(2012)	100		100		100		100		100		100		Dishub kominfo
		- Persentase SKPD yang telah mengudate data di *website*nya hingga tahun n-1	85 (2012)	85		90		95		97		100		100		Dishub kominfo
26.	**Urusan Perpustakaan**				**6.321.000**		**7.162.050**		**7.993.083**		**9.192.045**		**10.021.394**		**40.689.572,33**	
	1. Program Pengembangan Budaya Baca[7)]	- Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	732.050 orang	768.653 orang	1.485.000	807.085 orang	1.559.250	847.439 orang	1.746.360	889.811 orang	2.008.314	934.302 orang	2.209.145	934.302 orang	9.008.069,40	Badan Arpus
		- Jumlah pendataan dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan	700 perpus	525 perpus		525 perpus		525 perpus		525 perpus		525 perpus		2625 perpus		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	- Jumlah perpustakaan penerima bantuan rak dan koleksi buku	70 perpusdes/kel	70 perpusdes/kel	3.483.000	70 perpusdes/ kel	4.182.150	70 perpusdes/ kel	4.684.008	70 perpusdes/kel	5.386.609	70 perpusdes/ kel	5.925.270	350 perpusdes/ kel	23.661.037,32	Badan Arpus & Biro Humas
			35 perpus sekolah	35 perpus sekolah		35 perpus sekolah		35 perpus sekolah		35 perpus sekolah		35 perpus sekolah		175 perpus sekolah		
			35 perpusling	35 perpusling		35 perpusling		35 perpusling		35 perpusling		35 perpusling		35 perpusling		
		- Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi	203.126	213.282		223.946		235.144		246.901		259.246		259.246		
	3. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek	210 orang	105 orang	400.000	105 orang	420.000	105 orang	462.000	105 orang	531.300	105 orang	557.865	525 orang	2.371.165,00	Badan Arpus
	4. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	- Jumlah pengembangan perpustakaan se Jateng	35 kab/kota	35 kab/kota	953.000	35 kab/kota	1.000.650	35 kab/kota	1.100.715	35 kab/kota	1.265.822	35 kab/kota	1.329.113	35 kab/kota	5.649.300,61	Badan Arpus
		- Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan	781	851		921		991		1.061		1.131		1.131		Badan Arpus
	URUSAN PILIHAN				**228.661.732**		**241.420.361**		**281.561.757**		**342.934.188**		**395.262.939**		**1.489.840.976,07**	
1.	**Urusan Pertanian**				**94.395.964**		**108.750.000**		**130.062.500**		**162.578.125**		**190.216.406**		**686.002.995,25**	
	1. Program Pengembangan Agribisnis [4)]				77.725.964		100.000.000		120.000.000		150.000.000		175.500.000		623.225.964,00	Dinpertan TPH, Dinbun, Dinnak Keswan dan Biro Bina Produksi
		- Produksi Padi (ton)	10.146.860	10.187.447		10.228.197		10.269.110		10.310.186		10.351.427		10.351.427		Dinpertan TPH
		- Produksi Jagung (ton)	2.992.843	3.004.814		3.016.834		3.028.901		3.041.017		3.053.181		3.053.181		Dinpertan TPH
		- Produksi Kedelai (ton)	135.785	139.587		143.389		147.191		150.993		154.795		154.795		Dinpertan TPH
		- Produksi bawang merah (ton)	426.975	428.042		429.112		430.185		431.260		432.338		432.338		Dinpertan TPH
		- Produksi kentang (ton)	288.106	288.826		289.548		290.272		290.998		291.725		291.725		Dinpertan TPH
		- Produksi cabe besar (ton)	121.275	122.488		123.713		124.950		126.200		127.462		127.462		Dinpertan TPH
		- Produksi Tebu (ton)	5.025.000	5.125.500		5.228.010		5.332.570		5.439.222		5.548.006		5.548.006		Dinbun
		- Produksi Kopi (ton)	16.550	16.881		17.219		17.563		17.914		18.273		18.273		Dinbun
		- Produksi Kakao (ton)	2.000	2.040		2.081		2.122		2.165		2.208		2.208		Dinbun
		- Produksi Kelapa (ton)	182.529	184.354		186.198		188.060		189.940		191.840		191.840		Dinbun
		- Produksi Karet (ton)	3.000	1.612		1.644		1.677		1.710		1.744		1.744		Dinbun
		- Produksi Cengkeh (ton)	6.400	6.528		6.659		6.792,0		6.928,0		7.066,0		7.066,00		Dinbun
		- Produksi Teh (ton)	7.000	6.696		6.830		6.967		7.106		7.248		7.248		Dinbun
		- Produksi Daging (Kg)	265.148.307	274.428.498		282.661.352		291.141.193		299.875.429		308.871.692		308.871.692		Dinnak Keswan
		- Produksi Susu (liter)	97.527.340	98.990.250		101.456.006		104.001.631		106.601.672		109.799.722		109.799.722		Dinnak Keswan
		- Produksi Telur (Kg)	268.036.393	278.757.849		285.726.795		292.869.965		300.191.714		307.696.507		307.696.507		Dinnak Keswan
	2. Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian [4)]						8.750.000		10.062.500		12.578.125		14.716.406		46.107.031,25	Sek Bakorluh
		- Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes	-	-		378 dan 3.333		398 dan 3.383		418 dan 3.433		438 dan 3.483		438 dan 3.483		Sek Bakorluh
		- Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian	34,01%	40%		50%		60%		70%		80%		80%		Sek Bakorluh
	3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes	338 dan 3.233	358 dan 3.233	16.670.000		-		-		-		-		16.670.000,00	Sek Bakorluh
		- Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian	34,01%	40%												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Urusan Kehutanan**				**11.855.744**		**11.238.385**		**12.783.394**		**14.939.166**		**16.947.874**		**67.764.563,69**	
	1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan[10)]				2.761.792		2.982.735		3.430.146		4.047.572		4.735.659		17.957.904,01	Dinas Kehutanan, Biro Bina Produksi
		a. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	5,00	10		15		20		25		30		30		
		b. Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)	8.959	10.000		20.000		30.000		40.000		50.000		50.000		
	2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				2.155.000		2.219.650		2.486.008		2.858.909		3.144.800		12.864.367,32	
		a. Persentase unit penge-lolaan hutan dan pengo-lahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK	13	14		15		16		17		18		18		Dinas Kehutanan
		b. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,53	0,53		0,63		0,73		0,83		0,93		0,93		Dinas Kehutanan
	3. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan				1.325.000		1.364.750		1.528.520		1.757.798		1.898.422		7.874.489,84	Dinas Kehutanan
		a. Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan	10	10		10		10		10		10		10		
		b. Persentase Pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kehutanan
	4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan [10)]				4.538.952		3.564.000		4.098.600		4.836.348		5.658.527		22.696.427,16	
		a. Persentase kawasan konservasi yang meningkat kualitas pengelolaanya	20	25		30		35		40		45		45		Dinas Kehutanan, Biro Bina Produksi
		b. Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan (lokasi)	15	20		25		30		35		40		40		Dinas Kehutanan
	5. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang	6	10	1.075.000	20	1.107.250	30	1.240.120	40	1.438.539	50	1.510.466	50	6.371.375,36	Dinas Kehutanan Set. Bakorluh
3.	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**				**45.740.000**		**35.990.000**		**40.794.925**		**48.288.604**		**55.535.284**		**226.348.813,23**	
	1. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah				12.000.000		11.225.000		12.684.250		14.967.415		17.212.527		68.089.192,25	
		a. Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan	86	86		86		87		87		87		87		Dinas ESDM, Biro Bina Produksi
		b. Persentase kajian cekungan air tanah	52,63	63,16		68,42		73,68		84,21		89,47		89,47		Dinas ESDM, Biro Bina Produksi
	2. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas [4)]	Rasio Elektrifikasi (%)	82,12	85,02	14.340.000	87,42	9.397.500	90,01	10.619.175	91,40	12.530.627	92,12	14.410.220	92,12	61.297.521,98	Dinas ESDM Biro Bina Produksi
	3. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi	Persentase mitigasi bencana alam geologi	11,6	15,51	2.450.000	17,47	3.622.500	19,60	3.984.750	21,73	4.582.463	23,87	4.949.060	23,87	19.588.772,00	Dinas ESDM

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. Program Pengembangan	Persentase pemanfaatan	6,1	6,92	15.950.000	7,74	11.745.000	8,54	13.506.750	9,38	16.208.100	10,2	18.963.477	10,2	76.373.327,00	Dinas ESDM, Dinperindag dan Ro. Bina Produksi
	Energi Baru Terbarukan	EBT terhadap total														
	dan Konservasi Energi [4)]	konsumsi energi														
	5 Program Peningkatan				1.000.000	-	-		-		-		-		1.000.000,00	
	SDM bidang ESDM															
		1. Jumlah masyarakat yang	150 org	125 org												
		mendapatkan Pengetahuan														
		tentang Teknik														
		Penambangan yang Benar														
		dan Ramah Lingkungan.														
		2. Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen												
		perencanaan bidang ESDM														
4	**Urusan Pariwisata**				**14.820.024**		**15.561.025**		**17.821.973**		**20.824.378**		**22.906.816**		**91.934.216,29**	
	1. Program Pemasaran Pariwisata				7.000.024		7.350.025		8.452.529		9.889.459		10.878.405		43.570.441,88	
		- Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	26.502.007	27.827.107		29.218.463		30.679.386		32.123.356		33.824.055		33.824.055		Dinbudpar & Ro. Perekonomian
		- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	379.912	387.511		395.261		403.166		411.229		419.454		419.454		Dinbudpar & Ro. Perekonomian
															0,00	
	2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				5.496.000		5.770.800		6.636.420		7.764.611		8.541.073		34.208.903,94	
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,34	2.37		2.41		2.45		2.49		2.54		2,54		Dinbudpar
		Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	2,57	2,75		2,94		3,15		3,37		3,59		3,59		Dinbudpar
		Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara (US dollar)	326,76	392,11		490,14		637,18		828,34		1028,00		1028,00		Dinbudpar
		Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara (rupiah)	520.964	583.480		671.002		785.072		922.460		1.123.500		1.123.500		Dinbudpar
	3. Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)	435	575	2.324.000	605	2.440.200	645	2.733.024	695	3.170.308	735	3.487.339	735	14.154.870,46	Dinbudpar
5.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				**28.811.000**		**30.804.900**		**36.001.203**		**44.624.433**		**52.106.259**		192.347.794,61	
	1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir				1.700.000		2.100.000		2.415.000		2.849.700		3.277.155		12.341.855,00	
		1. Rata-rata pendapatan	2.742.951,61	2.849.926,73		2.961.073,87		3.076.555,75		3.196.541,43		3.321.206,54		3.321.206,54		Dinlutkan, Biro
		wanita pesisir														Bina Produksi
		(Rp/Kap/Th)														
		2. Rata-rata pendapatan	4.133.005,79	4.300.805,83		4.475.418,54		4.657.120,53		4.846.199,63		5.042.955,33		5.042.955,33		Dinlutkan, Biro
		taruna pesisir														Bina Produksi
		(Rp/Kap/Th)														
	2. Program Pemberdayaan				700.000		735.000		823.200		946.680		1.060.282		4.265.161,60	Dinlutkan
	Masyarakat dalam	Jumlah kelompok	10	20		20		20		20		20		20		
	Pengawasan dan	masyarakat Swakarsa														
	Pengendalian	Pengamanan Sumber Daya														
	Sumberdaya Kelautan	Kelautan yang aktif														
	dan Perikanan	(kelompok)														

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap [4)]				11.225.000		11.853.000		13.986.540		17.483.175		20.455.315		75.003.029,75	
		1. Produksi Perikanan tangkap (Ton)	286.797,18	296.663,00		306.868,21		317.424,48		328.343,88		339.638,91		339.638,91		Dinlutkan, Biro Bina Produksi
		2. Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)	10.663.295,88	11.566.477,04		12.546.157,65		13.608.817,2		14.761.484,02		16.011.781,71		16.011.781,71		Dinlutkan, Biro Bina Produksi
	4. Program Pengembangan Perikanan Budidaya [4)]				7.520.000		8.067.600		9.519.768		11.899.710		13.922.661		50.929.738,70	
		1. Produksi Perikanan budidaya (Ton)	267.760,99	288.084,05		309.949,63		333.474,81		358.785,54		386.017,37		386.017,37		Dinlutkan, Biro Bina Produksi
		2. Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Th)	15.433.760,77	16.339.722,52		17.298.864,23		18.314.307,57		19.389.357,42		20.527.512,7		20.527.512,7		Dinlutkan, Biro Bina Produksi
	5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan [4)]				5.584.000		5.863.200		6.742.680		8.428.350		9.861.170		36.479.399,50	
		1. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	17,82	18,69		19,59		20,55		21,55		22,59		22,59		Dinlutkan
		2. Ekspor produk perikanan (ton)	24.433,75	25.093,46		25.770,99		26.466,80		27.181,41		27.915,31		27.915,31		Dinlutkan
	6. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan[10)]				2.082.000		2.186.100		2.514.015		3.016.818		3.529.677		13.328.610,06	
		- Luas Penanaman mangrove (Ha)	8,08	7,50		8,13		8,25		8,38		8,50		40,75		Dinlutkan
		- Luas Terumbu karang buatan (Ha)	17,28	4,68		5,13		5,58		6,03		6,48		27,90		Dinlutkan
6.	**Urusan Perdagangan**				**12.975.000**		**14.440.500**		**16.318.350**		**19.311.540**		**21.456.722**		**84.502.111,80**	
	1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor [4)]				4.150.000		4.672.500		5.233.200		6.175.176		6.669.190		26.900.066,08	
		1 Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)	4.603	4.879		5.171		5.482		5.811		6.159		6.159		Dinperindag & Ro Perekonomian
		2 Nilai impor non migas (Jt US$)	5.186	5.134		5.082		5.032		4.981		4.931		4.931		Dinperindag & Ro Perekonomian
		3 Ekspor bersih perdagangan	(583)	(255)		89		450		830		1.228		1.228		Dinperindag
		4 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	20,39	20,47		20,55		20,62		20,67		20,72		20,72		Dinperindag
	2. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM [4)]				4.125.000		4.833.000		5.557.950		6.669.540		7.803.362		28.988.851,80	Dinperindag
		1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	25	5		5		5		5		5		50		
		2 Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri														
		- SIUP	378,636	398,539		418,442		438,345		458,248		478,151		478,151		
		- TDP	67,404	77,713		88,022		98,3331		108,639		118,948		118,948		
		3 Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok.	18	18		18		18		18		18		18		
	3. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri				4.700.000		4.935.000		5.527.200		6.466.824		6.984.170		28.613.193,92	Dinperindag
		1 Jumlah BPSK (kab/kota)	18	22		26		30		35		35		35		
		2 Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	**Urusan Perindustrian**				**19.245.000**		**23.898.450**		**26.953.860**		**31.410.301**		**35.078.479**		**136.586.090,15**	
	1. Pengembangan Industri				9.200.000		11.602.500		12.994.800		15.073.968		16.581.365		65.452.632,80	Dinperindag
	Logam, Mesin dan	1 Kontribusi sektor industri	31,6%	32,1%		32,3%		32,5%		32,5%		32,6%		32,6%		
	Tekstil [4)]	pengolahan terhadap														
		PDRB														
		2 Pertumbuhan industri	4,7%	5,2%		5,2%		5,2%		5,2%		5,2%		5,2 %		
		- Besar														
		- Kecil dan Menengah														
		3 Jumlah Klaster Logam,	3	6		6		6		6		6		6		
		Mesin, Tekstil;														
		4 Persentase kemampuan	6%	15-20%		15-20%		15-20%		15-20%		15-20%		15-20%		
		sentra ILMT menjadi														
		pemasok Industri besar.														
	2. Pengembangan Industri				4.990.000		6.253.200		7.191.180		8.485.592		9.928.143		36.848.115,51	Dinperindag
	Agro, Kimia dan Hasil	1 Kontribusi sektor industri	31,6%	32,1%		32,3%		32,5%		32,5%		32,6%		32,6%		
	Hutan [4)]	pengolahan terhadap														
		PDRB														
		2 Pertumbuhan industri	4,7%	5,2%		5,2%		5,2%		5,2%		5,2%		5,2 %		
		- Besar														
		- Kecil dan Menengah														
		3 Jumlah Klaster agro,	7	6		6		6		6		6		6		
		kimia & hasil hutan														
		4 Persentase kemampuan	5%	12-18%		12-18%		12-18%		12-18%		12-18%		12-18%		
		sentra IAKHH menjadi														
		pemasok Industri besar														
	3. Pengembangan Industri				2.805.000		3.470.250		3.886.680		4.508.549		4.959.404		19.629.882,48	Dinperindag
	Alat Transportasi,	1 Kontribusi sektor industri	31,6%	32,1%		32,3%		32,5%		32,5%		32,6%		32,6%		
	Elektronika dan Aneka [4)]	pengolahan terhadap														
		PDRB														
		2 Pertumbuhan industri	4,7%	5,2%		5,2%		5,2%		5,2%		5,2%		5,2 %		
		- Besar														
		- Kecil dan Menengah														
		3 Jumlah Klaster	4	6		6		6		6		6		6		
		Komponen Otomotif,														
		elektronika & Aneka														
		4 Persentase kemampuan	3%	6-10%		6-10%		6-10%		6-10%		6-10%		6-10%		
		sentra IATEA menjadi														
		pemasok Industri besar														
	4. Pengembangan dan	Pengembangan	3	5	2.250.000	5	2.572.500	5	2.881.200	5	3.342.192	5	3.609.567	5	14.655.459,36	Dinperindag
	Penguatan Kelembagaan	Kelembagaan Usaha														Ro. Perekonomian
	Usaha Industri	Industri														
8.	**Urusan Transmigrasi**				**819.000**		**737.100**		**825.552**		**957.640**		**1.015.099**		4.354.391,06	
	Program Pengembangan				819.000		737.100		825.552		957.640		1.015.099		4.354.391,06	
	Wilayah Transmigrasi															
		Kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan kawasan transmigrasi	19 Prov	9 Prov		10 Prov		12 Prov		12 Prov		12 Prov		12 Provinsi		Disnakertransduk
		Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	540 KK	200 KK		275 KK		300 KK		250 KK		200 KK		1325 KK		Disnakertransduk

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014		2015		2016		2017		2018				
				TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	EKS BAU				**937.866.429**		**928.044.655**		**1.034.141.959**		**1.152.840.036**		**1.285.706.118**		5.338.599.197,09	
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi	459.321.222	59 SKPD	502.037.851	59 SKPD	525.614.113	59 SKPD	591.896.243	59 SKPD	687.503.924	59 SKPD	766.529.860	48 SKPD	3.073.581.991,30	48 SKPD
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.	309.945.159	59 SKPD	390.681.447	59 SKPD	348.223.335	59 SKPD	380.456.835	59 SKPD	394.858.524	59 SKPD	438.730.023	48 SKPD	1.952.950.163,41	48 SKPD
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.	15.030.542	59 SKPD	15.228.961	59 SKPD	18.758.218	59 SKPD	21.574.566	59 SKPD	24.810.750	59 SKPD	28.537.975	48 SKPD	108.910.471,09	48 SKPD
	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur2)	Terlaksananya diklat dan bintek aparatur	23.726.433	59 SKPD	24.694.815	59 SKPD	29.928.765	59 SKPD	34.418.080	59 SKPD	39.580.792	59 SKPD	45.517.910	48 SKPD	174.140.361,68	48 SKPD
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD	2 SKPD	2 SKPD	468.355	2 SKPD	491.773	2 SKPD	516.361	2 SKPD	542.179	2 SKPD	569.288	2 SKPD	2.587.957,02	Badan Arpus dan BP3AKB
	6 Program Jasa Pelayanan Kesehatan	Tersedianya jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan	1 SKPD	1 SKPD	4.755.000	1 SKPD	5.028.451	1 SKPD	5.279.874	1 SKPD	5.543.867	1 SKPD	5.821.061	1SKPD	26.428.252,58	Dinas Kesehatan
C.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				**40.000.000**		**275.000.000**		**275.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**1.190.000.000,00**	
	1. Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada	-	-	-		200.000.000		200.000.000		150.000.000		0		550.000.000,00	PPKD
	2. Penyertaan Modal	Penyertaan Modal BUMD	-	-	40.000.000		75.000.000		75.000.000		150.000.000		300.000.000		640.000.000,00	PPKD
	TOTAL (A+B+C)				**14.037.158.183**		**15.186.085.363**		**16.778.305.303**		**18.657.556.441**		**21.430.948.428**		**86.090.053.718**	

Keterangan :

1) Program Unggulan Pendidikan Politik Masyarakat
2) Program Unggulan Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi
3) Program Unggulan Menguatkan Sistem Pelayanan Publik
4) Program Unggulan Mewujudkan Desa Mandiri
5) Program Unggulan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
6) Program Unggulan Rakyat Sehat
7) Program Unggulan Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah
8) Program Unggulan Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak
9) Program Unggulan Pembangunan Infrastruktur
10 Program Unggulan Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo - royo
11 Program Unggulan Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menggambarkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga yang diukur melalui indikator makro sebagai indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial antara lain laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengang-guran Terbuka, Indeks Williamson, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik fisik maupun sosial antara lain kondisi jalan provinsi, kondisi jaringan irigasi, rasio elektrifikasi rumah tangga, tingkat pelayanan air bersih perkotaan dan pedesaan, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH, prevalensi gizi buruk, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD, SMP dan SMA, rata-rata lama sekolah.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas total daerah, Nilai Tukar Petani, dan lama pelayanan perizinan.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	6,34	5,8 (Tw III)	5,9-6,4	6.0-6.5	6.1-6.6	6,2-6,7	6.2-6.7	6.2-6.7
2.	Laju Inflasi (%)	4,24	7,99	5±1	5±1	4.5±1	4.5±1	4.5±1	4.5±1
3.	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	6,49	6,81	7,12	7,44	7,75	8,07	8,39	8,39
4.	Indeks Gini	0,355	0,352	0,349	0,347	0,344	0,341	0,337	0,337
5.	Indeks Wiliamson	0,7042	0,7023	0,7015	0,7007	0,7000	0,6993	0,6986	0,6986
6.	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,98 (Sept)	14,44 (Sept)	11,58 - 11,37	9,05 - 8,75	8,60 - 8,35	8,25 - 8,00	7,80 - 7,60	7,80 - 7,60
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,36	N.A	74,24	74,68	75,12	75,56	75,94	75,94
	a. Angka Melek Huruf	90,45	N.A	91,06	91,36	91,66	91,97	92,27	92,27
	b. Rata-Rata Lama Sekolah	7,39	N.A	7,65	7,78	7,91	8,04	8,17	8,17
	c. Usia Harapan Hidup	71,71	N.A	71,70	71,77	71,85	71,90	72,00	72,00
	d. Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rupiah/Kapita/bulan)	643.530	724.902	806.273	887.645	969.016	1.050.388	1.131.759	1.131.759
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66,80	N.A	67,63	68,22	68,81	69,40	69,99	69,99
9.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,66	N.A	69,99	70,49	70,99	71,49	71,99	71,99
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,63	6,02 (Agustus)	5,31 - 4,77	4,93 - 4,62	4,66 - 4,43	4,49 - 4,27	4,32 - 4,20	4,32 - 4,20
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
	Layanan Urusan Wajib								
1.	**Urusan Pendidikan**								
	- APK PAUD/TK (4-6 th)	70,50	70,55	72,00	75,00	77,00	79,00	80,00	80,00
	- APK PAUD (0-6 th),	39,60	40,10	50,00	53,00	56,00	59,00	65,00	65,00
	- APK SD/ SDLB/MI/ Paket A	109,06	109,08	109,10	109,13	109,17	109,20	109,25	109,25
	- APM SD/ SDLB/MI/ Paket A	98,30	98,60	99,42	100	100	100	100	100
	- APK SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B	100,50	100,52	100,54	100,56	100,58	100,60	100,60	100,60
	- APM SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B	78,92	79,00	79,20	79,30	79,50	79,75	80,00	80,00
	- APK SMA/ SMALB/MA/ Paket C	67,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
	- APM SMA/ SMALB/MA/ Paket C	53,00	55,00	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00	66,00
	- APK Pendidikan Khusus	51,74	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00	62,00
	- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,38	0,34	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
	- Angka Kelulusan SD/MI	99,95	99,95	99,96	99,97	99,97	99,98	99,98	99,98
	- Angka Kelulusan SMP/MTs	99,15	99,17	99,17	99,19	99,21	99,23	99,25	99,25
	- Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	95,59	99,92	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	99,99
	- Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI	7,06	7,20	7,09	7,11	7,13	7,14	7,15	7,15
	- Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS	6,8	6,80	6,86	6,87	6,88	6,89	6,9	6,9

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK	7,73	7,31	7,73	7,74	7,74	7,75	7,75	7,75
	- % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan *) tidak termasuk mebelair **) termasuk mebelair	94,75 *)	94,78*) / 61,53 **)	64,5	65	65,5	70	70,5	70,5
	- % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan *) tidak termasuk mebelair **) termasuk mebelair	96,76 *)	98,79*) / 78,06 **)	78,4	79	79,55	80,25	80,75	80,75
	- % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	80	80,50	81,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
	- % SD/SDLB/ MI yang terakreditasi	99,93	100,00	100	100	100	100	100	100
	- % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi	99,78	100,00	100	100	100	100	100	100
	- % SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi	100	100,00	100	100	100	100	100	100
	- % Pendidik berkualifikasi S1/D4	73	74	75	76	77	78	80	80
	- Jumlah desa vokasi yang dikembangkan	251 desa	286 desa	35 desa	35 desa	35 desa	35 desa	35 desa	461 desa
	- Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan	44.956	40.481	37.500	38.000	39.000	40.000	41.000	195.500
2.	**Urusan Kesehatan**								
	- Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000	116,34	118,62	118	118	117	117	116	116
	KH)								
	- Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	10,75	10,41	12,50	12,00	12,00	11,50	11,00	11,00
	- Angka Kematian Balita (AKABA)	11,85	11,80	11,90	11,85	11,80	11,75	11,00	11,00
	(per 1.000 KH)								
	- Angka Kematian DBD (%)	<1,2	<1,2	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	- Angka Kesakitan DBD (per100.000 pddk)	19,29	45,52	<20	<20	<20	<20	<20	<20
	- Prevalensi Gizi Buruk (%)	0,04	0,08	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
	- Angka Penemuan Kasus Baru TB	114,00	115,00	116,00	117,00	118,00	120,00	122,00	122,00
	- Angka Penemuan Kasus Baru HIV/Aids(%)	20,00	20,00	18,00	16,00	15,00	14,00	13,00	13,00
	- Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	5,40	5,80	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00
	- Angka Penemuan Kasus Diare Balita	30,16	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
	- Angka Penemuan Kasus ISPA Balita	30,60	42,00	45,00	48,00	52,00	56,00	60,00	60,00
	- Angka Kesakitan Malaria	0,08	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
	- Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	37,00	<30	<30	<25	<25	<20	<20	<20
	- Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60,00	<55	<55	<50	<50	<45	<45	<45

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Urusan Pekerjaan Umum**								
	- Persentase panjang jalan dalam kondisi	86,18%	86,54%	86,92%	87,56%	88,24%	88,92%	89,60%	89,60%
	baik								
	- Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m	-	50,44%	54,14%	59,00%	64,84%	71,21%	77,87%	77,87%
	- Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai	-	67,62%	69,60%	72,20%	75,33%	78,74%	82,30%	82,30%
	jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)								
	- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	82 %	82 %
	- Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	48,01	50,12 %	52 %	54 %	56 %	58 %	60 %	0,60
	- Cakupan pelayanan air minum dan								
	sanitasi:								
	a. Air Minum Perkotaan (%)	40,60	63,99	67,00	75,00	76,50	77,50	78,00	78,00
	b. Air Minum Perdesaan (%)	20,30	49,13	50,50	52,80	55,00	57,00	59,00	59,00
	c. Sanitasi (%)	60,03	64,50	69,00	72,00	73,50	75,00	76,00	76,00
4.	**Urusan Perumahan Rakyat**								
	- Rasio Rumah layak huni	-	76,67	76,73	76,74	76,75	76,76	76,77	76,77
	- Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	-	7,80	12,83	14,88	16,92	18,97	21,02	21,02
5.	**Urusan Penataan Ruang**								
	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang	-	62,00	63,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00
6.	**Urusan Perencanaan Pembangunan**								
	- Dokumen perencanaan pembangunan	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	1 Pergub RKPD	5 Pergub RKPD
	daerah yang ditetapkan tepat waktu			1 Perda RPJMD					1 Perda RPJMD
	- Evaluasi Dokumen perencanaan daerah	1 dokumen evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen evaluasi
		RKPD; 1 dokumen	evaluasi RKPD	evaluasi RKPD	evaluasi RKPD	RKPD; 1 dokumen	evaluasi RKPD	evaluasi RKPD	RKPD; 1 dokumen
		evaluasi paruh				evaluasi paruh	dan evaluasi	dan evaluasi	evaluasi paruh
		waktu				waktu	tahun ke-4	tahun ke-5	waktu ; 2 dokumen
							RPJMD	RPJMD	evaluasi tahunan

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	-	5 desa inovatif	9 desa inovatif	11 desa inovatif	12 desa inovatif	11 desa inovatif	10 desa inovatif	58 desa inovatif
				3 kab/kota	6 kab/kota	8 kab/kota	10 kab/kota	8 kab/kota	35 kab/kota
				inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif
				6 klaster	6 klaster	6 klaster	6 klaster	6 klaster	30 klaster
7.	**Urusan Perhubungan**								
	- Peningkatan ketersediaan prasarana Keselamatan :								
	a. Jalan provinsi (%)	-	18,71	22,00	34,00	47,00	60,00	73,00	73,00
	b. Perlintasan Kereta Api di jalan provinsi (lokasi)	-	43 lokasi	9 lokasi	25 lokasi	25 lokasi	25 lokasi	25 lokasi	152 lokasi
8.	**Urusan Lingkungan Hidup**								
	- Informasi status mutu air (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Informasi status mutu udara ambien (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Jumlah pengaduan akibat dugaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	pencemaran/ kerusakan lingkungan								
	yang ditindaklanjuti (SPM)								
9.	**Urusan Kependudukan dan Catatan**								
	Sipil								
	- Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK	35	35	35	35	35	35	35	35
10.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan**								
	Perlindungan Anak								
	- Rasio kabupaten/kota menuju Kota	48,6	48,6	62,8	77,1	94,3	100	100	100
	Layak Anak								
	- Persentase partisipasi perempuan di	2,62	2,58	2,52	2,45	2,40	2,36	2,32	2,32
	lembaga pemeritah								
	- Persentase keterwakilan politik	21	21	30	30	30	30	30	30
	perempuan di lembaga parlemen								
	- Persentase perempuan di lembaga swasta	87,28	89,44	92,37	93,88	94,65	95,34	95,82	95,82
	- Rasio KDRT pada perempuan dan anak	0,03	0,03	0,028	0,026	0,022	0,019	0,017	0,017
11.	**Urusan Keluarga Berencana dan**								
	Keluarga Sejahtera								
	- *Contraceptive Prevalence Rate* /CPR (%)	80,19	76,00	77,00	78,00	79,00	79,50	80,00	80,00
	- DO KB (%)	9,83	15,09	14,75	14,50	14,00	13,75	13,50	13,50
	- *Unmetneed* (%)	10,36	10,26	10,00	9,75	9,50	9,25	9,00	9,00

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Persentase usia perkawinan perempuan	2,22	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,17
	Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari								
	20 tahun								
12.	**Urusan Sosial**								
	- Jumlah sarana dan prasarana sosial	6	10	10	10	12	8	10	50
	- Jumlah PMKS yang mendapatkan	144.217	18.075	33.712	34.807	35.352	35.147	34.337	173.355
	penanganan (orang)								
13.	**Urusan Ketenagakerjaan**								
	- Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71,43	70,72 (agustus)	72,27	72,58	72,90	73,22	73,55	73,55
	- Rasio kesempatan kerja terhadap	67,41	68,43	69,32	70,18	71,01	71,83	72,63	72,63
	penduduk usia kerja								
	- Rasio Upah Minimum Kabupaten/Kota	96,42	97,3	97,4	97,5	97,6	97,7	97,8	97,8
	dibanding KHL (%)								
14.	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil**								
	Menengah								
	- Jumlah Produk/komoditas OVOP (komoditas)	70	70	105	140	175	210	245	245
	- Presentase koperasi sehat	8,54	15,02	15,70	16,20	17,15	18,30	19,50	19,50
	- Persentase koperasi aktif	79,34	79,73	80,71	81,05	81,45	81,90	82,50	82,50
15.	**Urusan Penanaman Modal**								
	- Jumlah investor (PMA/PMDN)	30	32	33	36	37	39	40	185
	- Jumlah nilai investasi	2,993	3,088*	3,228	3,374	3,525	3,682	3,846	17,655
	(PMA/ PMDN) (Rp.Trilyun)								
16.	**Urusan Kebudayaan**								
	- Persentase Benda, Situs dan kawasan	25,00	8,33	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42
	cagar budaya yang dilestarikan								
17.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
	- Jumlah Organisasi Pemuda	55	55	57	59	61	63	65	65
	- Jumlah Organisasi Olah Raga/Pengurus Provinsi	-	72	72	72	72	72	72	72
	- Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)	34	40	40	50	60	60	70	280
	- Jumlah Kewirausahaan Pemuda	295 orang	380 orang	560 orang	650 orang	680 orang	700 orang	720 orang	3310 orang
		25 Kelompok	80 Kelompok	80 Kelompok	85 kelompok	85 kelompok	90 kelompok	90 kelompk	430 kelompok
	- Jumlah Cabang Olahraga Unggulan	8 cabor	8 cabor	8 cabor	8 cabor	10 cabor	10 cabor	12 cabor	12 cabor

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**								
	Dalam Negeri								
	- Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa	66,22	66,85	67,48	68,11	68,74	69,37	70,00	70,00
	Tengah								
	- Persentase pemilih dalam menggunakan								
	hak pilih melalui pemilu (%)								
	- Pilpres dan Pilleg	-	-	75	-	-	-	-	75
	- Pilkada Provinsi	-	58,46	-	-	-	-	75	75
	- Pilkada Kab./Kota	-	64,40	66,52	68,64	70,76	72,88	75	75
	- Persentase keterwakilan perempuan di	-	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30
	lembaga parlemen provinsi (%)								
19.	**Urusan Otonomi Daerah,**								
	Pemerintahan Umum, Administrasi								
	Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,								
	Kepegawaian dan Persandian								
	- *Indonesia Governance Indeks* (IGI)	5,88	5,90	5,92	5,94	5,96	5,98	6,00	6,00
	- Peningkatan PAD (%)	19,14	11,82	12,61	19,53	13,48	15,95	16,31	16,31
	- Persentase Aset yang dikelola dengan baik	70	75	80	85	90	95	100	100
	- Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-	2 SKPD	2 SKPD	15 SKPD	59 SKPD	59 SKPD	59 SKPD	59 SKPD
	- Terlaksananya promosi jabatan struktural secara terbuka	-	eselon III, IV	eselon I, II, III, IV	eselon I, II, III, IV	eselon I, II, III, IV	eselon I, II, III, IV	eselon I, II, III, IV	eselon I, II, III, IV
20.	**Urusan Ketahanan Pangan**								
	- Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan	2	6	1	1	1	1	1	11
	- Ketersediaan Pangan Utama (ton) Beras	5.749.620	5.701.257	5.724.620	5.746.958	5.769.946	5.793.026	5.816.198	5.816.198
	- Persentase Penguatan cadangan pangan (%)	70.95	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00
	- Persentase Ketersediaan informasi pasokan,	93,65	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	harga, & akses pangan di daerah (%)								
	- Penanganan daerah rawan pangan (%)	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	- Pengawasan dan pembinaan keamanan	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	pangan (%)								
21.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat**								
	dan Desa								
	- Desa Mandiri	N.A	N.A	NA	6 Desa	30 Desa	34 Desa	30 Desa	100 Desa
	- Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina (Unit)	11.838	15.838	500	750	1.250	1.500	1.000	20.838

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	**Urusan Kearsipan**								
	- Jumlah Arsip yang dilestarikan (arsip)	50.000,00	75.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	95.000,00
23.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**								
	- Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	35,00	35,00	35,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
24.	**Urusan Perpustakaan**								
	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi per Tahun	595.200	732.050	768.653	807.085	847.439	889.811	934.302	934.302
	- Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi	229.963	203.126	213.282	223.946	235.144	246.901	259.246	259.246
	- Jumlah Perpustakaan Desa yang memenuhi standar perpustakaan	711	781	851	921	991	1.061	1.131	1.131
1.	**Layanan Urusan Pilihan**								
	Urusan Pertanian								
	- Produksi Padi (ton)	10.232.934	10.146.860	10.187.447	10.228.197	10.269.110	10.310.186	10.351.427	10.351.427
	- Produksi Jagung (ton)	3.041.630	2.992.843	3.004.814	3.016.834	3.028.901	3.041.017	3.053.181	3.053.181
	- Produksi Kedelai (ton)	152.416	135.785	139.587	143.389	147.191	150.993	154.795	154.795
	- Produksi Tebu (ton)	4.555.355	5.025.000	5.125.500	5.228.010	5.332.570	5.439.222	5.548.006	5.548.006
	- Produksi Kelapa (ton)	183.048	182.529	184.354	186.198	188.060	189.940	191.840	191.840
	- Produksi Daging (Kg)	252.218.874	265.148.307	274.428.498	282.661.352	291.141.193	299.875.429	308.871.692	308.871.692
	- Produksi Susu (liter)	105.516.134	97.527.340	98.990.250	101.456.006	104.001.631	106.601.672	109.799.722	109.799.722
	- Produksi Telur (Kg)	271.819.998	268.036.393	278.757.849	285.726.795	292.869.965	300.191.714	307.696.507	307.696.507
	- Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas	528	527	555	583	611	639	667	667
	- Jumlah Posluhdes yang berkualitas	3.233	3.233	3.283	3.333	3.383	3.433	3.483	3.483
	- Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	12,07	12,04	12,01	11,97	11,94	11,91	11,88	11,88
	- Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB	1,62	1,59	1,56	1,54	1,51	1,48	1,45	1,45
	- Kontribusi Sektor Perternakan terhadap PDRB	2,42	2,41	2,41	2,40	2,40	2,39	2,39	2,39
2.	**Urusan Kehutanan**								
	- Persentase rehabilitasi hutan dan lahan	4,17	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
	kritis (%)								
	- Luas hutan yang dimanfaatkan untuk	7.737	8.959	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000
	pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)								

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Kontribusi sektor kehutanan terhadap	0,50	0,53	0,53	0,63	0,73	0,83	0,93	0,93
	PDRB (%)								
	- Persentase unit usaha masyarakat	5,20	6,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
	sekitar hutan yang berkembang								
3.	**Urusan Energi dan Sumber Daya**								
	Mineral								
	- Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan	85,00	86,00	86,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
	- Rasio Elektrifikasi (%)	79,98	82,12	85,02	87,42	90,01	91,40	92,12	92,12
	- Persentase upaya mitigasi bencana	9,91	11,6	15,51	17,47	19,60	21,73	23,87	23,87
	alam geologi								
	- Persentase pemanfaatan EBT terhadap	3,65	6,1	6,92	7,74	8,54	9,38	10,2	10,2
	total konsumsi energi								
	- Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14	1,14	1,15	1,15
4.	**Urusan Pariwisata**								
	- Jumlah kunjungan wisata (orang):								
	a. Wisatawan Nusantara	25.240.021	26.502.007	27.827.107	29.218.463	30.679.386	32.123.356	33.824.055	33.824.055
	b. Wisatawan Mancanegara	372.463	379.912	387.511	395.261	403.166	411.229	419.454	419.454
	- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3,280	3,544	3,548	3,553	3,557	3,562	3,566	3,566
5.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**								
	- Produksi Perikanan tangkap (Ton)	283.957,60	286.797,18	296.663,00	306.868,21	317.424,48	328.343,88	339.638,91	339.638,91
	- Produksi Perikanan budidaya (Ton)	251.135,80	267.760,99	288.084,05	309.949,63	333.474,81	358.785,54	386.017,37	386.017,37
	- Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	17,50	17,82	18,69	19,59	20,55	21,55	22,59	22,59
6.	**Urusan Perdagangan**								
	- Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)	4.513	4.603,00	4.879	5.171	5.482	5.811	6.159	6.159
	- Nilai impor non migas (Jt US$)	5.292	5.186	5.134	5.082	5.032	4.981	4.931	4.931
	- Ekspor bersih perdagangan (Jt US$)	-779	-583	-255	89	450	830	1.228	1.228
	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	20,30	20,39	20,47	20,55	20,62	20,67	20,72	20,72
7.	**Urusan Perindustrian**								
	- Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)	4,50	4,70	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
	- Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	32,8	31,6	32,1	32,3	32,5	32,5	32,6	32,6

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.	**Aspek Daya Saing Daerah**								
1.	Produktivitas total daerah	12.326.713,00	13.108.465,00	13.939.941,00	14.824.312,00	15.764.956,00	16.765.464,00	17.829.658,00	17.829.658,00
2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,37	101,66	102,04	102,36	102,63	102,86	103,27	103,27
3.	Lama Perijinan Investasi (hari)	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	8,00	8,00

KETERANGAN :

* Angka Prediksi

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1. Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2015-2019.

2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
b. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
c. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
d. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD;
e. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD;
f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD di lingkup Provinsi Jawa Tengah, dan melakukan fasilitasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

BAB XI
PENUTUP

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran tahapan kedua dan ketiga RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 untuk terwujudnya **"Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari"**, serta menjadi pedoman bagi SKPD dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah melalui penyusunan Renstra SKPD dan perencanaan pembangunan tahunan. Demikian pula bagi kabupaten/kota dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah masing-masing kabupaten/ kota. Selain itu, RPJMD dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui proses panjang antara lain berupa penjaringan aspirasi dan identifikasi permasalahan, curah pendapat dengan pakar, praktisi dan akademisi, konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah serta penyelenggaraan Musrenbang untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Disamping itu juga telah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan pembahasan bersama Badan Legislatif dan Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, serta semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga visi **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"** *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* dapat diwujudkan.

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO